



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025 TANGGAL 29 JULI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



(0525) 21015



Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok



www.Bapperida.baritoselatankab.go.id



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 disusun secara konkrit, sistematis dan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten Barito

Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

(2) RKPD Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan susunan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Tahun 2025;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2026;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- d. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2025 yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Tahun 2026.
- (2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten dalam merumuskan program prioritas pembangunan Tahun 2026.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kabupaten Tahun 2026 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Daerah akan menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Juli 2025



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 29 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 21

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, sehingga kita mampu menyusun dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional bagi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, kedudukan dan peran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan demikian, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi rencana program serta kegiatan hingga pelaksanaannya sebagaimana yang telah dituangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 ini kami ucapkan terimakasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buntok, 29 Juli 2025.

BUPATI BARITO SELATAN



EDDY RAYA SAMSURI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.5 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-82
2.6 Sustainable Development Goals (SDGs)	II-99
2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-100
2.8 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah	II-104
2.9 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-146
2.10 Dukungan Untuk Ibukota Negara (IKN) Baru	II-160
2.11 Food Estate	II-160
2.12 Makan Bergizi Gratis	II-162
2.13 Program Cetak Sawah	II-163
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-28

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-33
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-1
BAB VII Penutup	VII-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	II-3
Tabel 2.2.	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Kabupaten Barito Selatan	II-4
Tabel 2.3.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan	II-5
Tabel 2.4.	Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan	II-5
Tabel 2.5.	Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan	II-9
Tabel 2.6.	Rata-rata Suhu dan Kelembahan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan	II-10
Tabel 2.7.	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, Dan Rata-data Menurut Bulan	II-11
Tabel 2.8.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan	II-12
Tabel 2.9.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2011-2015	II-13
Tabel 2.10.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	II-15
Tabel 2.11.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan	II-16
Tabel 2.12.	Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman	II-16
Tabel 2.13.	Potensi Pengembangan Kawasan Industri	II-17
Tabel 2.14.	Potensi Pengembangan Kawasan Wisata	II-17
Tabel 2.15.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan	II-18
Tabel 2.16.	Potensi Kawasan Hutan	II-18
Tabel 2.17	Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan	II-19
Tabel 2.18	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-22
Tabel 2.19	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	II-23
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan Menurut Kelompok Umur	II-23
Tabel 2.21	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-25
Tabel 2.22	PDRB ADHK Kabupaten Barito Selatan	II-28
Tabel 2.23	DRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	II-29
Tabel 2.24	Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	II-32
Tabel 2.25	Indikator Komponen IPM	II-36
Tabel 2.26	Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan	II-39

Tabel 2.27	Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi	II-45
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi	II-46
Tabel 2.29	Persetase Kompetensi Pendidik	II-50
Tabel 2.30	Capaian Jaminan Kesehatan	II-51
Tabel 2.31	Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Barito Selatan	II-53
Tabel 2.32	Capaian i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	II-55
Tabel 2.33	Indikator Kinerja kesetaraan gender di Kabupaten Barito Selatan	II-57
Tabel 2.34	Angka Ketergantungan Kabupaten Barito Selatan	II-58
Tabel 2.35	Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	II-59
Tabel 2.36	Jumlah Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	II-59
Tabel 2.37	Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan	II-62
Tabel 2.38	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Barito Selatan	II-70
Tabel 2.39	Incremental Capital Output Ratio Nasional	II-72
Tabel 2.40	Jumlah Investor dan Nilai Investasi	II-72
Tabel 2.41	Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-74
Tabel 2.42	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	II-78
Tabel 2.43	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	II-88
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan	II-89
Tabel 2.45	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-93
Tabel 2.46	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-94
Tabel 2.47	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-95
Tabel 2.48	Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-96
Tabel 2.49	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-98
Tabel 2.50	Tujuan dan Indikator Kinerja SDGs Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	II-99
Tabel 2.51	Persentase Realisasi Capaian SPM	II-101
Tabel 2.52	Permasalahan Penerapan SPM	II-102
Tabel 2.53	Target Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM	II-103
Tabel 2.54	Target Realisasi Capaian SPM	II-103
Tabel 2.55	Kondisi Pendidikan	II-105
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan	II-106

Tabel 2.57	Jumlah Rasio Dokter	II-109
Tabel 2.58	Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk	II-110
Tabel 2.59	Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	II-110
Tabel 2.60	Area Irigasi	II-111
Tabel 2.61	Luas Lahan Permukiman Kumuh	II-112
Tabel 2.62	Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-113
Tabel 2.63	Capaian Indikator Bidang Sosial menurut Jumlah PMKS dan Rumah Tangga Penerima Bantuan	II-114
Tabel 2.64	Capaian Indikator Bidang Sosial	II-115
Tabel 2.65	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-116
Tabel 2.66	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-117
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-117
Tabel 2.68	Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-120
Tabel 2.69	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-121
Tabel 2.70	Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah	II-122
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-123
Tabel 2.72	Data Perkembangan Kendaraan Bermotor	II-124
Tabel 2.73	Data Penumpang Angkutan Umum	II-124
Tabel 2.74	Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan	II-125
Tabel 2.75	Perkembangan Urusan Koperasi	II-126
Tabel 2.76	Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha	II-127
Tabel 2.77	Perkembangan Usaha Mikro	II-127
Tabel 2.78	Publikasi Statistik	II-128
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Perpustakaan	II-130
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Kearsipan	II-131
Tabel 2.81	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga	II-131
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan	II-132
Tabel 2.83	Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap	II-133
Tabel 2.84	Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya	II-133
Tabel 2.85	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan	II-133
Tabel 2.86	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi	II-134
Tabel 2.87	Luas Panen Perkebunan	II-134
Tabel 2.88	Produksi Perkebunan	II-135
Tabel 2.89	Produktivitas Perkebunan	II-135
Tabel 2.90	Jumlah Sarana Perdagangan	II-137

Tabel 2.91	Capaian Kinerja Perindustrian	II-137
Tabel 2.92	Capaian Kinerja Transmigrasi	II-138
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	II-139
Tabel 2.94	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	II-140
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-141
Tabel 2.96	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan	II-142
Tabel 2.97	Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian	II-142
Tabel 2.98	Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan	II-143
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan	II-144
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan	II-145
Tabel 2.101	Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	II-145
Tabel 2.102	Peningkatan Frekuensi Kegiatan Kesbangpol	II-146
Tabel 3.1	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2020-2024	III-17
Tabel 3.2	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024	III-18
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2020-2024	III-19
Tabel 3.4	Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024	III-21
Tabel 3.5	Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	III-23
Tabel 3.6	PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024	III-25
Tabel 3.7	Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026	III-40
Tabel 3.8	Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025	III-47
Tabel 3.9	Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026	III-48
Tabel 3.10	Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun Anggaran 2026	III-49
Tabel 3.11	Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026	III-52
Tabel 3.12	Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026	III-60
Tabel 5.1	Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	V-1
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Barito Selatan	V-24
Tabel 5.3	Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026	V-25

Tabel 5.4	Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026	V-26
Tabel 5.5	Usulan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026	V-27
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan	VI-4



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan	II-2
Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan	II-3
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan	II-6
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan	II-10
Gambar 2.5 Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan	II-13
Gambar 2.6 Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan	II-14
Gambar 2.7 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan	II-15
Gambar 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2034	II-21
Gambar 2.9 Piramida Penduduk	II-24
Gambar 2.10 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	II-26
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah	II-30
Gambar 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan	II-31
Gambar 2.13 Grafik PDRB Per Kapita	II-32
Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-34
Gambar 2.15 Grafik Rasio Gini Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah	II-35
Gambar 2.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-36
Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah	II-37
Gambar 2.18 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Barito Selatan	II-38
Gambar 2.19 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Sebulan	II-38
Gambar 2.20 Grafik Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional	II-40
Gambar 2.21 Grafik Prevelensi Stunting Kabupaten Barito Selatan	II-41
Gambar 2.22 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas	II-43
Gambar 2.23 Harapan Lama Sekolah	II-44
Gambar 2.24 Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	II-47
Gambar 2.25 Grafik Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah	II-48
Gambar 2.26 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah	II-49
Gambar 2.27 Grafik PDRB Industri Pengolahan	II-60
Gambar 2.28 Grafik PDRB Akomodasi Makan dan Minum	II-61
Gambar 2.29 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-62



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Gambar 2.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Selatan	II-65
Gambar 2.31	Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan	II-66
Gambar 2.32	Grafik Rumah Layak Huni (unit)	II-69
Gambar 2.33	Grafik Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Barito Selatan	II-71
Gambar 2.34	Grafik Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	II-76
Gambar 2.35	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort	II-79
Gambar 2.36	Grafik Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	II-80
Gambar 2.37	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2024	II-83
Gambar 2.38	Persentase Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2024	II-84
Gambar 2.39	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2024	II-85
Gambar 2.40	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2024	II-86
Gambar 2.41	Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2023	II-87
Gambar 2.42	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	II-99
Gambar 2.43	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-119
Gambar 2.44	Jumlah Base Transceiver Station (BTS)	II-126
Gambar 2.45	Grafik Persentase Pertumbuhan Investasi	II-127
Gambar 2.46	Rasio Elektrifikasi	II-136
Gambar 2.47	Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN	II-136
Gambar 3.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2024	III-4
Gambar 3.2	Transfer Ke Daerah	III-6
Gambar 3.3	Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2025 (% ,yoy)	III-7
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kal-Teng dan Nasional	III-8
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan (% , yoy)	III-9
Gambar 3.6	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)	III-11
Gambar 3.7	Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah TW.IV 2023 & 2024 (Rp Miliar)	III-12



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Gambar 3.8	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)	III-13
Gambar 3.9	Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah	III-15
Gambar 3.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020-2024	III-20
Gambar 3.11	Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	III-22
Gambar 3.12	Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah Tahun 2024 (persen)	III-24
Gambar 3.13	Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku (juta rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2024	III-25
Gambar 3.14	Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%)	III-26
Gambar 3.15	Perkembangan Inflasi (Umum) Dua Kota HK Tahun 2024 (%)	III-27
Gambar 3.16	Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2020-2024	III-28
Gambar 4.1	Fokus Strategis Pembangunan	IV-4
Gambar 4.2	Tema Pembangunan 2025-2029	IV-33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);



3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18



Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-



1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKA PD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan dengan:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi, dalam hal pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana kegiatan operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
3. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2026 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah bagi stakeholder dalam pembangunan daerah serta merumuskan dan menyusun perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah Tahun 2026.
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun



Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

6. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah, serta Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.
7. Sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penentuan kegiatan prioritas.
8. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
9. Merupakan media konsultasi publik dan segenap *stakeholders* daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program/ kegiatan daerah serta sebagai bahan rekomendasi/ kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Pasal 79 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan Sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Penutup.



Selanjutnya Sistematika tersebut diatas, disusun per BAB, sehingga terdiri dari 7 (tujuh) BAB, dengan ringkasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang, yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD; (2) Dasar Hukum Penyusunan RKPD; (3) Hubungan antar Dokumen; (4) Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD; (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah; (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan 3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan yang disusun dan yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, disertai dengan pendanaan berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, administratif Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Ibukota Kabupaten Barito Selatan terletak di Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan yang terbagi dalam 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 93 desa. Kabupaten Barito Selatan terletak di jalur jalan nasional antara Banjarmasin dan Palangka Raya sehingga menjadikannya sebagai kota transit dan berperan penting dalam pergerakan aktivitas perekonomian. Jarak antara Barito Selatan dengan Palangka Raya sebagai ibukota provinsi sekitar 183 km. Perencanaan pembangunan yang baik memerlukan gambaran karakteristik, kondisi, potensi geografis, serta kependudukan untuk menggali dan mengenali potensi daerah. Maka dari itu, dijabarkan analisis komprehensif terkait dengan gambaran umum daerah dari sisi geografi dan demografi.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

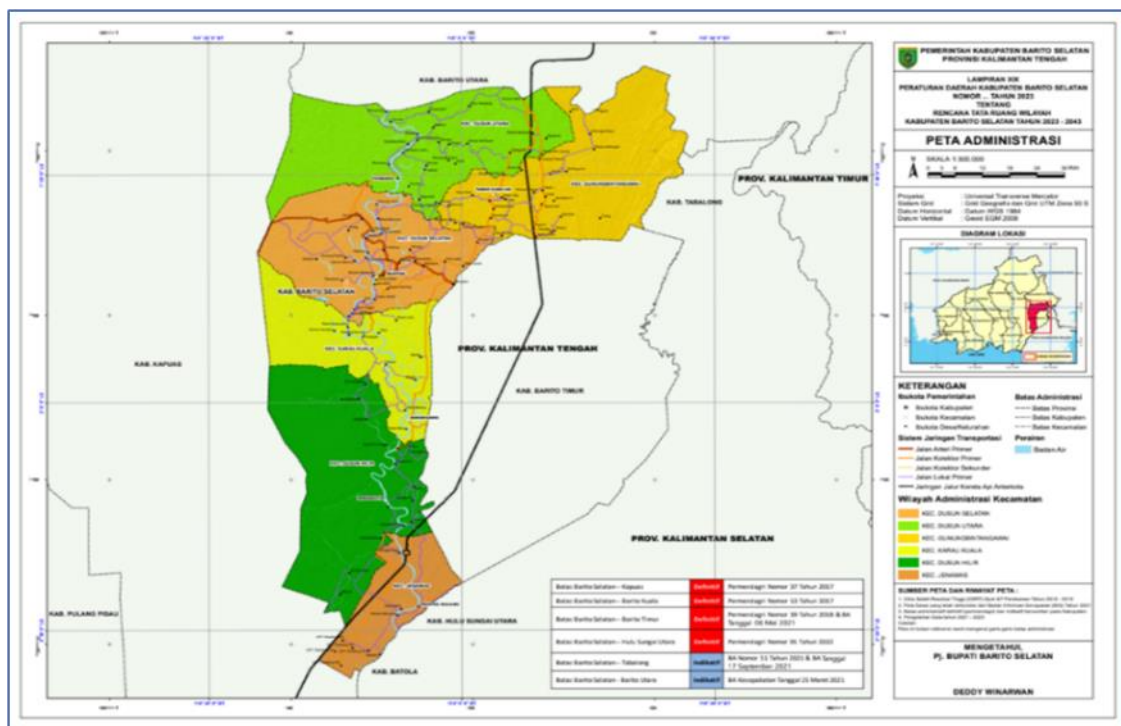
Dalam konteks pembangunan nasional maupun regional, posisi dan peran strategis suatu daerah merujuk pada letak geografis, potensi sumber daya, serta fungsi penting yang dimiliki daerah tersebut. Peran strategis daerah dapat mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, energi, keamanan, hingga pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pembangunan daerah strategis harus direncanakan dengan bijak agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal serta mendukung kepentingan nasional secara menyeluruh.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, Barito Selatan memiliki luas wilayah sebesar 7.020 km². Kabupaten Barito

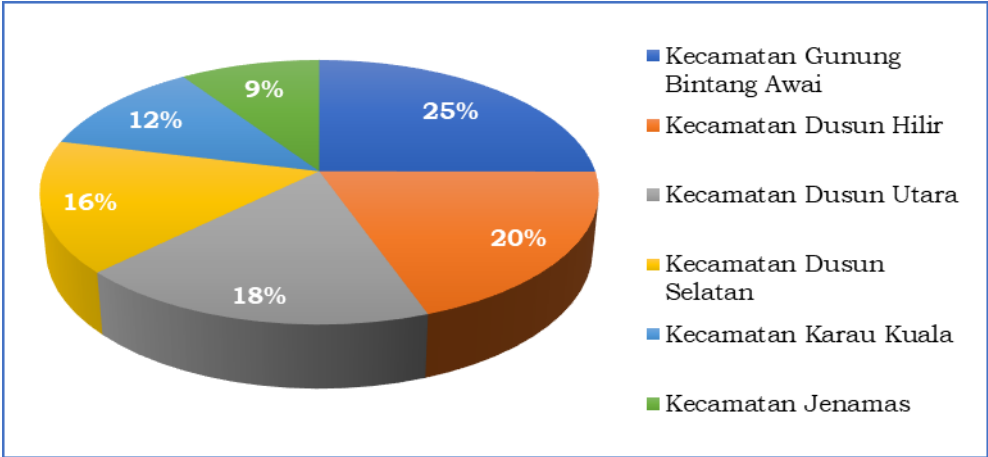
RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

Selatan memiliki lokasi strategis sebagai kota transit yang menghubungkan Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Banjarmasin sehingga berperan penting dalam pergerakan aktivitas perekonomian. Berdasarkan luas wilayah per kecamatan, persentase cakupan wilayah terbesar ditempati oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar 25,04% atau seluas 1.758 km² dan Jenamas menjadi wilayah terkecil dengan persentase sebesar 9,43 dengan luas sebesar 662 km². Adapun secara lebih rinci, peta administrasi dan persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada Gambar 2.1 dan 2.2, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan



Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 6 kecamatan, 7 kelurahan, 93 desa, 173 Rukun Warga, dan 663 Rukun Tetangga. Berdasarkan luas wilayah per kecamatan, persentase cakupan wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai, yaitu sebesar 25,04% atau seluas 1.758 km2. Kecamatan Dusun Hilir memiliki luas wilayah sebesar 19,52% dengan luas sebesar 1.370 km2; Kecamatan Dusun Utara memiliki persentase kontribusi sebesar 18,12% dengan luas sebesar 1.272 km2; Kecamatan Dusun Selatan dengan luas sebesar 1.133 km2 atau sebesar 16,14%; Kecamatan Karau Kuala dengan luas sebesar 825 km2; serta yang terkecil berada di Kecamatan Jenamas dengan persentase luas lahan sebesar 9,43% atau seluas 662 km2. Luas wilayah per kecamatan beserta dengan ibukota kecamatan dari Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1	Jenamas	Rantau Kujang	662
2	Dusun Hilir	Mengkatip	1.370
3	Karau Kuala	Bangkuang	825
4	Dusun Selatan	Buntok	1.133
5	Dusun Utara	Pendang	1.272
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.758
Kabupaten Barito Selatan			7.020

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

Adapun Kabupaten Barito Selatan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah yang dijabarkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas
Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Barito Selatan terletak diantara 1° 15’ 35,625” – 2° 36’ 31,300 LS dan 114° 35’ 48,600” – 115° 36’ 35,700 BT. Secara geografis, Kabupaten Barito Selatan terletak di sepanjang Sungai Barito yang melewati 5 (lima) dari 6 (enam) kecamatan dengan panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar 233,64 km. Maka dari itu, Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi sebagai daerah (inti) konservasi, perikanan budidaya dan tangkap, serta kawasan agrowisata. Dari segi jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, Kecamatan Jenamas memiliki jarak terjauh dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan, yaitu sejauh 150 km. Sebaliknya, Tabak Kanilan sebagai ibukota Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi yang paling dekat dengan Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan dengan jarak sejauh 48 km. Adapun jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten (Buntok dan/atau Kecamatan Dusun Selatan) secara lebih rinci, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (km)
1.	Jenamas	Rantau Kujang	132
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	99
3.	Karau Kuala	Bangkuang	57
4.	Dusun Selatan	Buntok	1
5.	Dusun Utara	Pendang	41
6.	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	42

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

2.1.1.3. Topografi Wilayah

Karakteristik wilayah Barito Selatan secara fisik cukup serupa di tiap wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 0-55 mdpl. Disamping itu, sebagian wilayah pada Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki wilayah perbukitan dimana tinggi wilayahnya berada di 55 mdpl.

Sementara itu, wilayah selatan tepatnya di Kecamatan Jenamas berada di ketinggian wilayah terendah, yaitu 22 mdpl.

Tabel 2. 3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Jenamas	Rantau Kujang	27
2	Dusun Hilir	Mengkatip	31
3	Karau Kuala	Bangkuang	33
4	Dusun Selatan	Buntok	35
5	Dusun Utara	Pendang	38
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	55

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

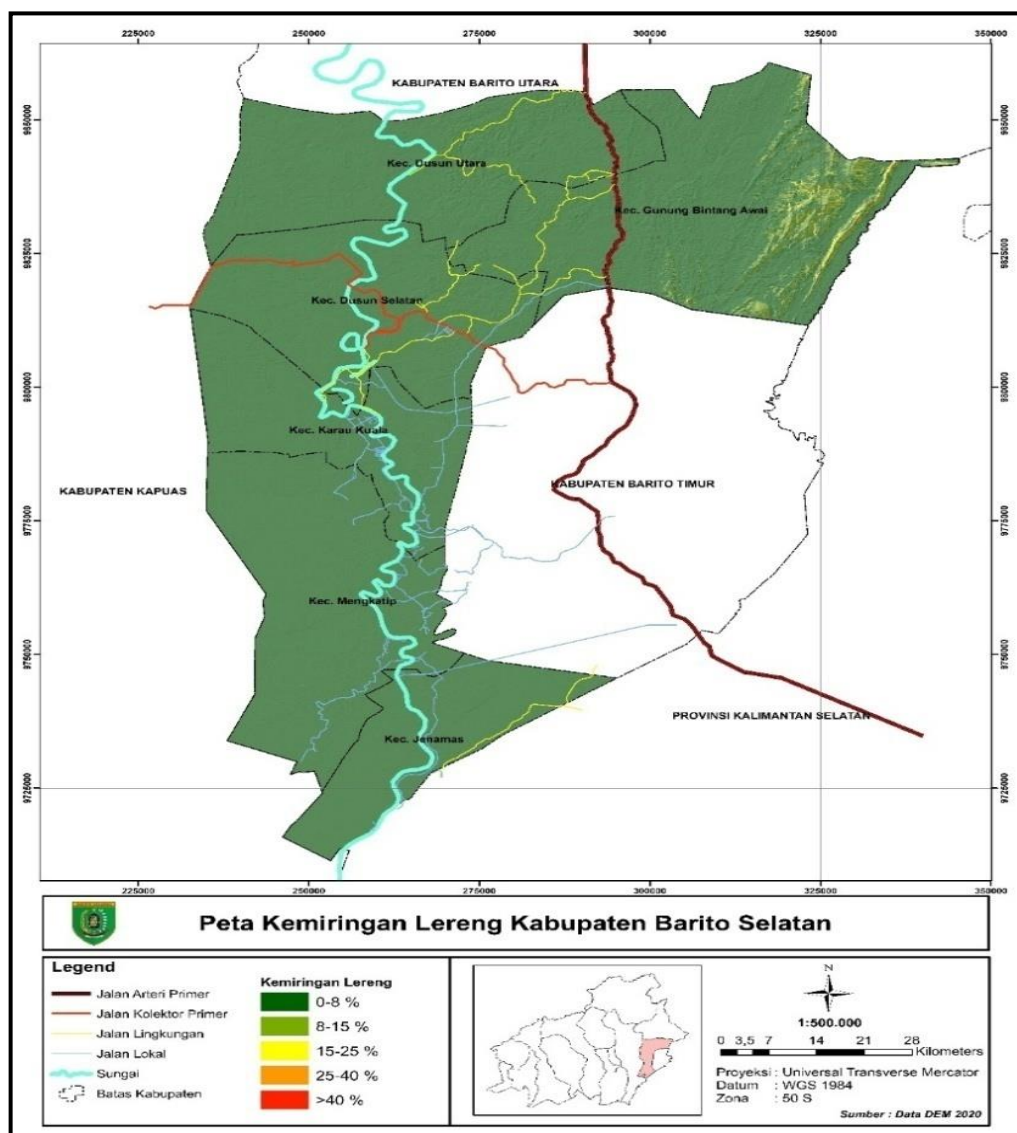
Kemiringan lahan di Barito Selatan berkisar antara 0 – 40 persen dengan pola dari wilayah bagian tengah ditemui variasi topografi perbukitan. Pola intensitas kemiringan lahan semakin meningkat ke arah utara dimulai dari bagian yang landai hingga miring. Bagian utara dari Barito Selatan didominasi oleh topografi kategori curam dengan rangkaian pegunungan yang memanjang dari barat daya ke timur. Dalam hal ini, luas wilayah dengan kategori curam yang berkisar antara 15 – 40 persen memiliki luas sebesar 85.222 hektare. Sebaliknya, pada area dengan kemiringan lahan kategori datar berkisar antara 0 – 2 persen dengan luas sebesar 441.838 hektare yang didominasi di wilayah bagian selatan.

Tabel 2. 4 Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan

1.	No	2.	Kemiringan Lahan	3.	Luas (Ha)
4.	1	5.	0 – 2%	6.	441.838
7.	2	8.	2 – 15%	9.	158.268
10.	3	11.	15 – 40%	12.	85.222
13.	4	14.	>40%	15.	16.682
16.	Jumlah			17.	702.000

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

Berdasarkan data ketinggian dan kemiringan lahan, berikut disertakan peta kemiringan lereng Kabupaten Barito Selatan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan
Sumber : Data DEM Tahun 2020, diolah

2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Tanah

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan Struktur geologi Kabupaten Barito Selatan terbentuk dari formasi geologis yang tergolong tua. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari: aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; dan batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. selain itu, terdapat batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; batuan beku; batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; serta batuan metamorf. Berdasarkan formasi



batuannya, potensi kesuburan lahan yang dimiliki Barito Selatan tergolong tidak tinggi. Berdasarkan bahan induk (geologi), iklim, dan keadaan medannya, jenis tanah di daerah bagian selatan berbeda dengan daerah hulu utara. Secara garis besar, jenis tanah dijabarkan sebagai berikut:

a. Aluvial

Jenis tanah aluvial tersebar di sepanjang aliran Sungai Barito, mulai dari bagian selatan hingga ke utara. Tanah ini merupakan hasil endapan sungai yang membentuk tanggul alami pada dataran banjir, berasal dari bahan induk berupa liat dan pasir. Ciri khas tanah aluvial ini meliputi bentuk wilayah yang relatif datar, warna tanah berkisar antara coklat tua hingga coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase yang cenderung lambat, serta reaksi tanah yang masam. Semakin menjauh dari tepi sungai, elevasi lahan menjadi lebih rendah dan kerap mengalami genangan sehingga dijumpai jenis tanah aluvial hidromorfik berwarna kelabu. Tanah ini memiliki solum dalam, tekstur halus hingga agak kasar, drainase terhambat, serta reaksi tanah yang tetap masam.

Lebih jauh ke arah pedalaman, tanah aluvial hidromorfik berasosiasi dengan tanah gley yang terbentuk dari endapan organik hasil pelapukan lanjut. Jenis tanah ini dikenal sebagai tanah gley humus yang sering kali berasosiasi dengan organosol, membentuk satuan tanah kompleks organosol – gley humus. Karakteristik tanah ini meliputi solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus hingga sedang, drainase yang terhambat, dan tingkat keasaman tanah yang tinggi. Secara keseluruhan, wilayah dengan jenis tanah aluvial di Kabupaten Barito Selatan mencakup luasan sekitar 290.993,12 hektare atau setara dengan 41,45 persen dari total luas lahan yang menunjukkan bahwa tanah aluvial merupakan jenis tanah dominan di wilayah ini.

b. Regosol

Jenis tanah regosol menyebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan tepatnya di Kecamatan Dusun Utara. Tanah ini bersolum dalam bentuk bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik, dan



reaksi tanah masam. Perbandingan luas tanah yang berjenis regosol terhadap keseluruhan lahan memiliki persentase sebesar 8,29 persen atau 58.198,62 hektare.

c. Padsolik

Jenis tanah padsolik cukup luas dan menyebar di bagian tengah hingga hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik, dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu yang membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter. Keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga membentuk tanah dangkal berbatu.

d. Organosol

Jenis tanah organosol merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari bagian selatan hingga ke bagian utara. Ketebalan gambut umumnya memiliki kedalaman sekitar 90 cm yang terdapat pada wilayah datar dan di daerah cekungan, tanah berwarna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, dan reaksi tanah sangat masam. Tanah organosol secara keseluruhan memiliki luas sebesar 145.847,15 hektare atau 20,78 persen dari persebaran jenis tanah di Barito Selatan.

e. Podsolik

Jenis tanah podsolik menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kuarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, tanah berwarna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, memiliki tekstur sedang, drainase agak terhambat, dan reaksi masa. Adapun persebaran jenis tanah podsolik di Barito Selatan secara keseluruhan sebesar 71.019,2 hektare atau 11,2 persen terhadap keseluruhan lahan.



f. Podsol

Jenis tanah podsol terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, dan berwarna kecoklatan. Luas persebaran dengan jenis tanah podsol di Barito Selatan sebesar 78.533,08 hektare.

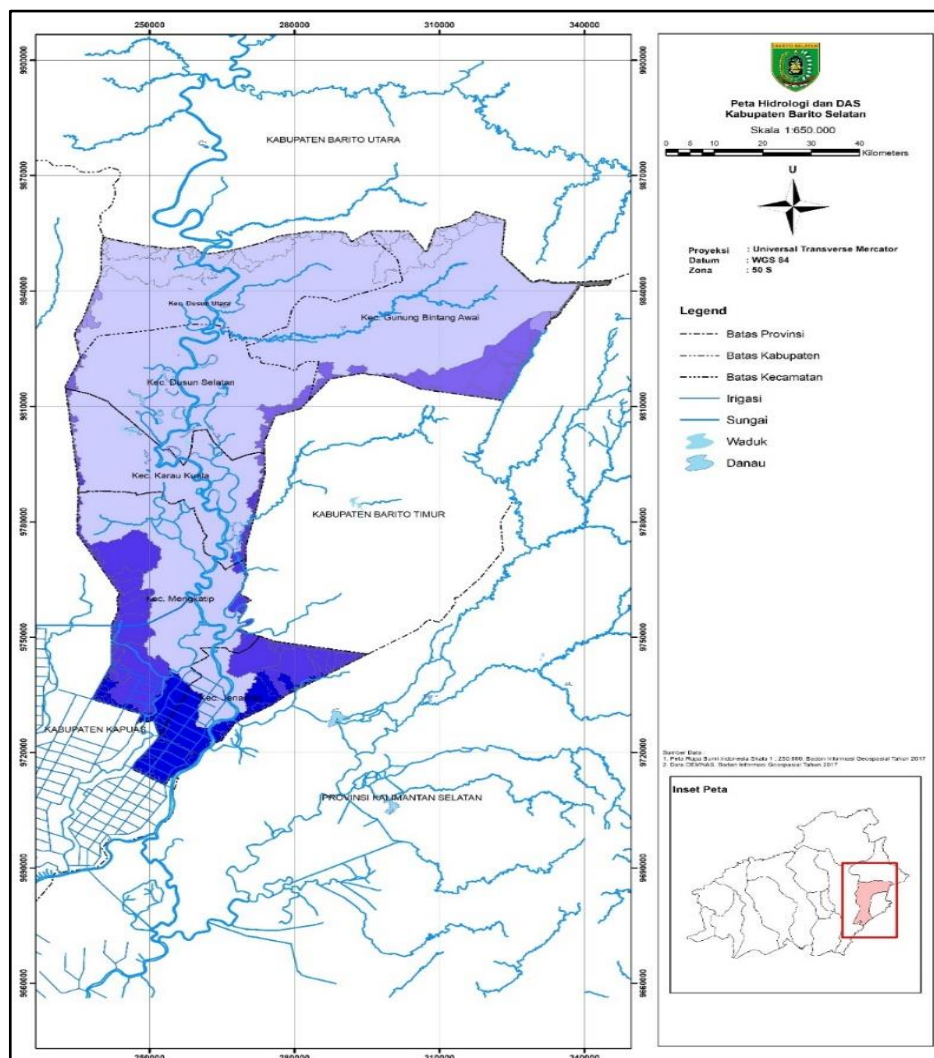
Tabel 2. 5 Luas Masing-Masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	290.993,12	41,45
2	Organosol	145.847,15	20,78
3	Podsolik	78.533,08	11,19
4	Podsol	54.102,07	7,71
5	Litosol	44.174,86	6,29
6	Kambisol	30.151,09	4,30
7	Regosol	58.198,62	8,29
Jumlah		702.000	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan, 2009

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Barito Selatan dikenal dengan keberadaan wilayah yang dilewati oleh sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, yaitu sungai Barito. Disamping itu, terdapat banyak sungai kecil/ anak sungai. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan verval tinggi bahkan beriam. Maka dari itu, tak hanya sebagai sumber mata air mineral kawasan hulu memiliki potensi yang besar pada pembangkit listrik tenaga air. Sejalan dengan kondisi fisiografisnya, sungai di Barito Selatan memiliki verval yang rendah hingga ke sektor tengah. Maka dari itu, jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh terkhusus ketika musim kemarau. Namun, ketika musim hujan tiba air sungai seringkali meluap ke wilayah sekitarnya. Pada wilayah yang berada di tengah terdapat rawa gambut dan di bagian hilir mudah ditemui rawa pasang surut. Dengan demikian, kawasan berawa berfungsi sebagai retensi ketika kelebihan air di musim hujan. Berikut merupakan gambaran peta dari hidrologi dan DAS Kabupaten Barito Selatan:



Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan

Sumber : Peta RBI skala 1 : 250.000 dan Data Demnas 2017, diolah

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Secara umum, Kabupaten Barito Selatan beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan pada tahun 2024 antara 26,9°C hingga 28,3°C, tertinggi pada April dan terendah pada Juli. Kelembapan udara berkisar antara 82,5% hingga 87,3% dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni dan Juli. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan total 460,6 mm dan terendah pada bulan Maret sebesar 77,8 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Agustus hingga Desember dengan 30 hingga 31 hari hujan per bulan. Secara lebih rinci, kondisi klimatologi di Barito Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rata-rata Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara

Bulan	Suhu/ Temperature (°C)	Kelembaban/ Humidity (%)	Kecepatan Angin (m/sec)	Tekanan Udara (mbar)
Januari	27,6	86,2	1,2	1007,4
Februari	28,0	84,0	1,5	1008,1
Maret	28,1	84,6	1,4	1007,2
April	28,3	84,9	1,3	1005,6
Mei	28,1	86,6	1,3	1005,8
Juni	27,5	87,3	1,0	1007,3
Juli	26,9	87,3	1,1	1007,9
Agustus	27,2	86,1	1,1	1008,9
September	28,0	82,5	1,2	1008,4
Oktober	27,8	84,5	1,1	1009,0
November	27,8	85,6	1,3	1007,4
Desember	27,2	86,3	1,3	1010,4

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 7 Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, Dan Rata-rata Menurut Bulan

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (Jam)
Januari	460,6	24,0	2,4
Februari	185,4	16,0	4,2
Maret	77,8	14,0	3,7
April	324,3	23,0	5,1
Mei	261,5	22,0	4,3
Juni	261,5	16,0	2,4
Juli	83,1	30,0	3,9
Agustus	245,7	31,0	4,6
September	245,7	30,0	6,3
Oktober	293,2	31,0	4,0
November	200,0	30,0	3,7
Desember	377,5	31,0	3,1

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan penataan ruang, dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang akan semakin terkendali dan teratur. Kondisi dimana terjadi ketida sesuaian lahan dengan kemampuan tanah juga dapat mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dasar penentuan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang pada hakekatnya merupakan gabungan antara aktivitas masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah manusia.

Kabupaten Barito Selatan berdasarkan luas kawasan hutan dan perairan mempunyai luas 702.009,9 Hektar yang terbagi dalam beberapa kawasan, yaitu hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, dan hutan produksi (Hutan produksi terbatas,tetap dan dapat dikonversi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 8
Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	86,574
2	Suaka Alam dan Pelastarian Alam	-
3	Hutan Produksi	276.198
	a. Hutan Produksi Terbatas	39.130
	b. Hutan Produksi Tetap	173.869
	c. Dapat dikonversi	63,199
	BARITO SELATAN	445.643

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

Sementara itu apabila mengacu kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan area perhutanan sosial provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Barito Selatan memiliki status dan fungsi kawasan yang terdiri dari hutan lindung yang berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mangkatip dan Kecamatan Karau Kuala serta Kecamatan Dusun Selatan, hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Dusun Selatan. Sementara untuk Hutan produksi tetap berada di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan serta Kecamatan Gunung Bintang Awai serta hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Mengkatip dan Kecamatan Jenamas. Terkait dengan status dan fungsi kawasan bisa dilihat pada gambar 2.5 berikut ini.

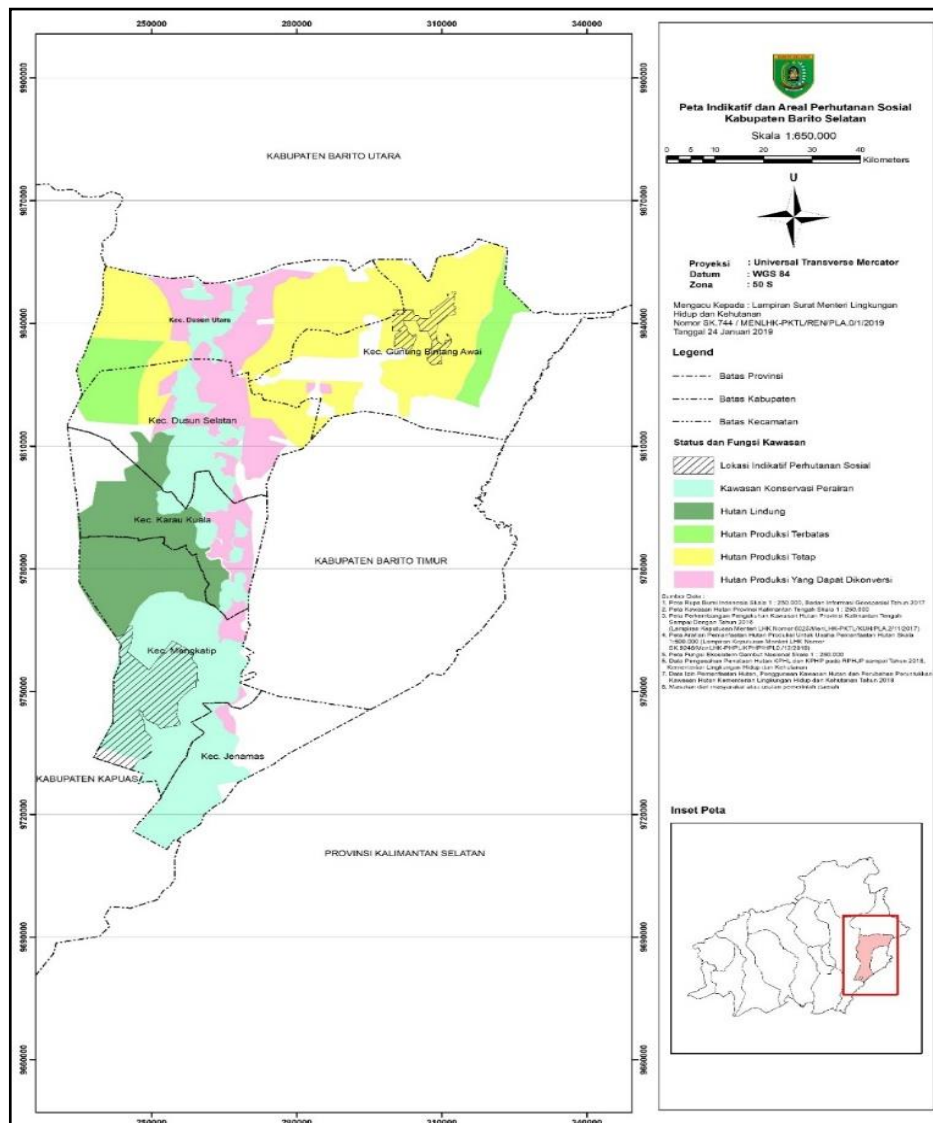
Gambar 2. 5
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026



Sumber : Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019, diolah

Produksi kayu hutan menurut jenis produksi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2011-2015

Tahun	Kayu Bulat (m ³)	Kayu Gergajian (m ³)	Kayu Lapis
2011	5.217, 64	905,79	-
2012	7.411,73	267,19	-
2013	888,83	583,38	-
2014	1.706, 20	774,01	-
2015	2.161,51	121,61	-

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

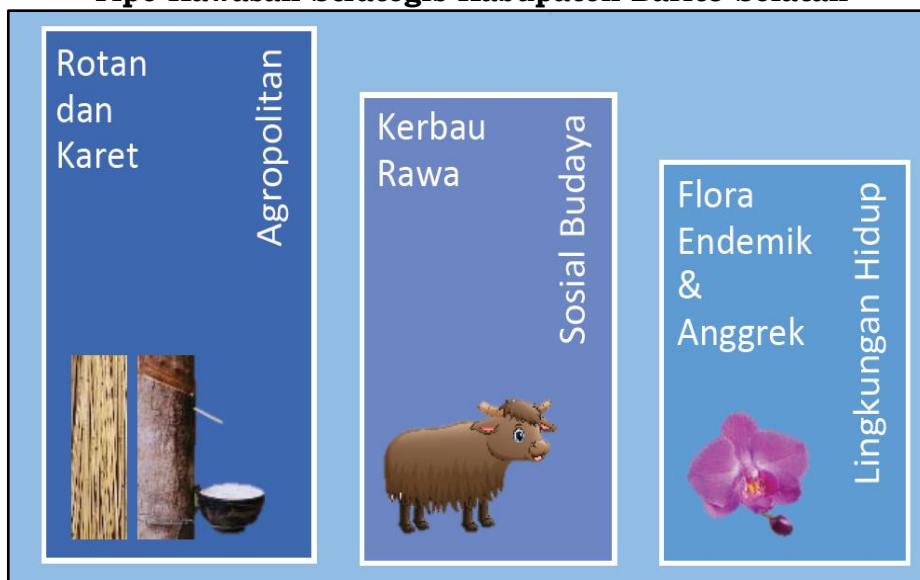
2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Strategis

Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) sebagai potensi dan peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas wilayah serta kemajuan dari wilayah itu sendiri. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, terdapat tiga tipe kawasan strategis Seperti yang ada pada gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2. 6
Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2024

Berdasarkan gambar 2.6, kawasan strategis Kabupaten Barito Selatan terbagi melalui tiga sudut pandang yakni sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni Kawasan agropolitan berbasis utama pada sektor kehutanan (rotan) dan perkebunan (karet) di Kawasan Pendang dan Tabak kanilan, dengan pusat pengembangan produksi dan pengumpul rotan di Buntok dan Mangkatip.
2. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yakni kawasan strategis Penggembalaan Kerbau Rawa di Tampulang, Ranga Ilung, dan Kalanis.
3. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan meliputi kawasan flora endemik dantaman anggrek di Malawen. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdapat di Desa Bintang Ara (Malungai Dalam) yaitu di Situs Gunung Bawo.

Gambar 2. 7
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan



Untuk kawasan pertanian sub tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan kering dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Barito Selatan.

Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 15



No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
2.	Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat	1. Kec. Dusun Utara 2. Kec. Gunung Bintang Awai 3. Kec. Dusun Selatan, 4. Kec. Karau Kuala 5. Kec. Dusun Hilir 6. Kec. Jenamas	7.481,65
3.	Kawasan peruntukkan perkebunan besar	Seluruh kecamatan	64.808,12
4.	Kawasan peruntukkan peternakan	1. Kec. Jenamas 2. Kec. Dusun Hilir	10.151,18
5.	Kawasan peruntukkan perikanan	Di sungai dan danau setiap kecamatan	745,62

Sumber Materi Teknis RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

3. Kawasan Pertambangan

Potensi galian/bahan tambang yang ada di Kabupaten Barito Selatan yang dapat dioptimalkan adalah batu bara dan bahan galian yang berasal dari permukaan tanah dan bukan logam. Untuk batu bara sendiri, diperkirakan tersimpan potensi kurang lebih 250 juta ton (terduga)/60 juta ton (terukur). wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan dengan peruntukkan pertambangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11
Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Peruntukkan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara	93.400,43

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

4. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Barito Selatan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan jenis pengembangan yakni kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 12
Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan permukiman perdesaan	Seluruh kecamatan	24.655,45
2.	Kawasan permukiman perkotaan	Di arahan di Desa Sababilah, Mangaris dan Sanggu Kec. Dusun Selatan	1.500,20
3.	Kawasan permukiman perkotaan	Kota Buntok	3.831,46

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

5. Kawasan Industri

Potensi pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi kawasan industri besar, kawasan industri sedang

dan kawasan industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13
Potensi Pengembangan Kawasan Industri

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan industri besar	1)Kawasan industri karet di Kec. Dusun Selatan, 2)Kawasan Industri CPO di Kec. Dusun Utara 3)Kawasan industri pencampuran batu bara di sepanjang Sungai Barito Kec. Dusun Utara, Kec. Dusun Selatan, Kec. Karau Kuala dan Kec. Dusun Hilir	2.120,35
2.	Kawasan peruntukkan industri sedang	1)Kawasan industri rotan di Kec.Dusun Hilir, Kec. Dusun Utara dan Kec. Dusun Selatan 2)Kawasan industri kayu di Kec. Gunung Bintang Awai 3)Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kec. Dusun Selatan	
3.	Kawasan peruntukkan industri rumah tangga	1)Kawasan industri anyaman rotan dan purun di Kec. Karau Kuala, Kec. Jenamas, Kec. Dusun Hilir dan Kec. Dusun Selatan 2)Kawasan industri penganeekaragaman pangan di Kec. Dusun Selatan dan Kec. Gunung Bintang Awai	

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

6. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Adapun terkait dengan lokasi dari masing-masing potensi wisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14
Potensi Pengembangan Kawasan Wisata

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan wisata alam	1) Wisata jelajah goa di Desa Bintang Ara dan Desa Bipak Kali 2) Wisata air terjun Senango di Desa Bintang Ara	50,80
2.	Kawasan peruntukkan wisata budaya	1) Wisata situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara	
3.	Kawasan wisata buatan	1) Wisata kuliner di Desa Pamait	

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

Sementara itu, potensi pariwisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan yang potensial untuk dikembangkan apabila mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh BPS antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan

No	Objek Wisata	Lokasi
1.	Danau Sanggu	Desa Sanggu, Dusun Selatan
2.	Banyu Habang	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
3.	Batang Nansarunai	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
4.	Cendana Harum	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
5.	Wenu Janang	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
6.	Air Merah Jaya Raya	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
7.	Mambarak Forest	Desa Sanguu, Kecamatan Dusun Selatan
8.	Situ Ulin Gagumet	Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

7. Kawasan Hutan

Potensi kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan secara lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16
Potensi Kawasan Hutan

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Utara 3) Kec. Dusun Selatan	85.070,30
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala	203.445,40
3.	Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK)	1) Kec. Dusun Selatan 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Hilir 4) Kec. Jenamas	93.378,90
4.	Kawasan peruntukkan hutan rakyat/hutan hak	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Selatan	1) 288,02 2) 280,12
5.	Kawasan areal penggunaan lain	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir 6) Kec. Jenamas	54.428,25

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

8. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan alokasi ruang di Kabupaten Barito Selatan dengan peruntukkan sebagai kawasan lindung adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 17
Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan

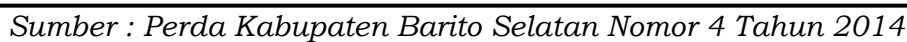
No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan lindung	1) Kec. Dusun Hilir 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Gunung Bintang Awai	67.566,60
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir	2.789,30
3.	Kawasan Perlindungan setempat		
a.	Kawasan Sempadan Sungai dengan ketentuan yakni : 1. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter 2. Perlindungan terhadap anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter 3. Pada sungai besar dan anak sungai yang melawati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter	1) Di sepanjang Sungai Barito	2.904,53
b.	Kawasan sempadan danau/waduk	1) Danau Bambaler 2) Danau Madara 3) Danau Karen 4) Danau Maguru 5) Danau Buntal 6) Danau Buritkumpai 7) Danau Kararen 8) Danau Raya 9) Danau Bundar 10) Danau Mangkirai 11) Danau Ganting 12) Danau Palui 13) Danau Malawen 14) Danau Jutuh 15) Danau Sadar 16) Danau Hampalam 17) Danau Sabur 18) Danau Lambuhang 19) Danau Jaman 20) Danau Letek 21) Danau Muaradanau	Luasnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
		22) Danau Pamarahan 23) Danau Bahalang 24) Danau Surapanji 25) Danau Rakutan 26) Danau Kalahien 27) Danau Mutar 28) Danau Sanggu 29) Danau Limut 30) Danau Sababilah 31) Danau Masura 32) Danau Baleleng 33) Danau Jayo 34) Danau Mantarem 35) Danau Pulut 36) Danau Telang	
c.	Kawasan Suaka Alam	Habitat Orang Utan 1) Madara 2) Batilap 3) Muara Puning	76.829,50
d.	Kawasan Ekosistem Air Hitam	Kawasan hutan rawa yang gambutnya sangat tebal sehingga perairan disekitarnya berwarna hitam	13.719,02
e.	Kawasan Perairan	Sungai Barito beserta cabang-cabang sungainya yang tersebar di seluruh kecamatan	15.607,30

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

Adapun terkait dengan visualisasi dari potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Barito Selatan (rencana pola ruang) bisa dilihat pada gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2. 8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2034



2.1.2. Demografi

Dalam konsep pembangunan, penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Maka dari itu, penduduk menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi karakteristik dan pertumbuhan demografi penduduk baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan memiliki sebanyak 135.910 jiwa penduduk yang terdiri atas 69.400 jiwa penduduk laki-laki dan 66.510 jiwa penduduk perempuan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami peningkatan dengan laju peningkatan tertinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 0,98%. Dari tahun 2019 hingga 2024, komposisi penduduk Barito Selatan didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Adapun detail lebih rinci terhadap jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan dalam 5 tahun terakhir, dijabarkan sebagai berikut

Tabel 2. 18 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2019	136.800	69.931	66.865	0.78
2020	131.100	67.113	64.027	0.78
2021	131.600	67.300	64.300	0.27
2022	131.997	67.467	64.530	0.37
2023	134.700	68.830	65.870	0.98
2024	135.910	69.400	66.510	0.96

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2020-2025

2.1.2.1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Dari tahun 2019 hingga 2024, komposisi jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Walaupun demikian, terjadi tren penurunan pada rasio jenis kelamin. Pada tahun 2019, sex ratio Kabupaten Barito Selatan sebesar 106 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Pada Tahun 2021 sex ratio Kabupaten Barito Selatan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 107. Sementara itu, pada tahun 2024 sex ratio menurun hingga berada di angka 104 sehingga terdapat 100 penduduk perempuan dalam setiap 104

penduduk laki-laki. Adapun detail lebih rinci terhadap rasio jenis kelamin Kabupaten Barito Selatan dalam periode 6 tahun terakhir, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Sex Ratio
2019	69.931	66.865	106
2020	67.113	64.027	105
2021	67.300	64.300	107
2022	67.467	64.530	105
2023	68.830	65.870	104
2024	69.400	66.510	104

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020-2025

2.1.2.2. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk atas rentang umur, pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh kelompok umur 20-24 tahun, yaitu sebanyak 11.810 jiwa. Kemudian, disusul oleh kelompok umur 0 – 4 tahun dengan jumlahnya sebanyak 11.440 jiwa. Dari komposisi penduduk, Kabupaten Barito Selatan memiliki usia produktif yang lebih besar. Maka dari itu, potensi produktivitas dari penduduk usia produktif sebagai bonus demografi harus dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, terjadi tren penurunan pada kelompok umur 0 – 35 tahun dan peningkatan pada kelompok umur diatas 35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya awal perubahan komposisi demografi penduduk dengan bertambahnya proporsi penduduk usia produktif menuju lanjut usia. Adapun detail lebih rinci terhadap jumlah penduduk Barito Selatan berdasarkan kelompok umur dalam 6 tahun terakhir dijabarkan sebagai berikut:

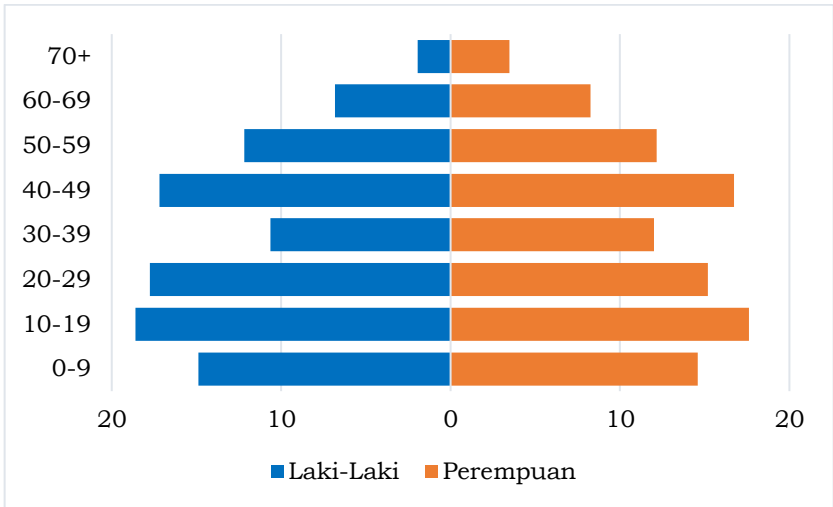
Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	12.534	10.700	10.650	10.567	11.380	11.440
5-9	13.027	9.900	9.681	9.547	10.040	10.310
10-14	12.088	11.100	10.843	10.586	10.130	9.900
15-19	10.692	12.100	11.962	11.793	11.500	11.200
20-24	9.569	11.500	11.428	11.308	11.800	11.810
25-29	10.836	10.400	10.365	10.326	10.880	11.070
30-34	11.515	10.500	10.421	10.355	10.230	10.210
35-39	11.872	10.300	10.356	10.401	10.280	10.280
40-44	11.217	10.100	10.172	10.210	10.110	10.090
45-49	9.948	9.200	9.342	9.500	9.670	9.780

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
50-54	8.246	7.600	7.822	8.042	8.400	8.650
55-59	5.793	6.200	6.409	6.604	6.800	7.020
60-64	4.010	4.700	4.911	5.160	5.320	5.530
65-69	2.519	3.100	3.242	3.399	3.730	3.950
70-74	1.630	1.900	2.037	2.135	2.290	2.420
75+	1.299	1.900	1.965	2.064	2.130	2.270
Total	136.796	131.100	131.606	131.997	134.700	135.910

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2018-2025

Jika ditinjau dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Selatan memiliki piramida penduduk ekspansif. Hal ini mengartikan bahwa mayoritas penduduknya didominasi oleh usia produktif. Oleh karena itu, diperlukan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor unggulan untuk memenuhi kebutuhan jumlah angkatan kerja saat ini. Adapun bentuk piramida penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 9 Piramida Penduduk

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, 2025

2.1.2.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Sebagaimana menjadi ibukota Kabupaten Barito Selatan, persebaran penduduk terpusat di Kecamatan Dusun Selatan dengan persentase terhadap penduduk secara keseluruhan di tahun 2024 sebesar 43,89 persen atau sebanyak 59.650 jiwa. Kecamatan Dusun Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 53 jiwa/ km2 dengan rasio jenis kelamin sebesar 103. Kemudian, persentase jumlah penduduk terbanyak diikuti oleh Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan persentase sebesar

14,26 persen dengan kepadatan penduduk sebanyak 11 jiwa/km². Kecamatan Karau Kuala memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi, yaitu sebesar 18 jiwa/ km² dengan rasio jenis kelamin sebesar 104. Adapun Kecamatan Dusun Utara memiliki kontribusi penduduk sebesar 12,42 persen dengan rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu sebesar 107. Sementara itu, rasio jenis kelamin tertinggi juga dimiliki oleh Kecamatan Dusun Hilir yaitu sebesar 107 dengan kontribusi penduduk sebanyak 15.970 jiwa penduduk. Kecamatan Jenamas memiliki kontribusi penduduk terkecil yaitu sebesar 6,48 persen atau sebanyak 8.810 jiwa dengan kepadatan sebesar 13 jiwa/ km². Secara garis besar, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan mencapai 19 jiwa/km². Adapun detail lebih rinci terhadap distribusi dan kepadatan penduduk dalam 6 tahun terakhir dijabarkan sebagai berikut:.

Tabel 2. 21 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km 2	Sex ratio
1	Jenamas	8.810	6,48	13	101
2	Dusun Hilir	15.970	11,75	12	107
3	Karau Kuala	15.220	11,20	18	104
4	Dusun Selatan	59.650	43,89	53	103
5	Dusun Utara	16.890	12,42	13	107
6	Gunung Bintang Awai	19.380	14,26	11	105
Barito Selatan		135.910	100	19	104

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan dari hasil upaya perencanaan terencana dan tersinergi dalam merespon dinamika kebutuhan dasar dalam mencegah dan mengatasi permasalahan serta memperkuat institusi sosial. Upaya ini tercermin melalui pemenuhan layanan publik yang merata, peningkatan akses terhadap perekonomian, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial yang inklusif. Ini perlu dibangun melalui langkah-langkah preventif dan responsif untuk terus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mencapai peningkatan kualitas hidup bagi

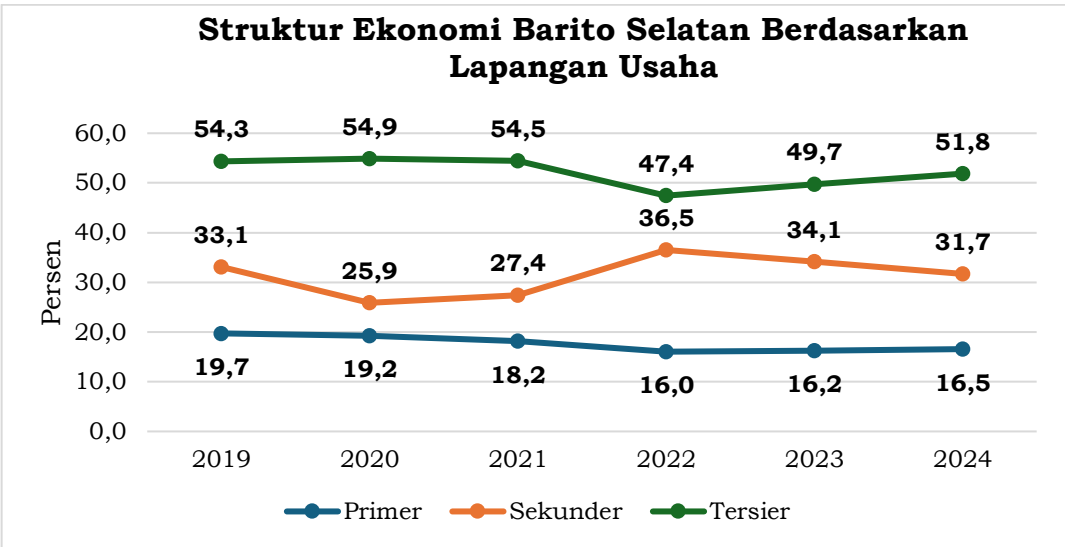
seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, berikut dijabarkan situasi kesejahteraan masyarakat berdasarkan data dan bukti faktual.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Indikator-indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat ditentukan oleh kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Aspek ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu indikator yang dimaksud. Indikator pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan, termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Indikator pemerataan kesejahteraan dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju inflasi, indeks gini.

2.2.1.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kondisi perekonomian dari sisi produksi. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi adalah distribusi persentase sektoral, yaitu kontribusi setiap sektor terhadap PDRB di suatu wilayah. Jika suatu sektor memiliki persentase yang tinggi maka sektor tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi daerah tersebut. Struktur ekonomi ini dapat dilihat pada tabel grafik di bawah yang menjelaskan kontribusi berbagai sektor berdasarkan kelompok lapangan usaha.



Gambar 2. 10 Struktur Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, diolah 2025



Struktur ekonomi menggambarkan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kondisi perekonomian dari sisi produksi. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi adalah distribusi persentase sektoral, yaitu kontribusi setiap sektor terhadap PDRB di suatu wilayah. Apabila suatu sektor memiliki persentase yang tinggi maka sektor tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi daerah tersebut. Struktur ekonomi ini dapat dilihat pada grafik di atas yang menjelaskan kontribusi berbagai sektor berdasarkan kelompok lapangan usaha.

Struktur ekonomi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri atas kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor sekunder mencakup kegiatan pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; dan konstruksi. Sementara itu, sektor tersier meliputi aktivitas jasa dan perdagangan seperti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2024, Kabupaten Barito Selatan mengalami fluktuasi struktur ekonomi. Sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 19,7% pada tahun 2019 menjadi 16,5% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan menurunnya rasio kegiatan berbasis sumber daya alam tradisional. Sektor sekunder menunjukkan fluktuasi tajam, sempat turun drastis di tahun 2020 akibat pandemi, lalu melonjak ke 36,5% pada 2022 dan kembali turun ke 31,7% pada 2024. Sementara itu, sektor tersier tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah meskipun sempat melemah pada 2022 dengan nilai 47,4%, tetapi kembali menguat pada 2024 dengan nilai 51,8%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1.2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk memahami kondisi ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik melansir, PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari hasil produksi semua sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dibedakan menjadi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Indikator PDRB ADHK dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Data PDRB ADHK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHK sebesar Rp4.366,80 miliar. Namun, pada tahun 2020, PDRB ADHK mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi. PDRB ADHK mulai kembali normal pada tahun 2021-2023 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB ADHK dari tahun 2020 hingga 2023. Meskipun terjadi fluktuasi PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) setiap tahun, sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai tertinggi. Sementara itu, sektor jasa perusahaan memiliki nilai terendah. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami kebangkitan ekonomi yang kuat pasca-pandemi yang ditopang oleh pemulihan aktivitas ekonomi, terutama sektor sekunder dan tersier.

Tabel 2. 22 PDRB ADHK Kabupaten Barito Selatan

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	782.939	770.015	803.767	797.949	792.635
B	Pertambangan dan Penggalian	905.149	959.633	1.087.948	1.162.026	1.258.079
C	Industri Pengolahan	237.875	241.271	258.500	247.303	247.667
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.459	2.607	2.622	2.760	2.919
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.108	6.551	6.801	7.152	7.022
F	Konstruksi	246.881	218.668	232.903	260.021	277.764
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	343.992	348.117	357.145	361.466	373.288
H	Transportasi dan Pergudangan	466.521	448.900	486.038	493.346	542.537
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81.232	82.613	86.784	90.031	96.289
J	Informasi dan Komunikasi	77.115	83.274	85.880	88.185	92.392
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.686	211.744	212.289	218.919	229.375
L	Real Estat	91.247	91.276	92.048	96.581	97.685

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
M,N	Jasa Perusahaan	662	610	611	675	703.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.503	298.024	292.493	304.175	326.396
P	Jasa Pendidikan	297.499	309.810	318.361	332.021	332.587
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141.031	186.640	206.594	213.027	219.370
R,S,T,U	Jasa lainnya	75.712	71.275	72.167	77.859	80.029
Jumlah Nilai		4.240.610	4.331.029	4.602.951	4.753.493	4.976.737

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

Akibat pandemi Covid-19, PDRB ADHB Kabupaten Barito Selatan sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp5.946,351 miliar dan meningkat menjadi Rp6.369,126 miliar pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp6.277,922 miliar yang mencerminkan dampak lanjutan pandemi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi. PDRB ADHB kembali meningkat menjadi Rp6.681,133 miliar dan melonjak pada tahun 2023 menjadi Rp8.131,627 miliar. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan proyeksi mencapai Rp8.898,706 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Selatan mulai pulih dan beradaptasi dengan situasi pasca pandemi. Kinerja ekonomi yang membaik ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

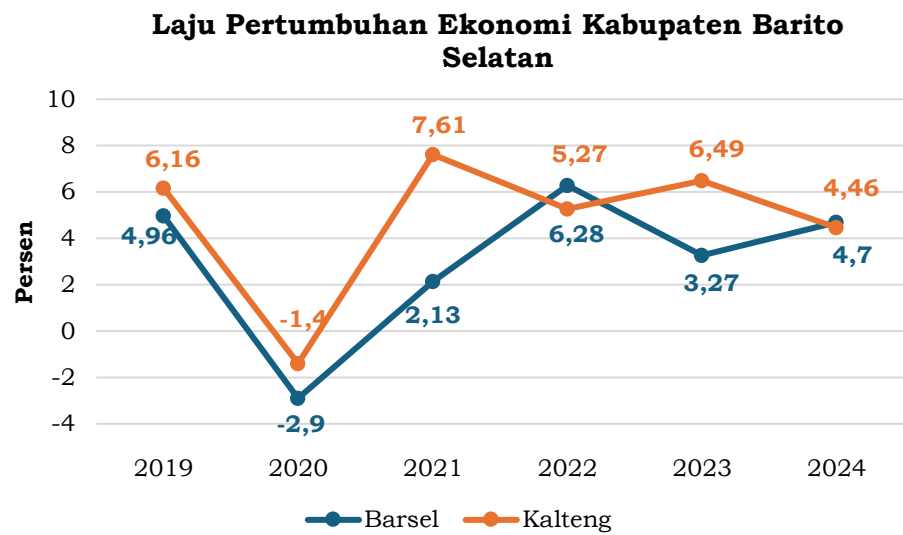
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.207.212	1.212.789	1.305.079	1.372.955	1.470.169
B	Pertambangan dan Penggalian	837.044	1.056.495	2.123.597	2.010.384	1.864.975
C	Industri Pengolahan	372.629	390.479	433.489	418.927	437.276
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.837	4.127	4.331	4.678	4.985
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.715	11.800	12.779	14.027	14.469
F	Konstruksi	400.491	364.922	395.033	446.401	495.140
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539.613	548.929	578.398	638.542	695.965
H	Transportasi dan Pergudangan	773.239	751.608	833.541	916.171	1.082.853
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136.047	140.638	151.569	163.160	182.455
J	Informasi dan Komunikasi	99.920	107.767	112.880	112.746	116.256
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	340.008	364.840	374.106	401.034	430.919

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estat	166.337	174.571	179.524	194.722	201.112
M,N	Jasa Perusahaan	1.145	1.088	1.129	1.310	1.407
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503.342	536.418	535.139	578.664	639.064
P	Jasa Pendidikan	527.348	584.835	623.001	698.545	721.307
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.067	302.751	335.307	360.556	381.406
R,S,T,U	Jasa lainnya	130.932	127.077	132.727	148.419	158.948
Jumlah Nilai		6.277.922	6.681.133	8.131.627	8.481.240	8.898.706

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dan kondisi di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan signifikan, yaitu -2,9 persen, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di -1,4 persen, akibat pandemi Covid-19. Namun, perekonomian mulai membaik pada tahun 2021 dan 2022, ditandai dengan nilai positif di seluruh sektor usaha. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 3,27 persen dan meningkat tajam menjadi 4,7 persen pada tahun 2024.

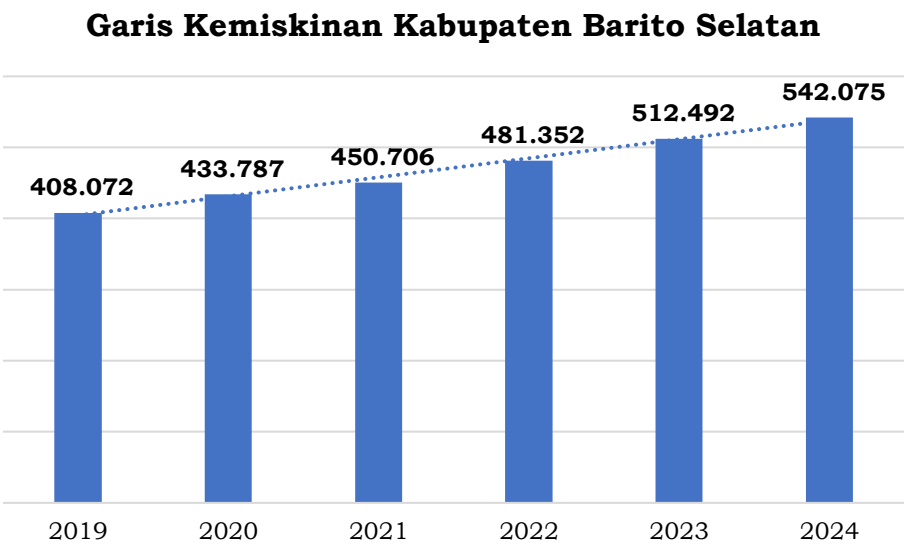


Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.4. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan meningkat jika kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin semakin besar. Kemiskinan adalah salah satu indikator utama kesejahteraan yang diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan: garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2. 12 Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Barito, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp408.072. Artinya, penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019 memiliki pengeluaran di bawah Rp408.072 per bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019 – 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil dengan peningkatan pada tahun 2020

akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2019 – 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang relatif kecil.

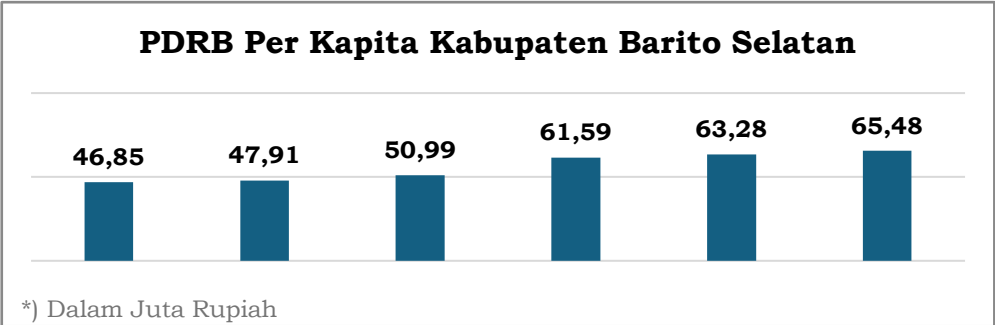
Tabel 2. 24 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	4,39	0,21	0,05
2020	4,45	0,89	0,26
2021	4,62	0,35	0,04
2022	4,88	0,58	0,10
2023	4,72	0,41	0,06
2024	4,83	0,21	0,03

Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.5. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah salah satu indikator untuk memantau aktivitas ekonomi. PDRB Per Kapita dihitung dengan membagi Nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk dalam periode tertentu. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima oleh setiap penduduk. Selain itu, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Barito Selatan. Asumsinya adalah semakin besar PDRB per kapita, semakin tinggi kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan data PDRB Per Kapita, kondisi di Kabupaten Barito Selatan tergolong cukup baik dengan rentang PDRB Per Kapita antara 46,85 hingga 65,48 juta rupiah. Stabilitas kondisi ini harus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.

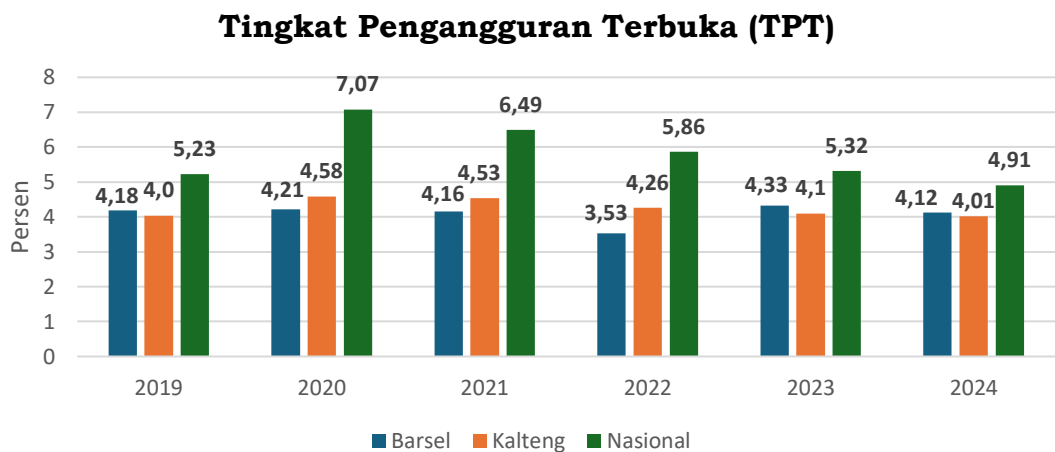


Gambar 2. 13 Grafik PDRB Per Kapita
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025



2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan proporsi jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja secara keseluruhan. Pengangguran terbuka merupakan penduduk dalam usia angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan/ sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha/ tidak mencari pekerjaan dan penduduk yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2024, TPT Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang relatif fluktuatif, tetapi cenderung stagnan. Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 4,18 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 4,00 persen dan lebih rendah dari angka nasional dengan nilai 5,23 persen. Pada tahun 2020 dan 2021, TPT Kabupaten Barito Selatan mengalami sedikit peningkatan dan mengalami penurunan di tahun berikutnya, masing-masing sebesar 4,21 persen dan 4,16 persen yang masih menunjukkan kestabilan meski di tengah dampak pandemi Covid-19. TPT menurun pada tahun 2022 menjadi 3,53 persen, tetapi kembali meningkat menjadi 4,33 persen pada tahun 2023. Angka ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Barito Selatan dan bahkan melebihi rata-rata TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,10 persen meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 5,32 persen. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Barito Selatan kembali menurun menjadi 4,12 persen, menunjukkan sinyal perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa isu ketersediaan dan kesesuaian lapangan pekerjaan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Barito Selatan. Adapun grafik komparatif TPT Kabupaten Barito Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.7. Rasio Gini

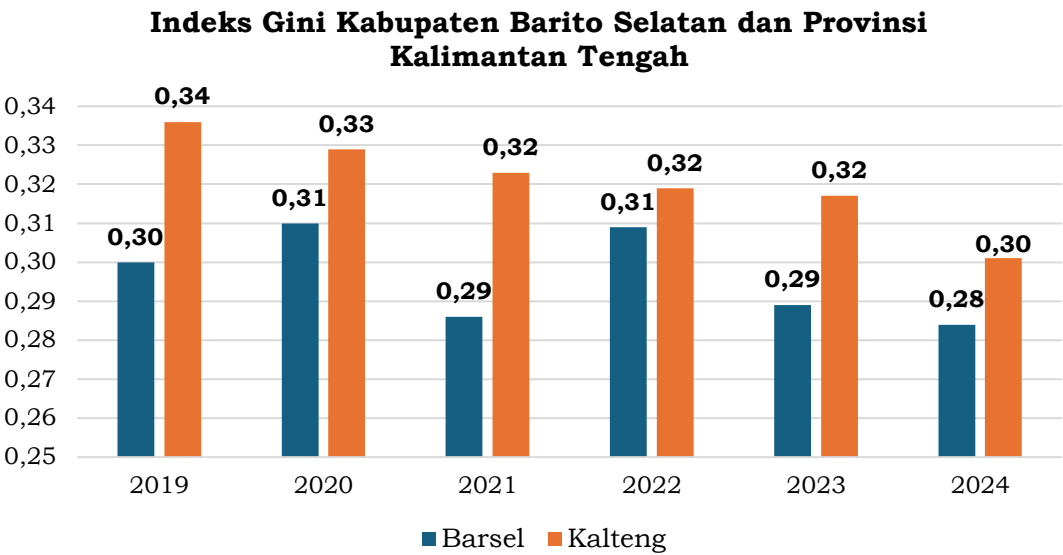
Kesenjangan dan ketidakmerataan perlu menjadi perhatian di setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesetaraan pembangunan. Jika pembangunan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi maka dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang serius yang merujuk pada disparitas dalam distribusi pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur kesetaraan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini.

Kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan perlu menjadi perhatian di setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesetaraan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi maka berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tercermin melalui Rasio Gini sebagai salah satu indikator kesenjangan.

Selama periode 2019–2024, Rasio Gini Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, Rasio Gini tercatat sebesar 0,30, kemudian meningkat menjadi 0,31 pada tahun 2020. Angka ini menurun menjadi 0,29 pada tahun 2021, tetapi kembali naik ke 0,31 pada tahun 2022. Setelah itu, Rasio Gini menurun berturut-turut menjadi 0,29 di tahun 2023 dan 0,28 pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam enam tahun terakhir.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Rasio Gini Barito Selatan cenderung lebih rendah. Penurunan Rasio Gini di

Barito Selatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, namun tetap diperlukan upaya yang konsisten agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

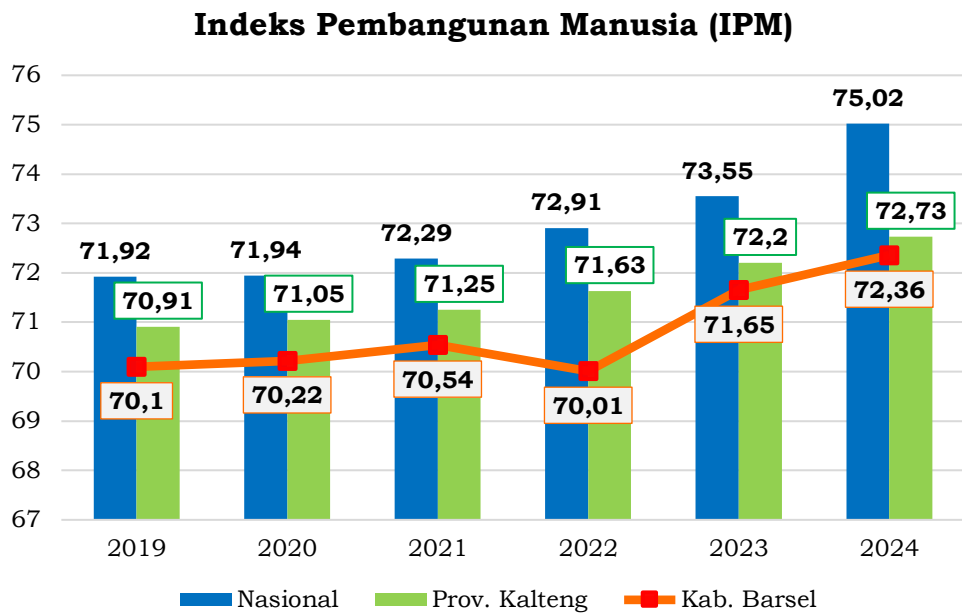


Gambar 2. 15 Grafik Rasio Gini Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan daerah atas pemenuhan kebutuhan dasar kualitas hidup penduduk. Indikator IPM diukur melalui 3 (tiga) komponen dasar, yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun tingkat pendapatan diukur melalui indikator Pengeluaran per kapita; tingkat kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH); dan tingkat pendidikan diukur melalui Angka Melek Huruf (AMH).



Gambar 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara komparatif, dari tahun 2019 - 2023 IPM Kabupaten Barito Selatan masih tergolong tinggi, tetapi masih jauh dibawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Barito Selatan sebesar 71,65 dengan capaian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,20 dan Nasional sebesar 73,55. Berdasarkan rincian perhitungan indikator komponen IPM, komponen kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius karena masih tergolong rendah, yaitu 67,75 tahun pada Tahun 2023. Rincian komponen dalam indikator IPM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Indikator Komponen IPM

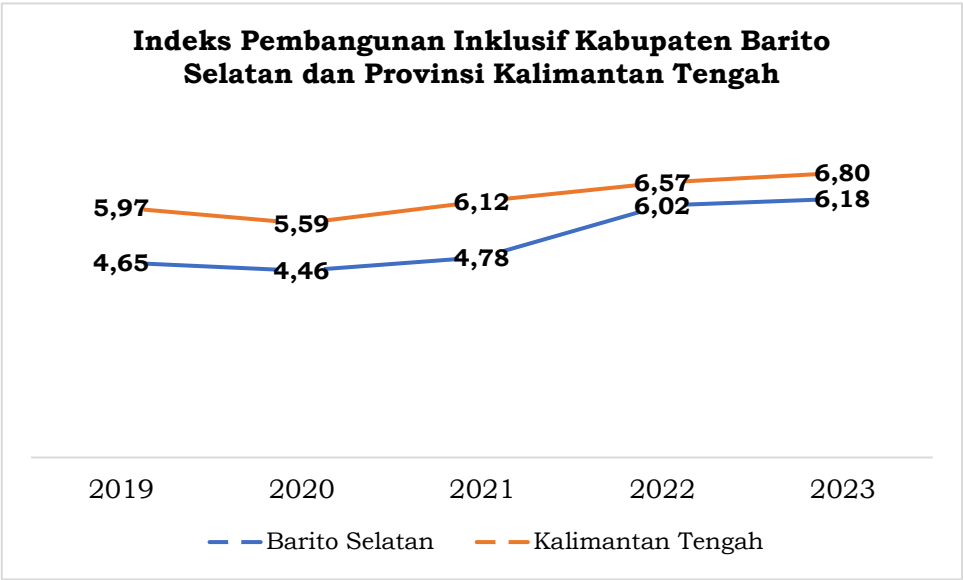
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,99	67,09	67,19	67,48	67,75	67,86
Angka Melek Huruf	99,74	99,75	99,2	99,99	100	99,92
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,71	8,82	8,95	9,01	9,13	9,22
Pengeluaran per Kapita (Rp)	1.582	11.486	11.492	11.780	12.067	12.508
IPM	70,1	70,22	70,54	70,1	71,65	72,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Inklusif

Tingkat pemerataan pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Inklusif yang menilai aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks

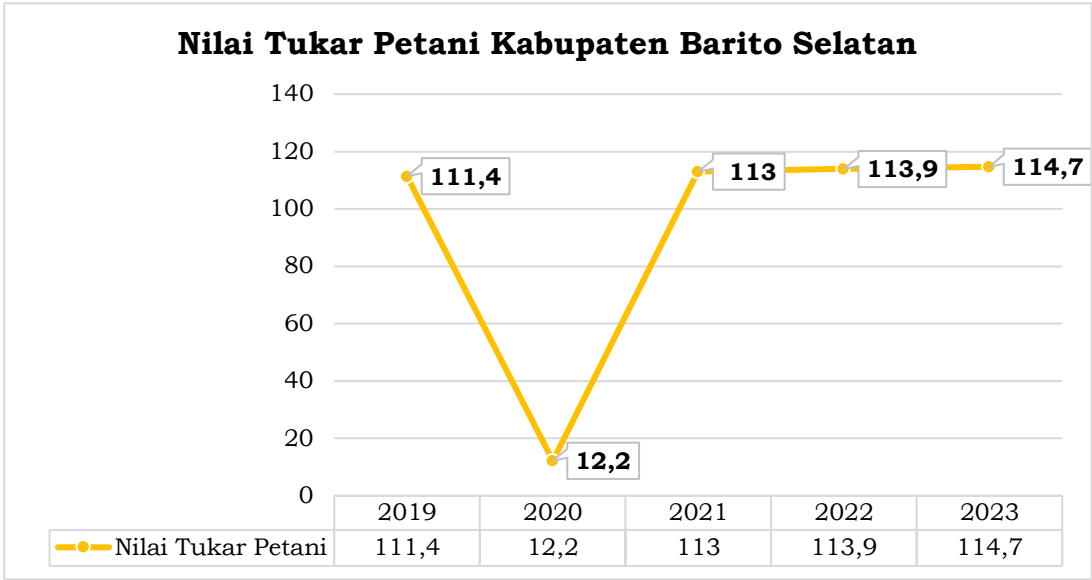
ini didasarkan pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan. Dari tahun 2019 hingga 2023, Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 6,18. Namun, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama, Kabupaten Barito Selatan memiliki nilai yang lebih rendah.



Gambar 2. 17 Perbandingan Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Bappenas, 2024

2.2.1.10.Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP dihitung dengan membandingkan pendapatan petani sebagai produsen yang menjual hasil pertanian dengan pengeluaran mereka sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari serta biaya produksi. Nilai NTP lebih dari 100 mengindikasikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar sehingga menunjukkan keuntungan dalam perdagangan. Sebaliknya, apabila NTP kurang dari 100 maka indeks harga yang diterima lebih rendah daripada yang dibayar sehingga menunjukkan kerugian. Nilai NTP sama dengan 100 menandakan bahwa harga komoditas yang dijual dan barang yang dibeli oleh petani berada dalam keseimbangan.



Gambar 2. 18 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Barito Selatan
Sumber: Barito Selatan dalam Angka (BPS), 2025

2.2.1.11. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Per Kapita mencerminkan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pengeluaran. Semakin tinggi rasio semakin menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Angka ini dihitung berdasarkan total pengeluaran penduduk untuk makanan dan non-makanan dibagi dengan jumlah penduduk. Teori Engel Law menggambarkan bahwa dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non-makanan cenderung meningkat. Di Kabupaten Barito Selatan, pengeluaran per kapita sebulan mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024.



Gambar 2. 19 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Sebulan
Sumber: Barito Selatan dalam Angka (BPS), 2025

Berdasarkan kategorinya, rasio pengeluaran untuk non-makanan terhadap total pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang relatif stagnan pada periode 2019 hingga 2021, yakni berada pada angka 46 persen. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan rasio menjadi 43 persen yang menunjukkan peningkatan proporsi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan makanan dibandingkan non-makanan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat terhadap kebutuhan non-pokok menurun atau masyarakat lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar. Pada tahun 2024, rasio pengeluaran non-makanan sedikit meningkat menjadi 44 persen yang dapat dibaca sebagai indikasi pemulihan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa non-makanan.

Tabel 2. 26 Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan

Golongan/ Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	54%	54%	54%	57%	57%	56%
	Rp564.978	Rp641.873	Rp665.081	Rp750.914	Rp670.988	Rp731.930
Non makanan	46%	46%	46%	43%	43%	44%
	Rp475.749	Rp542.339	Rp570.887	Rp556.635	Rp505.995	Rp575.556

Sumber: Barito Selatan dalam Angka (BPS)

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

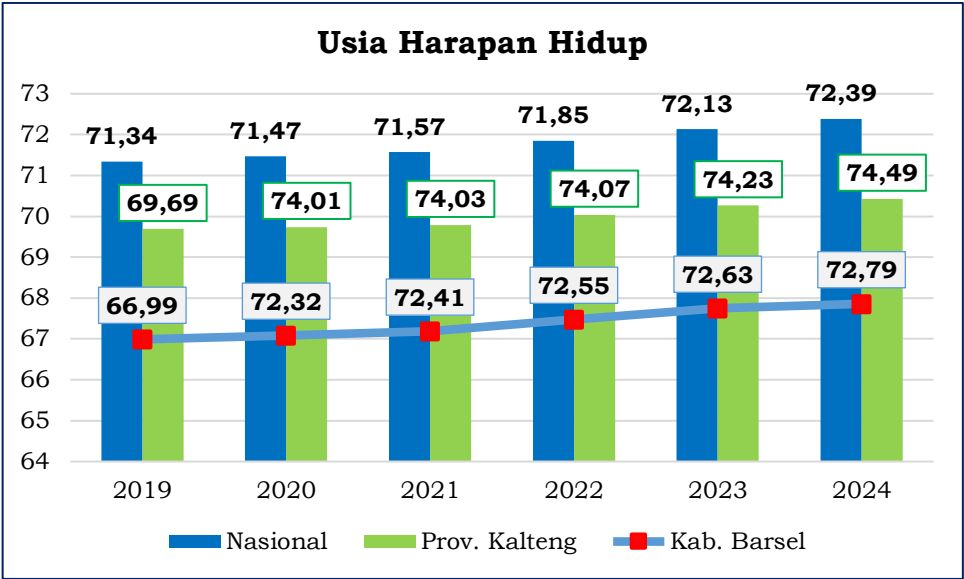
Aspek kesehatan merupakan salah satu fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Adapun fokus kesehatan untuk semua bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan merata.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh penduduk sejak lahir. Secara umum, terjadi tren peningkatan selama lima tahun terakhir baik pada tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Barito Selatan. Namun, terdapat perbedaan antara ketiga hirarki tersebut. UHH pada tingkat nasional mengalami peningkatan dari angka 71,34 pada tahun 2019 menjadi 72,39 pada tahun 2024. UHH Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari angka 69,69 pada tahun 2019 menjadi 74,49 pada tahun 2024. Sementara itu, UHH di

Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dari angka 66,99 pada tahun 2019 menjadi 72,79 pada tahun 2024.

Dapat disimpulkan bahwa UHH di Kabupaten Barito Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, Kabupaten Barito Selatan tetap perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Ini termasuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, serta pendidikan dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan usia harapan hidup antara Kabupaten Barito Selatan dengan tingkat provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.



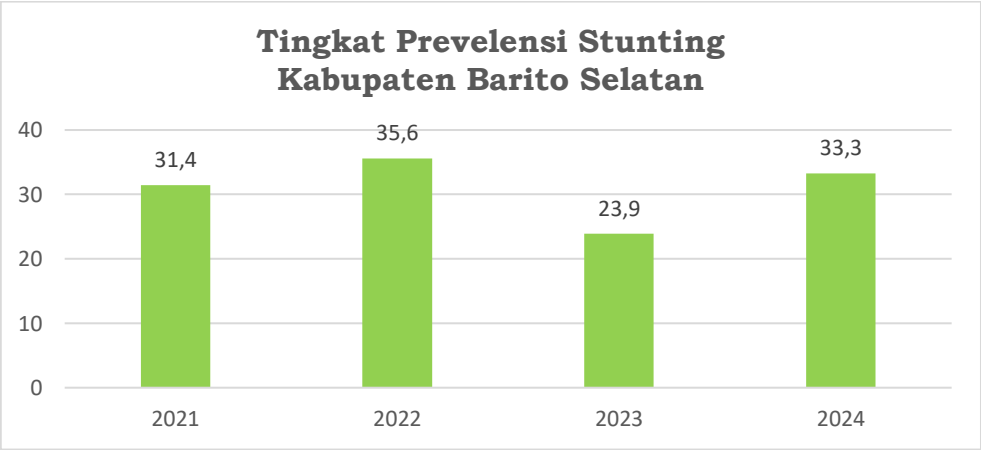
Gambar 2. 20 Grafik Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional
 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

2.2.2.2. Prevelensi Stunting

Prevelensi Stunting merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat permasalahan gizi yang terjadi pada anak balita di suatu wilayah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih

pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, serta kesehatan secara keseluruhan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi stunting pada balita dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya. Adapun data pravelensi stunting di Kabupaten Barito Selatan, tahun 2021 hingga 2022 dapat dikategorikan dalam klasifikasi sangat tinggi atau berada di atas 30%. Pada tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Barito Selatan mengalami penurun yang signifikan yaitu menjadi 23,9% atau turun sebesar 11,7% akan tetapi pada tahun 2024 stunting kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan pada angka 33,3. Meskipun demikian, tingkat prevelensi stunting Kabupaten Barito Selatan masih berada pada kategori tinggi.



Gambar 2. 21 Grafik Prevelensi Stunting Kabupaten Barito Selatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2025

Untuk menjaga dan mempercepat penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu untuk melanjutkan kebijakan dan program intervensi yang adaptif dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan gizi, akses layanan kesehatan yang memadai, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Monitoring dan evaluasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data dan kondisi lapangan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Akses dan



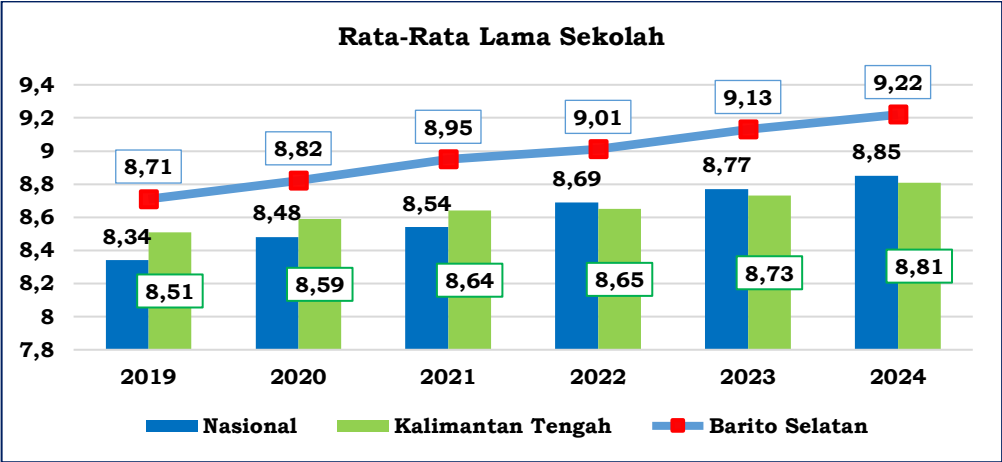
kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan formal yang diikuti oleh penduduk. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dan tidak termasuk tahun yang diulang. Rata-rata lama sekolah sangat penting karena menjadi salah satu ukuran dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada dimensi pendidikan.

Selama lima tahun terakhir dimulai pada tahun 2019 hingga 2024, Kabupaten Barito Selatan mempunyai tren rata-rata lama sekolah yang menunjukkan perkembangan secara positif dan konsisten. Tahun 2019 rata-rata lama sekolah menunjukkan angka 8,71 dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 9,22 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun terakhir sebagian besar murid mampu menempuh pendidikan selama 9,22 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan secara signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Selatan serta mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya sekolah sebagai sarana pendidikan dalam menunjang peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan rata-rata lama sekolah berpotensi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Selatan.

Kabupaten Barito Selatan secara konsisten memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa Barito Selatan telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas pendidikan lebih efektif dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Adapun perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2023, digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 2. 22 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Sumber: BPS 2025, diolah

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) didasarkan pada asumsi bahwa peluang penduduk dalam kategori usia tersebut akan tetap bersekolah pada usia berikutnya. Indikator ini dihitung berdasarkan pembagian antara peluang penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk untuk usia yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019 hingga 2024. Tahun 2019 tercatat sebesar 12,54 tahun kemudian sedikit mengalami peningkatan menjadi 12,55 pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan angka harapan lama sekolah mencapai 13 tahun. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan bahwa anak-anak diperkirakan akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pendidikan formal dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan memiliki angka harapan lama sekolah yang lebih rendah selama empat tahun awal terhitung dari 2019 hingga 2022. Namun, Kabupaten Barito Selatan mampu melampaui Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dan 2024 sehingga dapat mencerminkan bahwa adanya upaya yang lebih efektif dalam bidang pendidikan. Adapun perkembangan HLS di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Urusan	Jenjang Pendidikan	
		SD	SMP
1.	Rerata kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional	55,06	65,82
2.	Rerata kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional	43,85	60,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.3.4. Indeks Literasi Digital

Literasi digital di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perkembangan bertahap meskipun masih menghadapi berbagai tantangan terkait infrastruktur, akses internet, dan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan ini utamanya didorong oleh semakin meluasnya penggunaan perangkat digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta upaya pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menyelenggarakan pelatihan literasi digital, kampanye etika bermedia sosial, dan penguatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan. Penguatan literasi digital menjadi krusial untuk mendukung transformasi pendidikan, ekonomi lokal, dan layanan publik yang inklusif dan berdaya saing.

2.2.3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. Indikator ini disusun berdasarkan lima dimensi utama, yaitu ketersediaan bahan bacaan, akses masyarakat terhadap bahan bacaan, aktivitas literasi masyarakat, kualitas tenaga pendukung, dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan literasi. Indeks ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan dan infrastruktur literasi serta menumbuhkan budaya baca masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 dan 2023 secara berturut yaitu 56,44 dan 52,00 atau berada pada kategori sedang. Indeks ini mengalami penurunan sebesar 4,44 skor dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti tingkat literasi Kabupaten Barito Selatan sedang berkembang tetapi belum merata dan belum menunjukkan adanya konsistensi baik dari pemerintah maupun

pihak terkait. Maka dari itu, masih diperlukan adanya peningkatan investasi pada fasilitas literasi. Skor yang tinggi dapat menjadi modal sosial dan budaya yang kuat untuk mendukung program pembangunan berbasis pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, dan inovasi daerah.

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Kemampuan Literasi dan Numerasi

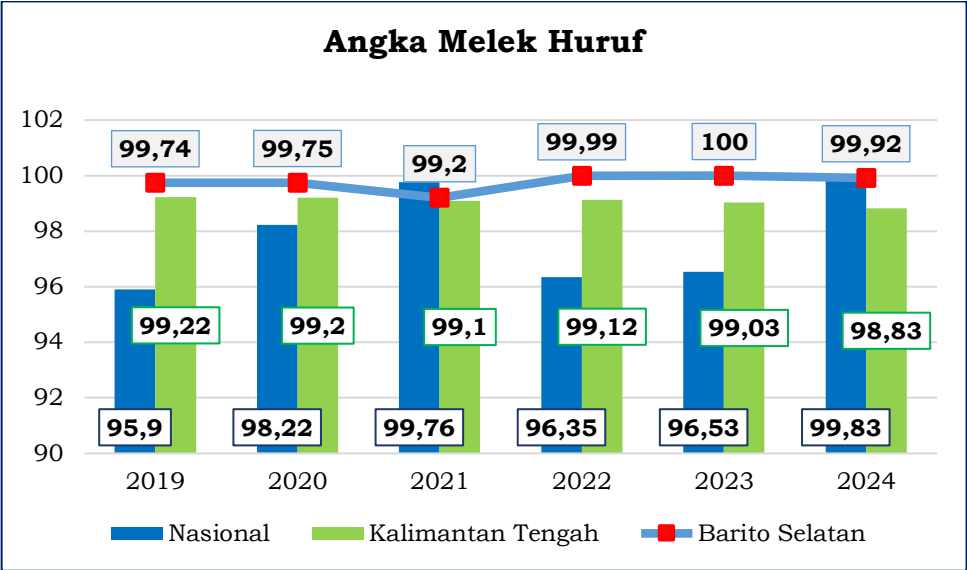
No.	Indikator	SD	SMP
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,44	52,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.2.3.6. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada aspek pendidikan. Indikator ini didasarkan pada proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan buta huruf. Tingginya jumlah penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar menjadi tantangan dalam upaya peningkatan AMH secara berkelanjutan. Selain itu, indikator AMH dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta digunakan untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

AMH di Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2019 hingga 2020 mengalami perkembangan yang sedikit, yaitu hanya 0,01. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,52 sehingga mencapai angka 99,2. Namun, pada tahun 2022 kembali meningkat tajam hingga 99,99 dan mencapai 99,83 pada tahun 2024. Grafik perkembangan AMH selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren peningkatan yang jelas setelah penurunan di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang baik dan mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis. Apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kemampuan angka melek huruf di Kabupaten Barito Selatan lebih tinggi. Adapun perkembangan AMH di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2024, digambarkan dalam grafik berikut:



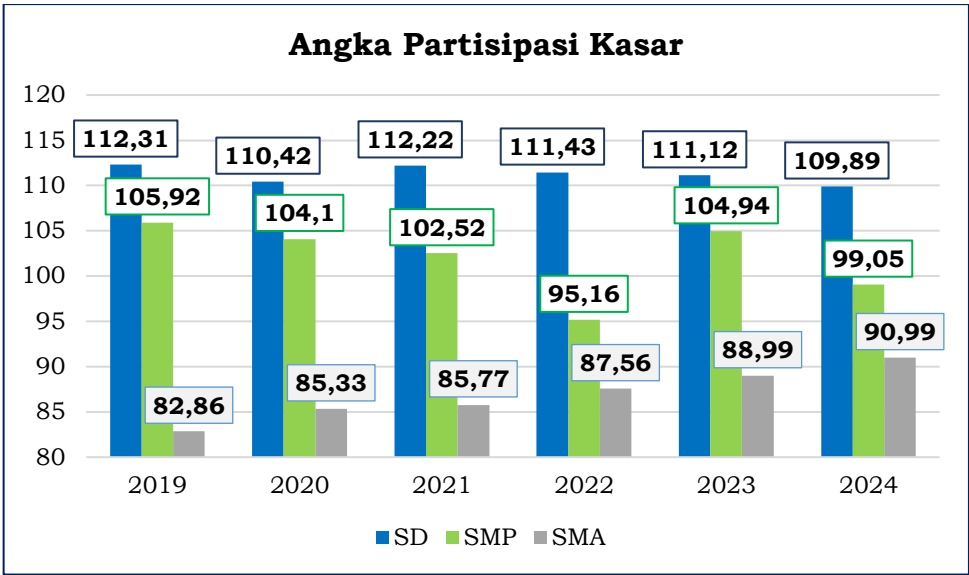
Gambar 2. 24 Grafik Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2025, diolah

2.2.3.7. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu baik formal maupun informal yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator APS terbagi dalam tiga kategori kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semakin tinggi capaian pada indikator APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Adapun APS terbagi kedalam dua klasifikasi, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

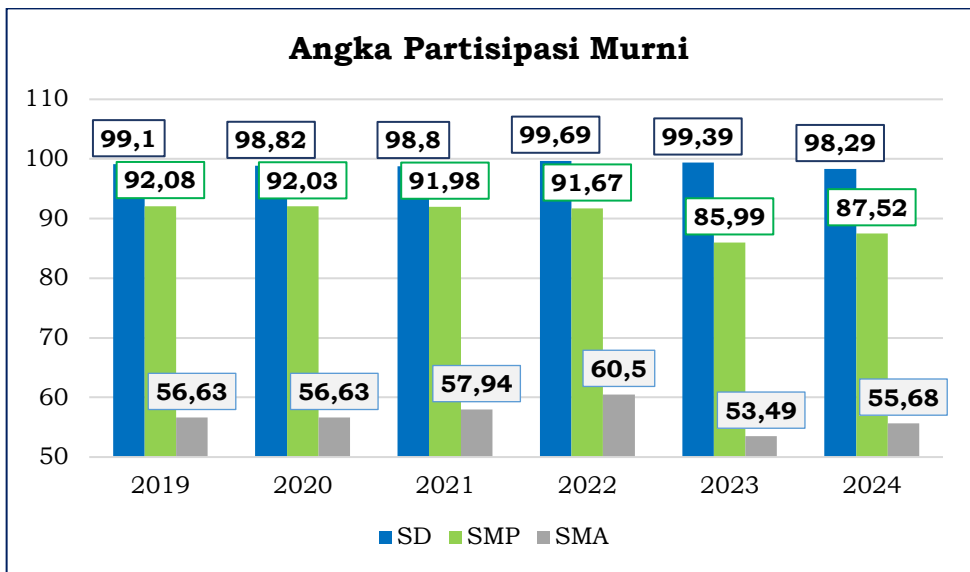
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah sesuai pada jenjang pendidikan yang dijalani tanpa melihat kesesuaian kelompok usia dengan jenjang pendidikan seharusnya. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, APK di Kabupaten Barito menunjukkan tren yang relatif stabil pada jenjang SD. Ini menandakan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia sekolah dasar. Sementara itu, APK jenjang SMP mengalami fluktuasi dengan penurunan bertahap dari 105,92% pada 2019 menjadi 99,05% pada 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyempitan akses. Pada jenjang SMA, APK mengalami peningkatan dari 82,86% pada tahun 2019 menjadi 90,99% pada tahun 2024, tetapi capaian ini masih menunjukkan tantangan dalam

menjangkau seluruh kelompok usia sekolah menengah atas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan intervensi pada jenjang SMP dan terutama SMA, baik dari sisi ketersediaan layanan pendidikan maupun strategi retensi siswa. Perkembangan APK Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019 hingga 2024 digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 2. 25 Grafik Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah
Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2025, diolah

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu secara tepat waktu sesuai dengan kelompok usianya. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir terhitung dari 2019 hingga 2024, APM di Kabupaten Barito memperlihatkan capaian tinggi dan relatif stabil pada jenjang SD sepanjang 2019–2024 dengan angka di atas 98% yang mencerminkan efektivitas dalam menjangkau anak usia sekolah dasar sesuai kelompok umur. Namun, APM SMP menunjukkan sedikit penurunan dari 92,08% pada 2019 menjadi 87,52% pada 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa usia SMP secara konsisten. Pada jenjang SMA meskipun sempat mengalami peningkatan hingga 60,5% pada 2022, tren menurun kembali terjadi pada 2023 sebelum sedikit membaik pada 2024. Capaian APM SMA yang masih di bawah 60% pada sebagian besar tahun menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketercapaian pendidikan menengah atas usia tepat. Strategisnya, dibutuhkan fokus kebijakan yang memperkuat transisi dan keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA serta penguatan intervensi berbasis inklusivitas dan keadilan akses.



Gambar 2. 26 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dan Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2024, diolah

2.2.3.8. Standar Kompetensi Pendidik

Standar kompetensi pendidik bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, standar kompetensi pendidik dapat diukur melalui dua indikator, yaitu persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan. Indikator ini penting untuk mengukur tingkat kualifikasi pendidikan tenaga pengajar yang dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tren perkembangan persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, pada tahun 2022, sedikit terjadi penurunan pada Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP/ SMPLB dan SMA/ SMK/ SMALB.

Sementara itu, persentase guru yang tersertifikasi mengalami tren yang fluktuatif. Persentase guru yang tersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan proporsi guru yang telah mendapatkan sertifikasi profesional sebagai guru dibandingkan dengan jumlah total guru di suatu wilayah atau lembaga pendidikan. Sertifikasi guru adalah proses formal yang memastikan bahwa seorang guru memiliki kompetensi, pengetahuan,

dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada tahun 2022, guru yang tersertifikasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan pada kompetensi pendidik di jenjang Paud, SMA, dan SMK. Dalam hal ini, Guru yang tersertifikasi di jenjang SMK mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu menjadi 62,7%. Sementara itu, Guru yang tersertifikasi di jenjang SLB dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren penurunan hingga hanya mencapai 9,5% di tahun 2022. Berikut merupakan detail persentase kompetensi pendidik di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019-2022.

Tabel 2. 29 Persentase Kompetensi Pendidik

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)					
1	SD/ SDLB	83,7	36,4	92,1	93,3
2	SMP/ SMPLB	85,7	90	94,3	94,1
3	SMA/ SMK/ SMALB	94,45	84,2	97,3	97,1
Guru yang tersertifikasi (%)					
1	Paud	12,9	6,1	2,4	3,2
2	SD/ Sederajat	47,3	37,9	36,0	34,1
3	SMP/ Sederajat	35,6	27,6	25,9	25,1
4	SMA	35,1	29,2	23,5	24,3
5	SMK	39,5	40,5	37,1	62,7
6	SLB	28,6	22,7	17,9	9,5

Sumber: Profil Pendidikan 2022 Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dalam pembangunan daerah, perlindungan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang dinamis. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.4.1. Cakupan Kepersetaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam capaian jaminan kesehatan, persentase Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan maupun non BPJS Ketenagakerjaan mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan mencakup sebesar 22,93 persen dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BPJS

Kesehatan mencakup sebesar 20,92 persen. Lebih lanjut, penggunaan jaminan kesehatan dari Jamkesda memiliki tren peningkatan, yaitu sebesar 3,76 persen di tahun 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan jaminan kesehatan milik perusahaan/ kantor yang mengalami tren penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 2,2 persen. Di sisi lain, Asuransi swasta mengalami tren penurunan hingga 0 persen yang berarti bahwa penduduk Barito Selatan tidak memakai jaminan kesehatan melalui asuransi swasta.

Tabel 2. 30 Capaian Jaminan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan	44,79	42,84	30,01	22,84	22,93
2.	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BPJS Kesehatan	19,52	18,88	20,03	19,06	20,92
4.	Jamkesda	0,07	1,61	1,86	3,76	-
5.	Asuransi Swasta	0,00	0,04	0	0	-
6.	Perusahaan/ Kantor	1,30	5,14	2,89	4,09	2,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.2.5. Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat mencerminkan orientasi kehidupan beragama yang tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memberikan kemanfaatan nyata bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang religius, tetapi terbuka, menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan moral. Sementara itu, berkebudayaan maju merujuk pada penguatan identitas lokal melalui pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya. Selain itu, kebudayaan juga dikembangkan secara adaptif agar selaras dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, termasuk melalui digitalisasi konten budaya, promosi budaya lokal ke kancah nasional dan internasional, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten Barito Selatan memiliki tren tingkat kerukunan yang relatif stabil dengan kecenderungan membaik, mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan lintas agama. Peningkatan indeks ini tidak lepas dari peran aktif organisasi masyarakat, tokoh agama, serta dukungan



pemerintah daerah dalam mendorong dialog antarumat, menjaga komunikasi yang harmonis, dan mengelola potensi konflik secara preventif. Program pembinaan kehidupan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah, serta kegiatan lintas iman secara berkala turut memperkuat ikatan sosial antar pemeluk agama di wilayah ini.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan di bidang seni budaya memiliki hubungan erat dengan kualitas hidup masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai jenis seni dan budaya. Berdasarkan data perkembangan seni dan kebudayaan daerah, jumlah grup kesenian setiap tahunnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini diduga disebabkan oleh perubahan budaya dan kesadaran masyarakat terhadap seni yang masih belum memadai. Cagar budaya juga menjadi salah satu indikator dalam perkembangan seni dan kebudayaan. Di Kabupaten Barito Selatan, jumlah cagar budaya yang dipelihara hampir tetap setiap tahunnya, yaitu sekitar 490 unit.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerak utama pembangunan. Keluarga berkualitas menjadi fondasi, sementara kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk mengatasi ketimpangan peran serta akses antara laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kesetaraan dan inklusivitas, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, berdaya, dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai tantangan.

2.2.6.1. Perlindungan Anak dan Perempuan

Kemajuan dalam pembangunan perlindungan anak di Indonesia dapat diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mencakup

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indikator-indikator ini dirancang berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup hak-hak sipil dan kebebasan; hak-hak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak-hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak-hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak. Berikut ini adalah perbandingan capaian nilai IPA, IPHA, dan IPKA untuk tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2. 31 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kabupaten Barito Selatan

No	Keterangan	2022			2023		
		IPA	IPHA	IPKA	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Barito Selatan	58,45	53,72	78,43	54,05	51,32	70,73
2	Provinsi Kalimantan Tengah	59,56	54,25	80,51	60,37	55,22	80,61
3	Nasional	63,30	60,33	75,21	63,83	60,75	75,72

Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak, 2023-2024

Berdasarkan capain hasil pada tahun 2023, Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam salah satu daerah dengan capaian IPA dan IPHA terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah. Nilai IPA mengalami penurunan sebesar 4,4 poin dari 58,45 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perlindungan anak di Barito Selatan masih memerlukan peningkatan.

Lebih lanjut, nilai IPHA di Barito Selatan mengalami penurunan sebesar 2,4 poin dari 53,72 pada tahun 2022 menjadi 51,32 pada tahun 2023. Nilai IPHA yang rendah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang masih perlu ditingkatkan.

Barito Selatan menunjukkan pencapaian yang lebih baik jika dilihat dalam aspek perlindungan khusus anak dengan nilai IPKA sebesar 78,43 pada tahun 2022. Meskipun demikian, nilai IPKA mengalami penurunan sebesar 7,7 poin menjadi 70,73 pada tahun 2023. Penurunan yang sangat

drastis ini harus menjadi perhatian yang cukup serius. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal sehingga dapat berpotensi dalam menghambat pencapaian target pembangunan manusia dan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan adanya evaluasi dan perbaikan strategi maupun penguatan infrastruktur perlindungan anak.

2.2.6.2. Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menjamin bahwa setiap keluarga memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan sanitasi. Di Indonesia, pembangunan keluarga diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini mengukur kualitas keluarga berdasarkan tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga menjadi tangguh, berkembang, atau rentan.

Pada tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Barito Selatan sebesar 61,98 yang berada pada kategori berkembang. Hal ini menandakan bahwa sebuah keluarga berada dalam proses pembangunan dan menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu perbaikan. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, dapat dilihat peringkat nilai iBangga dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan memiliki nilai iBangga sebesar 62,51. Angka ini menempatkan Barito Selatan di posisi keempat dalam peringkat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Dengan nilai iBangga 62,51, Barito

Selatan berada di atas nilai rata-rata provinsi yang tercatat sebesar 62,60. Meskipun tidak berada di posisi teratas, Barito Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal inisiatif pembangunan dan kinerja pemerintah daerah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain yang memiliki nilai lebih rendah, seperti Kabupaten Gunung Mas (59,76) dan Kabupaten Pulang Pisau (59,19). Namun, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki nilai lebih tinggi dari Barito Selatan, seperti Kabupaten Barito Utara dengan nilai iBangga 65,83 dan Kota Palangkaraya dengan nilai 65,03 yang menandakan perlunya peningkatan lebih lanjut dalam berbagai aspek agar Barito Selatan dapat lebih bersaing dan meningkatkan posisinya dalam peringkat provinsi.

Tabel 2. 32 Capaian i-Bangga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	iBangga
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	64,49
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	63,67
3	Kabupaten Kapuas	56,67
4	Kabupaten Barito Selatan	62,51
5	Kabupaten Barito Utara	65,83
6	Kabupaten Katingan	64,00
7	Kabupaten Seruyan	63,12
8	Kabupaten Sukamara	65,85
9	Kabupaten Lamandau	64,56
10	Kabupaten Gunung Mas	59,76
11	Kabupaten Pulang Pisau	59,19
12	Kabupaten Murung Raya	64,16
13	Kabupaten Barito Tiur	63,34
14	Kaota Palangkaraya	65,03
Provinsi Kalimantan Tengah		62,2

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2024

2.2.6.3. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender dan perlindungan anak merupakan tujuan utama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam upaya mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, perlu adanya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif



di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja diantaranya adalah menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator untuk melihat tingkat kesenjangan gender pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Jika nilai IKG semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan, begitupula sebaliknya. Nilai IKG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perubahan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IKG mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2022. Selanjutnya, dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,529. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang semakin baik di Kabupaten Barito Selatan. IPG digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Kondisi IPG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Nilai IPG pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dari 92,04 hingga 91,78. Pada tahun 2021 hingga 2023, IPG mengalami kenaikan menjadi 92,29. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk memperlihatkan kondisi sejauh mana peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Kondisi IDG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya tetapi jika dilihat dari perbandingan pada tahun awal (2019) dengan tahun akhir (2023) mengalami perkembangan yang stagnan yaitu sama sama menunjukkan angka 86,33. Pada dasarnya semakin tinggi nilai IPG dan IDG maka semakin rendah nilai IKG. Kondisi ini sudah sesuai dengan capaian angka

IPG dan IDG yang ada di Kabupaten Barito Selatan, yakni dibuktikan dengan kenaikan angka IPG dan IDG setiap tahunnya. Berikut merupakan data terkait capaian indikator kinerja terkait dengan kesetaraan gender di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 2. 33 Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,555	0,566	0,55	0,558	0,529
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,04	91,92	91,78	92,03	92,29
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	86,33	86,05	86,17	86,34	86,33

Sumber: BPS Kalteng, BPS Barito Selatan, dan DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah. Daya saing di Kabupaten Barito Selatan mencakup beberapa aspek, yaitu kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu dalam suatu wilayah untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun global, melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas. Peningkatan daya saing SDM penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berusia 0 – 14 tahun dan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas (disebut sebagai non-angkatan kerja) dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini berfungsi sebagai indikator kasar untuk menilai keadaan ekonomi suatu negara. Rasio Ketergantungan adalah salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung penduduk yang belum dan yang tidak lagi produktif. Sebaliknya, semakin

rendah persentase Rasio Ketergantungan, semakin kecil beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung penduduk non-produktif. Berdasarkan data pada tabel di bawah, Kabupaten Barito Selatan mengalami tren penurunan dalam angka ketergantungan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Barito Selatan mempunyai beban yang semakin rendah kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Tabel 2. 34 Angka Ketergantungan Kabupaten Barito Selatan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-14 tahun	37.649	31.700	31.174	30.700	31.550	31.630
15-64 tahun	93.699	92.500	93.188	93.699	95.000	95.630
> 64 tahun	5.448	6.900	7.244	7.598	8.150	8.650
Rasio Ketergantungan	46,00	41,73	41,23	40,87	41,79	42,11

Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2020-2024, diolah

2.3.1.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan wilayah yang dapat dipertimbangkan dari dua aspek yaitu kualitas dan kuantitas. Berkaitan dengan indikator angkatan kerja, aspek kuantitas menunjukkan seberapa banyak penduduk usia produktif yang mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara itu, aspek kualitas menunjukkan mutu pendidikan yang menyangkut kemampuan tenaga kerja. Wilayah dengan angkatan kerja yang lebih terdidik cenderung memiliki kemampuan dalam meningkatkan pembangunan wilayah sehingga mampu berdaya saing dari sisi sumber daya manusia.

Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Barito menunjukkan perubahan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SD, yaitu mencapai 32,87%. Sementara itu, tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SMA, yaitu mencapai angka 33,67% pada tahun 2024. Jika dilihat secara keseluruhan, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, masih diperlukan adanya upata untuk meningkatkan kualitas SDM karena lulusan pada jenjang perguruan tinggi mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang

awalnya mencapai angka 16,32% pada tahun 2020m kemudian menurun menjadi 14,21% pada tahun 2023.

Tabel 2. 35 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	21.964	32,87	4.336	6,53	22.944	32,82	21.213	31,28	23.253	32,32
Sekolah Menengah Pertama	15.595	23,34	31.546	47,48	15.865	22,69	12.715	18,75	14.233	19,78
Sekolah Menengah Atas	18.349	27,46	19.543	29,41	22.445	32,1	25.987	38,32	24.225	33,67
Perguruan Tinggi	10.904	16,32	11.014	16,58	8.663	12,39	7.908	11,66	10.225	14,21
Jumlah	66.812	100	66.439	100	69.917	100	67.823	100	71.956	100

Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka, diolah

Analisis terhadap indikator bukan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan juga penting dalam menunjukkan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan. Sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan hanya sampai SD dengan nilai 41,44 % pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dengan pendidikan rendah cenderung tidak bekerja yang mengindikasikan terdapat keterbatasan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, jumlah lulusan SMP yang tidak bekerja cenderung berkurang dari 2021 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan SMP mulai mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka. Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam kelompok bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024, lulusan SMA dengan nilai 26,78% dan lulusan Perguruan Tinggi dengan nilai 2,80% yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, idealnya semakin besar peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja sehingga meningkatkan daya saing sumber daya manusia secara keseluruhan.

Tabel 2. 36 Jumlah Bukan Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	14.514	39,78	4.180	10,94	13.664	37,91	14.520	40,86	13.471	41,44
Sekolah Menengah Pertama	11.587	31,76	22.522	58,93	12.546	34,81	11.917	33,53	9.583	29,48
Sekolah Menengah Atas	8.229	22,55	9.744	25,5	8.110	22,5	8.000	22,51	8.545	26,28
Perguruan Tinggi	2.155	5,91	1.773	4,64	1.719	4,77	1.102	3,1	911	2,80
Jumlah	36.485	100	38.219	100	36.039	100	35.539	100	32.510	100

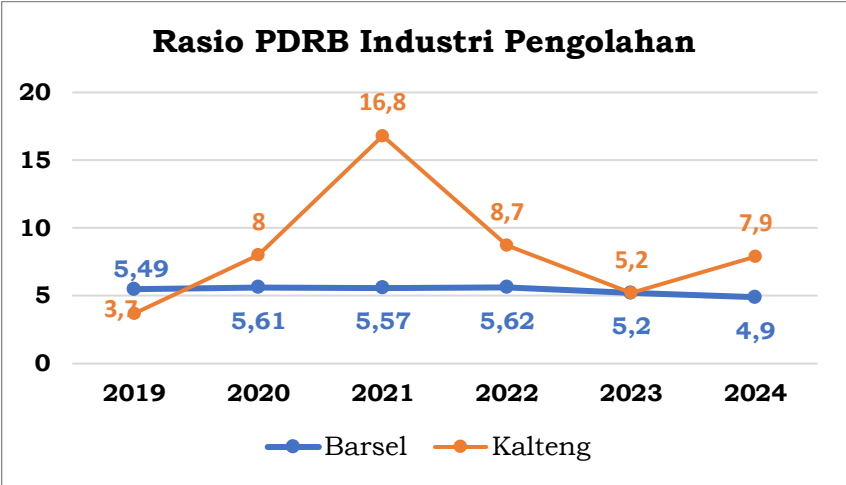
Sumber: Kabupaten Barito dalam Angka, diolah

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi diukur melalui rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan kondisi ketenagakerjaan. Berikut merupakan masing-masing penjelasan dari setiap indikator.

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

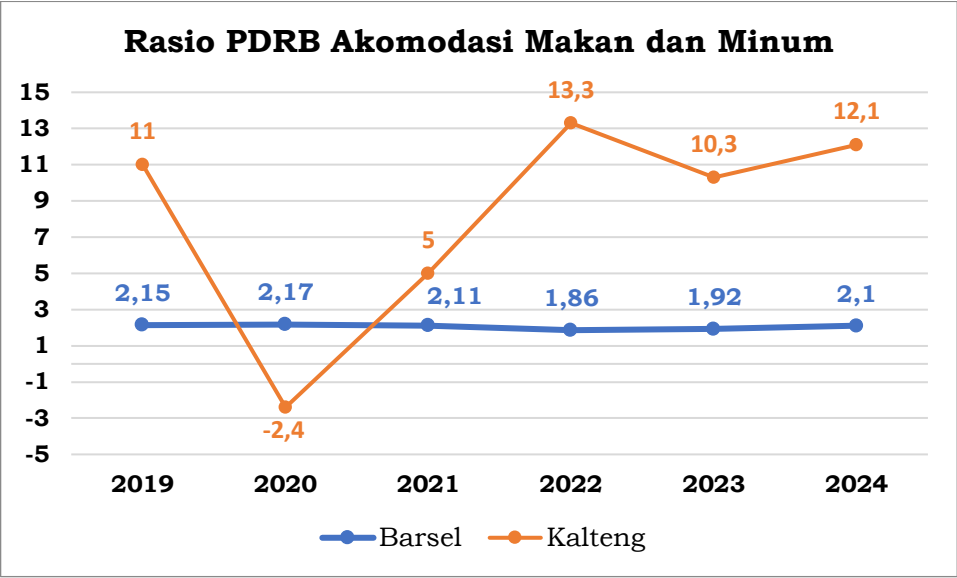
Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan peran dan signifikansi sektor manufaktur dalam perekonomian daerah.



Gambar 2. 27 Grafik PDRB Industri Pengolahan
Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka, diolah

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai peran sektor pariwisata dan jasa kuliner dalam perekonomian daerah.



Gambar 2. 28 Grafik PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka, diolah

2.3.2.3. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Rasio PDRB ekonomi kreatif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB suatu daerah. Indikator ini mencerminkan peran dan potensi sektor kreatif, seperti desain, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dan industri digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi yang inovatif, berbasis kreativitas, dan bernilai tambah.

2.3.2.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah wirausaha terhadap total angkatan kerja atau jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai dinamika dan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru, inovasi usaha, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin kuat pula potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, baik penduduk yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan terhadap penduduk yang merupakan angkatan kerja. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, TPAK Kabupaten Barito Selatan

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	359	86	445
4	Buruh/karyawan/pegawai	16.113	9.891	26.004
5	Pekerja bebas	5.884	865	6.749
6	Pekerja keluarga/ tak dibayar	3.040	4.453	7.493
Jumlah		42.811	26.191	69.002

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan Ekonomi Hijau adalah upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial. Dalam penerapannya, ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, ekonomi hijau juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah berjalan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indeks ini mencerminkan tingkat efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, indeks ekonomi hijau dapat mencakup berbagai indikator seperti intensitas emisi gas rumah kaca, rasio energi terbarukan, efisiensi energi, kualitas lingkungan hidup, hingga jumlah lapangan kerja hijau. Pengembangan dan pemanfaatan indeks ini menjadi penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, berketahanan, dan berdaya saing. Untuk Kabupaten Barito Selatan, Indeks Ekonomi Hijau menggunakan 5 Proksi yakni produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri pengolahan, produktivitas, sektor tersier, proporsi tenaga kerja di sektor tersier dan proporsi tengaka kerja di sektor pertambangan dan penggalian.



2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merujuk pada perubahan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup digitalisasi data, integrasi sistem informasi, serta pengembangan infrastruktur, dan sumber daya manusia berbasis teknologi. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Selain itu, transformasi ini juga membuka peluang inovasi di berbagai sektor pembangunan guna menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

2.3.4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan infrastruktur, akses, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini tersusun atas tiga subindeks utama, yaitu akses TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Saat ini, pengukuran IP-TIK masih dilakukan pada level provinsi sehingga belum tersedia data spesifik untuk tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil pengukuran terakhir, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori sedang yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemanfaatan teknologi digital di wilayah ini masih memerlukan penguatan untuk mendukung transformasi digital secara optimal.

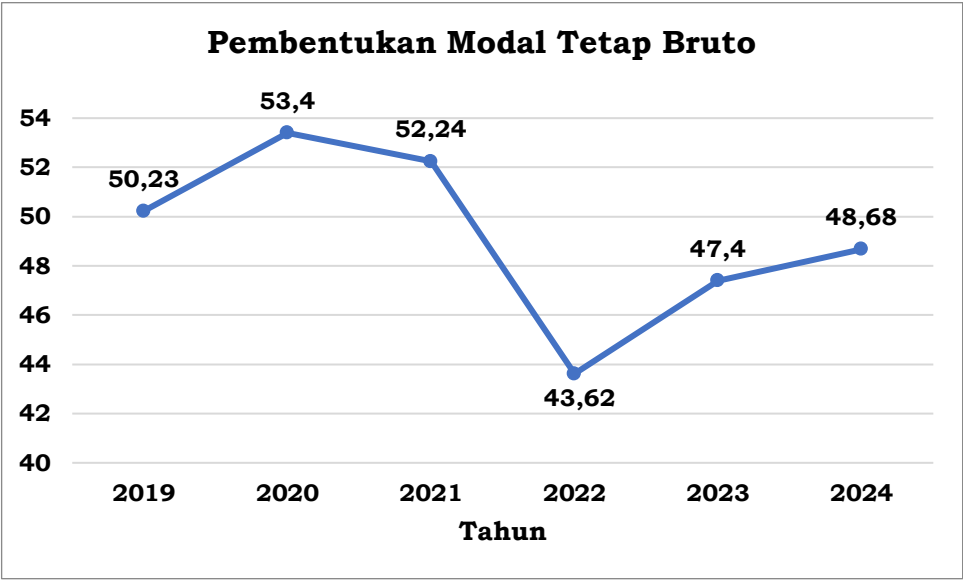
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merujuk pada keterhubungan antara perekonomian suatu daerah dengan pasar internasional, baik melalui perdagangan, investasi, maupun arus barang, jasa, dan modal. Proses ini memungkinkan daerah untuk memanfaatkan peluang global, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi asing serta mendorong pengembangan sektor ekonomi domestik yang lebih terbuka dan inovatif. Integrasi ini penting untuk memperkuat

pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

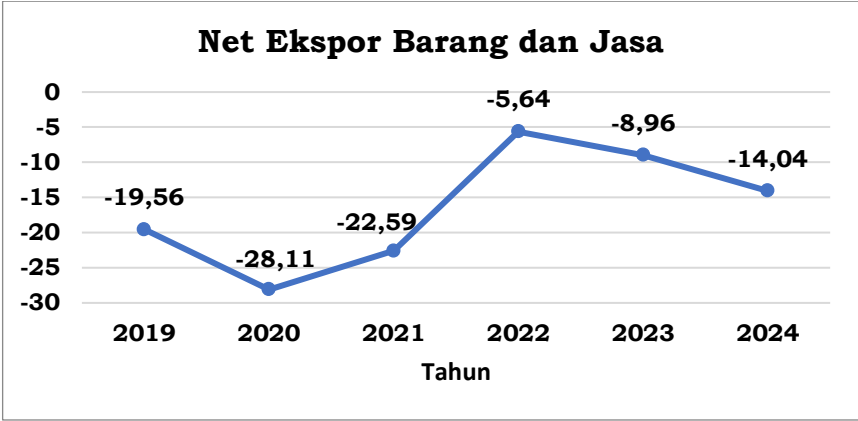
Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan , pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli barang modal bekas pada pihak lain. Kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan tingkat investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan peralatan. Jika PMTB naik, hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan pelaku ekonomi, ekspansi kapasitas produksi, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika PMTB turun, itu bisa mencerminkan penurunan investasi akibat ketidakpastian ekonomi, efisiensi belanja, atau perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. Kondisi di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan adanya peningkatan positif dari tahun 2022 hingga 2024.



Gambar 2. 30 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Barito Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan 2024, diolah

2.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Net ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen penting yang merupajan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Kondisi di Barito Selatan mengalami defisit perdagangan dari tahun 2019 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan Kabuapten Barito Selatan masih memiliki ketergantungan pada barang atau jasa dari luar wilayah.



Gambar 2. 31 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan 2024, diolah

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan masing-masing memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi meskipun dengan karakteristik dan kontribusi yang berbeda. Perkotaan memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih berkembang, dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, serta inovasi. Kota-kota besar menjadi pusat ekonomi karena memiliki akses lebih baik terhadap pasar, teknologi, serta investasi. Selain itu, adanya berbagai sektor jasa, seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan, menjadikan kota sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Kemampuan kota untuk menarik tenaga kerja terampil dan investasi membuatnya menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, perdesaan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang menjadi basis utama perekonomian banyak negara berkembang. Perdesaan berperan sebagai penyedia bahan baku dan sumber daya alam yang mendukung industri di



perkotaan serta memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti pengolahan hasil pertanian, pariwisata berbasis alam, dan ekowisata, perdesaan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sinergi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting. Pembangunan yang inklusif dengan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Perkotaan dapat mendukung perdesaan dengan menyediakan akses pasar dan teknologi, sedangkan perdesaan dapat menyediakan bahan baku dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh kota. Dengan demikian, baik perkotaan maupun perdesaan saling mendukung untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

2.3.7.1. Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sampai saat ini, data resmi mengenai Indeks Infrastruktur Daerah (IID) atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) khusus untuk Kabupaten Barito Selatan belum tersedia secara publik. Akan tetapi, perhitungan terhadap IID dan IKLI penting untuk dilakukan dalam rangka memantau perkembangan infrastruktur daerah dan sejauh mana infrastruktur tersebut berdampak bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Indeks Infrastruktur Daerah (IID) merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar di suatu wilayah atau daerah. Indeks ini biasanya digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur secara kuantitatif dan komparatif antar wilayah serta sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Komponen umum yang dikaji dalam indeks ini terdiri atas transportasi, yakni kondisi dan panjang jalan serta jembatan dan sarana transportasi lainnya; energi dan listrik, yaitu rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik dan keandalan pasokan listrik di daerah; air bersih dan sanitasi berupa akses rumah tangga terhadap air

bersih dan fasilitas sanitasi layak; telekomunikasi dan internet melalui akses terhadap layanan telekomunikasi dan jaringan internet; serta perumahan dengan kualitas dan ketersediaan rumah layak huni. IID bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan infrastruktur antardaerah, mendorong pemerataan pembangunan, menjadi acuan kebijakan dan perencanaan anggaran, menilai efektivitas pembangunan infrastruktur, serta mendukung daya siang daerah.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini memberikan gambaran objektif, komprehensif, dan kredibel mengenai persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, serta manfaat infrastruktur yang ada. Tujuan dari pengukuran IKLI diharapkan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah melalui efektivitas pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, menjadi dasar dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kepuasan masyarakat. Komponen dalam penilaian IKLI adalah:

1. Ketersediaan fisik (availability)

Menilai sejauh mana infrastruktur tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

2. Kualitas fisik (quality)

Mengukur kondisi fisik dan keandalan infrastruktur yang ada.

3. Kesesuaian (appropriateness)

Menilai apakah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Pemanfaatan (utility)

Mengukur tingkat penggunaan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari infrastruktur tersebut.

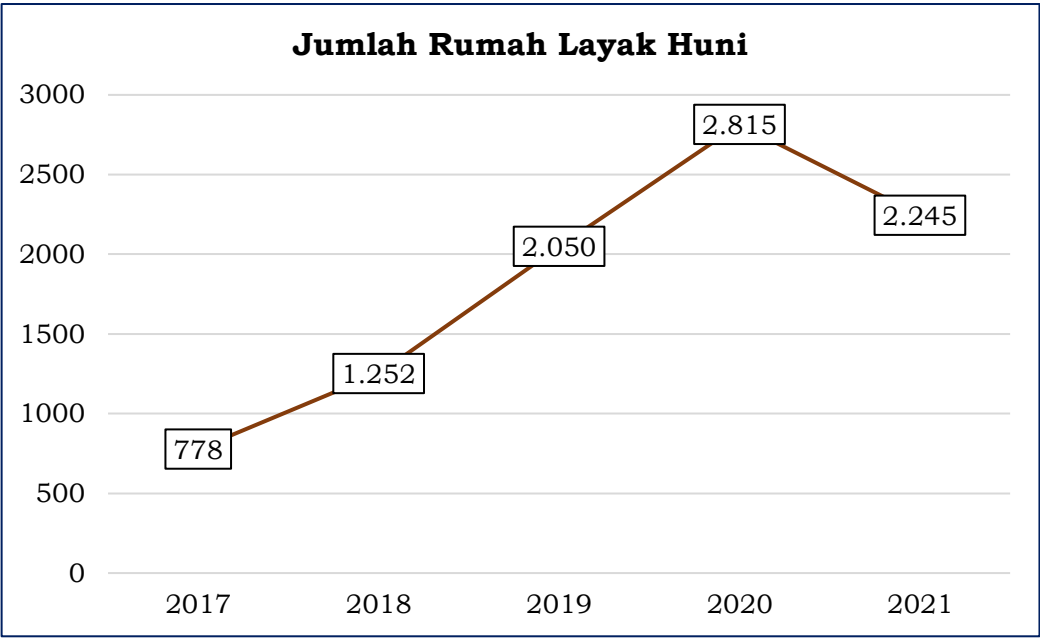
5. Kontribusi terhadap perekonomian

Menilai dampak infrastruktur terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

2.3.7.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator rumah layak huni adalah serangkaian standar atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah rumah memenuhi syarat untuk memberikan kondisi hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi penghuninya. Di Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, upaya peningkatan jumlah rumah layak huni (RLH) terus dilakukan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman. Pada tahun 2022, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pembangunan 98 unit rumah layak huni di Kabupaten Barito Selatan, khususnya di Kecamatan Dusun Selatan.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Barito Selatan juga melaksanakan program rehabilitasi RTLH dengan menyerahkan bantuan pembangunan baru rumah korban bencana dan rehabilitasi RTLH pada tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dilakukan di berbagai desa, termasuk Desa Mabuan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Program-program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam meningkatkan jumlah rumah layak huni dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.



Gambar 2. 32 Grafik Rumah Layak Huni (unit)
Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

2.3.7.3. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri adalah indikator yang menunjukkan proporsi desa dengan status "mandiri" dibandingkan dengan total jumlah desa dalam suatu wilayah tertentu. Status desa ini biasanya merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan keberlanjutan yang tinggi dalam tiga aspek utama: Ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan.

Tabel 2. 38 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Barito Selatan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Mandiri	TAD	TAD	TAD	TAD	3

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2024

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kestabilan indikator ekonomi utama seperti inflasi dan rasio pajak daerah yang mencerminkan ketahanan ekonomi suatu daerah. Kondisi ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung kebijakan pembangunan yang efektif.

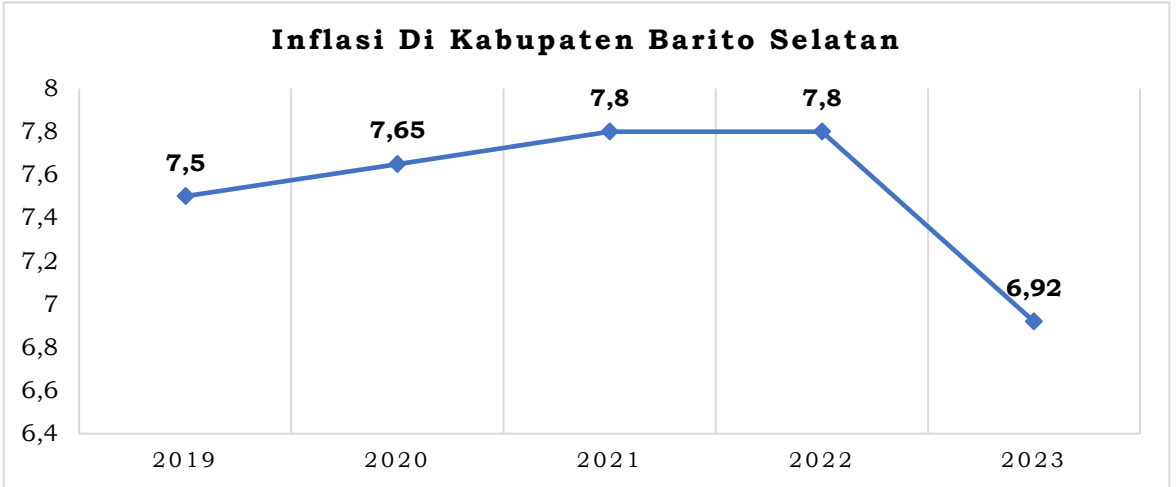
2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui penerimaan pajak lokal yang tidak tergantung pada transfer dari pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak untuk mendanai pembangunan tanpa bergantung pada sumber dana eksternal. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB juga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pajak serta kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung program pembangunan.

2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Secara umum, inflasi adalah penurunan nilai mata uang dalam kaitannya dengan harga barang dan jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga

menyebabkan penurunan nilai mata uang. Inflasi berkaitan erat dengan penawaran dan permintaan serta harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di wilayah tertentu. Inflasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Perubahan inflasi dikenal sebagai laju inflasi. Berdasarkan laju inflasi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019-2022, terdapat tren peningkatan. Pada tahun 2022, laju inflasi mencapai 7,80 persen yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 6,32 persen. Namun, Inflasi di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, begitupun dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Turunnya inflasi pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh penurunan harga di beberapa kelompok barang dan jasa, seperti transportasi, makanan, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga.



Gambar 2. 33 Grafik Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Barito Selatan
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan 2024, diolah

2.3.8. Daya Saing Iklim Berinvestasi

Fokus pada iklim investasi bertujuan untuk menilai situasi dan kondisi suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi investasi.

2.3.8.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Salah satu indikator yang digunakan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa iklim investasi di wilayah tersebut baik, karena mampu menghasilkan output yang besar dibandingkan dengan nilai investasi yang dilakukan.

Tabel 2. 39 Incremental Capital Output Ratio Nasional

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kalimantan Tengah	6.99	-27.75	11.43	6.04	9.31
2.	Nasional	6.87	-15.12	8.94	6.25	6.51
3.	Barito Selatan	9.33	-15.01	21.00	7.02	13.21

Sumber: BPS, BPS Kalteng, BPS Barito Selatan, diolah

Pada tahun 2023, nilai ICOR di Kabupaten Barito Selatan mencapai 13,21 yang merupakan nilai tertinggi dalam periode 2018-2023. Nilai ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional. Tren ini telah konsisten sejak tahun 2018. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi, seperti mempersiapkan regulasi yang tepat, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan modal yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan dapat digunakan untuk menghasilkan output secara optimal.

2.3.8.2. Realisasi Investasi

Kondisi daya saing iklim investasi di Kabupaten Barito Selatan dapat dievaluasi dari realisasi investasi baik dari nilai investasi maupun jumlah investor yang berinvestasi di daerah tersebut. Pada tahun 2022, jumlah investor meningkat menjadi 44 dari sebelumnya 38 di tahun 2021. Namun, nilai investasi yang masuk justru menurun menjadi Rp468 miliar dibandingkan dengan Rp1,3 triliun pada tahun 2021. Meskipun ada peningkatan jumlah investor, Kabupaten Barito Selatan perlu meningkatkan infrastruktur ekonomi untuk menarik investasi dengan nilai yang lebih tinggi.

Tabel 2. 40 Jumlah Investor dan Nilai Investasi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor	28	14	38	44	49
2	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Rp978.396	Rp103.729	Rp1.373.916	Rp468.975	Rp666.735

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai penyedia layanan umum hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dilandasi pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) memerlukan sebuah sistem yang adaptif dan kelembagaan yang berintegritas. Upaya memwujudkan tata kelola efekti dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Hukum, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Integritas Nasional.

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi hukum pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Penilaian IRH dilakukan berdasarkan empat variabel utama, yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi regulasi; mendorong reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; mendorong penyederhanaan regulasi di setiap jenjang peraturan; serta meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan (legal drafter) di pusat dan daerah.

Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Barito Selatan sedang dalam proses pendampingan dan verifikasi data dukung yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Proses ini melibatkan penilaian terhadap beberapa variabel seperti

koordinasi regulasi, kompetensi ASN perancang peraturan, kualitas re-regulasi, dan penataan database peraturan perundang-undangan.

2.4.1.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Berdasarkan tabel di bawah ini, tren indeks SPBE Kabupaten Barito Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai SPBE berada pada kategori cukup. Kemudian, pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan nilai SPBE sebesar 3,19 atau kategori baik. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi se-kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya pencapaian ini merupakan salah satu komitmen keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatn teknologi informasi.

Tabel 2. 41 Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,28	2,37	3,19

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indeks ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa pelayanan publik sudah diberikan kepada masyarakat. Menurut Permen PANRB No.4 Tahun 2023 beberapa komponen utama yang digunakan dalam penyusunan pelayanan publik antara lain yaitu:



kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan, inovasi pelayanan, dan kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan Perbub Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan nilai baik untuk indeks pelayanan publik dan telah menyusun indeks kepuasan masyarakat. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan sebesar 2,36 atau berada pada klasifikasi cukup memadai tetapi perlu adanya peningkatan pada tahun 2022.

2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya indeks ini yaitu untuk menggambarkan integritas organisasi publik, mengidentifikasi faktor-faktor integritas, dan untuk mengukur kinerja organisasi dalam hal integritas. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam salah satu dari empat Kabupaten dengan Indeks Integritas Nasional terendah se Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun data INN pada tahun 2022 sebesar 67,44% yang masih berada di bawah rata-rata INN di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 70,6%.

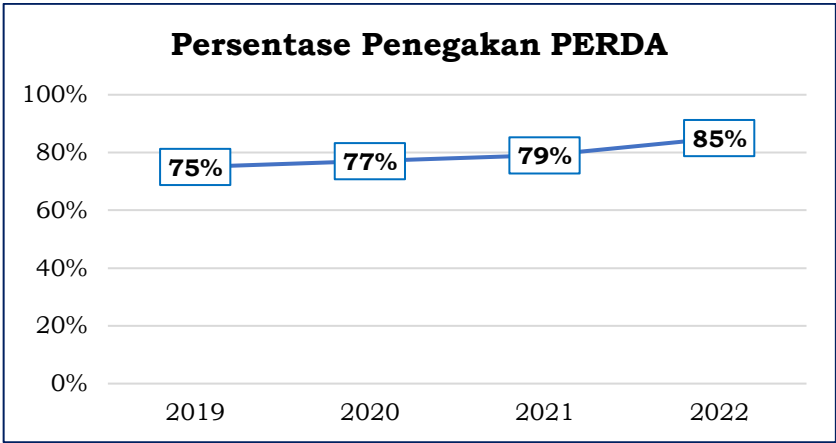
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari terciptanya tatanan hukum yang berkeadilan, sistem keamanan yang tangguh, serta praktik demokrasi yang substansial. Komitmen untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat yang tidak diskriminatif, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia menjadi prioritas untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Praktik demokrasi di Barito Selatan tidak hanya berorientasi pada proses elektoral, tetapi juga menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2.4.2.1. Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lokal, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu menjalankan Perda secara konsisten, adil, dan berdampak.

Tren persentase penegakan Perda di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, persentase penegakan Perda tercatat sebesar 75%, kemudian mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 77% di tahun 2020, 79% di tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada 85% di tahun 2022. Tren ini mencerminkan penguatan kapasitas aparatur penegak Perda, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam menegakkan aturan daerah. Capaian ini menjadi indikator positif dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepatuhan hukum.



Gambar 2. 34 Grafik Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

2.4.2.2. Capaian Aksi HAM

Kabupaten Barito Selatan menunjukkan komitmen yang semakin progresif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui implementasi Aksi HAM yang terintegrasi dengan



pembangunan daerah. Pemerintah daerah secara konsisten berupaya memenuhi pemenuhan hak atas pelayanan publik, hak perempuan dan anak, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meski tantangan masih ada, seperti pemerataan layanan dan penyempurnaan regulasi turunan, capaian Aksi HAM di Barito Selatan mencerminkan arah kebijakan yang responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan inklusivitas.

2.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Kondisi demokrasi di Kabupaten Barito Selatan secara umum menunjukkan tren yang positif pada indikator-indikator turunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), seperti kebebasan sipil, partisipasi politik, dan fungsi lembaga demokrasi. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah mendorong iklim politik yang lebih terbuka, inklusif, dan partisipatif, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Meski demikian, beberapa aspek seperti penguatan kapasitas partai politik lokal dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hak sipil tetap menjadi tantangan. IDI menjadi tolok ukur penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan yang lebih demokratis dan akuntabel.

2.4.2.4. Indeks Rasa Aman

Rasa Aman merupakan cerminan dari persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kondisi keamanan di wilayah tempat tinggalnya baik dari ancaman kriminalitas maupun gangguan ketertiban sosial. Upaya preventif dan represif terhadap tindak kejahatan, penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, serta peningkatan respons layanan pengaduan publik turut berkontribusi dalam membangun rasa aman yang lebih merata di seluruh kecamatan. Selain itu, hadirnya ruang publik yang lebih terbuka, penerangan jalan yang memadai, dan pengawasan sosial yang kuat memperkuat persepsi keamanan di tengah masyarakat. Indeks Rasa Aman yang terus membaik menjadi fondasi penting dalam mendorong produktivitas sosial, keberlanjutan ekonomi lokal, dan ketahanan sosial.

Data tindak pidana di Kabupaten Barito Selatan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk mengalami fluktuasi dengan kenaikan signifikan pada tahun 2020 (8,9), lalu menurun secara bertahap hingga stabil di angka 6,5

pada 2023 dan 2024. Adapun pada risiko penduduk terkena kejahatan, sejak tahun 2022 tercatat sebesar 91 per 100.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 85 pada 2023, tetapi kembali naik ke angka 95 pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan eksposur masyarakat terhadap kejahatan, meski pada saat yang sama upaya penanganan kasus terus diperbaiki. Persentase penyelesaian kejahatan mencerminkan hal tersebut dengan capaian tertinggi pada 2022 sebesar 91,2%, sempat menurun di tahun 2023 (75,21%), lalu kembali membaik menjadi 81,67% pada 2024. Secara keseluruhan, ini menggambarkan bahwa meskipun tantangan dalam menjaga keamanan masih terjadi, kinerja penegakan hukum menunjukkan respons adaptif yang cukup baik untuk menjaga rasa aman masyarakat.

Tabel 2. 42 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk	6,5	8,9	7,6	8,6	6,5	6,5
2	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	-	-	-	91	85	95
3	Persentase Penyelesaian Kejahatan	-	-	-	91,2	75,21	81,67

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025

2.4.2.5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

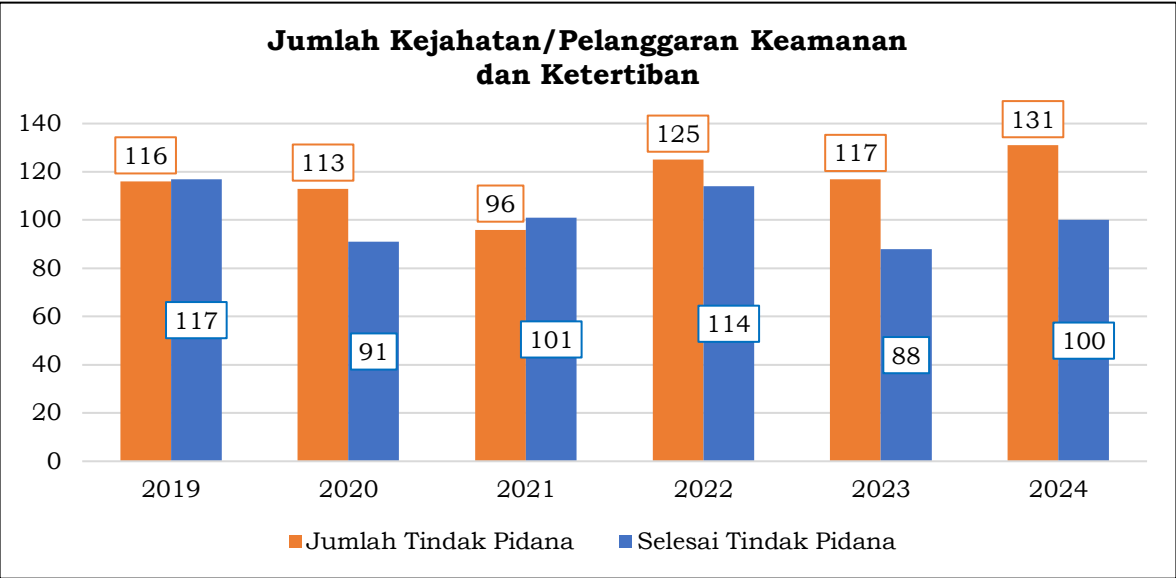
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Barito Selatan berada pada level yang cukup stabil. Kondisi ini mencerminkan keadaan sosial yang relatif aman dan kondusif bagi aktivitas masyarakat dan investasi. Pemerintah daerah secara aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, mengantisipasi potensi konflik horizontal, dan menekan angka kriminalitas. Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja serta optimalisasi peran organisasi masyarakat turut memperkuat sistem deteksi dan respons dini terhadap gangguan ketertiban.

Jumlah Tindak Pidana (JTP) di Kabupaten Barito Selatan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019–2024 dengan tren peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 131 kasus. Sementara itu, jumlah tindak pidana yang berhasil diselesaikan (STP) cenderung tidak seimbang dengan jumlah kasus yang terjadi, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan penurunan efektivitas penanganan perkara. Ketimpangan antara JTP dan STP ini

mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sinergi kelembagaan, serta pendekatan preventif yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Gambar 2. 35 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban per Kepolisian Resort

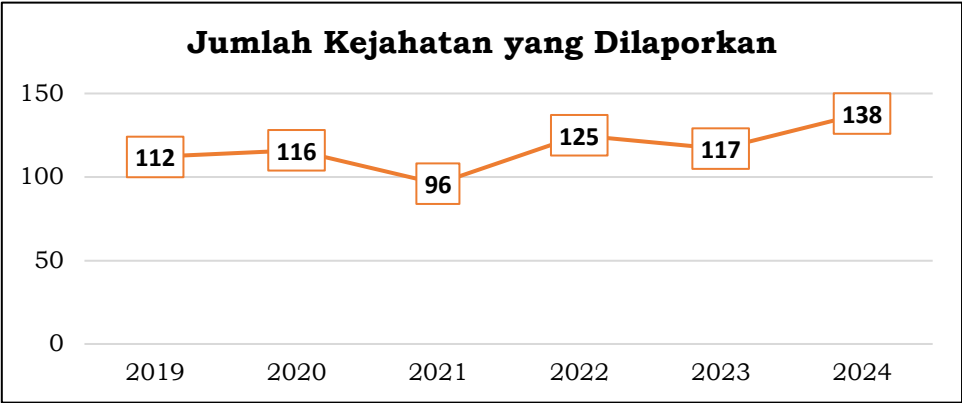
Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025



2.4.2.6. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Kriminalitas tidak hanya berdampak pada aspek keamanan individu dan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi, stabilitas sosial, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang terus berkembang, kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kompleksitas, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tren jumlah kejahatan dan kapasitas penyelesaiannya menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan warga. Angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan. Kejadian kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019 – 2024

cenderung meningkat. Pada periode tersebut, jumlah kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan 138 kasus.



Gambar 2. 36 Grafik Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan
Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merujuk pada kemampuan sebuah negara atau entitas dalam menghadapi tantangan dan ancaman di tingkat internasional maupun kawasan dengan mengandalkan kekuatan diplomatik yang kuat dan sistem pertahanan yang mampu menghalau potensi ancaman. Konsep ini mengedepankan dua aspek utama, yaitu diplomasi yang efektif dan pertahanan yang kuat. Kedua konsep ini saling mendukung untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan negara di kancah global dan kawasan. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan di Barito Selatan, Kalimantan Tengah meskipun tidak secara langsung terhubung dengan dinamika internasional atau kawasan besar, tetap relevan dalam konteks memperkuat posisi daerah ini dalam menjaga stabilitas dan keamanan lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Barito Selatan berperan dalam memperkuat kerjasama dengan daerah lain di Kalimantan Tengah dan provinsi-provinsi tetangga. Melalui forum daerah dan provinsi, Barito Selatan dapat bekerja sama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pengurangan bencana, dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pembangunan yang merata. Diplomasi lokal Barito Selatan dalam konteks hubungan dengan pemerintah pusat dan swasta sangat



penting untuk mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas rumah layak huni, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah.

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,76. Skor ini menempatkan Barito Selatan di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 3,26 dan juga di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki skor 3,13. Sementara itu, IDSD Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 menunjukkan skor keseluruhan sebesar 2,93. Skor ini mencerminkan posisi daya saing daerah dalam skala nasional dengan beberapa pilar yang menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri.

IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan 12 pilar utama, termasuk institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Barito Selatan menunjukkan kekuatan pada pilar institusi dengan skor 4,09 dan dinamisme bisnis dengan skor sempurna 5,00. Namun, terdapat kelemahan pada pilar ukuran pasar dengan nilai 0,28 dan kapabilitas inovasi dengan nilai 0,40 yang menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek pengembangan pasar dan inovasi daerah. Sementara itu, berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Barito Selatan masih dikategorikan sebagai daerah kurang inovatif. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntuyungo, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi dengan memperhatikan data yang dilaporkan melalui aplikasi IID. Untuk meningkatkan daya saing, Barito Selatan perlu fokus pada pengembangan inovasi daerah, perluasan ukuran pasar, dan peningkatan kapabilitas inovasi. Langkah-langkah strategis seperti pelatihan sumber daya manusia, pengembangan industri lokal, dan peningkatan infrastruktur dapat menjadi kunci dalam memperkuat posisi daya saing daerah ini.

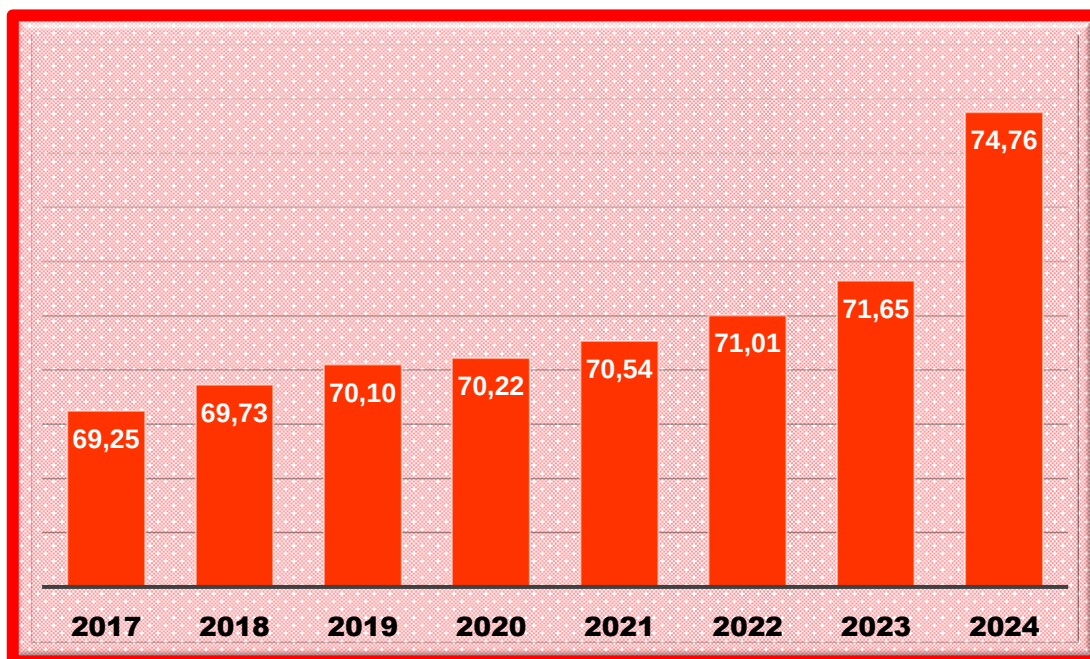
2.5 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

2.5.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Kinerja Makro

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator makro yang mencapai target antara lain laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan indikator makro yang tidak mencapai target adalah indeks gini, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Capaian indikator makro pembangunan daerah dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi pembangunan daerah. Secara umum gambaran capaian Indikator kinerja makro Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2024 adalah berikut ini:

2.5.1.1 indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga salah satu indikator target pembangunan pemerintah serta menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen IPM yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita menjadi indikator dalam penghitungan Dana Insetif Daerah (DID).

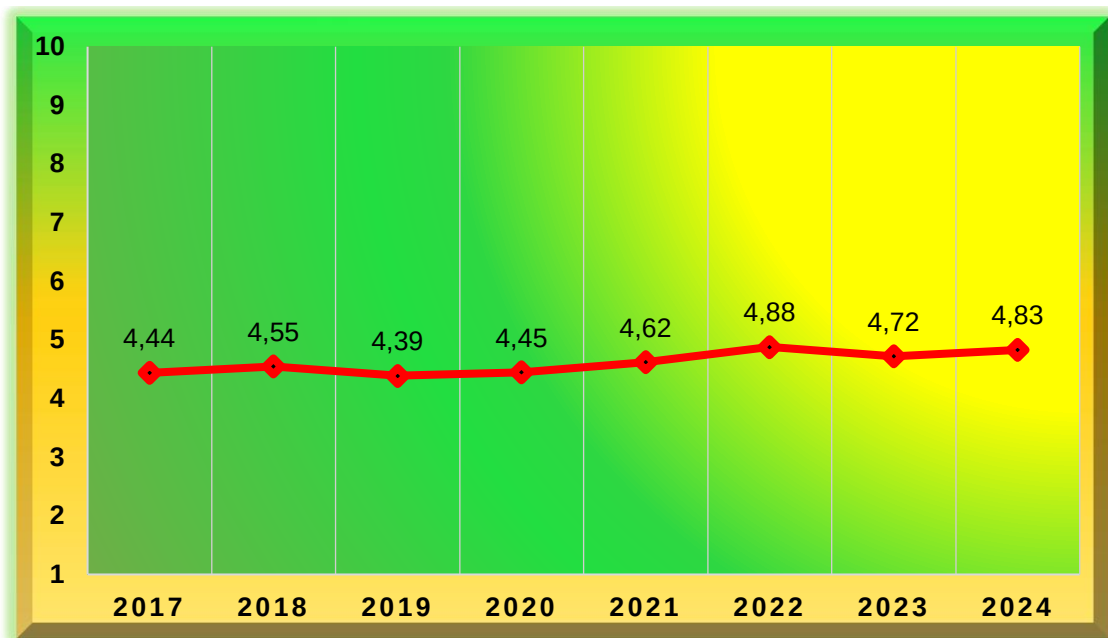


Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

**Gambar 2. 37 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2024**

2.5.1.2 Persentase Kemiskinan

Persentase kemiskinan atau bisa disebut dengan tingkat kemiskinan yang menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, terdapat cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab kemiskinan tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

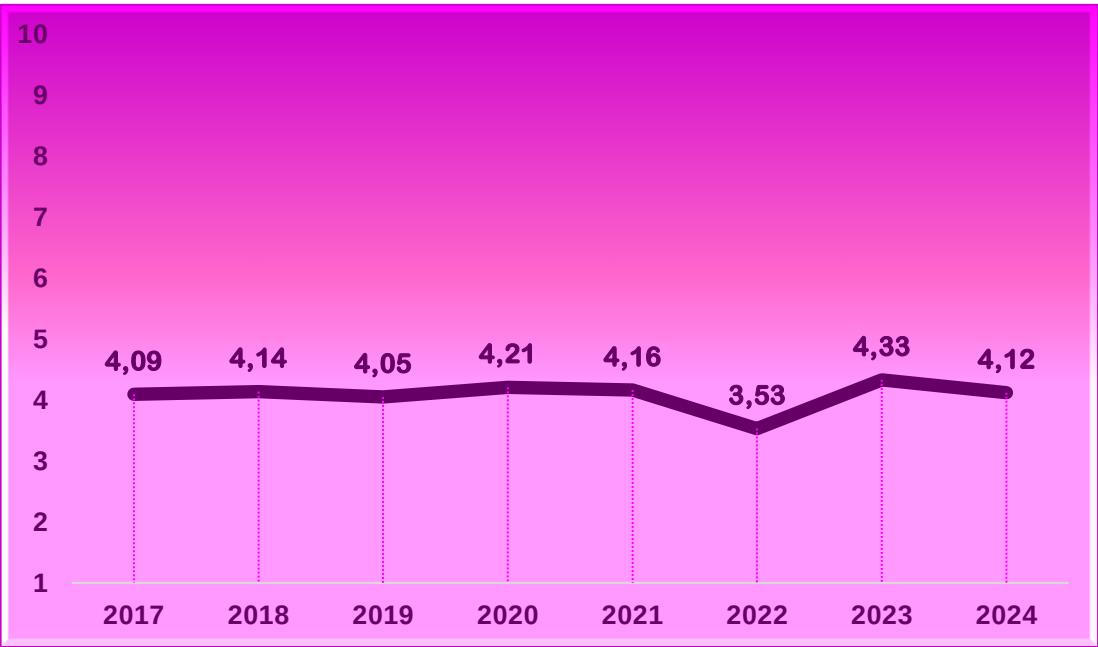
**Gambar 2. 38 Persentase Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2024**

Perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan tahun 2017 dari 4,44% mengalami kenaikan menjadi 4,55% pada tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,39% kemudian terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir menjadi 4,45% pada tahun 2020 hingga 4,88% pada tahun 2022. Persentase kemiskinan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,72% dan tahun 2024 meningkat menjadi 4,83%.

2.5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam

perekonomian, karena dengan adanya pengangguran menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2017 – 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka berada pada nilai 4,09% selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 4,14% kemudian mengalami penurunan menjadi 4,05% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 4,21% diduga akibat dampak pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 seiring dengan penanganan pandemi oleh pemerintah tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,05 poin menjadi 4,16%. Pada tahun 2022 terus mengalami penurunan menjadi 3,53%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 4,33% dan menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 4,12%.

2.5.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju

keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan dalam 5 (lima) tahun cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2017 – 2019 laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat dari 5,44% hingga menjadi 4,96%. Pada Tahun 2020 penurunan drastis karena dampak pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi -2,90%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan ekonomi nasional untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 2,13% menjadi 6,28% di tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 3,27% dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 4,70%.

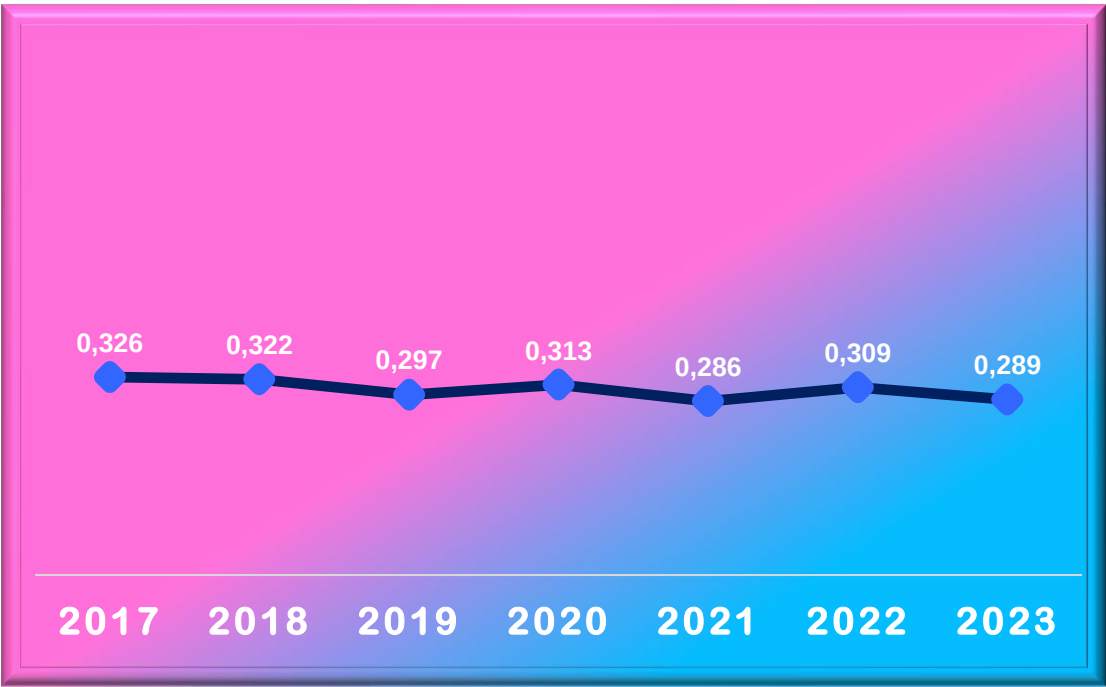


Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

**Gambar 2. 40 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017-2024**

2.5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan/kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segala dan Semua orang lain tidak memiliki apa-apa.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 41 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2023

Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 – 2013 mengalami penurunan dari 0,326 menjadi 0,297. Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,313 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 0,286 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,309. Indeks Gini pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,289. Data capaian untuk tahun 2024, pada posisi per Maret 2025 belum rilis.

2.5.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,50%	3,27%	2,70%	4,70%
2.	Indeks Gini	0,276 Angka	0,289 Angka	0,266 Angka	belum rilis
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,90 Poin	71,98 Poin	73,17 Poin	73,22 Poin
4.	Persentase Penduduk Miskin	4,52%	4,72%	4,42%	4,83%
5.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	120,40 Point	111,54 Point	120,40 Point	belum rilis
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	belum rilis
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,30%	71,65	70,35%	74,76
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%	4,33%	3,90%	4,12%
9.	Persentase Penegakkan Perda	85%	85%	90%	80%

Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/tujuan. Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut

Tabel 2. 44 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2,11 Persen	2-4 Persen	2,02 Persen
2	PDRB Per Kapita	59,25 Juta	63,28 Juta	60,14 Juta	47,5 Juta
3	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,8 Milyar Rupiah	163,16 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	109.560.420.000
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	611 Milyar Rupiah	392.332.040.000,00	629 Milyar Rupiah	141.176.520.000,00
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	53,25 Persen	37%	54,39 Persen	54,05 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	49,42 Persen	51,25%	50,54 Persen	34,40 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	110 Jumlah	15 Jumlah	102 Jumlah	31 Jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	50,00 Persen	1,43 Persen	55,00 Persen	50 Persen
9	Indeks Kualitas Air	52,8	50,8	52,9	50,61
10	Indeks Kualitas Udara	90,64	91,19	90,75	94,55
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	74,62	72,81	75,46	72,6
12	Timbunan Sampah yang Ditangani	60	51	65	81,99
13	Ketaatan Terhadap RTRW	96 Persen	80 Persen	97 Persen	90
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	4,92 Permiriad (persepuluhribu)	-	4,81 Permiriad (persepuluhribu)	Belum Rilis
15	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	85 Persen	88 Persen	90 Persen	100 Persen

16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen	99,99 Persen	75 Persen	98,70
17	Tingkat Pengangguran	5,01 Persen	4,33 Persen	4,93 Persen	4,90
18	Persentase PMKS yang Tertangani	80,05 Persen	100 Persen	85,05 Persen	80,3 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Air Bersih	42,76 Persen	77,68 Persen	47,76 Persen	79,98 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,01 Persen	22,31 Persen	19,02 Persen	21,91 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,23 Persen	0,084 Persen	0,15 Persen	Belum Rilis
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87,15 Persen	68 Persen	91,15 Persen	75,12 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	66,59 Persen	34,49 Persen	68,59 Persen	35,17 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	47,06 Persen	100 Persen	64,71 Persen	53,79 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	100,00 Persen	100 Persen	100,00 Persen	100 Persen
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92 Persen	88,4 Persen	95 Persen	92,06 Persen
27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	Belum Rilis
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	71,55 Indeks	76,54 Indeks	72,92 Indeks	71,66 Indeks
29	Nilai SAKIP	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria (61,02)

30	Nilai LPPD	Sangat Tinggi Kriteria	Kriteria Sedang	Sangat Tinggi Kriteria	Masih Dalam Tahap Proses Evaluasi
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	6,00 Persen	3,42 Persen	6,50 Persen	Data Akhir Masih Dalam Tahap Proses Penyusunan
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	96 Persen	100 Persen	97 Persen	97,44 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6722 (Berkembang) Indeks	0,7018 (Berkembang) Indeks	0,6822 (Berkembang) Indeks	Indeks 0,7142 (Berkembang)
34	Rasio Penduduk ber-KTP	92 Persen	97,14 Persen	95 Persen	98,01 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	8 Kajian
36	Indeks SPBE	2,50 Indeks	2,5 Indeks	2,80 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	9,05	9,13	9,15 Tahun	9,22 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,77 Tahun	12,8 Tahun	12,88 Tahun	13 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,29 Tahun	67,75 Tahun	67,39 Tahun	67,86 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	129,34 Juta Rupiah	191,34 Juta Rupiah	131,28 juta rupiah	Belum Rilis
41	Persentase Wirausaha Muda	41,00 Persen	28,50 Persen	45,00 Persen	Belum Rilis
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	33,36 Indeks	62,51 Indeks	34,45 Indeks	61,98 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,80 Persen (%)	92,29	91,82 Persen (%)	Belum Rilis

44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	10,00 Festival	1 Festival	12,00 Festival	12 Festival
45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	23,53 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	20 Persen

2.5.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 berdasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan regulasi sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 diatur dalam regulasi sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan. Realisasi APBD yang ditampilkan pada tabel berikut bersifat sementara dalam kondisi belum selesai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 45 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
4	PENDAPATAN	1.489.253.594.771,00	1.850.935.885.078,00	1.829.345.468.395,71	98,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.307.687.553,00	90.112.759.982,00	69.398.401.478,71	77,01
4.1.01	Pajak Daerah	23.556.250.000,00	23.006.250.000,00	13.131.821.762,55	57,08
4.1.02	Retribusi Daerah	7.587.361.585,00	7.667.361.486,00	4.763.641.164,00	62,13
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	13.700.000.000,00	4.522.018.416,50	33,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.664.075.968,00	45.739.148.496,00	46.980.920.135,66	102,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.376.861.002.315,00	1.750.480.034.315,00	1.755.362.379.614,00	100,28
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.895.319.000,00	1.709.514.351.000,00	1.694.695.554.520,00	99,13
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.965.683.315,00	40.965.683.315,00	60.666.825.094,00	148,09
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.084.904.903,00	10.343.090.781,00	4.584.687.303,00	44,33
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.441.814.122,00	-	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.643.090.781,00	10.343.090.781,00	4.584.687.303,00	44,33

Tabel 2. 46 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
5	BELANJA	1.663.515.199.167,00	1.949.005.323.992,00	1.728.683.984.569,70	88,70
5.1	BELANJA OPERASI	995.175.452.929,00	1.142.249.461.742,22	983.099.400.598,50	86,07
5.1.01	Belanja Pegawai	485.391.260.706,00	499.634.447.602,54	465.935.980.281,00	93,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.287.130.323,00	525.828.138.529,68	410.134.143.013,50	78,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	2.735.558.710,00	2.735.558.710,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	65.379.761.900,00	85.291.866.900,00	80.831.573.144,00	94,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.117.300.000,00	28.759.450.000,00	23.462.145.450,00	81,58
5.2	BELANJA MODAL	436.872.319.298,00	577.536.028.573,78	533.140.058.471,20	92,31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.587.641.591,00	88.037.993.441,00	76.179.053.361,00	86,53
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.007.301.502,00	150.622.528.978,99	146.962.062.900,10	97,57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	267.951.188.205,00	338.230.166.153,79	309.512.765.006,10	91,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.188.000,00	195.340.000,00	44.337.204,00	22,70
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	450.000.000,00	441.840.000,00	98,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.615.399.613,00	5.469.445.649,00	424.698.824,00	7,76
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.615.399.613,00	5.469.445.649,00	424.698.824,00	7,76
5.4	BELANJA TRANSFER	190.852.027.327,00	223.750.388.027,00	212.019.826.676,00	94,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.793.401.527,00	4.793.401.527,00	-	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	186.058.625.800,00	218.956.986.500,00	212.019.826.676,00	96,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(174.261.604.396,00)	(98.069.438.914,00)	100.661.483.826,01	(102,64)

Tabel 2. 47 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	186.561.604.396,00	110.519.438.914,00	110.519.438.914,19	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	186.561.604.396,00	110.519.438.914,00	110.519.438.914,19	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.300.000.000,00	12.450.000.000,00	12.300.000.000,00	98,80
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	150.000.000,00	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	174.261.604.396,00	98.069.438.914,00	98.219.438.914,19	100,15
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	198.880.922.740,20	0,00

Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan pagu anggaran murni tahun anggaran 2024 yaitu Rp. 1.663.515.199.167,00 mengalami kenaikan Rp. 285.490.124.825,00 atau 17,16% sehingga pagu anggaran setelah perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.1.949.005.323.992,00. Capaian realisasi belanja sebesar Rp. 1.728.800.000.775,18 atau 88,70%. Rincian realisasi Belanja Daerah per Perangkat Daerah se Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 48 Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN	306.411.249.373,00	337.499.387.965,00	295.082.561.236,00	87,43
2	DINAS KESEHATAN	217.376.703.787,00	237.789.584.023,00	203.735.116.497,00	85,68
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	361.416.697.028,00	450.516.619.278,00	413.656.610.635,00	91,82
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	28.001.797.212,00	47.725.797.212,00	46.353.832.837,00	97,13
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	17.364.104.796,00	22.251.522.496,00	20.734.110.342,00	93,18
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.768.699.221,00	7.800.083.221,00	6.865.584.490,00	88,02
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	133.756.451.755,00	173.040.592.455,00	160.883.322.243,00	92,97
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.348.263.549,00	9.698.263.549,00	8.615.512.444,00	88,84
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.449.596.993,00	11.575.471.993,00	10.821.259.098,00	93,48
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	31.253.298.818,00	35.519.548.768,00	32.814.772.496,00	92,39
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.208.798.386,00	15.966.798.386,00	15.023.831.460,00	94,09
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.024.129.696,00	8.084.129.696,00	7.282.501.961,00	90,08
13	DINAS PERHUBUNGAN	9.297.041.924,00	10.712.083.757,00	9.927.568.863,00	92,68

14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.958.362.066,00	13.673.708.066,00	12.215.438.110,00	89,34
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	10.285.405.957,00	11.415.405.957,00	10.933.861.531,00	95,78
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	8.922.792.174,00	9.837.792.174,00	9.026.669.505,00	91,76
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	22.327.208.177,00	30.850.368.177,00	28.936.059.328,00	93,79
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.969.247.610,00	5.479.318.489,00	4.706.077.690,00	85,89
19	SEKRETARIAT DAERAH	76.615.090.780,00	103.081.254.207,00	91.641.438.075,00	88,90
20	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	48.858.612.782,00	65.208.612.782,00	55.210.288.601,00	84,67
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.402.994.136,00	13.580.474.136,00	11.647.438.892,00	85,77
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	226.600.607.207,00	213.594.287.465,00	178.316.627.172,18	83,48
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.162.871.719,00	24.751.920.719,00	15.631.443.548,00	63,15
24	INSPEKTORAT	17.650.692.971,00	17.750.692.971,00	12.813.816.817,00	72,19
25	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.272.275.615,00	3.572.275.615,00	3.355.924.133,00	93,94
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	6.843.503.632,00	7.543.503.632,00	6.346.603.664,00	84,13
27	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.728.294.902,00	4.028.294.902,00	3.602.216.070,00	89,42
28	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	4.569.768.168,00	4.869.768.168,00	4.504.458.388,00	92,50
29	KECAMATAN JENAMAS	3.423.000.000,00	3.723.000.000,00	3.129.684.214,00	84,06
30	KECAMATAN KARAU KUALA	3.863.789.692,00	4.163.789.692,00	3.483.063.696,00	83,65
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.383.849.041,00	43.700.974.041,00	41.502.306.739,00	94,97
TOTAL		1.663.515.199.167,00	1.949.005.323.992,00	1.728.800.000.775,18	88,70

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran.

Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; realisasi penyerapan dana program; dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 terdiri dari 189 program, 507 kegiatan dan 1627 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah. Secara terperinci evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

**Tabel 2.49 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Usulan/ Bidang Usunan Pemerintahan Daerah (n-1) Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																							
I				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																		
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN											DINAS PENDIDIKAN																						
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN											DINAS KESEHATAN																						
3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
	Meningkatnya kualitas Akumulabilitas kinerja Dinas Perkimtan	1	04	01	0.00	00																																
			1	04	01	2.01	00																															
			1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	Dokumen	175.978.160,00	4	Dokumen	43.994.140,00	4	Dokumen	49.673.500,00	0	Dokumen	2.500.000,00	0	Dokumen	3.500.000,00	2	Dokumen	19.429.000,00	2	Dokumen	24.157.000	4	Dokumen	49.586.000	8	Dokumen	93.580.140	50,00	%	53,18%
			1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	12.700.000,00	3	Laporan	3.175.000,00	3	Laporan	1.655.500,00	0	Laporan	-	3	Laporan	1.164.500,00	0	Laporan	411.000,00	0	Laporan	80.000	3	Laporan	1.655.500	6	Laporan	4.830.500	50,00	%	38,04%
			1	04	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																														
			1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang / bulan	13.947.688.084,00	222	Orang / bulan	3.164.276.117,00	38	Orang / bulan	4.501.616.650,00	37	Orang / bulan	695.113.213,00	0	Orang / bulan	1.289.222.869,00	0	Orang / bulan	767.587.470,00	0	Orang / bulan	874.782.481	37	Orang / bulan	3.626.706.033	259	Orang / bulan	6.790.982.150	616,67	%	48,69%
			1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	744.656.800,00	1	Dokumen	180.135.600,00	1	Dokumen	306.370.000,00	0	Dokumen	49.920.000,00	0	Dokumen	8.760.000,00	0	Dokumen	117.360.000,00	1	Dokumen	118.650.000	1	Dokumen	294.690.000	2	Dokumen	474.825.600	50,00	%	63,76%
			1	04	01	2.03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																														
			1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	16.146.000,00	1	Dokumen	4.036.500,00	1	Dokumen	4.158.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.158.000	1	Dokumen	4.158.000	2	Dokumen	8.194.500	50,00	%	50,75%
			1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	93.716.000,00	1	Dokumen	23.429.000,00	1	Dokumen	22.738.000,00	0	Dokumen	6.016.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.953.000,00	1	Dokumen	10.614.000	1	Dokumen	21.583.000	2	Dokumen	45.012.000	50,00	%	48,03%
			1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	71.832.000,00	1	Laporan	17.893.000,00	1	Laporan	23.220.000,00	0	Laporan	3.870.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	7.740.000,00	1	Laporan	11.610.000	1	Laporan	23.220.000	2	Laporan	41.113.000	50,00	%	57,23%
			1	04	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																														
			1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan kepengawaannya	4	paket	168.843.000,00	2	Paket	42.210.750,00	1	paket	122.000.000,00	0	paket	-	1	paket	46.150.000,00	0	paket	-	0	paket	75.450.000	1	Paket	121.600.000	3	Paket	163.810.750	75,00	%	97,02%
			1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	Dokumen	115.950.080,00	2	Dokumen	27.697.900,00	2	Dokumen	40.374.000,00	0	Dokumen	3.300.000,00	0	Dokumen	2.506.000,00	1	Dokumen	10.525.000,00	1	Dokumen	18.838.000	2	Dokumen	35.169.000	4	Dokumen	62.866.900	50,00	%	54,22%
			1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	orang	99.365.600,00	2	Orang	23.115.501,00	2	Orang	44.260.000,00	0	Orang	1.375.000,00	1	Orang	-	0	Orang	-	1	Orang	37.389.938	2	Orang	38.764.938	4	Orang	61.880.439	50,00	%	62,28%
			1	04	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah																														
			1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	44.602.000,00	2	Paket	11.150.500,00	1	Paket	33.373.500,00	0	Paket	9.494.500,00	1	Paket	-	0	Paket	10.393.250,00	0	Paket	13.485.750	1	Paket	33.373.500	3	Paket	44.524.000	75,00	%	99,83%
			1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Paket	102.396.000,00	4	Paket	25.417.500,00	4	Paket	12.562.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-	3	Paket	4.327.500,00	1	Paket	7.883.500	4	Paket	12.211.000	8	Paket	37.628.500	50,00	%	36,75%
			1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16	Paket	55.932.920,00	3	Paket	13.956.200,00	4	Paket	8.765.500,00	0	Paket	-	2	Paket	2.137.500,00	1	Paket	1.607.500,00	1	Paket	5.020.500	4	Paket	8.765.500	7	Paket	22.721.700	43,75	%	40,62%
			1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Paket	114.520.040,00	4	Paket	28.629.620,00	4	Paket	8.056.700,00	0	Paket	2.267.500,00	2	Paket	-	1	Paket	5.542.000,00	1	Paket	245.950	4	Paket	8.055.450	8	Paket	36.685.070	50,00	%	32,03%
			1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	16	Paket	136.440.000,00	4	Paket	34.110.000,00	4	Paket	26.354.000,00	0	Paket	7.994.000,00	2	Paket	5.540.000,00	1	Paket	5.466.000,00	1	Paket	7.250.000	4	Paket	26.350.000	8	Paket	60.460.000	50,00	%	44,31%
			1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pustaka Perundang- undangan	4	Dokumen	75.000.000,00	1	Dokumen	17.810.000,00	1	Dokumen	18.750.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.540.000,00	0	Dokumen	9.540.000,00	1	Dokumen	2.580.000	1	Dokumen	18.660.000	2	Dokumen	36.470.000	50,00	%	48,63%
			1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	laporan	83.700.000,00		Laporan		2	laporan	27.900.000,00	0	laporan	735.000,00	0	laporan	3.125.000,00	1	laporan	12.640.000,00	1	laporan	11.400.000	2	Laporan	27.900.000	2	Laporan	27.900.000	33,33	%	33,33%
			1	04	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	laporan	768.862.000,00	4	Laporan	173.444.190,00	4	laporan	259.225.144,00	0	laporan	22.587.575,00	1	laporan	27.013.000,00	2	laporan	51.126.036,00	1	laporan	119.148.381	4	Laporan	219.874.992	8	Laporan	393.319.182	50,00	%	51,16%
			1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	519.834.760,00	1	Dokumen	128.456.700,00	1	Dokumen	184.110.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	140.000,00	0	Dokumen	10.941.000,00	1	Dokumen	171.124.000	1	Dokumen	182.205.000	2	Dokumen	310.661.700	50,00	%	59,76%
			1	04	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Usahan Pemerintah																														
			1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	724.544.587,00	0	Unit	-	2	Unit	724.544.587,00	0	Unit	-	2	Unit	643.599.500,00	0	Unit	-	0	Unit	73.493.500	2	Unit	717.093.000	2	Unit	717.093.000	100,00	%	98,97%

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (p-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (p-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%		16															
		1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	74	Unit	109.080.000,00	0	Unit	-	74	Unit	54.540.000,00	0	Unit	-	74	Unit	54.540.000,00	0	Unit	-	74	Unit	54.540.000	74	Unit	54.540.000	100,00	%	50,00%														
		1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	310.925.636,00	3	Unit	77.730.000,00	13	Unit	1.276.658.750,00	0	Unit	-	10	Unit	83.125.000,00	0	Unit	-	3	Unit	1.185.576.250	13	Unit	1.268.701.250	16	Unit	1.346.431.250	100,00	%	433,04%											
		1 04 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	33	Unit	433.768.000,00	24	Unit	108.442.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	24	Unit	108.442.000	72,73	%	25,00%														
		1 04 01 2.08 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																										
		1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	18.530.000,00	1	Laporan	4.632.500,00	1	laporan	5.200.000,00	0	laporan	1.930.000,00	0	laporan	1.170.000,00	1	laporan	2.100.000	1	Laporan	5.200.000	2	Laporan	9.832.500	50,00	%	53,06%														
		1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	3.672.136.008,00	12	Laporan	911.084.120,00	12	laporan	1.102.339.495,00	3	laporan	206.089.687,00	3	laporan	209.833.895,00	3	laporan	282.948.667,00	3	laporan	195.400.890	12	Laporan	894.273.139	24	Laporan	1.805.357.259	50,00	%	49,16%											
		1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	laporan	42.400.000,00	1	Laporan	10.445.000,00	1	laporan	11.880.000,00	0	laporan	3.850.000,00	0	laporan	1.700.000,00	1	laporan	6.330.000	1	Laporan	11.880.000	2	Laporan	22.325.000	50,00	%	52,65%														
		1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	laporan	6.489.600.000,00	12	Laporan	1.600.720.000,00	12	laporan	1.701.600.000,00	3	laporan	272.934.875,00	3	laporan	410.788.375,00	3	laporan	411.348.500,00	3	laporan	584.146.750	12	Laporan	1.679.218.500	24	Laporan	3.279.938.500	50,00	%	50,54%											
		1 04 01 2.09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																										
		1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	Unit	222.959.000,00	4	Unit	55.719.850,00	4	Unit	53.750.000,00	0	Unit	9.460.000,00	1	Unit	5.040.000,00	0	Unit	8.801.800,00	3	Unit	29.650.000	4	Unit	52.951.800	8	Unit	108.671.650	50,00	%	48,74%											
		1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terkaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	500.586.000,00	4	Unit	125.146.500,00	1	Unit	92.188.600,00	0	Unit	7.042.500,00	0	Unit	8.776.000,00	0	Unit	12.914.100,00	1	Unit	63.455.100	1	Unit	92.187.700	5	Unit	217.334.200	31,25	%	43,42%											
		1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	488.580.000,00	1	Unit	122.145.000,00	1	Unit	105.000.000,00	0	Unit	-	1	Unit	70.000.000,00	0	Unit	-	0	Unit	35.000.000	1	Unit	105.000.000	2	Unit	227.145.000	50,00	%	46,49%											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 04 02 0.00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																																										
		1 04 02 2.01 00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																																										
		1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	Dokumen	194.000.000,00	1	Dokumen	46.346.800,00	1	Dokumen	50.000.000,00	0	Dokumen	14.895.000,00	0	Dokumen	10.655.500,00	0	Dokumen	9.355.000,00	1	Dokumen	12.688.500	1	Dokumen	47.594.000	2	Dokumen	93.940.800	50,00	%	48,42%											
		1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3	Dokumen	75.000.000,00		Dokumen		1	Dokumen	25.000.000,00	0	Dokumen	7.709.000,00	0	Dokumen	4.219.000,00	0	Dokumen	10.394.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	22.322.000	1	Dokumen	22.322.000	33,33	%	29,76%											
		1 04 02 2.03 00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																																										
		1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	Unit	100.000.000,00	1	Unit	24.655.000,00		Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	24.655.000	25,00	%	24,66%														
		1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52	Unit	2.720.000.000,00	13	Unit	679.939.000,00	22	Unit	1.168.890.000,00	0	Unit	12.259.000,00	11	Unit	560.536.000,00	0	Unit	4.055.000,00	11	Unit	574.931.000	22	Unit	1.151.781.000	35	Unit	1.831.720.000	67,31	%	67,34%											
		1 04 02 2.03 07	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33	Rumah Tangga	51.000.000,00		Unit		22	Rumah Tangga	17.000.000,00	0	Rumah Tangga	1.406.000,00	0	Rumah Tangga	4.956.000,00	0	Rumah Tangga	3.355.000,00	22	Rumah Tangga	4.726.000	22	Unit	14.443.000	22	Unit	14.443.000	66,67	%	28,32%											
		1 04 02 2.06 00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																																										
		1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terkaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	8	Laporan	96.880.000,00	1	Laporan	24.094.700,00	1	Laporan	20.000.000,00	0	Laporan	11.465.500,00	0	Laporan	6.983.300,00	0	Laporan	1.206.160	1	Laporan	19.654.960	2	Laporan	43.749.660	25,00	%	45,16%														
		1 04 02 2.06 05	Pembangunan/Perencanaan/Implementasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terselenggaranya/ terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Sistem Informasi	200.000.000,00		Laporan		1	Sistem Informasi	150.000.000,00	0	Sistem Informasi	-	0	Sistem Informasi	-	1	Sistem Informasi	148.840.000	1	Laporan	148.840.000	1	Laporan	148.840.000	100,00	%	74,42%														

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	04	03	0.00	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I				II				III				IV				K		Rp	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Sat

6							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume			Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume			Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																							
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																		
3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN											DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN																						
4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																								DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
		2 10 02 0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI																																		
		2 10 02 2.01	00	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																		
		2 10 04 2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	4	Dokumen	39.120.000,00	1	Dokumen	9.390.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Laporan	-	1	Laporan	9.390.000	25,00	%	24,00%						
		2 10 04 0.00	00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																																		
		2 10 04 2.01	00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																																		
		2 10 04 2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perikua Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	232.817.920,00	1	Dokumen	53.294.800,00	1	Dokumen	31.659.000,00	0	Dokumen	9.740.000,00	0	Dokumen	5.952.000,00	0	Dokumen	5.805.000,00	1	Dokumen	10.010.000	1	Laporan	31.507.000	2	Laporan	84.801.800	50,00	%	36,42%				
		2 10 04 2.01	02	Terkaksannya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	112.730.000,00	2	Berita Acara	2.035.000,00	2	Berita Acara	56.365.000,00	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0	Berita Acara	-	2	Berita Acara	55.633.000	2	Laporan	55.633.000	4	Laporan	57.668.000	50,00	%	51,16%						
		2 10 06 0.00	00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ASSENTEE																																		
		2 10 06 2.01	00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Gant Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absennte dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																		
		2 10 06 2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	4	Dokumen	218.628.000,00	1	Dokumen	54.517.000,00	1	Dokumen	64.290.000,00	0	Dokumen	5.867.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	11.576.000,00	1	Dokumen	33.448.000	1	Laporan	50.891.000	2	Laporan	105.408.000	50,00	%	48,21%				
		2 10 06 2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	3	Dokumen	309.642.000,00		Dokumen	1	Dokumen	154.821.000,00	0	Dokumen	1.840.000,00	0	Dokumen	14.959.000,00	0	Dokumen	38.110.000,00	1	Dokumen	66.446.680	1	Laporan	121.355.680	1	Laporan	121.355.680	33,33	%	39,19%					
		2 10 06 2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	Dokumen	89.371.520,00	1	Dokumen	22.342.400,00	1	Dokumen	32.800.000,00	0	Dokumen	5.800.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.055.000,00	1	Dokumen	17.062.000	1	Laporan	28.917.000	2	Laporan	51.259.400	50,00	%	57,36%				
		2 10 09 0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH																																		
		2 10 09 2.01	00	Pemberian Izin Membuka Tanah																																		
		2 10 09 2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	3	Dokumen	67.826.250,00		Dokumen	1	Dokumen	22.608.750,00	0	Dokumen	5.737.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.844.750	1	Laporan	19.581.750	1	Laporan	19.581.750	33,33	%	28,87%					
		2 10 09 2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	4	Dokumen	320.699.520,00	1	Dokumen	79.967.000,00	1	Dokumen	84.881.250,00	0	Dokumen	7.858.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	25.370.000,00	1	Dokumen	48.215.250	1	Laporan	81.443.250	2	Laporan	161.410.250	50,00	%	50,33%				
		2 10 10 0.00	00	PROGRAM PENATAGUNGAN TANAH																																		
		2 10 10 2.01	00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																																		
		2 10 10 2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	28.000.000,00	1	Dokumen	7.000.000,00	1	Dokumen	24.480.000,00	0	Dokumen	25.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	21.266.000	1	Laporan	21.291.000	2	Laporan	28.291.000	50,00	%	101,04%				
				JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.418.835.210,00			228.546.200,00			471.905.000,00			36.867.000,00			28.911.000,00			86.916.000,00			265.925.680,00			410.619.680,00			639.165.880,00							
5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
		2 11 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																																		
		2 11 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																		
		2 11 01 2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	320.000.000,00	1	Dokumen	121.818.900,00	1	Dokumen	100.000.000,00	0	Dokumen	6.672.500,00			8.474.500,00			15.977.804,00			52.804.781,00	0	Dokumen	84.129.585	1	Dokumen	205.948.485	25,00	%	64,36%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan																		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																																								
		2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket 200.000.000,00	1 Paket 23.698.000,00	1 Paket 64.250.000,00		Paket -				43.654.000,00				18.751.000,00	0 Paket 62.405.000	1 Paket 86.103.000	25,00 % 43,05%																																			
		2 11 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan 200.000.000,00	12 Laporan 30.000.000,00	12 Laporan 61.000.000,00	Laporan 9.050.000,00		3.000.000,00			13.875.000,00				17.700.000,00	0 Laporan 43.625.000	12 Laporan 73.625.000	25,00 % 36,81%																																			
		2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 Laporan 800.000.000,00	80 Laporan 134.073.028,00	80 Laporan 240.000.000,00	5 Laporan 2.185.000,00		81.088.304,00			44.299.443,00				77.570.021,00	5 Laporan 205.142.768	85 Laporan 339.215.796	26,56 % 42,40%																																			
		2 11 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen 80.000.000,00	1 Dokumen 25.000.000,00	1 Dokumen 17.000.000,00	1 Dokumen -		-			5.000.000,00				12.000.000,00	1 Dokumen 17.000.000	2 Dokumen 42.000.000	50,00 % 52,50%																																			
		2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																																				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	5 Unit 150.000.000,00	0 Unit -		-			-	5 Unit 138.813.000,00	5 Unit 138.813.000	5 Unit 138.813.000	#DIV/0! % #DIV/0!																																						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan yang Disediakan		1 Unit 6.270.000,00	0 Unit -		-			1 Unit 6.270.000,00	1 Unit 6.270.000	1 Unit 6.270.000	#DIV/0! % #DIV/0!																																								
		2 11 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	3 Unit 1.500.000.000,00	0 Unit -		94.666.998,00			45.705.000,00	1 Unit 1.307.906.500,00	1 Unit 1.448.278.498	1 Unit 1.448.278.498	#DIV/0! % #DIV/0!																																						
		2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																				
		2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan 8.000.000,00	4 Laporan 2.000.000,00	4 Laporan 2.000.000,00	0 Laporan -		2.000.000,00			-	0 Laporan 2.000.000	4 Laporan 4.000.000	25,00 % 50,00%																																							
		2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28 Laporan 960.000.000,00	7 Laporan 99.790.495,00	7 Laporan 108.607.500,00	5 Laporan 9.880.365,00		30.124.820,00			11.291.352,00				20.950.840,00	5 Laporan 72.247.377	12 Laporan 172.037.872	42,86 % 17,92%																																			
		2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Dokumen 2.000.000.000,00	27 Dokumen 482.250.000,00	27 Dokumen 492.850.850,00	1 Dokumen 78.800.000,00		118.200.000,00			129.500.000,00				161.770.000,00	1 Dokumen 488.270.000	28 Dokumen 970.520.000	25,93 % 48,53%																																			

				2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp		K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x100%	15	16															
		2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	24	Laporan	112.000.000,00	6	Laporan	17.474.500,00	6	Laporan	70.000.000,00	Laporan	3.000.000,00		11.051.000,00		33.747.000,00	16.926.000,00	0	Laporan	64.724.000	6	Laporan	82.198.500	25,00	%	73,39%						
		2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diidentifikasi	8	Laporan	100.000.000,00	2	Laporan	24.999.000,00	2	Laporan	45.000.000,00	0	Laporan	4.508.000,00		18.789.800,00		814.000,00	17.056.671,00	0	Laporan	41.168.471	2	Laporan	66.167.471	25,00	%	66,17%					
		2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota																																
		2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang	2	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	67.994.210,00		Dokumen	35.000.000,00		Dokumen	688.000,00		25.161.340,00		-	9.026.000,00	0	Dokumen	34.875.340	1	Dokumen	102.869.550	50,00	%	102,67%					
		2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	6	Dokumen	264.000.000,00	12	Dokumen	65.906.200,00	12	Dokumen	195.000.000,00	0	Dokumen	14.502.800,00		43.782.057,00		24.110.366,00	88.459.616,00	0	Dokumen	170.854.839	12	Dokumen	236.761.039	200,00	%	89,68%					
		2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN																																
		2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota																																
		2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kebun-kebun Hutan	Jumlah Dokumen Rencana induk Pengelolaan Kebun yang	1	Dokumen	120.000.000,00	1	Dokumen	29.979.000,00		Dokumen	40.000.000,00		Dokumen	-		4.736.000,00		22.203.511,00	8.972.000,00	0	Dokumen	35.911.511	1	Dokumen	65.890.511	100,00	%	54,91%					
		2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Ha	80.000.000,00	0	Ha	67.995.142,00		Ha	30.000.000,00		Ha	310.000,00		2.850.000,00		5.511.000,00	21.280.000,00	0	Ha	29.951.000	0	Ha	97.946.142	-	%	122,43%					
		2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,5	Ha	120.000.000,00	0	Ha	29.970.000,00		Ha	20.000.000,00		Ha	4.477.000,00		3.950.000,00		8.618.000,00	2.840.000,00	0	Ha	19.885.000	0	Ha	49.855.000	-	%	41,55%					
		2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)																																
		2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3																																
		2 11 05 2.01 01	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Diaknakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Dokumen	100.000.004,00	3	Dokumen	23.220.280,00	3	Dokumen	10.000.000,00		Dokumen	-		-		2.982.500,00	-	0	Dokumen	2.982.500	3	Dokumen	26.202.780	25,00	%	26,20%					
		2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Kebutuhan Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12	Laporan	100.000.000,00	3	Laporan	9.526.000,00	3	Laporan	25.000.000,00		Laporan	-		-		19.285.000,00	0	Laporan	19.285.000	3	Laporan	28.811.000	25,00	%	28,81%						
		2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																																
		2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi & Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemertfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemertfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Peraturan Daerah	12	Dokumen	50.000.000,00	3	Dokumen	14.333.000,00	3	Dokumen	20.000.000,00		Dokumen	5.304.000,00		7.939.000,00		1.738.000,00	0	Dokumen	14.961.000	3	Dokumen	29.314.000	25,00	%	58,63%						
		2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)																																
		2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah																																
		2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	16	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	49.938.900,00	16	Dokumen	50.000.000,00		Dokumen	-		12.577.000,00		31.274.500,00	5.995.500,00	0	Dokumen	49.847.000	4	Dokumen	99.785.900	25,00	%	49,89%					
		2 11 06 2.01 02	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	Laporan	320.000.000,00	0	Laporan	44.736.200,00	15	Laporan	85.000.000,00		Laporan	4.600.000,00		12.499.000,00		20.583.000,00	47.008.100,00	0	Laporan	84.690.100	0	Laporan	129.426.300	-	%	40,45%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 / 6 x100%	16																		
		2 11 06 2.01 04	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	15	Dokumen	240.000.000,00	0	Dokumen	54.975.000,00	15	Dokumen	50.000.000,00		Dokumen	-				10.172.000,00			39.309.900,00	0	Dokumen	49.481.900	0	Dokumen	104.456.900	-	%	43,52%	
		2 11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH																														
		2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH																														
		2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3	Dokumen	120.000.000,00	1	Dokumen	24.128.700,00	1	Dokumen	203.000.000,00	1	Dokumen	2.400.000,00				4.976.000,00			143.646.800,00	1	Dokumen	154.622.800	2	Dokumen	178.751.500	66,67	%	148,96%	
		2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH																														
		2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	Dokumen	120.000.000,00	3	Dokumen	24.612.000,00	3	Dokumen	28.000.000,00	0	Dokumen	2.400.000,00				4.400.000,00			5.114.000,00	0	Dokumen	16.014.000	3	Dokumen	40.626.000	100,00	%	33,86%	

		2	11	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp								
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36											
8																																			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
9																																			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN										
		2	15	01																															PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		2	15	01	2.01																														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		2	15	01	2.01	01																													Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	32.827.700	1	Dokumen	82.827.700	25,00	%	103,53%		
		2	15	01	2.01	02																													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	25,00	%	7,14%		
		2	15	01	2.01	03																													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.980.000	25,00	%	7,11%		
		2	15	01	2.01	04																													Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.864.000	25,00	%	6,95%		
		2	15	01	2.01	06																													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Dokumen	11.940.800	1	Dokumen	30.365.800	25,00	%	43,38%		
		2	15	01	2.02																														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		2	15	01	2.02	01																														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang/ Bulan	3.083.969.631	756	Orang/ Bulan	3.096.929.631	37,50	%	15,32%	
		2	09	01	2.03																														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		2	09	01	2.03	03																														Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	10.000.000	1	Laporan	81.147.500	25,00	%	115,93%	
		2	09	01	2.03	06																														Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	-	1	Laporan	12.500.000	25,00	%	17,86%	
		2	09	01	2.04																														Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
		2	09	01	2.04	04																														Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	Dokumen	-	1	Dokumen	14.811.000	25,00	%	21,16%	
		2	09	01	2.04	07																														Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Dokumen	5.250.000	1	Dokumen	15.242.000	25,00	%	16,94%	
		2	09	01	2.05																														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		2	09	01	2.05	09																														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Orang	-	5	Orang	73.148.099	25,00	%	18,29%	
		2	09	01	2.06																														Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		2	09	01	2.06	01																														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisaksikan	10	Paket	6.965.000	60	Paket	19.925.000	30,00	%	15,09%	
		2	09	01	2.06	02																														Penyediaan Peralatan dan Petengkapan Kantor yang Didisaksikan	15	Paket	36.700.000	65	Paket	109.466.720	32,50	%	68,42%	
		2	09	01	2.06	04																														Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Didisaksikan	25	Paket	75.000.000	125	Paket	225.000.000	31,25	%	56,25%	
		2	09	01	2.06	06																														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	Paket	47.640.000	60	Paket	118.787.500	30,00	%	42,42%	
		2	09	01	2.06	06																														Penyediaan Bahan Bacaan dan Penituran Peusang-undangan yang Didisaksikan	0	Dokumen	3.400.000	1	Dokumen	15.900.000	25,00	%	31,80%	
		2	09	01	2.06	09																														Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	491.690.406	2	Laporan	1.647.222.351	50,00	%	55,15%	
		2	09	01	2.07																															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I				II				III				IV				K		Rp	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2026 (Akhir Pelaksanaan RKPD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2026 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Usulan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																										Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16												
		2 17 3 2.01 03	Pengutan Tata Kelola Ketenagabagian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuasaan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Koperasi	148.799.120,00	25	Koperasi	26.830.780,00	25	Koperasi	37.199.780,00		Koperasi	-			0	Koperasi	-	25	Koperasi	26.830.780	25,00	%	18,03%
		2 17 3 2.01 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Pendukung-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	40	Koperasi	42.800.000,00	45	Koperasi	10.350.000,00	10	Koperasi	10.700.000,00	1	Koperasi	2.030.000,00			1	Koperasi	2.030.000	46	Koperasi	12.380.000	115,00	%	26,93%

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No	Saseran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp																	
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Rp	Volume														Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																																	
		2 18 06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																																												
		2 18 06 2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																												
		2 18 06 2.01 02		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	155	Pelaku Usaha	50.000.000,00	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	50.000.000,00	20	Pelaku Usaha	4.295.000,00	20	Pelaku Usaha	10.125.800,00	20	Pelaku Usaha	25.501.300,00	20	Pelaku Usaha	10.075.600	80	Pelaku Usaha	49.997.700	80	Pelaku Usaha	49.997.700	51,61	%	100,00%														
				JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		27.121.707.096,00		8.095.486.577,00		9.837.792.174,00		991.955.112,00		2.422.443.671,00		1.908.918.286,00		3.703.352.436,00		9.026.669.505,00		17.122.156.082,00																										
13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN												DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN																															
14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																												DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
		2 20 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																																												
		2 20 02 2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																																												
		2 20 02 2.01 01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	8	Dokumen	200.000.000,00	1	Dok	120.111.800,00	2	Dok	175.000.000,00	2	Dok	7.011.600,00	0	Dok	8.227.800,00	1	Dokumen	30.351.757,00	0	Dokumen	92.173.076	3	Dokumen	137.764.233	4	Dokumen	257.876.033	50,00	%	128,94%														
		2 20 02 2.01 02		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	120	Orang	40.000.000,00	30	Org	22.726.000,00	30	Orang	40.000.000,00	-	10	Orang	10.038.200,00	0	Orang	-	0	Orang	-	10	Orang	10.038.200	40	Orang	32.764.200	33,33	%	81,91%																
				Membangun Metadata Statistik Sektorial	2452	Dokumen	100.000.000,00	613	Dok	24.345.000,00	613	Dokumen	40.000.000,00	150	Dokumen	31.131.000,00	100	Dokumen	1.880.000,00	0	Dokumen	6.045.000	250	Dokumen	39.056.000	863	Dokumen	63.401.000	35,20	%	63,40%																	
				Pengembangan Infrastruktur	4	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	50.000.000,00		Dokumen		0	Dokumen	650.000,00	1	Dokumen	49.046.250,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	49.696.250	1	Dokumen	49.696.250	25,00	%	24,85%																	
				JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		540.000.000,00		167.182.800,00		305.000.000,00		7.011.600,00		50.047.000,00		81.278.007,00		98.218.076,00		236.554.683,00		403.737.483,00																										
15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																												DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
		2 21 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN																																												
		2 21 02 2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																																												
		2 21 02 2.01 01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4	Dokumen	80.000.000,00			1	Dokumen	40.000.000,00		1	Dokumen	17.934.000,00	1	Dokumen	2.750.000,00	0	Dokumen	12.332.000	2	Dokumen	33.016.000	2	Dokumen	33.016.000	50,00	%	41,27%																	
		2 21 02 2.01 02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4	Laporan	100.000.000,00	1	Laporan	44.134.661,00	1	Laporan	40.000.000,00	1	Laporan	29.371.853,00	0	Laporan	-	0	Laporan	2.237.999	1	Laporan	31.609.852	2	Laporan	75.744.513	50,00	%	75,74%																	
		2 21 02 2.01 03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	80.000.000,00			1	Laporan	40.000.000,00		0	Laporan	-	1	Laporan	30.313.118,00	0	Laporan	-	1	Laporan	30.313.118	1	Laporan	30.313.118	25,00	%	37,89%																	
		2 21 02 2.01 05		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Layanan	80.000.000,00			1	Layanan	280.500.000,00		1	Layanan	25.363.000,00	0	Layanan	197.161.120	1	Layanan	222.524.120	1	Layanan	222.524.120	1	Layanan	222.524.120	25,00	%	278,16%																	
				JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		340.000.000,00		44.134.661,00		400.500.000,00		-		47.305.853,00		58.426.118,00		211.731.119,00		317.463.090,00		361.597.751,00																										
16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN												DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN																															

17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																													DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan												Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																				
		2 23 01 02 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	235.200.000,00	1	Unit	14.438.000,00	2	Unit	13.000.000,00	1	Unit	7.781.900,00	0	Unit	618.900,00	1	Unit	4.198.000,00	0	Unit	-	2	Unit	12.598.800	3	Unit	27.036.800	42,86	%	11,50%	
		2 23 01 02 06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	97.500.000,00	15	Unit	8.135.000,00	15	Unit	14.135.000,00	1	Unit	610.000,00	9	Unit	6.220.000,00	4	Unit	6.791.250,00	1	Unit	513.750	15	Unit	14.135.000	30	Unit	22.270.000	50,00	%	22,84%	
		2 23 01 02 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	600.000.000,00				1	Unit	400.000.000,00	0	Unit	-	0	Unit	540.000,00	1	Unit	100.260.000,00	1	Unit	298.058.000	2	Unit	398.858.000	2	Unit	398.858.000	200,00	%	66,48%	
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																																
		2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																
		2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM Information Technology Service Management)	8	Layanan	322.432.000,00	1	Layanan	23.486.900,00	2	Layanan	39.631.400,00	0	Layanan	-	1	Layanan	6.091.700,00	0	Layanan	-	1	Layanan	12.533.900	2	Layanan	18.625.600	3	Layanan	42.112.500	37,50	%	13,06%	
		2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	93	Perpustakaan	357.808.000,00	78	Perpustakaan	89.913.000,00	86	Perpustakaan	136.421.000,00	0	Perpustakaan	-	11	Perpustakaan	6.578.115,00	30	Perpustakaan	-	37	Perpustakaan	77.380.461	78	Perpustakaan	83.958.596	156	Perpustakaan	173.871.596	167,74	%	48,59%	
		2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	145	Perpustakaan	454.557.000,00				36	Perpustakaan	44.750.000,00	0	Perpustakaan	-	41	Perpustakaan	32.650.000,00	0	Perpustakaan	-	0	Perpustakaan	2.762.000	41	Perpustakaan	35.412.000	41	Perpustakaan	35.412.000	28,28	%	7,79%	
		2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24	Perpustakaan	214.688.000,00				6	Perpustakaan	25.343.000,00	0	Perpustakaan	-	0	Perpustakaan	5.180.700,00	0	Perpustakaan	-	25	Perpustakaan	16.433.000	25	Perpustakaan	21.613.700	25	Perpustakaan	21.613.700	104,17	%	10,07%	
		2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	8	Orang	55.897.116,00				2	Orang	47.571.000,00	0	Orang	-	0	Orang	15.893.000,00	0	Orang	8.857.000,00	1	Orang	9.053.900	1	Orang	33.803.900	1	Orang	33.803.900	12,50	%	60,48%	
		2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	40	Layanan	313.260.000,00	10	Layanan	35.354.700,00	10	Layanan	49.710.000,00	5	Layanan	5.030.000,00	2	Layanan	8.595.000,00	2	Layanan	2.180.000,00	1	Layanan	9.816.000	10	Layanan	25.621.000	20	Layanan	60.985.700	50,00	%	19,47%	
		2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Kebangsaan Koleksi Perpustakaan	38718	Eksemplar	488.756.000,00	14484	Eksemplar	9.327.500,00	11078	Eksemplar	19.469.500,00	0	Eksemplar	-	0	Eksemplar	676.000,00	2010	Eksemplar	-	1890	Eksemplar	13.145.000	3900	Eksemplar	13.821.000	18384	Eksemplar	23.148.500	47,48	%	4,74%	
		2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	82.200.000,00	0	Dokumen	919.400,00	1	Dokumen	25.375.400,00	1	Dokumen	2.509.960,00	0	Dokumen	301.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	15.094.400	1	Dokumen	17.905.360	1	Dokumen	18.824.760	25,00	%	22,90%	
		2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																
		2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20	Orang	320.500.000,00	5	Orang	36.093.600,00	5	Orang	40.682.900,00	0	Orang	-	0	Orang	3.773.100,00	5	Orang	34.242.750,00	0	Orang	-	5	Orang	38.015.850	10	Orang	74.109.450	50,00	%	23,12%	
		2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	31	Perpustakaan	260.344.000,00	4	Perpustakaan	22.948.500,00	7	Perpustakaan	96.672.200,00	2	Perpustakaan	6.275.800,00	0	Perpustakaan	-	2	Perpustakaan	46.235.000,00	3	Perpustakaan	20.300.000	7	Perpustakaan	72.810.800	11	Perpustakaan	95.759.300	35,48	%	36,78%	
				JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			20.110.179.152,00			3.098.651.275,00			4.983.188.888,00			637.894.730,00			1.061.418.647,00			906.299.731,00			1.782.386.416,00			4.388.001.524,00			7.486.652.795,00				
18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																																
		2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota																																
		2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	8400	Berkas	356.000.000,00				1800	Berkas	39.128.000,00	0	Berkas	-	0	Berkas	-	980	Berkas	17.252.000,00	904	Berkas	18.440.000	1884	Berkas	35.692.000	1884	Berkas	35.692.000	22,43	%	10,03%	
		2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8400	Berkas	279.540.000,00	1003	Perpustakaan	24.787.000,00	1800	Berkas	25.000.000,00	302	Berkas	3.022.500,00	0	Berkas	-	829	Berkas	2.827.500,00	753	Berkas	8.154.000	1884	Berkas	14.004.000	2887	Berkas	38.791.000	34,37	%	13,88%	
		2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	84	Laporan	242.400.000,00	10	Perpustakaan	23.422.500,00	18	Laporan	195.484.500,00	0	Laporan	-	5	Laporan	28.241.600,00	0	Laporan	13.266.000,00	5	Laporan	19.043.300	10	Laporan	60.550.900	20	Laporan	83.973.400	23,81	%	34,64%	
		2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota																																
		2 24 02 2.02 01	Pengumpulan dan Penyempurnaan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Tertinggi kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Tertinggi yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	40	Arsip	105.420.000,00				10	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0	Arsip	-	0,00	%	0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (P-1)	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun N-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
					Volume	Satuan	6	Volume	Satuan	7	Volume	Satuan	8	Volume	Satuan	9	Volume	Satuan	10	Volume	Satuan	11	Volume	Satuan	12	Volume		Satuan	13	Volume	Satuan	14 = 7 + 13	Volume	Satuan	15 = 14 / 6 x100%				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30				
		2	24	02	02	Akuisisi, Pengembangan, Presensi, dan Akses Ansis Statis	Jumlah Ansis Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Presensi dan Akses Ansis Statis	1224	Ansip	233.600.000,00	272	Perputakaan	16.169.600,00	295	Ansip	19.672.100,00	0	Ansip	-	30	Ansip	280.000,00	170	Ansip	9.252.000,00	95	Ansip	1.140.000	295	Ansip	10.672.000	567	Ansip	26.841.600	48,32	%	11,49%		
		2	24	02	2.03	Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																																	
		2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	3360	Pengguna	120.849.000,00	0	Perputakaan	24.574.000,00	720	Pengguna	189.884.000,00	0	Pengguna	-	0	Pengguna	-	0	Pengguna	7.754.000,00	532	Pengguna	168.251.746	532	Pengguna	176.005.746	532	Pengguna	200.579.746	15,83	%	165,98%	
		2	24	02	2.03	02	Pembelengkapan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembelengkapan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8	Laporan	124.339.616,00	2	Perputakaan	20.122.000,00	2	Laporan	26.960.000,00	0	Laporan	4.450.000,00	1	Laporan	9.801.300,00	0	Laporan	6.900.220,00	1	Laporan	-	2	Laporan	21.151.520	4	Laporan	41.273.520	50,00	%	33,19%	
	Ternujudnya tugas-tugas pemerintahan yang akurat	2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																																	
		2	24	03	2.01	Pemurnahan Ansis Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																																	
		2	24	03	2.01	01	Pemurnahan, Pendataan dan Pelaksanaan Pemurnahan Ansis yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Ansis yang Dilakukan Pemurnahan, Pendataan dan Pelaksanaan Pemurnahan Ansis yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250	Ansip	148.000.000,00	50	Ansip	-		Ansip	-	0	Ansip	-		Ansip	-		Ansip	-	0	Ansip	-	0	Ansip	-	0	Ansip	-	0,00	%	0,00%	
						JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.610.148.616,00			109.075.100,00			496.128.600,00			7.472.500,00			38.322.900,00			57.251.720,00			215.029.046,00			318.076.166,00			427.151.266,00					
III						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																	
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																															DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA																															DINAS PEMUDA, OLARHAGA, PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANINAN																															DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
4						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																															DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
		3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																																	
		3	30	2	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																																	
		3	30	2	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12	Laporan	132.000.000,00	3	Laporan	32.866.500,00	3	Laporan	33.000.000,00		Laporan	-																			
		3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																																	
		3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																																	
		3	30	3	2.01	02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	232	Unit	412.345.360,00	58	Unit	266.808.038,00	58	Unit	103.086.340,00	2	Unit	228.054,00																			
		3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																																	
		3	30	3	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	48	Dokumen	179.574.000,00	12	Dokumen	423.752.216,00	12	Dokumen	44.893.500,00		Dokumen	-																			
		3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																																	
		3	30	4	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																																	
		3	30	4	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	52	Laporan	2.312.856.000,00	53	Laporan	776.517.740,00	13	Laporan	578.214.000,00	1	Laporan	2.750.000,00																			

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s.d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34 = 14 / 6 x100%	35 = 14 / 6 x100%	36		
				Penataan Penyebaran Penduduk yang Bersaal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan Kelayakan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bag Penduduk Sotempat dan Transmigran	4	Dokumen	120.000.000,00	1	Dokumen	29.849.100,00	1	Dokumen	30.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	21.039.400	1	Dokumen	21.039.400	2	Dokumen	50.888.500	50,00	%	42,41%				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSKRIPSI	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian																																
				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Pemukiman	40	Kepala Keluarga	37.880.000,00	14	Kepala Keluarga	37.692.260,00	10	Kepala Keluarga	37.880.000,00	2	Kepala Keluarga	4.159.800,00	2	Kepala Keluarga	4.159.800,00	1	Kepala Keluarga	252.000,00	5	Kepala Keluarga	21.374.600	10	Kepala Keluarga	29.946.200	24	Kepala Keluarga	67.638.460	60,00	%	178,56%		
				Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kerebabgagan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kerebabgagan	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kerebabgagan	4	Satuan Pemukiman	160.000.000,00	2	Satuan Pemukiman	108.837.775,00	24	Satuan Pemukiman	240.000.000,00	6	Satuan Pemukiman	29.037.000,00	6	Satuan Pemukiman	22.035.000,00	6	Satuan Pemukiman	37.121.800,00	6	Satuan Pemukiman	123.879.000	24	Satuan Pemukiman	212.072.800	26	Satuan Pemukiman	320.910.575	650,00	%	200,57%		
				JUMILAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				437.880.000,00			206.379.135,00			337.880.000,00			33.196.800,00			26.194.800,00			37.373.800,00			186.565.200,00			283.330.600,00			489.709.735,00					
IV				URUSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
1				SEKRETARIAT DAERAH																															SEKRETARIAT DAERAH		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Pelayanan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati - Persentase tercapainya Regulasi Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi																																
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tetaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	01	01	2.01																												
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	120.000.200,00	2	Dokumen	29.621.500,00	2	Dokumen	193.878.000,00	1	Dokumen	9.633.000,00	Dokumen	91.261.278,00	Dokumen	39.964.600,00	Dokumen	182.128.528,00	1	Dokumen	322.986.806	3	Dokumen	352.608.306	37,50	%	293,84%					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun																																
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meremina Gaji dan Tunjangan ASN	5472	Orang	45.654.288.336,00	1368	Orang	11.874.500.825,00	114	Orang	12.893.616.444,00	114	Orang	2.348.671.747,00	114	Orang	4.904.647.741,00	Orang	4.827.415.276,00	Orang	7.179.974.982,00	228	Orang	19.280.709.746	1596	Orang	31.135.210.571	29,17	%	68,20%				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Dinas yang disediakan																																
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Anlbut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Anlbut Kelengkapan yang disediakan	56	Paket	1.178.790.000,00	42	Paket	522.505.971,00	14	Paket	698.890.000,00	0	Paket	-	4	Paket	179.403.750,00	Paket	547.351.500,00	4	Paket	726.755.250	46	Paket	1.249.261.221	82,14	%	105,98%						
				Pendatan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendatan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	484	Dokumen	10.692.000.000,00	483	Dokumen	2.418.700.000,00	121	Dokumen	3.584.400.000,00	30	Dokumen	485.350.000,00	30	Dokumen	973.950.000,00	Dokumen	1.219.750.000,00	Dokumen	1.713.450.000,00	60	Dokumen	4.392.500.000	543	Dokumen	6.811.200.000	112,19	%	63,70%				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pensingkat daerah yang difasilitasi -Persentase Pelaksanaan perjalanan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Rp	Volume										Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																				
		6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	148	Laporan	4.130.907.912,00	111	Laporan	932.966.430,00	37	Laporan	1.032.726.551,00	9	Laporan	241.946.938,00	9	Laporan	290.129.047,00		Laporan	485.463.844,00		Laporan	510.603.264,00	18	Laporan	1.528.143.093	129	Laporan	2.461.109.523	87,16	%	59,58%	
		7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan	400	Laporan	2.135.800.000,00	300	Laporan	1.596.274.000,00	100	Laporan	609.891.000,00	25	Laporan		25	Laporan	282.925.500,00		Laporan	229.150.000,00		Laporan	752.000.500,00	50	Laporan	1.264.076.000	350	Laporan	2.860.350.000	87,50	%	133,92%	
		8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	480	Laporan	6.102.090.000,00	360	Laporan	1.943.046.760,00	120	Laporan	3.304.745.000,00	30	Laporan	185.952.200,00	30	Laporan	333.714.700,00		Laporan	608.382.700,00		Laporan	2.798.538.100,00	60	Laporan	3.926.587.700	420	Laporan	5.869.634.460	87,50	%	96,19%	
		4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara																															
		4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	400	Unit	443.960.000,00	300	Bulan	48.288.200,00	100	Unit	300.000.000,00	25	Unit		25	Unit	13.263.600,00		Unit	106.364.630,00		Unit	140.745.800,00	50	Bulan	260.374.030	350	Bulan	308.662.230	87,50	%	69,52%	
		4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	148	Unit	13.704.082.200,00	111	Unit	3.725.829.209,00	37	Unit	1.539.530.000,00	9	Unit	296.072.800,00	9	Unit	542.512.897,00		Unit	794.133.890,00		Unit	1.265.611.830,00	18	Unit	2.898.331.417	129	Unit	6.624.160.626	87,16	%	48,34%	
		4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	232	Unit	667.600.000,00	174	Unit	121.085.000,00	58	Unit	350.000.000,00	15	Unit		15	Unit	107.191.000,00		Unit	-		Unit	272.725.702,00	30	Unit	379.916.702	204	Unit	501.001.702	87,93	%	75,05%	
		4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terakannya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. - Tepeliharanya Gedung Jaro Pirarahan. - Tepeliharanya Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati. - Tepeliharanya Pendopo Rujab Bupati. - Tepeliharanya Perlatan dan Perbaikan Perlatan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. - Tepeliharanya Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. - Tepeliharanya Tanaman Hias Kantor Bupati. - Tepeliharanya Tanaman Hias Rujab Bupati. - Rehab Lantunan Kantor Bupati. - Rehab Lantunan Ruang Vidio dan Inventaris Kantor	32	Unit	2.132.240.000,00	24	Unit	999.615.100,00	8	Unit	3.118.066.920,00	2	Unit		2	Unit	4.125.000,00		Unit	780.936.000,00		Unit	2.821.463.000,00	4	Unit	3.606.524.000	28	Unit	4.606.139.100	87,50	%	216,02%	
		4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Tepeliharanya Barang Inventaris Kantor	16	Unit	9.303.408.000,00	12	Unit	2.541.343.748,00	4	Unit	2.019.988.000,00	1	Unit		1	Unit			Unit	99.800.000,00		Unit	189.610.000,00	2	Unit	289.410.000	14	Unit	2.830.753.748	87,50	%	30,43%	
		4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																																
		4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Penyediaan Makan dan Minum Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Bupati. - Kebutuhan pakan ternak			3.462.101.000,00	12	Bulan	1.167.316.350,00	12	bulan	1.141.393.500,00	3	Bulan	105.000.000,00	3	Bulan	344.321.000,00		Bulan	169.659.000,00		Bulan	1.175.667.000,00	6	Bulan	1.794.667.000	18	Bulan	2.961.963.350	#DIV/0!	%	85,55%	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Kebutuhan Makan dan Minum Wakil Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati						736.322.000,00									916.629.940,00	0		916.629.940	0		916.629.940,00	#DIV/0!	%	#DIV/0!							
		4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Kebutuhan Makan dan Minum Wakil Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket		634.325.200,00	12	Bulan	106.107.500,00	12	bulan	157.798.000,00	3	Bulan	36.636.000,00	3	Bulan	36.636.000,00		Bulan	44.975.000,00		Bulan	324.153.000,00	6	Bulan	405.764.000	18	Bulan	510.871.500	#DIV/0!	%	80,54%	
		4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Terakannya Penataan Organisasi																															
		4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Penda/Perkap/Keputusan/Laporan Penataan Kelembagaan Persentase menyusun arjab dan ejab	72	Dokumen	1.220.000.000,00	54	Dokumen	262.895.489,00	18	Dokumen	294.111.000,00	3	Dokumen	13.654.585,00	5	Dokumen	50.563.403,00		Dokumen	88.824.935,00		Dokumen	209.384.013,00	8	Dokumen	362.426.936	62	Dokumen	625.322.425	86,11	%	51,26%	
		4 01 01 2.13 02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyelesaian penyusunan Baku Kelengkapan Domestik, Pencapaian penyusunan SKM, Pencapaian penyusunan SPP dan SOP serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik	16	Laporan	840.000.000,00	4	Laporan	264.762.728,00	4	Laporan	308.500.000,00	1	Laporan	31.228.000,00	1	Laporan	96.594.718,00		Laporan	95.182.000,00		Laporan	194.332.618,00	2	Laporan	417.337.336	6	Laporan	682.100.064	37,50	%	81,20%	
		4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terakannya Sistem Reformasi Birokrasi, Pencapaian persentase Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan	16	Dokumen	1.520.000.000,00	12	Dokumen	415.886.980,00	4	Dokumen	370.000.000,00	1	Dokumen	46.834.000,00	1	Dokumen	54.520.500,00		Dokumen	156.114.464,00		Dokumen	202.667.700,00	2	Dokumen	460.136.664	14	Dokumen	876.023.644	87,50	%	57,63%	
		4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terakannya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																															
		4 01 01 2.14 01	Facilitasi Keptokotolan	Terakannya kegiatan acara kepengisian dan acara resmi daerah	16	laporan	2.427.239.592,00	12	Laporan	1.241.433.907,00	4	Laporan	606.809.860,00	1	Laporan	114.936.558,00	1	Laporan	219.026.048,00		Laporan	218.575.930,00		Laporan	632.835.142,00	2	Laporan	1.185.375.678	14	Laporan	2.426.809.585	87,50	%	99,98%	
		4 01 01 2.14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Terakannya kurungan kerja dan inspeksi KDH dan WKDH	16	laporan	2.527.330.600,00	12	Laporan	639.457.977,00	4	Laporan	1.813.862.500,00	1	Laporan	27.290.000,00	1	Laporan	405.270.454,00		Laporan	310.265.630,00		Laporan	882.019.863,00	2	Laporan	1.624.845.947	14	Laporan	2.264.303.924	87,50	%	89,59%	

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp							
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan												Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																
		4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terkaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Bantul Tersedianya bahan bacaan pada Sekretariat Daerah Kab. Bantul Tersedianya buku-buku keadilan Pemerintah Daerah	16	Laporan	2.614.449.808,00	12	Laporan	836.248.300,00	4	Laporan	689.723.250,00	1	Laporan	158.859.900,00	1	Laporan	108.645.200,00		Laporan	361.074.400,00		Laporan	786.005.200,00	2	Laporan	1.414.584.700	14	Laporan	2.250.833.000	87,50	%	86,09%		
	S.2 : Menurumnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	- Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat																																
				- Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintah																																
				- Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi Hukum																																
		4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terkaksananya Administrasi Tata Pemerintahan																																
		4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terkaksananya Pembinaan dan Pengawasan PATEN Tersaksananya penyelenggaraan Pembangunan Sarana/Pasaranana dan Pemeliharaan Masjid	68	Dokumen	636.000.000,00	51	Dokumen	272.323.300,00	17	Dokumen	194.560.000,00	4	Dokumen	44.214.000,00	4	Dokumen	32.701.790,00		Dokumen	71.259.000,00		Dokumen	222.819.790,00	8	Dokumen	370.994.580	59	Dokumen	643.317.880	86,76	%	101,15%		
		4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terkaksananya Pembakuan Nama Rukabumi / Toponimi Tersaksananya Pendataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tersaksananya Pengaturan	48	Dokumen	1.200.000.000,00	36	Bulan	607.114.107,00	12	Dokumen	338.440.000,00	3	Dokumen	130.443.000,00	3	Dokumen	10.815.000,00		Dokumen	130.443.000,00		Dokumen	544.843.373,00	6	Bulan	816.544.373	42	Bulan	1.423.658.480	87,50	%	118,64%		
		4 01 02 2.01 03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terkaksananya fasilitasi Kelajasma Daerah Tersaksananya Pelaksanaan Pertemuan Teknis dan Pengendalian Rencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembentukan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Tertib dan Linmas Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tersusunnya Laporan Penerapan SPM Terwujudnya Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi	32	Dokumen	3.995.536.000,00	24	Dokumen	1.288.827.409,00	8	Dokumen	1.035.894.000,00	2	Dokumen	149.043.635,00	2	Dokumen	155.056.365,00		Dokumen	276.623.454,00		Dokumen	516.180.839,00	4	Dokumen	1.096.904.293	28	Dokumen	2.385.731.702	87,50	%	58,71%		
		4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terkaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan																																
		4 01 02 2.02 01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terkaksananya Pelayanan Urutan Haji, - Penyelenggaraan Kegiatan Sabtri Ramadhan, Nyepi dan Natal, - Pendataan Rumah Badah, - Pengendalian dan verifikasi Rumah Badah	800	Dokumen	32.026.111.800,00	200	Dokumen	10.652.647.459,00	200	Dokumen	12.761.639.530,00	50	Dokumen	548.637.575,00	50	Dokumen	4.889.162.200,00		Dokumen	5.075.862.342,00		Dokumen	11.679.895.050,00	100	Dokumen	22.193.557.167	300	Dokumen	32.846.204.626	37,50	%	102,56%		
		4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Pelaksanaan Pertemuan Teknis Bidang Kersa, - Pertemuan Teknis dalam Daerah, - Pembinaan UKS dan LSS, - Pertemuan Teknis dengan SKPD terkait penanggulangan kemiskinan, - Pelaksanaan lain	652	Dokumen	39.212.000.000,00	489	Dokumen	13.088.812.350,00	163	Dokumen	12.578.000.000,00	40	Dokumen	999.294.600,00	41	Dokumen	4.837.251.260,00		Dokumen	3.598.270.200,00		Dokumen	14.494.537.412,00	81	Dokumen	23.929.353.472	570	Dokumen	37.018.165.822	87,42	%	94,41%		
		4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Pembayaran Tunjangan Demang, Sekretaris Demang dan Mantri Adat Kec. - Peningkatan Kapasitas DAD Kab, Kec dan Demang, - Pembinaan Kedamangan, Pembayaran Honor Mantri Adat, - Pertemuan Teknis dalam daerah Kedamangan, - Pertemuan Teknis luar daerah Kedamangan, Mengikutl Kep. Promosi Kebudayaan / Adat, - Pembinaan Senam Masial Senda Kab. Barto Selatan, -	452	Dokumen	5.705.280.000,00	339	Bulan	1.416.366.946,00	113	Dokumen	1.611.720.000,00	28	Dokumen	335.389.896,00	28	Dokumen	71.040.600,00		Dokumen	648.465.906,00		Dokumen	1.230.130.600,00	56	Bulan	2.285.027.002	395	Bulan	3.701.393.948	87,39	%	64,88%		

		4	01	02	2.03		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Pelaksanaan RPKD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp								
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan												Volume	Satuan	Volume	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																						
		4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kegiatan Sages Sabar Pungli Terlaksananya Mou Kab. Bantul , RUTAN Negara Kelas I B Bantul dan LBH Barito Terbit Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya Penyuluhan Keadilan Hukum Terlaksananya Diseminasi	1180	Dokumen	800.528.000,00	885	Dokumen	196.405.900,00	295	Dokumen	200.132.000,00	73	Dokumen	39.212.000,00	74	Dokumen	36.058.000,00		Dokumen	88.551.000,00		Dokumen	213.318.775,00	147	Dokumen	377.139.775	1032	Dokumen	573.545.675	87,46	%	71,65%			
	T.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	- Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana																																	
				- Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang di tender/tekteksikan																																	
				- Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana																																	
		4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																																	
		4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Inventarisasi dan Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	24	Dokumen	2.054.044.000,00	18	Dokumen	599.127.100,00	6	Dokumen	248.511.000,00	1	Dokumen	1	Dokumen	117.376.600,00		Dokumen	66.969.600,00		Dokumen	350.772.609,00	2	Dokumen	535.118.809	20	Dokumen	1.134.245.909	83,33	%	55,22%				
		4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian pada bidang Perekonomian sehingga terciptanya perekonomian yang berkualitas	24	Laporan	1.098.000.000,00	18	Laporan	352.047.502,00	6	Laporan	349.500.000,00	1	Laporan	1	Laporan	74.962.552,00		Laporan	88.235.200,00		Laporan	155.578.247,00	2	Laporan	318.775.999	20	Laporan	670.823.501	83,33	%	61,10%				
		4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tersedianya data potensi ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi	24	Dokumen	246.240.000,00	18	Dokumen	53.157.600,00	6	Dokumen	151.560.000,00	1	Dokumen	1	Dokumen	28.151.000,00		Dokumen	44.245.000,00		Dokumen	44.951.000,00	2	Dokumen	127.247.000	20	Dokumen	180.404.600	83,33	%	73,26%				
		4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																																	
		4 01 03 2.02 01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program	16	Dokumen	879.999.720,00	4	Dokumen	280.602.301,00	4	Dokumen	220.000.000,00	1	Dokumen	1	Dokumen	34.710.303,00		Dokumen	62.644.523,00		Dokumen	130.085.485,00		Dokumen	183.838.353,00	2	Dokumen	411.278.664	6	Dokumen	691.880.965	37,50	%	78,62%	
		4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16	Laporan	524.471.760,00	4	Laporan	157.401.465,00	4	Laporan	151.117.750,00	1	Laporan	1	Laporan	15.512.678,00		Laporan	63.585.750,00		Laporan	40.439.276,00		Laporan	196.742.889,00	2	Laporan	316.280.593	6	Laporan	473.682.058	37,50	%	90,32%	
		4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Tegra	16	Laporan	733.199.360,00	4	Laporan	204.299.063,00	4	Laporan	183.299.750,00	1	Laporan	1	Laporan	28.272.000,00		Laporan	56.503.100,00		Laporan	103.807.850,00		Laporan	159.014.150,00	2	Laporan	347.597.100	6	Laporan	551.896.163	37,50	%	75,27%	
		4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa																																	
		4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya Dokumen Pemilihan dan Dokumen Pendukung Lainnya Adanya Dokumen Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa Semester I dan II Adanya Dokumen Strategi Pengadaan Barang/Jasa Tahunan Adanya Katalog Elektronik Lokal/Sektoral Membantu Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa) Tersedianya Dokumen Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa pada Buku Register Terlaksananya Morev Progres	600	Dokumen	466.443.232,00	150	Dokumen	214.481.058,00	150	Dokumen	170.232.500,00	36	Dokumen	16.358.000,00	38	Dokumen	3.928.000,00		Dokumen	111.044.331,00		Dokumen	233.522.483,00	74	Dokumen	364.852.814	224	Dokumen	579.333.872	37,33	%	124,20%			
		4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Persentase Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Jumlah Persentase tersedianya system Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Pendukung dan infrastrukturnya Pembinaan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya pengembangan system informasi yang amanah	600	Dokumen	1.157.365.968,00	150	Bulan	377.993.550,00	150	Dokumen	350.870.000,00	36	Dokumen	24.087.000,00	38	Dokumen	165.899.500,00		Dokumen	64.672.078,00		Dokumen	344.775.500,00	74	Bulan	599.434.078	224	Bulan	977.427.628	37,33	%	84,45%			
		4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kompetensi Personil UKPBJ untuk memenuhi Persyaratan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Penanganan mediasi pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Penerapan seluruh standar LPSE Terlaksananya Administrasi Pengadaan Terlaksananya layanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kabupaten Tersedianya informasi tingkat kematangan organisasi UKPBJ Tersedianya laporan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah	132	Orang	997.041.600,00	33	Orang	344.346.434,00	33	Orang	311.311.250,00	8	Orang	35.517.000,00	8	Orang	70.986.794,00		Orang	87.662.002,00		Orang	321.861.492,00	16	Orang	516.027.288	49	Orang	860.373.722	37,12	%	86,29%			

No	Sasaran	Kode	Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume			Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					1	2		3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkatasnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																			
		4 02 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	48	Laporan	400.000.000,00	12	Laporan	353.923.203,00	12	Laporan	200.000.000,00	3	Laporan	6.625.000,00	3	Laporan	91.225.000,00	3	Laporan	2.000.000,00	3	Laporan	96.817.000,00	12	Laporan	196.667.000	24	Laporan	550.590.203	50,00	%	137,65%
		4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
		4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	Unit	200.000.000,00	1	Unit	229.650.000,00	1	Unit	1.251.386.000,00	Unit	-	Unit	168.703.600,00	Unit	390.300.000,00	1	Unit	590.680.000,00	1	Unit	1.149.683.600	2	Unit	1.379.333.600	50,00	%	689,67%			
		4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	Unit	200.000.000,00	1	Unit	1.170.366.600,00	1	Unit	3.815.109.700,00	Unit	-	Unit	11.000.000,00	Unit	331.800.000,00	1	Unit	3.324.240.000,00	1	Unit	3.667.040.000	2	Unit	4.837.406.600	50,00	%	2418,70%			
		4 02 01 2.07 09	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang disediakan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	1	Unit		1	Unit	150.000.000,00	1	Unit		Unit	-	Unit		Unit		1	Unit	144.000.000,00	1	Unit	144.000.000	2	Unit	144.000.000	200,00	%	#DIV/0!			
		4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	4	Unit	4.252.600.000,00	1	Unit	4.250.200.000,00	1	Unit	4.395.360.000,00	Unit	-	Unit	2.000.000,00	Unit	1.311.600.000,00	1	Unit	3.075.400.000,00	1	Unit	4.389.000.000	2	Unit	8.639.200.000	50,00	%	203,15%			
		4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	250.000.000,00	1	Unit	200.482.000,00										0	Unit	-	1	Unit	200.482.000	25,00	%	80,19%						
		4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
		4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	Laporan	64.000.000,00	12	Laporan	32.496.000,00	12	Laporan	101.000.000,00	3	Laporan	6.000.000,00	3	Laporan	23.900.000,00	3	Laporan	5.100.000,00	3	Laporan	22.000.000,00	12	Laporan	57.000.000	24	Laporan	89.496.000	50,00	%	139,84%
		4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	1.870.612.640,00	12	Laporan	231.954.807,00	12	Laporan	328.745.598,00	3	Laporan	58.792.699,00	3	Laporan	72.076.204,00	3	Laporan	66.896.096,00	3	Laporan	124.425.631,00	12	Laporan	322.190.630	24	Laporan	954.145.437	50,00	%	29,62%
		4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	Laporan	80.000.000,00	12	Laporan	34.315.000,00	12	Laporan	26.100.000,00	Laporan	-	6	Laporan	15.790.000,00	Laporan	-	6	Laporan	10.210.000,00	12	Laporan	26.000.000	24	Laporan	60.315.000	50,00	%	75,39%		
		4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	3.796.040.000,00	12	Laporan	2.309.798.681,00	12	Laporan	3.079.289.999,00	3	Laporan	310.516.023,00	3	Laporan	902.184.388,00	3	Laporan	593.522.846,00	3	Laporan	1.260.418.268,00	12	Laporan	3.066.641.475	24	Laporan	5.376.640.156	50,00	%	141,63%
		4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
		4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	Unit	400.000.000,00	3	Unit	161.992.629,00	3	Unit	233.031.150,00	Unit	12.840.503,00	Unit	49.254.272,00	Unit	26.566.203,00	3	Unit	111.979.814,00	3	Unit	200.640.792	6	Unit	362.633.421	50,00	%	90,66%			
		4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	Unit	403.136.000,00	3	Unit	100.370.467,00	3	Unit	125.769.100,00	Unit	3.764.920,00	Unit	28.385.302,00	Unit	20.663.243,00	3	Unit	72.677.615,00	3	Unit	125.491.080	6	Unit	225.861.547	50,00	%	56,03%			
		4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2860	Unit	40.000.000,00	715	Unit	60.000.000,00	715	Unit	60.000.000,00	Unit	-	Unit		Unit		715	Unit	59.400.000,00	715	Unit	59.400.000	1430	Unit	119.400.000	50,00	%	298,50%			
		4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	616	Unit	160.000.000,00	154	Unit	69.470.000,00	154	Unit	69.900.000,00	Unit	8.550.000,00	Unit	12.335.000,00	Unit	15.150.000,00	154	Unit	33.650.000,00	154	Unit	69.685.000	308	Unit	139.155.000	50,00	%	86,97%			
		4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	108	Unit	449.528.000,00	17	Unit	531.405.200,00	27	Unit	1.399.480.000,00	Unit	30.726.000,00	Unit	85.952.000,00	Unit	116.736.000,00	27	Unit	1.165.092.000,00	27	Unit	1.398.506.000	44	Unit	1.929.911.200	40,74	%	429,32%			
		4 02 01 2.13	Penataan Organisasi																															
		4 02 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	4	Dokumen	12.000.000,00	1	Dokumen	3.985.500,00	1	Dokumen	4.000.000,00	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	1	Dokumen	3.976.800,00	1	Dokumen	3.976.800	2	Dokumen	7.962.300	50,00	%	66,35%	

		4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan				Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp														
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan																Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																																			
		05 01 01 2.03 06	Pembangunan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan Barang Milk Daerah pada SKPD	28	Laporan	254.000.000,00	7	Laporan	62.360.000,00	7	Laporan	87.140.000,00	0	Laporan	8.900.000,00	Laporan	13.350.000,00	7	Laporan	13.350.000,00	0		Laporan		45.530.091,00		7		Laporan		81.130.091	14		Laporan		143.490.091	50,00	%	56,49%										
		05 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																															
		05 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	200.000.000,00	1	Paket	46.724.500,00	1	Paket	53.534.250,00	0	Paket	-		Paket		1	Paket	53.460.700,00	1	Paket	53.460.700	2	Paket	100.185.200	50,00	%	50,09%																			
		05 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	Dokumen	108.448.000,00	4	Dokumen	26.062.000,00	4	Dokumen	32.490.000,00	1	Dokumen	2.100.000,00	2	Dokumen	6.515.243,00	Dokumen	6.258.756,00	1	Dokumen	16.218.413,00	4	Dokumen	31.092.412	8	Dokumen	57.154.412	50,00	%	52,70%																	
		05 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	3	Peraturan Perundang-undangan	90.856.150,00	0	Peraturan Perundang-undangan	-	1	Peraturan Perundang-undangan	90.856.150,00		Peraturan Perundang-undangan	-		Peraturan Perundang-undangan	-	1	Peraturan Perundang-undangan	22.571.375,00	1	Peraturan Perundang-undangan	22.571.375	1	Peraturan Perundang-undangan	22.571.375	33,33	%	24,84%																			
		05 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16	Orang	20.000.000,00	1	Orang	6.600.000,00	1	Orang	12.300.000,00	0	Orang	-	Orang	-	1	Orang		0	Orang	7.040.000,00	1	Orang	7.040.000	2	Orang	13.640.000	12,50	%	68,20%																	
		05 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																															
		05 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	113.925.320,00	1	Paket	58.478.958,00	1	Paket	55.000.000,00		Paket	-	Paket	16.657.995,00	Paket	11.351.589,00	1	Paket	26.316.083,00	1	Paket	54.325.667	2	Paket	112.804.625	50,00	%	99,02%																		
		05 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	120.000.000,00	1	Paket	65.654.281,00	1	Paket	35.810.000,00		Paket	-	Paket	8.492.860,00	Paket	7.939.015,00	1	Paket	19.369.152,00	1	Paket	35.801.027	2	Paket	101.455.308	50,00	%	84,55%																		
		05 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	80.000.000,00	1	Paket	17.752.450,00	1	Paket	10.114.500,00		Paket		Paket	1.195.000,00	Paket	3.434.110,00	1	Paket	3.205.204,00	1	Paket	7.834.314	2	Paket	25.586.764	50,00	%	31,98%																		
		05 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	120.000.000,00	1	Paket	50.054.000,00	1	Paket	30.860.000,00		Paket	-	Paket	15.451.517,00	Paket	4.418.232,00	1	Paket	10.922.130,00	1	Paket	30.791.879	2	Paket	80.845.879	50,00	%	67,37%																		
		05 01 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96	Laporan	360.000.000,00	24	Laporan	54.843.400,00	24	Laporan	55.850.000,00	5	Laporan	6.866.790,00	Laporan	14.858.475,00	Laporan	10.388.820,00	19	Laporan	23.401.085,00	24	Laporan	55.515.170	48	Laporan	110.358.570	50,00	%	30,66%																		
		05 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	1.060.000.000,00	75	Laporan	519.614.255,00	75	Laporan	514.243.500,00	13	Laporan	32.910.247,00	35	Laporan	109.320.715,00	Laporan	133.153.030,00	27	Laporan	238.802.635,00	75	Laporan	514.186.627	150	Laporan	1.033.800.882	50,00	%	97,53%																	
		05 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	120.000.000,00	1	Dokumen	31.000.000,00	1	Dokumen	48.800.000,00	0	Dokumen	6.300.000,00	Dokumen	9.450.000,00	Dokumen	9.339.750,00	1	Dokumen	19.367.435,00	1	Dokumen	44.447.185	2	Dokumen	75.447.185	50,00	%	62,87%																		
		05 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah																																															
		05 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Paket	52.000.000,00	4	Paket	19.240.000,00	4	Paket	99.439.000,00		Paket	-					4	paket	96.875.250,00	4	Paket	96.875.250	8	Paket	116.115.250	50,00	%	223,30%																		
		05 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	329.547.800,00	2	Unit	210.470.800,00	2	Unit	255.869.335,00		Unit	-	Unit	3.400.000,00	2	Unit	92.755.000,00	0	Unit	152.130.500,00	2	Unit	248.285.500	4	Unit	458.756.300	50,00	%	139,21%																	
		05 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	101.000.000,00	0	Unit		1	unit	-		Unit	-	Unit		Unit		0	Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%																		
		05 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																																															
		05 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	24.000.000,00	12	Laporan	5.914.200,00	12	Laporan	10.000.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	3.840.000,00	7	Laporan	1.200.000,00	4	Laporan	4.956.000,00	12	Laporan	9.996.000	24	Laporan	15.910.200	50,00	%	66,29%																
		05 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	44	Laporan	1.004.601.600,00	11	Laporan	150.027.087,00	11	Laporan	396.990.000,00	3	Laporan	22.849.208,00	3	Laporan	51.485.317,00	3	Laporan	33.409.351,00	2	Laporan	39.772.181,00	11	Laporan	147.516.057	22	Laporan	297.543.144	50,00	%	29,62%																
		05 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	52.372.000,00	12	Laporan	36.509.380,00	12	Laporan	35.000.000,00	0	Laporan	-	6	Laporan	-	3	Laporan		3	Laporan	33.076.356,00	12	Laporan	33.076.356	24	Laporan	69.585.736	50,00	%	132,87%																
		05 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	400.000.000,00	12	Laporan	108.664.525,00	12	Laporan	155.675.000,00	0	Laporan	16.200.000,00	6	Laporan	36.875.393,00	3	Laporan	29.550.271,00	3	Laporan	65.748.683,00	12	Laporan	148.974.347	24	Laporan	257.038.872	50,00	%	64,26%																
		05 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																															
		05 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	80.000.000,00	1	Unit	21.835.928,00	1	Unit	16.766.600,00	0	Unit	-	1	Unit	9.495.000,00	Unit	574.945,00	Unit	6.637.225,00	1	Unit	16.707.170	2	Unit	38.543.096	50,00	%	48,18%																		
		05 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320	Unit	80.000.000,00	80	Unit	8.832.000,00	80	Unit	29.030.000,00	0	Unit		5	Unit	1.664.000,00	0	Unit	5.940.480,00	75	Unit	17.436.988,00	80	Unit	25.041.468	160	Unit	33.873.468	50,00	%	42,34%																
		05 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	120.000.000,00	1	Unit	49.970.500,00	1	Unit	119.800.000,00	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit		1	Unit	109.534.500,00	1	Unit	109.534.500	2	Unit	159.505.000	50,00	%	132,92%																	
		05 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	80.000.000,00	1	Unit	14.000.000,00	1	Unit	30.000.000,00	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit		1	Unit	29.768.172,00	1	Unit	29.768.172	2	Unit	43.768.172	50,00	%	54,71%																	
		05 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI																																															
		05 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																																															
		05 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita acara	60.000.000,00	1	Berita acara	23.904.092,00	1	Berita acara	78.190.000,00	1	Berita acara	15.942.113,00		Berita acara			Berita acara	13.878.000,00	0	Berita acara		1	Berita acara	29.820.113	2	Berita acara	53.724.205	40,00	%	89,54%																
		05 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	12	Berita acara	220.000.000,00	3	Berita acara	44.880.500,00	3	Berita acara	34.805.000,00	3	Berita acara	2.100.000,00		Berita acara	18.997.600,00	Berita acara	8.620.																													

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah (n-1)	Indikator Kinerja Program dan Program/ Kegiatan (n-1)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp											
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan								Volume	Satuan	Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 / 6 x100%	16																				
		05 01 02 2.01 06	Penyipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terealisasi oleh Kecamatan	120	Usulan	480.000.000,00	30	Usulan	118.739.698,00	30	Usulan	124.000.000,00	30	Usulan	20.061.250,00	Usulan	97.248.000,00		Usulan	1.244.000,00	0	Usulan	30	Usulan	118.553.250	60	Usulan	237.292.948	50,00	%	49,44%			
		05 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Pengisian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dihasilkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dihasilkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	9	Dokumen	400.000.000,00	3	Dokumen	301.185.649,00	3	Dokumen	891.250.000,00	2	Dokumen	28.096.000,00	Dokumen	106.145.299,00		Dokumen	133.357.492,00	1	Dokumen	3	Dokumen	781.250.878	6	Dokumen	1.082.436.527	66,67	%	270,61%			
		05 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																																
		05 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	124	Masukan	80.000.000,00	31	Masukan	15.176.200,00	31	Masukan	54.600.000,00	0	Masukan	-	Masukan	9.912.595,00	31	Masukan	14.844.000,00	0	Masukan	31	Masukan	49.406.095	62	Masukan	64.582.295	50,00	%	80,73%			
		05 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	124	Orang	280.000.000,00	31	Orang	69.965.504,00	31	Orang	49.936.000,00	0	Orang	-	Orang	16.747.500,00	31	Orang		0	Orang	31	Orang	44.102.790	62	Orang	114.068.294	50,00	%	40,74%			
		05 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4	Buku	80.000.000,00	1	Buku	29.782.200,00	1	Buku	40.000.000,00	1	Buku	12.084.315,00	Buku	10.608.000,00		Buku	12.989.481,00	0	Buku	1	Buku	35.681.796	2	Buku	65.483.996	50,00	%	81,83%			
		05 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																																
		05 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	16	Laporan	499.068.000,00	4	Laporan	126.549.512,00	4	Laporan	154.175.000,00	1	Laporan	15.556.000,00	1	Laporan	9.552.000,00	1	Laporan	36.303.090,00	1	Laporan	4	Laporan	108.616.749	8	Laporan	235.166.261	50,00	%	47,12%		
		05 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaita Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Berkaita Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16	Laporan	300.000.000,00	4	Laporan	196.785.336,00	4	Laporan	823.136.000,00	1	Laporan	2.300.000,00	1	Laporan	17.457.000,00	1	Laporan	27.845.585,00	1	Laporan	4	Laporan	538.885.659	8	Laporan	735.670.995	50,00	%	245,22%		
		05 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																
		05 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																																
		05 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	100.000.000,00	2	Dokumen	74.766.000,00	2	Dokumen	80.000.000,00	0	Dokumen	4.971.000,00	1	Dokumen	51.529.253,00	0	Dokumen		1	Dokumen	2	Dokumen	78.609.403	4	Dokumen	153.375.403	66,67	%	153,38%		
		05 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28	Perangkat daerah	110.000.000,00	7	Perangkat daerah	62.337.249,00	7	Perangkat daerah	45.727.000,00	0	Perangkat daerah	-	Perangkat daerah	8.177.000,00	7	Perangkat daerah		Perangkat daerah	37.009.230,00	7	Perangkat daerah	7	Perangkat daerah	45.186.230	14	Perangkat daerah	107.523.479	50,00	%	97,75%	
		05 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28	Laporan	120.000.000,00	7	Laporan	54.852.845,00	7	Laporan	50.000.000,00	0	Laporan	2.100.000,00	Laporan	3.150.000,00	7	Laporan	32.126.800,00	Laporan	9.657.625,00	7	Laporan	7	Laporan	47.034.425	14	Laporan	101.887.270	50,00	%	84,91%	
		05 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	28	Laporan	200.000.000,00	7	Laporan	44.816.634,00	7	Laporan	50.000.000,00	0	Laporan	2.100.000,00	2	Laporan	14.106.000,00	1	Laporan	21.099.230,00	4	Laporan	7	Laporan	47.109.480	14	Laporan	91.926.114	50,00	%	45,96%		
		05 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	220.000.000,00	3	Dokumen	129.449.512,00	3	Dokumen	153.190.000,00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	22.006.000,00	1	Dokumen	76.594.152,00	0	Dokumen	3	Dokumen	151.934.096	6	Dokumen	281.383.608	50,00	%	127,90%		
		05 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	36	Perangkat daerah	160.000.000,00	9	Perangkat daerah	114.074.668,00	9	Perangkat daerah	133.800.000,00		Perangkat daerah	-	Perangkat daerah	20.144.000,00	9	Perangkat daerah	15.284.000,00	Perangkat daerah	97.726.031,00	9	Perangkat daerah	9	Perangkat daerah	133.154.031	18	Perangkat daerah	247.228.699	50,00	%	154,52%	
		05 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	36	Perangkat daerah	220.000.000,00	9	Perangkat daerah	104.815.350,00	9	Perangkat daerah	101.640.000,00	0	Perangkat daerah	47.605.400,00	3	Perangkat daerah	12.728.455,00	6	Perangkat daerah	3.900.000,00	Perangkat daerah	31.226.300,00	9	Perangkat daerah	9	Perangkat daerah	95.460.155	18	Perangkat daerah	200.275.505	50,00	%	91,03%
		05 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjangsan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	36	Dokumen	675.960.000,00	9	Dokumen	167.953.020,00	9	Dokumen	253.060.000,00	1	Dokumen	5.200.000,00	4	Dokumen	67.825.670,00	2	Dokumen	16.044.750,00	2	Dokumen	9	Dokumen	246.594.246	18	Dokumen	414.547.266	50,00	%	61,33%		
		05 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																																
		05 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	Dokumen	453.520.000,00	3	Dokumen	150.175.209,00	3	Dokumen	143.940.000,00	0	Dokumen	29.416.513,00	2	Dokumen	52.701.395,00	0	Dokumen	46.964.685,00	1	Dokumen	3	Dokumen	143.790.393	6	Dokumen	293.965.002	54,55	%	64,82%		
		05 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	24	Perangkat daerah	23.800.000,00	6	Perangkat daerah	14.046.800,00	6	Perangkat daerah	5.000.000,00	0	Perangkat daerah	3.562.000,00	6	Perangkat daerah	440.000,00	0	Perangkat daerah		Perangkat daerah	998.000,00	6	Perangkat daerah	6	Perangkat daerah	5.000.000	12	Perangkat daerah	19.046.800	50,00	%	80,03%
		05 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	24	Perangkat daerah	188.000.000,00	6	Perangkat daerah	127.990.000,00	6	Perangkat daerah	90.004.000,00	0	Perangkat daerah	2.100.000,00	6	Perangkat daerah	29.663.004,00	0	Perangkat daerah	3.150.000,00	Perangkat daerah	53.238.814,00	6	Perangkat daerah	6	Perangkat daerah	88.151.818	12	Perangkat daerah	216.141.818	50,00	%	114,97%

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp						
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan												Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																				
		05 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	Laporan	504.000.000,00	2	Laporan	163.264.836,00	2	Laporan	150.000.000,00	0	Laporan	5.200.000,00	1	Laporan	87.827.776,00	1	Laporan	18.517.000,00		Laporan	33.589.300,00	2	Laporan	145.134.076	4	Laporan	308.398.912	50,00	%	61,19%	
		05 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	132.120.000,00	2	Dokumen	76.525.800,00	2	Dokumen	212.060.000,00	1	Dokumen	16.342.000,00		Dokumen	49.526.000,00	1	Dokumen	62.036.744,00		Dokumen	74.417.238,00	2	Dokumen	202.321.982	4	Dokumen	278.847.782	66,67	%	211,06%	
		05 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	Perangkat daerah	9.000.000,00	3	Perangkat daerah	4.500.000,00	6	Perangkat daerah	5.000.000,00	0	Perangkat daerah	1.824.000,00	0	Perangkat daerah			Perangkat daerah	3.176.000,00	6	Perangkat daerah	5.000.000	9	Perangkat daerah	9.500.000	75,00	%	105,56%				
		05 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	Perangkat daerah	200.000.000,00	3	Perangkat daerah	104.747.157,00	6	Perangkat daerah	76.520.000,00		Perangkat daerah	1.000.000,00	6	Perangkat daerah	23.947.200,00	0	Perangkat daerah			Perangkat daerah	49.079.766,00	6	Perangkat daerah	74.026.966	9	Perangkat daerah	178.774.123	75,00	%	89,39%	
		05 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang SDA	4	Dokumen	168.000.000,00	1	Dokumen	70.574.497,00	1	Dokumen	73.476.000,00	0	Dokumen	3.520.000,00		Dokumen	14.561.200,00	0	Dokumen	21.903.035,00	1	Dokumen	31.970.100,00	1	Dokumen	71.954.335	2	Dokumen	142.528.832	50,00	%	84,84%	
		05 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																																
		05 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30	Dokumen	124.600.000,00	6	Dokumen	30.691.150,00	6	Dokumen	107.126.000,00	3	Dokumen	17.782.800,00	0	Dokumen	39.636.600,00	1	Dokumen	15.717.000,00	2	Dokumen	32.447.400,00	6	Dokumen	105.583.800	12	Dokumen	136.274.950	40,00	%	109,37%	
		05 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	30	Perangkat daerah	28.600.000,00	6	Perangkat daerah	1.087.815,00	6	Perangkat daerah	7.150.000,00	6	Perangkat daerah	3.361.000,00	0	Perangkat daerah	3.780.000,00		Perangkat daerah	3.780.000,00		Perangkat daerah	-	6	Perangkat daerah	7.141.000	12	Perangkat daerah	8.228.815	40,00	%	28,77%	
		05 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	30	Perangkat daerah	600.600.000,00	6	Perangkat daerah	165.061.000,00	6	Perangkat daerah	150.150.000,00	6	Perangkat daerah	8.800.000,00	0	Perangkat daerah	47.213.500,00	0	Perangkat daerah	56.162.875,00		Perangkat daerah	29.328.375,00	6	Perangkat daerah	141.504.750	12	Perangkat daerah	306.565.750	40,00	%	51,04%	
		05 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Infrastruktur	30	Dokumen	720.000.000,00	6	Dokumen	354.830.959,00	6	Dokumen	460.930.000,00	0	Dokumen	18.217.225,00		Dokumen	33.536.000,00	0	Dokumen	107.899.209,00	6	Dokumen	275.012.363,00	6	Dokumen	434.664.797	12	Dokumen	789.495.756	40,00	%	109,65%	
		05 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	Dokumen	124.000.000,00	6	Dokumen	34.906.625,00	6	Dokumen	36.000.000,00	3	Dokumen	1.881.900,00	3	Dokumen	22.237.000,00		Dokumen	1.196.000,00		Dokumen	10.378.000,00	6	Dokumen	35.692.900	12	Dokumen	70.999.525	33,33	%	56,94%	
		05 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	24	Perangkat daerah	28.600.000,00	6	Perangkat daerah	76.500,00	6	Perangkat daerah	7.150.000,00	6	Perangkat daerah	-		Perangkat daerah	-	0	Perangkat daerah	5.907.000,00		Perangkat daerah	1.196.000,00	6	Perangkat daerah	7.103.000	12	Perangkat daerah	7.179.500	50,00	%	25,10%	
		05 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	24	Perangkat daerah	220.600.000,00	6	Perangkat daerah	53.870.830,00	6	Perangkat daerah	144.350.000,00	6	Perangkat daerah	-	0	Perangkat daerah	91.230.585,00	0	Perangkat daerah	47.633.000,00		Perangkat daerah	4.988.000,00	6	Perangkat daerah	143.851.585	12	Perangkat daerah	197.722.415	50,00	%	89,63%	
		05 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Kewilayahan	24	Laporan	292.600.000,00	6	Laporan	85.094.350,00	6	Laporan	177.044.000,00	0	Laporan	6.049.461,00		Laporan	10.636.000,00	0	Laporan	34.524.000,00	6	Laporan	80.966.400,00	6	Laporan	132.195.861	12	Laporan	217.290.211	50,00	%	74,26%	
			JUMLAH PERENCANAAN				29.935.951.254,00			9.212.986.617,00			12.165.474.136,00			1.143.662.052,00			3.029.094.201,00			2.185.000.433,00			4.421.071.167,00			10.778.737.853,00			19.991.724.470,00				
2			KEUANGAN																															BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Nilai SAKIP	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																																
		5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
		5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	208.931.836,00	1	Dokumen	51.596.000,00	1	Dokumen	88.441.000,00		Dokumen	15.270.500,00		Dokumen	25.204.400,00		Dokumen	30.928.700,00		Dokumen	500.000,00	0	Dokumen	71.903.600	1	Dokumen	123.499.600	33,33	%	59,11%	
		5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	194.878.125,00	1	Dokumen	51.346.600,00	1	Dokumen	87.219.000,00		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	14.453.250,00		Dokumen	45.613.000,00	0	Dokumen	60.066.250	1	Dokumen	111.412.850	33,33	%	57,17%	
		5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	208.931.836,00	1	Dokumen	54.704.800,00	1	Dokumen	80.062.750,00		Dokumen	15.289.600,00		Dokumen	40.626.400,00		Dokumen	15.284.400,00		Dokumen	-	0	Dokumen	71.200.400	1	Dokumen	125.905.200	33,33	%	60,26%	
		5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	195.010.734,00	1	Dokumen	56.941.200,00	1	Dokumen	83.991.000,00		Dokumen	-		Dokumen	-		Dokumen	13.692.000,00		Dokumen	56.303.000,00	0	Dokumen	69.995.000	1	Dokumen	126.936.200	33,33	%	65,09%	
		5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15	Laporan	379.155.789,00	5	Laporan	87.878.700,00	5	Laporan	86.506.750,00		Laporan	3.440.000,00		Laporan	-		Laporan	36.892.400,00		Laporan	13.937.000,00	0	Laporan	54.269.400	5	Laporan	142.148.100	33,33	%	37,49%	

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah (p-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																										
		5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	2	Unit	0	Unit	2	Unit	157.511.000,00	Unit	3.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	143.447.300,00	0	Unit	146.947.300	0	Unit	196.947.300	0,00	%	247,64%													
		5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	1	Unit	4.725.804.398,00	1	Unit	11.544.432.496,00	Unit	61.900.000,00	Unit	226.297.250,00	Unit	3.575.987.683,00	Unit	5.793.921.886,00	0	Unit	9.658.106.819	1	Unit	14.383.911.217	33,33	%	3559,80%												
		5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	1	Unit	59.739.600,00	1	Unit	106.861.250,00	Unit	13.574.000,00	Unit	13.345.500,00	Unit	17.677.500,00	Unit	23.965.000,00	0	Unit	68.562.000	1	Unit	128.301.600	33,33	%	41,32%												
		5 02 01 2.13	Penataan Organisasi																																						
		5 02 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	Dokumen	582.581.199,00	5	Dokumen	196.177.050,00	5	Dokumen	217.114.750,00	Dokumen	-	Dokumen	11.430.700,00	Dokumen	41.812.400,00	Dokumen	49.922.109,00	0	Dokumen	103.165.209	5	Dokumen	299.342.259	33,33	%	51,38%											
		5 02 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	Dokumen	553.312.055,00	5	Dokumen	181.867.400,00	5	Dokumen	124.258.500,00	Dokumen	-	Dokumen	1.620.500,00	Dokumen	26.008.200,00	Dokumen	71.856.900,00	0	Dokumen	99.485.600	5	Dokumen	281.353.000	33,33	%	50,85%											
		5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN																																						
	Opini BPK	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																																						
		5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6	Dokumen	427.500.000,00	2	Dokumen	168.997.100,00	2	Dokumen	156.000.000,00	0	Dokumen	5.446.200,00	0	Dokumen	12.766.600,00	Dokumen	25.353.000,00	Dokumen	112.430.600,00	0	Dokumen	155.996.400	2	Dokumen	324.993.500	33,33	%	76,02%									
		5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	Dokumen	461.503.165,00	2	Dokumen	196.288.200,00	2	Dokumen	181.300.000,00	0	Dokumen	1.776.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	33.320.300,00	Dokumen	146.203.700,00	0	Dokumen	181.300.000	2	Dokumen	377.588.200	33,33	%	81,82%									
		5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3	Dokumen	270.886.165,00	1	Dokumen	140.685.860,00	1	Dokumen	197.813.250,00	0	Dokumen	9.077.000,00	0	Dokumen	12.707.800,00	Dokumen	1.815.400,00	Dokumen	111.457.984,00	0	Dokumen	135.058.184	1	Dokumen	275.744.044	33,33	%	101,79%									
		5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3	Dokumen	257.215.079,00	1	Dokumen	125.730.400,00	1	Dokumen	133.178.000,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	7.763.000,00	Dokumen	78.843.400,00	0	Dokumen	86.606.400	1	Dokumen	212.336.800	33,33	%	82,55%										
		5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3	Dokumen	270.886.170,00	1	Dokumen	170.694.580,00	1	Dokumen	289.588.250,00	0	Dokumen	9.000.000,00	0	Dokumen	239.018.721,00	Dokumen	-	Dokumen	16.660.600,00	0	Dokumen	264.679.321	1	Dokumen	435.373.901	33,33	%	160,72%									
		5 02 02 2.01 07	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	6	Dokumen	363.624.336,00	2	Dokumen	127.062.600,00	2	Dokumen	212.752.000,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	8.721.500,00	Dokumen	171.744.462,00	0	Dokumen	180.465.962	2	Dokumen	307.528.562	33,33	%	84,57%										
		5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	Dokumen	752.606.563,00	2	Dokumen	249.022.000,00	2	Dokumen	250.553.000,00	1	Dokumen	29.835.700,00	1	Dokumen	31.501.400,00	1	Dokumen	49.280.400,00	Dokumen	139.191.000,00	3	Dokumen	249.808.500	5	Dokumen	498.830.500	83,33	%	66,28%								
		5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	Dokumen	595.703.125,00	2	Dokumen	281.339.900,00	2	Dokumen	343.640.000,00	1	Dokumen	22.250.000,00	1	Dokumen	23.150.000,00	1	Dokumen	126.182.400,00	Dokumen	128.152.824,00	3	Dokumen	299.735.224	5	Dokumen	581.075.124	83,33	%	97,54%								
		5 02 02 2.01 10	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	Dokumen	627.613.750,00	2	Dokumen	239.045.800,00	2	Dokumen	284.696.000,00	1	Dokumen	28.777.800,00	1	Dokumen	26.233.400,00	1	Dokumen	64.326.700,00	Dokumen	165.358.100,00	3	Dokumen	284.696.000	5	Dokumen	523.741.800	83,33	%	83,45%								
		5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	Dokumen	1.925.932.031,00	2	Dokumen	691.409.455,00	2	Dokumen	775.463.750,00	Dokumen	31.043.200,00	0	Dokumen	122.189.800,00	Dokumen	101.687.300,00	Dokumen	398.791.850,00	0	Dokumen	653.712.150	2	Dokumen	1.345.121.605	33,33	%	69,94%										
		5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	6	Dokumen	558.301.014,00	2	Dokumen	445.298.417,00	2	Dokumen	404.341.200,00	1	Dokumen	7.600.000,00	1	Dokumen	20.304.000,00	1	Dokumen	66.252.700,00	Dokumen	288.399.300,00	3	Dokumen	382.556.000	5	Dokumen	827.854.417	83,33	%	148,28%								
		5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3	Orang	500.673.584,00	1	Orang	237.823.948,00	1	Orang	423.427.500,00	Orang	-	0	Orang	67.600.000,00	Orang	304.019.255,00	Orang	46.080.000,00	0	Orang	417.699.255	1	Orang	655.523.203	33,33	%	130,93%										
	Opini BPK	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																																						
		5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36	Dokumen	368.719.981,00	12	Dokumen	206.824.480,00	12	Dokumen	169.984.000,00	Dokumen	18.942.200,00	1	Dokumen	43.989.610,00	1	Dokumen	6.292.000,00	Dokumen	95.594.126,00	2	Dokumen	164.817.936	14	Dokumen	371.642.416	38,89	%	100,79%									
		5 02 02 2.02 03	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	465	Dokumen	160.312.500,00	155	Dokumen	11.002.330,00	155	Dokumen	14.998.000,00	Dokumen	375.000,00	24	Dokumen	950.000,00	12	Dokumen	2.050.000,00	Dokumen	4.251.000,00	36	Dokumen	7.626.000	191	Dokumen	18.628.330	41,08	%	11,62%									
		5 02 02 2.02 04	Pemantauan Pelaksanaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembayaan Daerah	36	Dokumen	645.741.294,00	12	Dokumen	159.534.700,00	12	Dokumen	129.990.000,00	Dokumen	2.058.200,00	1	Dokumen	10.754.400,00	1	Dokumen	57.679.033,00	Dokumen	51.865.163,00	2	Dokumen	122.357.796	14	Dokumen	281.892.486	38,89	%	43,65%									
		5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	36	Dokumen	327.634.931,00	12	Dokumen	130.202.080,00	12	Dokumen	139.906.000,00	Dokumen	-	1	Dokumen	15.932.144,00	1	Dokumen	38.557.143,00	Dokumen	53.961.870,00	2	Dokumen	108.451.157	14	Dokumen	238.653.237	38,89	%	72,84%									
		5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	36	Dokumen	263.181.641,00	12	Dokumen	49.575.600,00	12	Dokumen	49.978.750,00	Dokumen	-	1	Dokumen	980.000,00	1	Dokumen	9.150.250,00	Dokumen	22.970.400,00	2	Dokumen	33.100.650	14	Dokumen	82.676.250	38,89	%	31,41%									
		5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4215	Laporan	376.675.000,00	2455	Laporan	105.219.224,00	1405	Laporan	119.936.000,00	Laporan	-	0	Laporan	600.000,00	2	Laporan	46.598.672,00	Laporan	51.901.896,00	2	Laporan	99.100.568	2457	Laporan	204.319.792	58,29	%	54,24%									

No	Sasaran	Kode	Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																			
		5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	93	Dokumen	623.504.590,00	31	Dokumen	104.491.518,00	31	Dokumen	110.309.000,00	4	Dokumen	7.275.000,00	4	Dokumen	22.894.000,00	1	Dokumen	23.347.125,00	Dokumen	34.671.000,00	9	Dokumen	88.187.125	40	Dokumen	192.678.643	43,01	%	30,90%	
		5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24	Dokumen	449.875.000,00	8	Dokumen	124.938.171,00	8	Dokumen	124.985.000,00	2	Dokumen	6.000.000,00	2	Dokumen	9.252.000,00	3	Dokumen	46.040.550,00	Dokumen	54.172.800,00	7	Dokumen	115.465.350	15	Dokumen	240.403.521	62,50	%	53,44%	
		5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	141	Orang	723.137.427,00	47	Orang	480.886.972,00	47	Orang	1.074.139.750,00	6	Orang	51.368.139,00	6	Orang	20.581.200,00	Orang	103.031.500,00	Orang	809.033.038,00	12	Orang	984.013.877	59	Orang	1.464.900.849	41,84	%	202,58%		
Opini BPK		5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																															
		5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6	Laporan	327.055.313,00	2	Laporan	148.042.080,00	2	Laporan	371.784.750,00	Laporan	-	0	Laporan	161.351.650,00	Laporan	11.224.500,00	Laporan	156.136.423,00	0	Laporan	328.712.573	2	Laporan	476.754.653	33,33	%	145,77%			
		5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	96	Dokumen	652.533.204,00	32	Dokumen	412.718.289,00	32	Dokumen	466.696.500,00	Dokumen	-	2	Dokumen	82.776.150,00	2	Dokumen	158.851.100,00	Dokumen	206.031.650,00	4	Dokumen	447.658.900	36	Dokumen	860.377.189	37,50	%	131,85%		
		5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36	Laporan	632.661.024,00	12	Laporan	218.743.796,00	12	Laporan	351.516.000,00	Laporan	-	1	Laporan	19.367.900,00	1	Laporan	144.681.750,00	Laporan	187.465.342,00	2	Laporan	351.514.992	14	Laporan	570.258.788	38,89	%	90,14%		
		5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	392.406.329,00	1	Laporan	308.763.591,00	1	Laporan	434.766.000,00	0	Laporan	14.679.543,00	0	Laporan	67.153.900,00	Laporan	100.231.200,00	Laporan	228.233.092,00	0	Laporan	410.297.735	1	Laporan	719.061.326	33,33	%	183,24%		
		5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	Dokumen	816.079.746,00	2	Dokumen	162.516.170,00	2	Dokumen	167.006.750,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	102.732.939,00	Dokumen	63.916.869,00	0	Dokumen	166.649.808	2	Dokumen	329.165.978	33,33	%	40,34%			
		5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	351.813.688,00	1	Dokumen	53.959.740,00	1	Dokumen	39.991.000,00	Dokumen	-	0	Dokumen	6.469.000,00	Dokumen	19.493.900,00	Dokumen	6.575.400,00	0	Dokumen	32.538.300	1	Dokumen	86.498.040	33,33	%	24,59%			
		5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Dokumen	291.257.367,00	1	Dokumen	161.874.960,00	1	Dokumen	93.807.000,00	Dokumen	-	0	Dokumen	12.537.850,00	Dokumen	33.545.592,00	Dokumen	44.083.700,00	0	Dokumen	90.167.142	1	Dokumen	252.042.102	33,33	%	86,54%			
PDRB Per Kapita		5 02 02 2.04	Penunjang Usuan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																															
		5 02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3	Laporan	4.544.862.119,00	1	Laporan	2.683.742.010,00	1	Laporan	2.735.558.710,00	Laporan	683.889.678,00	Laporan	683.889.678,00	Laporan	683.889.678,00	Laporan	683.889.678,00	Laporan	683.889.676,00	0	Laporan	2.735.558.710	1	Laporan	5.419.300.720	33,33	%	119,24%		
		5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	6	Laporan	264.897.162.249,00	2	Laporan	72.480.332.350,00	2	Laporan	76.424.094.000,00	Laporan	18.288.526.119,00	Laporan	18.288.526.119,00	Laporan	18.288.526.119,00	Laporan	18.288.526.119,00	0	Laporan	73.154.104.476	2	Laporan	145.634.436.826	33,33	%	54,98%				
		5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6	Laporan	99.882.995.829,00	2	Laporan	12.983.272.537,00	2	Laporan	32.919.445.649,00	0	Laporan	5.656.849.706,00	Laporan	5.656.849.706,00	Laporan	5.656.849.706,00	0	Laporan	22.627.398.824	2	Laporan	35.610.671.361	33,33	%	35,65%					
		5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6	Laporan	13.134.912.159,00	2	Laporan	-	2	Laporan	4.793.403.527,00	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	-	33,33	%	0,00%					
Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi		5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																															
		5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah																															
		5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3	Dokumen	695.642.551,00	1	Dokumen	171.686.280,00	1	Dokumen	298.361.570,00	Dokumen	17.363.467,00	0	Dokumen	15.580.800,00	Dokumen	47.885.608,00	Dokumen	142.311.702,00	0	Dokumen	223.141.577	1	Dokumen	394.827.857	33,33	%	56,76%			
		5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Laporan	612.151.680,00	4	Laporan	526.899.963,00	4	Laporan	558.111.790,00	0	Laporan	91.988.000,00	0	Laporan	58.324.400,00	Laporan	61.277.000,00	Laporan	190.314.496,00	0	Laporan	401.903.896	4	Laporan	928.803.859	33,33	%	151,73%		
		5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	3	Laporan	2.869.952.173,00	1	Laporan	555.623.450,00	1	Laporan	313.927.620,00	Laporan	-	0	Laporan	150.065.700,00	Laporan	32.697.000,00	Laporan	29.371.000,00	0	Laporan	212.133.700	1	Laporan	767.757.150	33,33	%	26,75%			
		5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	96	Laporan	801.017.998,00	32	Laporan	362.048.760,00	32	Laporan	416.667.950,00	2	Laporan	17.307.800,00	2	Laporan	37.249.500,00	2	Laporan	122.530.800,00	Laporan	175.141.950,00	6	Laporan	352.250.050	38	Laporan	714.278.810	39,58	%	89,17%	
		5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	36	Laporan	529.420.275,00	12	Laporan	109.744.000,00	12	Laporan	173.361.053,00	1	Laporan	13.492.400,00	1	Laporan	12.656.400,00	1	Laporan	41.313.600,00	Laporan	39.968.600,00	3	Laporan	107.431.000	15	Laporan	217.175.000	41,67	%	41,02%	
		5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	96	Laporan	573.555.162,00	32	Laporan	259.173.740,00	32	Laporan	339.626.080,00	2	Laporan	34.716.200,00	2	Laporan	12.400.000,00	2	Laporan	99.042.900,00	Laporan	138.213.998,00	≠VALUE	Laporan	284.373.098	≠VALUE	Laporan	543.546.838	≠VALUE	%	94,77%	
		5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1434	Dokumen	612.606.479,00	477	Dokumen	199.876.452,00	478	Dokumen	441.205.648,00	39	Dokumen	20.665.500,00	39	Dokumen	12.280.800,00	39	Dokumen	80.504.800,00	Dokumen	220.363.200,00	117	Dokumen	333.814.300	584	Dokumen	533.690.752	41,42	%	87,12%	
		5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48	Laporan	327.690.000,00	16	Laporan	99.037.488,00	16	Laporan	78.999.853,00	Laporan	-	0	Laporan	18.691.100,00	Laporan	30.767.000,00	Laporan	3.412.750,00	0	Laporan	52.870.850	16	Laporan	151.908.338	33,33	%	46,36%			

No	Sasaran	Kode	Urusen/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s.d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

		5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Diusulkan NJOP nya	36	Objek Pajak	667.187.500,00	12	Objek Pajak	201.978.550,00	12	Objek Pajak	142.232.500,00	0	Objek Pajak	9.642.000,00		Objek Pajak	34.582.500,00		Objek Pajak	45.455.500,00		Objek Pajak	33.268.000,00	0	Objek Pajak	122.948.000	12	Objek Pajak	324.926.550	33,33	%	48,70%	
		5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	Dokumen	500.390.625,00	1	Dokumen	49.999.000,00	1	Dokumen	140.320.000,00		Dokumen	1.632.000,00		Dokumen	-		Dokumen	6.063.500,00		Dokumen	27.672.000,00	0	Dokumen	35.367.500	1	Dokumen	85.366.500	33,33	%	17,06%	
		5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18	Kecamatan Layanan	428.906.250,00	6	Kecamatan Layanan	93.754.450,00	6	Kecamatan Layanan	468.750.000,00		Kecamatan Layanan	9.377.600,00		Kecamatan Layanan	11.272.800,00		Kecamatan Layanan	44.422.100,00		Kecamatan Layanan	316.707.492,00	0	Kecamatan Layanan	381.779.992	6	Kecamatan Layanan	475.534.442	33,33	%	110,87%	
		5	02	04	2.01	11	Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah	36	Dokumen	1.443.715.919,00	12	Dokumen	531.736.466,00	12	Dokumen	968.859.750,00	1	Dokumen	3.450.000,00		Dokumen	70.082.800,00	1	Dokumen	212.741.500,00		Dokumen	208.271.100,00	2	Dokumen	494.545.400	14	Dokumen	1.026.281.866	38,89	%	71,09%	
		5	02	04	2.01	12	Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyetaraan Keberatan Pajak Daerah	3	Dokumen	73.042.544,00	1	Dokumen	2.530.450,00	1	Dokumen	12.262.250,00		Dokumen	-		Dokumen	1.942.250,00		Dokumen	1.440.000,00		Dokumen	2.043.000,00	0	Dokumen	5.425.250	1	Dokumen	7.955.700	33,33	%	10,89%	
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36	Dokumen	840.893.401,00	12	Dokumen	342.389.422,00	12	Dokumen	568.888.000,00		Dokumen	5.300.000,00		Dokumen	75.421.400,00	1	Dokumen	98.994.200,00		Dokumen	280.120.992,00	1	Dokumen	459.836.592	13	Dokumen	802.226.014	36,11	%	95,40%	
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36	Laporan	272.377.867,00	12	Laporan	40.005.900,00	12	Laporan	45.723.700,00		Laporan	-		Laporan	8.205.500,00		Laporan	20.716.200,00		Laporan	11.399.000,00	0	Laporan	40.320.700	12	Laporan	80.326.600	33,33	%	29,49%	
								JUMLAH KEUANGAN			686.802.130.796,00			143.064.349.607,00			213.594.287.465,00			29.587.078.748,00			32.906.394.012,00			44.960.842.171,00			72.428.312.878,00			179.882.627.809,00			322.946.977.416,00				
3							KEPEGAWAIAN																															BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
						5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																													
						5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah																													
						5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	251.500.000,00	2	Dokumen	24.909.500	2	Dokumen	40.901.000,00	1	Dokumen	-	1	Dok	13.074.700,00			2	Dokumen	13.074.700	4	Dokumen	37.984.200	50,00	%	15,10%		
						5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	20	Laporan	104.000.000,00	5	Laporan	31.415.000	5	Laporan	44.522.000,00	3	Laporan	-	1	Lap	16.319.950,00			4	Laporan	16.319.950	9	Laporan	47.734.950	45,00	%	45,90%		
						5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																													
						5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	672	Orang	12.126.650.820,00	168	Orang	2.722.641.299	168	Orang	2.791.371.894,00	56	Orang	547.854.724,00		42	Org/Bln	1.037.613.975,00			98	Orang	1.585.468.699	266	Orang	4.308.109.998	39,58	%	35,53%	
						5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	400.800.000,00	1	Dokumen	104.196.000	1	Dokumen	125.937.000,00	1	Dokumen	-	1	Dok	44.807.750,00			2	Dokumen	44.807.750	3	Dokumen	149.003.750	300,00	%	37,18%		
						5	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																													
						5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Laporan	72.000.000,00	5	Laporan	23.000.000	5	Laporan	29.864.500,00	2	Laporan	-	1	Lap	14.405.000,00			3	Laporan	14.405.000	8	Laporan	37.405.000	40,00	%	51,95%		
						5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																													
						5	03	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	200	Paket	140.000.000,00	50	Paket	44.249.000	50	Paket	43.550.000,00	0	Paket	-	0	Pkt	-			0	Paket	-	50	Paket	44.249.000	25,00	%	31,61%		
						5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	Dokumen	60.000.000,00	2	Dokumen	17.500.000	2	Dokumen	30.000.000,00	1	Dokumen	-	1	Dok	12.033.000,00			2	Dokumen	12.033.000	4	Dokumen	29.533.000	50,00	%	49,22%		
						5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	Orang	120.000.000,00	8	Orang	7.880.000	4	Orang	27.480.000,00	0	Orang	-	2	Org	5.985.400,00			2	Orang	5.985.400	10	Orang	13.865.400	62,50	%	11,55%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp							
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan								Volume	Satuan	Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16																	
		5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							L A P O R A N	L A P O R A N																					
		5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000,00	1	Paket			17.119.900	1	Paket	22.000.000,00	0	Paket	-	0	Pkt	6.449.000,00	0	Paket	6.449.000	1	Paket	23.568.900	25,00	%	117,84%		
		5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Bulan	120.000.000,00	1	Bulan			39.991.800	1	Bulan	40.000.000,00	0	Bulan	-	0	Pkt	12.422.000,00	0	Bulan	12.422.000	1	Bulan	52.413.800	25,00	%	43,68%		
		5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Bulan	304.800.000,00	2	Bulan			100.175.000	1	Bulan	132.500.000,00	0	Bulan	-	0	Pkt	26.250.000,00	0	Bulan	26.250.000	2	Bulan	126.425.000	50,00	%	41,48%		
		5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	Bulan	60.000.000,00	0	Bulan			26.772.000	12	Bulan	24.000.000,00	3	Bulan	-	3	Pkt	6.775.000,00	6	Bulan	6.775.000	6	Bulan	33.547.000	12,50	%	55,91%		
		5 03 01 2.06 09	Facilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Bulan	60.000.000,00	0	Bulan			15.000.000	12	Bulan	15.000.000,00	3	Bulan	-	3	Lap	3.435.000,00	6	Bulan	3.435.000	6	Bulan	18.435.000	12,50	%	30,73%		
		5 03 01 2.06 11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	800.000.000,00	300	Laporan			233.047.541	75	Laporan	275.095.000,00	12	Laporan	-	23	Lap	79.968.999,00	35	Laporan	79.968.999	335	Laporan	313.016.540	111,67	%	39,13%		
		5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																													
		5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	52.863.000,00		Unit				1	Unit	52.863.000,00	1	Unit	49.825.000,00	0	Unit	650.000,00	1	Tahun	50.475.000	1	Tahun	50.475.000	33,33	%	95,48%		
		5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	140.000.000,00	1	Tahun			66.683.250	1	Tahun	101.420.825,00	1	Tahun	80.797.750,00	0	Unit	17.615.000,00	1	Tahun	98.412.750	2	Tahun	165.096.000	50,00	%	117,93%		
		5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																													
		5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Bulan	280.000.000,00	12	Bulan	82.992.990	12	Bulan	91.044.000,00	3	Bulan	-	3	lap	28.815.048,00	6	Bulan	28.815.048	18	Bulan	111.808.038	37,50	%	39,93%				
		5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	866.400.000,00	12	Laporan	196.800.000	12	Laporan	201.000.000,00	3	Laporan	33.500.000,00	3	lap	83.750.000,00	6	Laporan	117.250.000	18	Laporan	314.050.000	37,50	%	36,25%				
		5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah																													
		5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	40.000.000,00	2	Unit	18.467.145	2	Unit	28.450.000,00	1	Unit	-	0	Unit	13.725.450,00	1	Unit	13.725.450	3	Unit	32.192.595	37,50	%	80,48%				
		5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	100.000.000,00	1	Unit	27.550.000	1	Unit	43.000.000,00	0	Unit	-	0	Unit	9.400.000,00	0	Unit	9.400.000	1	Unit	36.950.000	25,00	%	36,95%				
		5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	176.000.000,00	3	Unit	72.567.680	1	Unit	80.712.000,00	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit	-	3	Unit	72.567.680	75,00	%	41,23%				
		5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100.000.000,00	3	Unit	24.953.469	1	Unit	26.400.000,00	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit	-	3	Unit	24.953.469	75,00	%	24,95%				
		5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																													
		5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																													
		5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4	Dokumen	251.200.000,00	0	Dokumen	60.847.962	1	Dokumen	50.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dok	24.696.000,00	0	Dokumen	24.696.000	0	Dokumen	85.543.962	0,00	%	34,05%				
		5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	4	Dokumen	800.000.000,00	0	Dokumen	185.944.500	1	Dokumen	150.000.000,00	0	Dokumen	6.000.000,00	0	Dok	63.067.562,00	0	Dokumen	69.067.562	0	Dokumen	255.012.062	0,00	%	31,88%				
		5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	500	Dokumen	60.000.000,00	0	Dokumen	40.767.100	125	Dokumen	122.920.500,00	0	Dokumen	-	0	Dok	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	40.767.100	0,00	%	67,95%				
		5 03 02 2.01 08	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4	Dokumen	60.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	12.000.000,00	18	Dokumen	-	0	Imbga	-	18	Dokumen	-	18	Dokumen	-	450,00	%	0,00%				
		5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Dokumen	672.000.000,00	0	Dokumen	167.668.600	1	Dokumen	168.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dok	46.932.500,00	0	Dokumen	46.932.500	0	Dokumen	214.601.100	0,00	%	31,93%				
		5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	Dokumen	60.000.000,00	0	Dokumen	25.939.400	1	Dokumen	76.000.000,00	0	Dokumen	9.000.000,00	0	Dok	22.953.000,00	0	Dokumen	31.953.000	0	Dokumen	57.892.400	0,00	%	96,49%				
		5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN																													
		5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	1000	Dokumen	160.000.000,00	0	Dokumen	74.796.306	250	Dokumen	77.500.000,00	0	Dokumen	-	0	Dok	32.684.400,00	0	Dokumen	32.684.400	0	Dokumen	107.480.706	0,00	%	67,18%				
		5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500	Dokumen	260.000.000,00	0	Dokumen	80.373.500	625	Dokumen	83.000.000,00	35	Dokumen	-	0	Dok	14.200.000,00	35	Dokumen	14.200.000	35	Dokumen	94.573.500	1,40	%	36,37%				
		5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dokumen	1.400.000.000,00	0	Dokumen	70.624.000	1	Dokumen	122.500.000,00	60	Dokumen	-	0	Dok	52.582.800,00	60	Dokumen	52.582.600	60	Dokumen	123.206.600	1500,00	%	8,80%				
		5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN																													
		5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	100	Orang	1.500.000.000,00		Orang		25	Orang	500.000.000,00	0	Orang	-	0	Org	-													
		5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	200.000.000,00	0	Orang	47.519.102	25	Orang	1.750.000.000,00	0	Orang	-	0	Org	91.834.036,00	0	Orang	91.834.036	0	Orang	139.353.138	0,00	%	69,68%				

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RRPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s.d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan	I		II		III		IV		K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan		K	Rp				
													K	Rp	Volume	Satuan	K	Rp	Volume	Satuan												K	Rp	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16																				
		5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100	Dokumen	2.956.000.000,00	0	Dokumen	1.524.021.050	25	Dokumen	1.896.000.000,00	0	Dokumen	285.350.088,00	0	Dok	618.900.020,00			0	Dokumen	904.250.108	0	Dokumen	2.428.271.158	0,00	%	82,15%					
		5 03 02 2.03 06	Facilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	100	Orang	164.000.000,00	0	Orang	215.810.118	25	Orang	465.000.000,00	0	Orang	-	0	Org	318.506.862,00			0	Orang	318.506.862	0	Orang	534.316.980	0,00	%	325,80%					
		5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	20	Dokumen	240.000.000,00	0	Dokumen	129.098.543	5	Dokumen	200.000.000,00	0	Dokumen	115.981.400,00	0	Dok				0	Dokumen	115.981.400	0	Dokumen	245.079.943	0,00	%	102,12%					
		5 03 02 2.03 10	Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	20	Orang	114.800.000,00	0	Orang	29.773.000	5	Orang	50.000.000,00	2	Orang	-	0	Org				2	Orang	-	2	Orang	29.773.000	10,00	%	25,93%					
		5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																																
		5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	200	Dokumen	216.000.000,00	0	Dokumen	78.976.000	50	Dokumen	50.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dok	12.248.000,00			0	Dokumen	12.248.000	0	Dokumen	91.224.000	0,00	%	42,23%					
		5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	Orang	150.000.000,00	0	Orang	36.919.203	100	Orang	33.920.000,00	0	Orang	-	0	Org	30.421.929,00			0	Orang	30.421.929	0	Orang	67.341.132	0,00	%	44,89%					
		5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20	Orang	300.000.000,00	0	Orang	59.904.700	5	Orang	95.000.000,00	0	Orang	-	0	Org	65.177.000,00			0	Orang	65.177.000	0	Orang	125.081.700	0,00	%	41,69%					
		5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	60.000.000,00	12	Laporan	14.939.800	3	Laporan	23.920.000,00	2	Laporan	-	0	Lap	21.715.709,00			2	Laporan	21.715.709	14	Laporan	36.655.509	116,67	%	61,09%					
			JUMLAH KEPEGAWAIAN				26.019.013.820,00			6.741.834.458,00			10.162.871.719,00			1.128.308.962,00			2.849.414.890,00			-		3.977.723.852,00			10.719.558.310,00								
4			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																												BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		05 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																																
		05 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																																
		05 05 02 2.01 01	Facilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	100.000.000,00				1	Laporan	100.000.000,00							1	Laporan	100.000.000,00	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	100,00	%	100,00%				
		05 05 02 2.01 05	Facilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	100.000.000,00				1	Laporan	100.000.000,00							1	Laporan	100.000.000,00	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	100,00	%	100,00%				
		05 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelengkapan dan Peraturan	Jumlah Data Kelengkapan dan Peraturan yang Terkela dengan Baik	4	Laporan	40.000.000,00	1	Laporan	5.322.740,00	1	Laporan	-	0	Laporan	-				0	Laporan	-	1	Laporan	5.322.740	25,00	%	13,31%							
		05 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Peraturan yang Ditetapkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Peraturan yang Ditetapkan	4	Rekomendas	40.000.000,00	1	Rekomendas	5.392.612,00	1	Rekomendas	-	0	Rekomendas	-				0	Rekomendas	-	1	Rekomendas	5.392.612	25,00	%	13,48%							
		05 05 02 2.01 14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas danEvaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4	Laporan	40.000.000,00	1	Laporan	5.272.612,00	1	Laporan	-	0	Laporan	-				0	Laporan	-	1	Laporan	5.272.612	25,00	%	13,18%							
		05 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																																
		05 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	Dokumen	40.000.000,00	1	Dokumen	4.831.712,00	1	Dokumen	-	0	Dokumen	-				0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.831.712	25,00	%	12,08%							
		05 05 02 2.02 03	Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	1	Dokumen	100.000.000,00				1	Dokumen	100.000.000,00							1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100,00	%	100,00%				
		05 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	4	Dokumen	40.000.000,00	1	Dokumen	4.853.512,00	1	Dokumen	-	0	Dokumen	-				0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.853.512	25,00	%	12,13%							
		05 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	4	Dokumen	40.000.000,00	1	Dokumen	4.853.512,00	1	Dokumen	100.000.000,00	0	Dokumen	-				1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000	2	Dokumen	104.853.512	50,00	%	262,13%				
		05 05 02 2.02 09	Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Dokumen	100.000.000,00				1	Dokumen	100.000.000,00							1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100,00	%	100,00%				
		05 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																																
		05 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	3.441.800,00	1	Dokumen	100.000.000,00	0	Dokumen					1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000	2	Dokumen	103.441.800	50,00	%	517,21%				
		05 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	4	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	3.412.820,00	1	Dokumen	-	0	Dokumen					0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.412.820	25,00	%	17,06%							
		05 05 02 2.03 05	Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan	1	Dokumen	100.000.000,00				1	Dokumen	100.000.000,00							1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100,00	%	100,00%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan															Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x100%			16
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	34.000.000,00	4	Dokumen	8.250.000,00	4	Dokumen	2.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000.000,00	0	Dokumen	-	3	Dokumen	500.000	4	Dokumen	1.500.000	8	Dokumen	9.750.000	50,00	%	28,68%			
		07	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	29.675.000,00	1	Dokumen	4.250.000,00	1	Dokumen	2.750.000,00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	1.500.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	1.500.000	3	Dokumen	5.750.000	75,00	%	19,38%			
		07	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.250.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.125.000	1	Dokumen	1.125.000	1	Dokumen	1.125.000	100,00	%	22,50%			
		07	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	18.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00%			

				07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	Dokumen	15.000.000,00	1	Dokumen	5.875.000,00	3	Dokumen	2.500.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	750.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	750.000	1	Dokumen	6.625.000	8,33	%	44,17%	
				07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan																															
				07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240	Orang/bulan	15.776.968.132,00	570	Orang/bulan	3.277.823.117,00	490	Orang/bulan	3.968.450.001,00	175	Orang/bulan	814.423.122,00	105	Orang/bulan	1.010.048.485,00	35	Orang/bulan	738.608.759,00	106	Orang/bulan	780.070.120	421	Orang/bulan	3.343.150.486	991	Orang/bulan	6.620.973.603	44,24	%	41,97%	
				07	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8	Dokumen	15.950.000,00	1	Dokumen	500.000,00	2	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.500.000	2	Dokumen	5.000.000	3	Dokumen	5.500.000	37,50	%	34,48%	
				07	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	19.375.000,00	1	Laporan	1.875.000,00	1	Laporan	2.000.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Laporan	-	1	Laporan	1.875.000	12,50	%	9,68%	
				07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah																															
				07	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	8	Laporan	12.000.000,00	2	Laporan	2.875.000,00	2	Laporan	6.000.000,00	0	Laporan	-	2	Laporan	3.000.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	2.750.000	2	Laporan	5.750.000	4	Laporan	8.625.000	50,00	%	71,88%	
				07	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi pendapatan daerah																															
				07	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelabuan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelabuan Retribusi Daerah	8	Dokumen	8.000.000,00	1	Dokumen	1.125.000,00	1	Dokumen	2.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	125.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	875.000	0	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	2.125.000	12,50	%	26,56%	
				07	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																															
				07	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	110.000.000,00	1	Paket	19.993.000,00	1	Paket PDH	30.000.000,00	1	Paket	30.000.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket PDH	30.000.000	2	Paket PDH	49.993.000	50,00	%	45,45%	
				07	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16	Dokumen	12.000.000,00	4	Dokumen	2.550.000,00	4	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	500.000,00	0	Dokumen	-	3	Dokumen	1.250.000	3	Dokumen	1.750.000	7	Dokumen	4.300.000	43,75	%	35,83%	
				07	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Dokumen	295.000.000,00	2	Dokumen	67.412.388,00	6	Dokumen	95.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	5.630.800,00	4	Dokumen	27.457.200,00	1	Dokumen	53.134.800	6	Dokumen	86.222.800	8	Dokumen	153.635.188	100,00	%	52,08%	
				07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah																															
				07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	35.000.000,00	4	Paket	5.000.000,00	4	Paket	7.000.000,00	1	Paket	651.000,00	0	Paket	865.000,00	2	Paket	3.941.900,00	3	Paket	-	6	Paket	5.457.900	10	Paket	10.457.900	62,50	%	29,88%	
				07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	157.627.200,00	4	Paket	36.340.000,00	4	Paket	40.000.000,00	1	Paket	6.216.000,00	0	Paket	14.084.000,00	3	Paket	19.324.500,00	0	Paket	-	4	Paket	39.624.500	8	Paket	75.964.500	50,00	%	48,19%	
				07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	119.036.800,00	4	Paket	29.032.500,00	4	Paket	30.284.000,00	1	Paket	1.308.700,00	0	Paket	11.292.500,00	2	Paket	15.203.900,00	0	Paket	-	3	Paket	27.805.100	7	Paket	56.837.600	43,75	%	47,75%	
				07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	15.000.000,00	4	Dokumen	2.875.000,00	1	Dokumen	4.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.040.000,00	0	Dokumen	2.830.000,00	0	Dokumen	130.000	1	Dokumen	4.000.000	5	Dokumen	6.875.000	125,00	%	45,83%	
				07	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	Laporan	130.000.000,00	6	Laporan	25.000.000,00	6	Laporan	25.000.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	7.600.000,00	4	Laporan	7.600.000,00	6	Laporan	8.340.000	11	Laporan	23.540.000	17	Laporan	48.540.000	70,83	%	37,34%	
				07	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	1.961.000.000,00	30	Laporan	265.430.008,00	30	Laporan	335.800.000,00	1	Laporan	6.980.000,00	11	Laporan	103.124.000,00	5	Laporan	206.183.000,00	30	Laporan	-	47	Laporan	316.287.000	77	Laporan	581.717.008	64,17	%	29,66%	
				07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
				07	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16	Unit	164.999.367,00	4	Unit	29.977.727,00	4	Unit	1.023.057.400,00	0	Unit	-	3	Unit	290.902.400,00	0	Unit	331.792.500,00	1	Unit	-	4	Unit	622.694.900	8	Unit	652.672.627	50,00	%	395,56%	
				07	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
				07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	Laporan	7.500.000,00	48	Laporan	1.470.000,00	150	Laporan	1.000.000,00	36	Laporan	250.000,00	-	114	Laporan	250.000,00	0	Laporan	500.000	150	Laporan	1.000.000	198	Laporan	2.470.000	33,00	%	32,93%			
				07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	192	Laporan	355.450.000,00	48	Laporan	45.149.619,00	48	Laporan	73.816.231,00	5	Laporan	8.339.767,00	5	Laporan	12.972.355,00	22	Laporan	22.513.356,00	8	Laporan	-	40	Laporan	43.825.478	88	Laporan	88.975.097	45,83	%	25,03%	
				07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan	2.075.094.000,00	24	Laporan	525.121.700,00	24	Laporan	534.476.000,00	3	Laporan	71.100.000,00	3	Laporan	155.150.000,00	12	Laporan	40.294.000,00	6	Laporan	267.931.000	24	Laporan	534.475.000	48	Laporan	1.059.596.700	50,00	%	51,06%	

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah (p-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (p-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota sid Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 / 6 x100%	16																						
		07 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																																	
		07 01 06 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																																	
		07 01 06 2.01 02		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24	Dokumen	24.000.000,00	6	Dokumen	5.740.000,00	6	Dokumen	6.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.360.000,00	5	Dokumen	2.520.000,00	0	Dokumen	-	6	Dokumen	5.880.000	12	Dokumen	11.620.000	50,00	%	48,42%			
		07 01 06 2.01 03		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	Dokumen	20.000.000,00	6	Dokumen	4.615.000,00	6	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.960.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.030.000	2	Dokumen	4.990.000	8	Dokumen	9.605.000	33,33	%	48,03%			
		07 01 06 2.01 15		Facilitasi Penilaian, Pemantauan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24	Dokumen	36.000.000,00	5	Dokumen	5.275.000,00	6	Dokumen	6.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	1.260.000	0	Dokumen	1.260.000	5	Dokumen	6.535.000	20,83	%	18,15%			
		07 01 06 2.01 16		Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	24	Dokumen	19.000.000,00	6	Dokumen	3.365.000,00	6	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	6	Dokumen	3.365.000	25,00	%	17,71%			
		07 01 06 2.01 17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	Dokumen	19.000.000,00	6	Dokumen	3.820.000,00	6	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen		3	Dokumen	2.165.000,00	3	Dokumen	2.800.000	6	Dokumen	4.965.000	12	Dokumen	8.785.000	50,00	%	46,24%			
				JUMLAH KECAMATAN DUSUN SELATAN			29.035.175.499,00			6.325.900.157,00			7.393.503.632,00			1.064.443.589,00			1.909.089.540,00			2.084.985.615,00			1.288.084.920,00			6.346.603.664,00			12.672.503.821,00						
C				KECAMATAN DUSUN UTARA																															KECAMATAN DUSUN UTARA		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Bakuasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	83.387.296,00	4	Dokumen	13.355.000,00	4	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00								2	Dokumen	6.000.000	6	Dokumen	19.355.000	37,50	%	23,21%		
				Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	8	Dokumen	20.000.000,00	2	Dokumen	4.500.000,00	2	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen				640.000,00							0	Dokumen	640.000	2	Dokumen	5.140.000	25,00	%	25,70%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	8	Dokumen	20.000.000,00	2	Dokumen	4.568.000,00	2	Dokumen	5.000.000,00	0	Dokumen											0	Dokumen	-	2	Dokumen	4.568.000	25,00	%	22,84%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	8	Dokumen	12.000.000,00	2	Dokumen	2.496.000,00	2	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen											0	Dokumen	-	2	Dokumen	2.496.000	25,00	%	20,80%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Dokumen	12.000.000,00	2	Dokumen	1.645.000,00	2	Dokumen	10.000.000,00	0	Dokumen											0	Dokumen	-	2	Dokumen	1.645.000	25,00	%	13,71%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960	orang	7.702.201.092,00	240	orang	1.656.670.587,00	204	orang	1.913.731.902,00	51	orang	321.217.959,00	102	orang	496.233.129,00								153	Dokumen	817.451.088	393	Dokumen	2.474.121.675	40,94	%	32,12%		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	61.761.680,00	4	Dokumen	50.000.000,00	1	Dokumen	12.390.000,00	1	Dokumen	12.390.000,00								2	Dokumen	24.780.000	6	Dokumen	86.541.680	37,50	%	43,27%		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																																	
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	16	Laporan	20.000.000,00	4	Laporan	1.860.000,00	4	Laporan	5.000.000,00		Laporan												0	Dokumen	-	4	Dokumen	1.860.000	25,00	%	9,30%		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	16	Laporan	20.000.000,00	4	Laporan	2.075.000,00	4	Laporan	5.000.000,00		Laporan												0	Dokumen	-	4	Dokumen	2.075.000	25,00	%	10,38%		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
				Pengadaan Pakelan Dinas beserta Akutur Kelerengkapannya				0	Dokumen	-	33	orang	18.000.000,00		Dokumen				16.000.000,00								0	Dokumen	16.000.000	0	Dokumen	16.000.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!		
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	Dokumen	752.000.000,00	12	Dokumen	386.747.000,00	12	Dokumen	200.000.000,00		Dokumen		7	Dokumen	55.940.000,00								7	Dokumen	55.940.000	19	Dokumen	442.687.000	39,58	%	58,87%		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	orang	40.000.000,00	5	orang	48.281.000,00	5	orang	40.000.000,00	0	orang		3	Orang	12.490.000,00								3	Dokumen	12.490.000	8	Dokumen	60.771.000	200,00	%	151,93%		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Dokumen	40.000.000,00	1	orang	5.000.000,00	4	Dokumen	50.000.000,00	0	orang												0	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	12,50	%	12,50%		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																																	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket	20.000.000,00	10	Paket	4.986.140,00	10	Paket	5.000.000,00	2	Paket	1.240.000,00	2	Paket	1.248.000,00								4	Dokumen	2.488.000	14	Dokumen	7.474.140	35,00	%	37,37%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	240.000.000,00	12	Paket	49.072.000,00	2	Paket	30.000.000,00		Paket													0	Dokumen	-	12	Dokumen	49.072.000	25,00	%	20,45%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	80.000.000,00	10	Paket	20.000.000,00	10	Paket	15.000.000,00	2	Paket	2.600.000,00	3	Paket	7.176.000,00									5	Dokumen	9.776.000	15	Dokumen	29.776.000	37,50	%	37,22%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%	16															
			Persediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	20.000.000,00	10	Paket	5.000.000,00	10	Paket	5.000.000,00	1	Paket	500.000,00	2	Paket	1.000.000,00			3	Dokumen	1.500.000	13	Dokumen	6.500.000	32,50	%	32,50%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	100.000.000,00	5	Laporan	12.257.000,00	5	Laporan	20.000.000,00	3	Laporan	10.000.000,00						3	Dokumen	10.000.000	8	Dokumen	22.257.000	40,00	%	22,26%

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K		Rp	K	Rp							
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan								Volume	Satuan					
																												Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x13	15 = 14 / 6 x100%	16																	
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	8	Laporan	40.000.000,00	2	Laporan	7.500.000,00	2	Laporan	154.000.000,00	1	Laporan	33.520.000,00		6.880.000,00			1	Dokumen	40.400.000	3	Dokumen	47.900.000	37,50	%	119,75%		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																												
				Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																												
				Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16	Laporan	200.000.000,00	4	Laporan	50.000.000,00	3	Laporan	30.000.000,00	3	Laporan	30.000.000,00					3	Dokumen	30.000.000	7	Dokumen	80.000.000	43,75	%	40,00%		
				JUMLAH KECAMATAN DUSUN UTARA			15.677.284.388,00			3.449.574.139,00			3.728.294.902,00		474.331.406,00		804.451.604,00								1.278.783.010,00		4.728.357.149,00					
D				KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI																											KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
				PROGRAM PENJAJANG USUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																												
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	12.754.000,00	2	Dokumen	2.963.500,00	2	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	360.000,00				0	Dokumen	360.000	2	Dokumen	3.323.500	20,00	%	26,06%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	12.000.000,00	1	Dokumen	2.934.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	360.000,00				0	Dokumen	360.000	1	Dokumen	3.294.000	20,00	%	27,45%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000,00	1	Dokumen	1.775.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	-			#REF!	Dokumen	-	#REF!	Dokumen	1.775.000	#REF!	%	22,19%		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000,00	1	Dokumen	2.000.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	360.000,00				0	Dokumen	360.000	1	Dokumen	2.360.000	20,00	%	29,50%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000,00	1	Dokumen	1.355.000,00	1	Dokumen	4.000.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	-			0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.355.000	20,00	%	16,94%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	60	Laporan	8.000.000,00	12	Laporan	1.980.000,00	12	Laporan	6.000.000,00	0	Laporan	-	Laporan	-			0	Laporan	-	12	Laporan	1.980.000	20,00	%	24,75%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																												
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1320	Orang/Bulan	7.143.629.872,00	462	Orang/Bulan	1.662.581.402,00	252	Orang/Bulan	1.785.921.171,00	54	Orang/Bulan	405.278.404,00		581.212.954,00				54	Orang/Bulan	986.491.358	516	Orang/Bulan	2.649.072.760	39,09	%	37,08%	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	969.456.000,00	12	Dokumen	76.162.890,00	12	Dokumen	88.708.800,00	1	Dokumen	-	Dokumen	34.112.000,00				1	Dokumen	34.112.000	13	Dokumen	110.274.890	21,67	%	29,85%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	19.999.600,00	3	Paket	12.757.500,00	1	Paket	2.499.900,00	0	Paket	-	Paket	197.000,00				0	Paket	197.000	3	Paket	12.954.500	60,00	%	64,77%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27	Paket	251.832.000,00			251.832.000,00	27	Paket	251.832.000,00	0	Paket	-	Paket	118.500.000,00				0	Paket	118.500.000	0	Paket	118.500.000	0,00	%	47,06%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	135	Paket	119.999.200,00	33	Paket	34.999.100,00	12	Paket	26.520.000,00	0	Paket	-	Paket	13.260.000,00				0	Paket	13.260.000	33	Paket	48.259.100	24,44	%	40,22%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pembuatan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Paket	142.864.000,00	21	Paket	35.629.464,00	1	Dokumen	46.916.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	8.603.000,00				0	Dokumen	8.603.000	21	Dokumen	44.232.464	35,00	%	30,96%	
				Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	180	Laporan	120.000.000,00	48	Laporan	50.040.000,00	36	Laporan	49.891.750,00	0	Laporan	-	Laporan	25.174.225,00				0	Laporan	25.174.225	48	Laporan	75.214.225	26,67	%	62,68%	
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	440.000.000,00	28	Laporan	181.790.933,00	12	Laporan	343.530.000,00	0	Laporan	-	Laporan	61.920.000,00				0	Laporan	61.920.000	28	Laporan	243.710.933	46,67	%	55,39%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan																												
				Langitun Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	168.500.000,00			168.500.000,00	1	Unit	168.500.000,00	0	Unit	-	Unit	9.427.500,00				0	Unit	9.427.500	0	Unit	9.427.500	0,00	%	5,59%	
				Penimbunan Halaman Kantor	Luas Penimbunan Halaman Kantor	1	Lokasi	459.184.100,00			459.184.100,00	1	Lokasi	459.184.100,00	0	Lokasi	-	Lokasi	24.427.500,00				0	Lokasi	24.427.500	0	Lokasi	24.427.500	0,00	%	5,32%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.078.266.000,00	2	Unit	328.171.480,00			328.171.480,00					328.171.480,00				0	Unit	-	2	Unit	328.171.480	40,00	%	30,44%	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Kegiatan	399.999.812,00	2	Unit	397.113.680,00			397.113.680,00					397.113.680,00				0	Unit	-	2	Unit	397.113.680	100,00	%	99,28%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	15.951.200,00	2	Laporan	3.987.800,00	1	Laporan	3.984.000,00	0	Laporan	-	Laporan	1.100.000,00				0	Laporan	1.100.000	2	Laporan	5.087.800	40,00	%	31,90%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	60	Laporan	509.476.800,00	15	Laporan	26.596.538,00	12	Laporan	189.999.147,00	0	Laporan	-	Laporan	4.404.551,00				0	Laporan	4.404.551	15	Laporan	31.001.089	25,00	%	6,08%	

No	Sasaran	Kode	Usulan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2026 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K		Rp				
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan
					K			K			K			K		K		K		K		K			K			K			K			K				K			K		K	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16																			
				Penyediaan Jasa Penatatan dan Penengkapan Kantor	5	Laporan	80.000.000,00	1	Laporan	8.859.700,00	1	Laporan	18.803.000,00	0	Laporan	-	Laporan	2.946.000,00			0	Laporan	2.946.000	1	Laporan	11.805.700	20,00	%	14,76%															
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	554.800.000,00	20	Laporan	136.200.000,00	12	Laporan	198.000.000,00	2	Laporan	33.000.000,00	Laporan	49.500.000,00			2	Laporan	82.500.000	22	Laporan	218.700.000	36,67	%	39,42%															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	25.600.000,00				12	Bulan	25.600.000,00	0	Bulan	-	Bulan	-			0	Bulan	-	0	Bulan	-	0,00	%	0,00%															
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Kegiatan	199.999.915,00	1	Kegiatan	199.581.715,00											0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	199.581.715	100,00	%	99,79%															
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																								
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																																								
				Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	Laporan	163.560.000,00	6	Laporan	40.890.000,00	2	Laporan	46.425.000,00	0	Laporan	-	Laporan	46.425.000,00			0	Laporan	46.425.000	6	Laporan	87.315.000	60,00	%	53,38%															
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Bulan	99.952.000,00				12	Bulan	99.952.000,00	0	Bulan	-	Bulan	49.801.000,00			0	Bulan	49.801.000	0	Bulan	49.801.000	0,00	%	49,82%															
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																																								
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	Laporan	309.966.000,00	13	Laporan	77.491.500,00	12	Laporan	57.600.000,00	2	Laporan	9.600.000,00	Laporan	14.400.000,00			2	Laporan	24.000.000	15	Laporan	101.491.500	25,00	%	32,74%															
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																																								
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																																								
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	Laporan	363.094.000,00	6	Laporan	109.927.550,00	12	Laporan	134.237.300,00	0	Laporan	-	Laporan	8.680.000,00			0	Laporan	8.680.000	6	Laporan	118.607.550	10,00	%	32,67%															
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																																								
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	12	Bulan	100.000.000,00				12	Bulan	100.000.000,00	0	Bulan	-	Bulan	25.000.000,00			0	Bulan	25.000.000	0	Bulan	25.000.000	0,00	%	25,00%															
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																																								
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																																								
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	60	Laporan	200.000.000,00	6	Laporan	50.000.000,00	12	Laporan	51.750.000,00	0	Laporan	-	Laporan	6.280.000,00			0	Laporan	6.280.000	6	Laporan	56.280.000	10,00	%	28,14%															
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																								
				Penyelenggaraan Urusan Sosial Pemukiman Kepala Daerah																																								
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	Dokumen	575.676.000,00	6	Dokumen	83.769.000,00	12	Dokumen	243.900.000,00	0	Dokumen	-	Dokumen	67.738.000,00			0	Dokumen	67.738.000	6	Dokumen	151.507.000	10,00	%	26,32%															
				PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA																																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	15 = 14 / 6 x100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6		7	7		8	9		10	10		11		12		13		14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x100%		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627

No	Sasaran	Kode	Usulan Bidang Usutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RWPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s.d Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
					Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Rp	Volume	Satuan	Rp												
																														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 12	15 = 14 / 6 x100%	16																										
		7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	4	Unit	42.000.000,00	1	Unit	10.174.300	1	Unit	9.000.000,00	0	Unit	-	0	Unit	5.400.000,00	0	Unit	-	1	Unit	3.084.300	1	Unit	8.484.300	2	Unit	18.658.600	50,00	%	44,43%							
		7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	25.480.000,00	12	Unit	6.370.000	12	Unit	10.000.000,00	0	Unit	-	6	Unit	3.690.000,00	0	Unit	2.100.000,00	6	Unit	-	12	Unit	5.790.000	24	Unit	12.160.000	50,00	%	47,72%							
		7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						61.247.250,00																															
		7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	19.520.000,00	1	Unit	4.880.000	1	Unit	4.880.000,00	0	Unit	-	0	Unit	2.440.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	2.440.000	1	Unit	7.320.000	25,00	%	37,50%							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	7 01 02	PROGRAM PENYELONGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										-																												
		7 01 02 2.01	Koordinat Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										-																												
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	8	Laporan	180.000.000,00	2	Laporan	44.729.000	2	Laporan	142.447.800,00	0	Laporan	-	0	Laporan	3.250.000,00	0	Laporan	55.640.000,00	1	Laporan	70.627.800	1	Laporan	129.517.800	3	Laporan	174.246.800	37,50	%	96,80%							
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Usutan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										-																												
		7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	6.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00%						
		7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Dokumen	9.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00%						
		7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Dokumen	6.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00%						
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	7 01 03	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										-																												
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										-																												
		7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20	Lembaga Ke masyarakata n	20.000.000,00	5	Lembaga Ke masyarakata n	5.000.000	1	Lembaga Ke masyarakata n	5.000.000,00	0	Lembaga Ke masyarakata n	-	0	Lembaga Ke masyarakata n	-	0	Lembaga Ke masyarakata n	-	0	Lembaga Ke masyarakata n	-	0	Lembaga Ke masyarakata n	-	5	Lembaga Ke masyarakata n	5.000.000	25,00	%	25,00%							
		7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Paket	881.620.880,00	2	Paket	220.145.220	1	Paket	40.686.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	447.800,00	2	Paket	40.238.200	2	Paket	40.686.000	4	Paket	260.831.220	50,00	%	29,59%							
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Omas	518.379.120,00	2	Pokmas / Omas	125.290.780	2	Pokmas / Omas	198.615.600,00	0	Pokmas / Omas	-	0	Pokmas / Omas	29.658.800,00	0	Pokmas / Omas	37.038.000,00	2	Pokmas / Omas	131.471.000	2	Pokmas / Omas	198.167.800	4	Pokmas / Omas	323.458.580	50,00	%	62,40%							
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										-																												
		7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga Ke masyarakata n	678.770.000,00	1	Lembaga Ke masyarakata n	166.119.000	2	Lembaga Ke masyarakata n	154.320.000,00	0	Lembaga Ke masyarakata n	5.000.000,00	0	Lembaga Ke masyarakata n	27.000.000,00	1	Lembaga Ke masyarakata n	31.600.000,00	2	Lembaga Ke masyarakata n	89.985.000	3	Lembaga Ke masyarakata n	153.585.000	4	Lembaga Ke masyarakata n	319.704.000	50,00	%	47,31%							
		7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										-																												
		7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	300.000.000,00	0	Dokumen	-																															
		7 01 03 2.05 07 01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menegapkan Perilaku Hidup	Jumlah dokumen Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menegapkan Perilaku Hidup	1	Dokumen	225.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00%							
		7 01 03 2.05 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1	Dokumen	150.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	48.200.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	48.200.000	0	Dokumen	48.200.000	0,00	%	32,13%							
	Meningkatnya Keterlibatan dan Keterlraman Masyarakat	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERLIRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM										-																												
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlraman dan Keterlibatan Umum										-																												
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Koposisi Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Koposisi Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1	Dokumen	300.000.000,00			1	Dokumen			0	Dokumen	53.985.000,00	0	Dokumen	9.450.000,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	46.215.000	1	Dokumen	109.650.000	1	Dokumen	109.650.000	100,00	%	36,55%							
		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	20.000.000,00	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	5.000.000	25,00	%	25,00%							

No	Sasaran	Kode	Usulan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
											I		II		III		IV																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
		7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																	
		7 01 05 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemangsaan Kepala Daerah																																	
		7 01 05 2.01 06		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	536.000.000,00	1	Dokumen	74.000.000	1	Dokumen	134.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	43.070.000,00	0	Dokumen	5.500.000,00	1	Dokumen	58.244.200	1	Dokumen	106.814.200	2	Dokumen	180.814.200	50,00	%	33,73%			
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																																	
		7 01 06 2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																																	
		7 01 06 2.01 03		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	231.000.000,00	1	Dokumen	57.065.000	1	Dokumen	56.505.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.250.000,00	0	Dokumen	4.250.000,00	1	Dokumen	20.400.000	1	Dokumen	28.900.000	2	Dokumen	85.965.000	50,00	%	37,21%			
		7 01 06 2.01 05		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	25,00	%	25,00%						
		7 01 06 2.01 11		Facilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum	4	Dokumen	40.000.000,00	1	Dokumen	9.620.000	1	Dokumen	10.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	4.000.000	2	Dokumen	13.620.000	50,00	%	34,05%			
		7 01 06 2.01 13		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4	Dokumen	81.983.600,00	1	Dokumen	20.495.900	1	Dokumen	25.923.500,00	0	Dokumen	25.923.500,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	25.923.500	1	Dokumen	46.419.400	25,00	%	56,62%			
				JUMLAH KECAMATAN KARAU KUALA			14.655.200.768,00					3.052.189.401,00			4.163.789.682,00			437.292.934,00			871.068.523,00			814.523.887,00			1.360.177.352,00			3.483.063.696,00			6.535.253.097,00				
VIII				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																																	
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																	
	Nilai SAKIP	8 01 01		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																	
		8 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
		1 01 01 2.01 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	91.360.000,00		Dokumen		2	Dokumen	22.840.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	22.454.600,00	1	Dokumen	-	2	Dokumen	22.454.600	2	Dokumen	22.454.600	25,00	%	24,58%			
		2 01 01 2.01 02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	Dokumen	60.000.000,00		Dokumen		5	Dokumen	15.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	5	Dokumen	15.000.000,00	0	Dokumen	-	5	Dokumen	15.000.000	5	Dokumen	15.000.000	25,00	%	25,00%			
		3 01 01 2.01 03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	Dokumen	60.000.000,00	4	Dokumen	80.520.800,00	5	Dokumen	15.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	5	Dokumen	14.683.200,00	5	Dokumen	14.683.200	9	Dokumen	95.204.000	45,00	%	158,67%			
		4 01 01 2.01 04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20	Dokumen	86.560.000,00		Dokumen		5	Dokumen	21.640.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	21.617.000,00	1	Dokumen	-	5	Dokumen	21.617.000	5	Dokumen	21.617.000	25,00	%	24,97%			
		5 01 01 2.01 05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20	Dokumen	100.000.000,00		Dokumen		5	Dokumen	25.000.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	10.172.750,00	5	Dokumen	14.613.450,00	5	Dokumen	24.786.200	5	Dokumen	24.786.200	25,00	%	24,79%			
		6 01 01 2.01 06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itikad Realisasi Kinerja SKPD	40	Laporan	147.828.000,00		Laporan		10	Laporan	36.957.000,00	5	Laporan	36.957.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	95	Laporan	-	100	Laporan	36.957.000	100	Laporan	36.957.000	250,00	%	25,00%			
		7 01 01 2.01 07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	90.040.000,00		Laporan		4	Laporan	22.510.000,00	3	Laporan	22.250.800,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	-	4	Laporan	22.250.800	4	Laporan	22.250.800	25,00	%	24,71%			
		8 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
		8 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1200	orang/bulan	10.481.260.564,00	312	orang/bulan	2.256.227.552,00	300	orang/bulan	2.620.315.141,00	75	orang /bulan	539.752.271,00	75	orang /bulan	830.759.025,00	75	orang /bulan	414.137.304,00	75	orang /bulan	583.867.667,00	300	orang/bulan	2.368.516.267	612	orang/bulan	4.624.743.819	51,00	%	44,12%			
		8 01 01 2.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	320.000.000,00		Dokumen		12	Dokumen	53.300.000,00	0	Dokumen	-	4	Dokumen	26.450.000,00	2	Dokumen	17.850.000,00	6	Dokumen	9.000.000,00	12	Dokumen	53.300.000	12	Dokumen	53.300.000	25,00	%	16,66%			
		8 01 01 2.02 05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	Laporan	80.000.000,00		Laporan		4	Laporan	45.160.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	4	Laporan	45.160.000,00	4	Laporan	45.160.000	4	Laporan	45.160.000	25,00	%	56,45%			
		8 01 01 2.02 07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40	Laporan	80.000.000,00		Laporan		10	Laporan	20.000.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	19.997.800,00	9	Laporan	-	1	Laporan	-	10	Laporan	19.997.800	10	Laporan	19.997.800	25,00	%	25,00%			
		8 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																	
		8 01 01 2.03 06	06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Laporan	40.000.000,00		Laporan		4	Laporan	10.000.000,00	0	Laporan	-	1	Laporan	2.400.000,00	1	Laporan	2.800.000,00	2	Laporan	4.800.000,00	4	Laporan	10.000.000	4	Laporan	10.000.000	25,00	%	25,00%			
		8 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota sid Tahun 2024 (Majmuk Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota sid Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan										Volume	Satuan	Volume	Satuan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 / 6 x 100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		8 01 01 2.05 02	Pengadahan Paksiain Dinas beserta Attribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Attribut Kelengkapan	200	Stel	100.000.000,00		Stel	50	Stel	25.000.000,00	0	Stel	-	0	Stel	-	50	Stel	24.000.000,00	50	Stel	24.000.000,00	25,00	%	24,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang	80.000.000,00		Orang	4	Orang	16.000.000,00	1	Orang	3.000.000,00	0	Orang	-	0	Orang	-	2	Orang	3.600.000,00	3	Orang	6.600.000,00	3	Orang	6.600.000,00	18,75	%	8,25%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		8 01 01 2.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000,00		Paket	1	Paket	9.140.000,00	0	Paket	-	0	Paket	4.000.000,00	0	Paket	4.983.250,00	1	Paket	140.000,00	1	Paket	9.123.250	1	Paket	9.123.250	25,00	%	45,62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	89.000.000,00	4	Paket	16.193.260,00	1	Paket	26.000.000,00	0	Paket	7.000.000,00	0	Paket	7.000.000,00	0	Paket	12.000.000,00	1	Paket	-	1	Paket	26.000.000	5	Paket	42.193.260	125,00	%	47,41%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	4	Paket	208.000.000,00	4	Paket	51.500.000,00	1	Paket	52.000.000,00	0	Paket	2.000.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	50.000.000,00	1	Paket	52.000.000	5	Paket	103.500.000	125,00	%	49,76%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	40.000.000,00	1	Paket	6.977.750,00	12	Paket	11.536.200,00	0	Paket	3.000.000,00	8	Paket	3.000.000,00	1	Paket	5.000.000,00	3	Paket	536.000,00	12	Paket	11.536.000	13	Paket	18.513.750	27,08	%	46,28%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyusunan Peundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penyusunan Peundang-undangan yang Disediakan	48	Dokumen	28.000.000,00	3	Dokumen	7.700.000,00	12	Dokumen	9.000.000,00	0	Dokumen	-	6	Dokumen	3.500.000,00	3	Dokumen	5.500.000,00	3	Dokumen	-	12	Dokumen	9.000.000	15	Dokumen	16.700.000	31,25	%	59,64%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Laporan	160.000.000,00	10	Laporan	39.880.000,00	12	Laporan	48.000.000,00	0	Laporan	-	6	Laporan	21.900.000,00	0	Laporan	22.950.000,00	6	Laporan	3.150.000,00	12	Laporan	48.000.000	22	Laporan	87.880.000	45,83	%	54,93%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	Laporan	1.273.104.000,00	25	Laporan	162.414.620,00	1	Laporan	405.925.600,00	0	Laporan	87.843.000,00	0	Laporan	84.837.200,00	0	Laporan	83.596.300,00	1	Laporan	149.399.200,00	1	Laporan	405.675.700	26	Laporan	568.090.320	650,00	%	44,62%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	100.000.000,00		Paket	1	Paket	25.000.000,00	0	Paket	-	0	Paket	23.750.000,00	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	23.750.000	1	Paket	23.750.000	25,00	%	23,75%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	100.000.000,00		Paket	1	Paket	25.000.000,00	0	Paket	-	0	Paket	23.750.000,00	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	23.750.000	1	Paket	23.750.000	25,00	%	23,75%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	Paket	175.500.000,00		Paket	1	Paket	43.875.000,00	0	Paket	-	0	Paket	42.930.000,00	0	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	42.930.000	1	Paket	42.930.000	25,00	%	24,46%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
											Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan															Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 / 6 x 100%	16																																				
		8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Semangat Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Semangat Kebangsaan	16	Laporan	160.000.000,00	10	Laporan	25.883.780,00	4	Laporan	40.000.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	8.311.800,00	2	Laporan	12.416.200,00	2	Laporan	18.176.800,00	4	Laporan	38.904.800	14	Laporan	64.788.580	87,50	%	40,49%																	
		8 01 02 2.01 08	Pembentukan Pasukabata		280	Orang	4.000.000.000,00		Orang		70	Orang	1.480.940.000,00	0	Orang	25.206.800,00	6	Orang	71.163.700,00	60	Orang	853.232.528,00	4	Orang	526.463.791,00	70	Orang	1.476.066.819	70	Orang	1.476.066.819	25,00	%	36,90%																	
		8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA																																																
	Capaian Pembinaan terhadap Omas, LSM dan OKP Aktif	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																																																
		8 01 03 2.01 01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	16	Dokumen	160.000.000,00	7	Dokumen	12.246.200,00	4	Dokumen	40.000.000,00	1	Dokumen	2.000.000,00	0	Dokumen	900.000,00	0	Dokumen	9.411.914,00	3	Dokumen	27.620.400,00	4	Dokumen	39.932.314	11	Dokumen	52.178.514	68,75	%	32,61%																	
		8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1536	Orang	360.000.000,00	384	Orang	1.812.763.220,00	384	Orang	1.917.625.000,00	0	Orang	3.351.000,00	20	Orang	1.500.000,00	173	Orang	923.177.495,00	191	Orang	983.442.749,00	384	Orang	1.911.471.244	768	Orang	3.724.234.464	50,00	%	1034,51%																	
		8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	504	Orang	320.000.000,00	126	Orang	57.257.800,00	126	Orang	80.000.000,00	10	Orang	11.309.800,00	70	Orang	40.155.200,00	30	Orang	21.296.714,00	16	Orang	6.556.400,00	126	Orang	79.318.114	252	Orang	136.575.914	50,00	%	42,68%																	
		8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	48	Laporan	300.000.000,00	5	Laporan	19.131.600,00	12	Laporan	75.000.000,00	1	Laporan	5.446.200,00	5	Laporan	37.106.800,00	0	Laporan	730.172,00	6	Laporan	31.655.200,00	12	Laporan	74.938.372	17	Laporan	94.069.972	35,42	%	31,36%																	
	Capaian Pembinaan terhadap Omas, LSM dan OKP Aktif	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																																																
		8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																																																
		8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Disusun	16	Dokumen	40.000.000,00	4	Dokumen	6.487.000,00	4	Dokumen	7.400.000,00	0	Dokumen	1.120.000,00	1	Dokumen	2.117.700,00	1	Dokumen	2.810.000,00	2	Dokumen	1.065.000,00	4	Dokumen	7.112.700	8	Dokumen	13.599.700	50,00	%	34,00%																	
		8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan didiorg Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Disusun	16	Dokumen	60.000.000,00		Dokumen		4	Dokumen	14.450.000,00	0	Dokumen	2.542.000,00	2	Dokumen	6.474.200,00	0	Dokumen	-	2	Dokumen	5.050.800,00	4	Dokumen	14.067.000	4	Dokumen	14.067.000	25,00	%	23,45%																	
		8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan didiorg Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Disusun	224	Orang	129.510.967.600,00	56	Orang	22.238.256.300,00	56	Orang	33.418.464.900,00	0	Orang	2.628.000,00	53	Orang	30.653.898.900,00	1	Orang	467.344.200,00	2	Orang	1.651.561.114,00	56	Orang	32.775.432.214	112	Orang	55.013.688.514	50,00	%	42,48%																	

[illegible]

2.6 Sustainable Development Goals (SDG’s)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Terdapat 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s), seperti pada gambar berikut:



Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Tabel 2.50

Tujuan dan Indikator Kinerja SDGs
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Daerah	Capaian kinerja tahun 2024
1.	Tanpa kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	6.870 Jiwa
2.	Tanpa kelaparan	Prevalensi stunting	23,09%
3.	Kehidupan sehat dan sejahtera	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BAD
4.	Pendidikan berkualitas	Persentase angka melek hurup penduduk umur ≥15 tahun.	99,92 %
5.	Kesetaraan gender	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	10 Kursi
6.	Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi.	82,90%
7.	Energi bersih dan terjangkau	- Rasio elektrifikasi	83,13%
8.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	- Laju pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Pengangguran terbuka	- 4,70 - 4,12

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Daerah	Capaian kinerja tahun 2024
9.	Industri, Inovasi dan infrastruktur	- Kondisi mantap jalan	BAD
10.	Berkurangnya kesenjangan	- Rasio Gini - Indeks Desa Membangun	- 0,284 - 104,68%
11.	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Jumlah rumah layak huni	86,64
12.	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	- Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	BAD
13.	Penanganan perubahan iklim	- Tersedianya strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BAD
14.	Ekosistem lautan	-	Tidak ada wilayah laut di Barito Selatan.
15.	Ekosistem Darat	- Luas kawasan hutan	445.643 Ha
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	- Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B - Persentase bayi berakta kelahiran	- BAD - BAD - BAD
17.	Kemitraan untuk mencapai tujuan	- Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	- BAD

2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri urusan terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrumen krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam

menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah.

Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema “Transformasi Pondasi Pembangunan”. SPM bukan sekadar instrumen administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan transformasi pondasi pembangunan. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

SPM merupakan entry point dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar:

Tabel 2. 51 Persentase Realisasi Capaian SPM

Urusan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	56,51	58,28	82,48	94,42
Kesehatan	55,28	38,49	81,19	90,51
Pekerjaan Umum	57,54	30,48	48,62	89,95
Perumahan Rakyat	16,12	60	100	95
Trantibumlinmas	23,28	89,38	62,22	94,44
Sosial	33,33	75,8	97,44	97,44

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2025)

Hasil capaian kinerja selama periode 2021-2024 menunjukkan bahwa Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis, pada tahap pertama RPJPD ini harus menjadi titik balik pemenuhan SPM, sebagai prasyarat utama keberhasilan Transformasi Pondasi Pembangunan.

Selain dari capaian kuantitatif, keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sangat ditentukan oleh seberapa besar hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Berdasarkan rekapitulasi permasalahan yang dilaporkan oleh masing-masing urusan pelayanan dasar selama tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah uraian permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Permasalahan Penerapan SPM

Urusan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	0	0	0	0
Kesehatan	4	5	0	0
Pekerjaan Umum	0	1	1	0
Perumahan Rakyat	4	4	4	5
Trantibumlinmas	4	0	0	0
Sosial	6	3	1	0

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran antarurusan dan tahun belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan signifikan meliputi beberapa sektor yang mengalami realisasi sangat rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi capaian SPM dalam kurun waktu tersebut. Tabel berikut menyajikan persentase realisasi anggaran untuk masing-masing urusan pelayanan dasar:

Tabel 2. 53 Target Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	98,3	0	0	63,11
Kesehatan	82,1	20,86	37,36	28,74
Pekerjaan Umum	98,52	41,96	97,58	96,28
Perumahan Rakyat	0	35,39	100	96,67
Trantibumlinmas	98,77	24,84	77,33	43,06
Sosial	100	0	98,46	93,66

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak dan akses layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan target capaian SPM sebesar 100% untuk seluruh urusan pelayanan dasar mulai tahun 2025 hingga 2030. Target ini bersifat absolut dan non-negotiable, karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Target Realisasi Capaian SPM

Urusan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan	100	100	100	100	100	100
Kesehatan	100	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum	100	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat	100	100	100	100	100	100
Trantibumlinmas	100	100	100	100	100	100
Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.8 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, kinerja urusan pemerintahan daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.8.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.8.1.1. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan krusial dalam pembangunan suatu wilayah karena menjadi landasan bagi kemajuan sosial ekonomi. Tingkat pendidikan yang berkualitas akan memberikan kemudahan akses bagi setiap individu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks pembangunan wilayah, investasi dalam pendidikan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat berkontribusi dalam perkembangan suatu wilayah dan merupakan pilar penting pembangunan.

Fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas yang layak menunjukkan variasi dengan sedikit penurunan dan peningkatan di berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan pada jenjang SD menunjukkan tren kenaikan hingga mencapai angka 100 pada tahun 2021, tetapi mengalami penurunan yang drastis hingga mencapai angka 92,68 pada tahun 2023. Begitu pula pada jenjang SMP, ketersediaan fasilitas pendidikan mengalami kenaikan dan penurunan drastis pada tahun 2023. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar meningkat dari 0,093 pada 2019 menjadi 0,110 pada 2023. Dilihat

dari sisi ketersediaan guru, rasio guru terhadap murid menunjukkan perkembangan yang stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar mengalami penurunan dari 1:8 menjadi 1:7, kemudian pada pendidikan menengah juga mengalami penurunan dari 1:11 menjadi 1:8. Capaian ini menunjukkan beberapa kemajuan dalam sektor pendidikan. Namun, peningkatan angka putus sekolah di SD menunjukkan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua anak mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan. Investasi lebih lanjut dalam infrastruktur pendidikan dan program dukungan siswa diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

Tabel 2. 55 Kondisi Pendidikan

No	Capaian Kinerja						
	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah						
	APS SD	%	0.07	0.28	0	0.52	-
	APS SMP	%	0.3	0.39	0	1.82	-
	APS SMA	%	-	-	-	-	-
2	Angka Kelulusan						
	SD/MI		100	100	100	100	-
	SMP/MTs		100	100	100	100	-
3	Fasilitas Pendidikan						
	Ruang Kelas Pendidikan SD/MI yang Layak	-	91,88	96,02	100	91,75	92,68
	Ruang Kelas Pendidikan SMP/MTS yang Layak	-	92,05	94,65	100	94,74	93,11
	Ruang Kelas Pendidikan SMA/MA yang Layak	-	96,95	100	100	97,18	93,18
	Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	-	0,099306	0,097222	-	0,110417	-
4	Rasio Guru terhadap Murid						
	Pendidikan Dasar	-	01:08	01:08	01:08	01:08	01:07
	Pendidikan Menengah	-	01:11	01:11	01:10	01:10	01:08
5	Guru yang memenuhi		85,70	92,57	0	78,33	78,41

No	Capaian Kinerja						
	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	kualifikasi S1 D-IV						

Sumber: Kabupaten Barsel Dalam Angka, BPS Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2017-2022, serta RKPD Tahun 2024 dan 2025, Diolah

2.8.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak mendasar manusia yang menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu perencanaan pembangunan. Dengan memahami situasi kesehatan, perumusan strategi dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan kualitas, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun setiap warga negara bertanggung jawab untuk atas kesehatannya sendiri, pemerintah wajib memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi kesehatan kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari tingkat kelahiran dan kematian; Penyakit menular dan tidak menular; serta kebijakan pemerintah tentang pengentasan stunting yang menjadi fokus utama. Berikut dijabarkan capaian kinerja bidang kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	70,66	-	85.85	96,57	-
2	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	76,3	83,3	75	90	-
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	62,34	69,82	63,94	65,69	50,98
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah	%	63,99	64,91	72,85	151	69,19
6	Cakupan kunjungan bayi	%	71,9	-	-	100	-
7	Survei Stunting	%	33,9		31,4	35,6	-
8	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	-	2,6	0	3,89	2	-
9	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	-	0	251	399,29	200	274,2
10	Angka kesakitan DBD	Orang	18	7	2	4	93
11	Jumlah penderita penyakit menular (Malaria)	Orang	-	-	2	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
12	Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi)	Orang	-	-	12.576	36.021	9.459
13	Angka Penemuan dan Pengobatan TBC	%	25	31	31	49	49,9
14	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	%	97	98	94	97	82
15	Jumlah kasus baru AIDS	Orang	6	2	1	9	12

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kalteng Tahun 2019, BPS Kalteng, Kalteng Dalam Angka, Barsel Dalam Angka, RPJMD Tahun 2017-2022, dan Dokumen RKPD, Diolah

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan persentase ibu hamil yang melahirkan dengan didampingi oleh tenaga kesehatan terlatih seperti bidan, dokter, atau perawat. Indikator ini penting karena persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Tren cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menunjukkan adanya peningkatan dimana pada tahun 2022 telah mencapai 96,57 persen. Sementara itu, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah persentase desa/kelurahan di suatu wilayah yang telah mencapai kondisi dimana 80 persen atau lebih bayi di bawah usia 1 tahun di suatu desa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, antara lain melalui imunisasi campak, difteri, tetanus, pertusis, polio, dan hepatitis B. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Hal ini tentunya harus dipertahankan untuk mencapai pembangunan kesehatan yang ideal dari penanganan kesehatan bayi sejak dini.

Pada tahun 2023, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,98 persen. Fenomena ini dapat diartikan bahwa setengah dari ibu hamil yang beradai di Kabupaten Barito Selatan tidak mendapatkan kunjungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, akses transportasi yang sulit, atau kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kunjungan antenatal. Selaras dengan hal tersebut, persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah mengalami penurunan hingga hanya mampu mencakup sebesar 69,19 persen di tahun 2023. Hal ini



mengindikasikan bahwa kebijakan atau program-program kesehatan mungkin tidak berjalan efektif karena minimnya akses dan kurangnya kesadaran akan pentingnya suplementasi tambah darah selama kehamilan.

Cakupan kunjungan bayi merupakan persentase bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) paling sedikit 4 kali dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2022, cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barito Selatan telah mencapai 100 persen. Semakin tinggi cakupan kunjungan bayi maka semakin baik pula pelayanan kesehatan yang diperoleh bayi di suatu wilayah. Namun, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan AKB dengan nilai 3,89. Peningkatan AKB ini menjadi indikator bahwa kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu mendapat perhatian lebih.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren yang fluktuatif dimana terjadi penurunan di Tahun 2023 yang mencapai 274,2 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian perempuan saat hamil atau selama 42 hari setelah terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan oleh kehamilannya atau pengelolaannya. Pada tahun 2023, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai 93 orang. Sementara itu, jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi) pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 9.459 orang dari 36.021 orang di tahun sebelumnya. Angka Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (TBC) menunjukkan peningkatan signifikan dari 25% pada tahun 2019 menjadi 204% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menemukan dan mengobati kasus TBC semakin efektif dari tahun ke tahun. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan TBC relatif stabil dengan persentase tinggi antara tahun 2019 dan 2022. Peningkatan signifikan dalam penemuan dan pengobatan TBC mengindikasikan bahwa program deteksi dini dan intervensi pengobatan semakin berhasil. Sementara itu, kestabilan dalam

tingkat keberhasilan pengobatan menunjukkan bahwa pengobatan yang diberikan cukup efektif.

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah dokter yang tersedia untuk melayani setiap 100.000 orang dalam populasi. Rasio ini digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Tabel 2. 57 Jumlah Rasio Dokter

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	42,56	30,76	31,04	44,06	46,03
2.	Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk	3,85	3,76	3,70	3,36	4,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2023

Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren perkembangan dari tahun 2019 hingga 2023 untuk berbagai indikator kinerja fasilitas kesehatan. Tren yang diamati meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, dan Klinik. Puskesmas menunjukkan tren yang stagnan dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Puskesmas Pembantu menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021 dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan sedikit menjadi 0.393. Posyandu mengalami fluktuasi dengan penurunan kembali pada tahun 2023, yaitu mencapai 1,292 per 1000 Penduduk. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan seperti

Puskesmas dan Klinik menunjukkan upaya meningkatkan akses dan layanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ideal, tersebar merata, dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat menerima perawatan medis yang dibutuhkan tanpa kesulitan.

Tabel 2. 58 Kondisi Perkembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Puskesmas	0.088	0.092	0.091	0.091	0.089
2.	Puskesmas Pembantu	0.336	0.397	0.403	-	0.393
3.	Posyandu	1.886	1.312	1.322	1.955	1.292
4.	Rumah Bersalin	0.007	-	-	-	-
5.	Rumah Sakit Umum	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007
6.	Klinik	0.058	0.008	0.000	0.023	0.037

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka, Kalimantan Tengah Dalam Angka

2.8.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur yang mumpuni menjadi kunci utama dalam pembangunan. Infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan tidak hanya mempermudah pergerakan penduduk, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama dalam mendorong mobilisasi dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pembangunan wilayah. Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten.

Tabel 2. 59 Capaian Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Tahun	Realisasi (km)	Capaian
2017	613,158	59%
2018	559,439	54%
2019	483,67	47%
2020	648,35	63%
2021	680,97	66%
2022	358,97	35%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Barito Selatan

Capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan selama periode 2017-2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017, dari total panjang jalan 1.035,040 km, target yang ditetapkan sebesar 421,66 km (41%) dapat tercapai dengan realisasi 613,158 km (59%). Pada tahun 2021, target proporsi panjang jalan yang baik adalah 617,35 km (60%), dan realisasi mencapai 680,97 km (66%).

Meskipun ada penurunan pada tahun 2019, di mana capaian berada di bawah target dengan proporsi 47%, namun pada tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan signifikan, mencapai 63% dan 66% masing-masing. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh program perbaikan jalan melalui skema Proyek Multiyears yang berlangsung dari 2018 hingga 2020. Namun, pada tahun 2022, capaian kembali mengalami penurunan drastis menjadi hanya 35%, menunjukkan perlunya evaluasi dan upaya tambahan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di masa depan.

Irigasi memiliki peran yang sangat penting di Kabupaten Barito Selatan. Wilayah ini memiliki mayoritas penduduk yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Dengan sistem irigasi yang baik, pasokan air yang teratur dan dapat diandalkan ke lahan pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan hasil panen, produktivitas pertanian, dan juga mendukung perlindungan lingkungan dan manajemen yang berkelanjutan terhadap sumber daya air. Kabupaten Barito Selatan juga rentan terhadap musim kemarau dan kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian.

Tabel 2. 60 Area Irigasi

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah daerah irigasi	unit	43	43	70	70	70	70
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	28,12	28,12	28,12	28,12	42,18	44,49
Rasio jaringan irigasi	m/ha	17,6	17,6	17,6	17,6	18,57	35,94

Sumber: Dinas PUPR Barito Selatan 2023

Merujuk pada data diatas, jumlah daerah irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Persentase luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan menunjukan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022, tetapi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Target tahun 2017 sebesar 47,11 persen dan realisasi sebesar 28,12 persen; target tahun 2018 sebesar 52,27 persen dan realisasi sebesar 28,12 persen; target tahun 2019 sebesar 55,72 persen dan realisasi sebesar 28,12 persen; target tahun 2020 sebesar 59,16 persen dan realisasi sebesar 35,15 persen, target tahun 2021 sebesar 62,61 persen dan realisasi sebesar 42,18 persen; dan realisasi tahun 2022 sebesar 44,49 persen. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan area irigasi melalui pendanaan APBD Kabupaten serta dukungan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi khususnya Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa.

Upaya untuk menyediakan akses air bersih yang adil dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan air bersih masyarakat utamanya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Barito yang tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga melayani kebutuhan niaga, industri, pemerintah di wilayah tersebut. Pelanggan PDAM Tirta Barito menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 12.429 rumah tangga dan secara keseluruhan meningkat 13.772 pelanggan.

2.8.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Langkah-langkah dalam mengurangi jumlah kawasan kumuh telah dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Pemerintah Daerah turut serta dalam kegiatan bantuan sosial rumah kumuh dengan fokus terhadap warga kurang mampu (MBR). Namun realisasi capaian penanganan rumah kumuh tahun 2017 hingga 2019 tidak ada peningkatan. Persentase capaian penanganan areal Kawasan kumuh tahun 2017-2019 tidak terjadi penurunan, yaitu masih sebesar 4 persen areal kumuh lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan capaian dengan menurun menjadi 0 persen. Adapun kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021, yaitu meliputi Kawasan Kumuh Pahlawan Bawah, Kawasan Kumuh Veteran, Kawasan Kumuh Kamper, Kawasan Kumuh Jelapat, Kawasan Kumuh Bangkuang dan Kawasan Kumuh Rantau Kujang.

Tabel 2. 61 Luas Lahan Permukiman Kumuh

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Presentase luas lahan permukiman kumuh	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan 2024

2.8.1.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial, keamanan, dan kenyamanan hidup masyarakat. Kinerja dalam bidang ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah kejahatan yang dilaporkan, persentase penyelesaian kejahatan, cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan), cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten/kota, waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), serta persentase penegakan Perda.

Capaian kinerja Tantribum Kabupaten Barito Selatan 2019–2023 menunjukkan kinerja yang stagnan dan responsif. Penyelesaian kejahatan mencapai lebih dari 100% pada beberapa tahun yang menandakan efektivitas aparat penegak hukum. Penegakan Perda meningkat dari 75% menjadi 85%, sedangkan cakupan layanan kebakaran melonjak dari 20,71% menjadi 80% yang disertai perbaikan waktu tanggap. Meski terjadi penurunan pada peran Linmas dan penyelesaian pelanggaran K3 di 2022, secara umum kinerja Tantribum menunjukkan peningkatan dalam menjaga ketertiban dan kesiapsiagaan bencana.

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Kasus	112	116	96	125	117
2	Persentase Penyelesaian Kejahatan	%	80,53	100,86	105,21	91,20	103,54
3	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	70	-
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	75	-
5	Penegakan Perda	%	75	77	79	85	-
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	20,71	20,71	78	80	-
7	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90	82,60	73	80	-

Sumber: BAPPERIDA, 2025

2.8.1.6. Sosial

Pembangunan wilayah dapat dicapai salah satunya dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan bentuk dari pembangunan sosial yang diharapkan mampu mennciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera serta dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Permasalahan

sosial berkaitan dengan kelompok seperti orang terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan, dan korban bencana alam. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi sosial di suatu daerah adalah dengan mengetahui persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kondisi sosial di Kabupaten Barito jika dilihat dari indikator tersebut menunjukkan bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan hingga mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh PMKS menerima bantuan sosial tanpa terkecuali. Begitupun dengan persentase rumah tangga yang menerima bantuan melalui program keluarga harapan juga mencapai 100% dari tahun 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan berhasil dalam memberikan bantuan sosial secara konsisten kepada PMKS dan rumah tangga penerima PKH. Berikut merupakan capaian indikator bidang sosial di Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 2. 63 Capaian Indikator Bidang Sosial menurut Jumlah PMKS dan Rumah Tangga Penerima Bantuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100	100	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan	%	100% (1.677 kpm)	100% (2.540 kpm)	100% (2.649 kpm)	100% (2.579 kpm)	100% (2.518 kpm)	100% (2,52 kpm)

Sumber: BAPPERIDA, 2025

Capaian kinerja bidang sosial Kabupaten Barito Selatan periode 2019–2024 menunjukkan peningkatan penanganan terhadap kelompok rentan. Jumlah korban bencana alam berhasil ditekan signifikan dari 59.196 jiwa (2023) menjadi 3.654 jiwa (2024), sedangkan lansia terlantar menurun drastis dari 127 jiwa (2022) menjadi hanya 2 jiwa pada dua tahun terakhir. Meski jumlah fakir miskin relatif stabil, ini menunjukkan perlunya penguatan program pemberdayaan. Kasus anak korban kekerasan seksual dan HIV/AIDS tetap menjadi perhatian utama. Secara umum, capaian ini mencerminkan respons sosial yang semakin membaik.

Tabel 2. 64 Capaian Indikator Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Korban bencana alam	jiwa	10	18.044	93	27.772	59.196	3.654
2.	Korban bencana sosial	jiwa	62	270	80	9	27	111
3.	Gelandang dan Pengemis	jiwa	2	-	-	5	3	3
4.	Penderita HIV/AIDS	jiwa	-	-	11	-	12	
6.	Fakir Miskin	jiwa	6.732	2.875	4.691	5.065	5.995	5.114
8.	Anak korban kekerasan seksual	jiwa	1	6	6	5	2	6
9	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	121	50	80	127	2	2
10.	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	jiwa				3	-	-
11.	Tuna Daksa	jiwa	9	6	-	-	-	-
12.	Penyandang Cacat Fisik	jiwa				194	251	251
13.	Tuna Susila	jiwa	20	0	0	0	0	-

Sumber: Dinas DSPMD, 2023

2.8.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.8.2.1. Tenaga Kerja

Sektor tenaga kerja memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga kerja yang produktif dan berkualitas merupakan aset utama dalam mendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan dan keahlian pekerja harus terus ditingkatkan melalui akses pendidikan dan pelatihan kerja guna memperkuat sumber daya manusia sehingga dapat menjadi aset investasi untuk pembangunan berkelanjutan. Peningkatan keterampilan dan pendidikan perlu dioptimalkan untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja dan berkontribusi secara optimal dalam berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, penduduk yang tergolong dalam usia produktif sebesar 69.002 jiwa. Sebagian besar komposisi penduduk berumur 15 Tahun keatas bekerja di sektor jasa, yaitu sejumlah 27.769 jiwa. Sementara itu, sektor pertanian dijadikan sebagai lapangan pekerjaan

oleh sebanyak 27.679 jiwa. Sektor industri menjadi yang paling sedikit dijadikan sebagai lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Barito Selatan, yaitu sebanyak 8.305 jiwa.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian			
	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	19.838	7.841	27.679
2.	Industri			
	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi	9.172	2.012	11.184
3.	Jasa			
	Perdagangan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.801	16.338	30.139
	Jumlah	42.811	26.191	69.002

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

2.8.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Meningkatkan akses terhadap kesetaraan gender menjadi langkah penting dalam memberdayakan perempuan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Selain itu, hal ini juga mencakup pemberian kesempatan yang setara bagi anak-anak untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.

Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan capaian strategis dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meskipun diwarnai oleh dinamika fluktuasi partisipasi dan tantangan perlindungan. Tingginya proporsi kursi legislatif yang diduduki perempuan, mencapai 52% pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik. Namun, penurunan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan fluktuasi di sektor swasta serta angkatan kerja mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan afirmatif. Sementara itu, seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani selama enam tahun berturut-turut, menunjukkan

komitmen kuat dalam aspek perlindungan. Meski demikian, peningkatan jumlah kasus dari 19 pada 2019 menjadi 44 pada 2024 menjadi sinyal penting bagi perlunya langkah pencegahan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 66 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	34,73%	24,14%	-	14,01%	-	-
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	36%	40%	-	40%	-	52%
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	45,93%	31,30%	-	86%	-	-
4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	54,28%	47,09	43,1	47,89	47,39	52,58
5.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	19	6	14	21	21	44
6.	Rasio KDRT	0,14	0,14	-	2	-	0,04
7.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Dewan dan DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.2.3. Pertanian

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan pertanian dianggap sebagai bagian dari tugas pokok pemerintahan yang harus dilaksanakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan dasar. Penyelenggaraan berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi pertanian, terutama di tingkat nasional, regional, dan sektoral, sepenuhnya diserahkan kepada Badan Pertanian Nasional (BPN).

Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Pertanian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Lahan Bersertifikat	%	70,75	72,75	77,75	78,75	80,75	80,75
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	kasus	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kab. Barito Selatan 2023 (diolah)

Merujuk pada data tersebut, terjadi peningkatan capaian layanan dalam urusan pertanian jumlah lahan bersertifikat. Pada 2017 sebesar 70,75

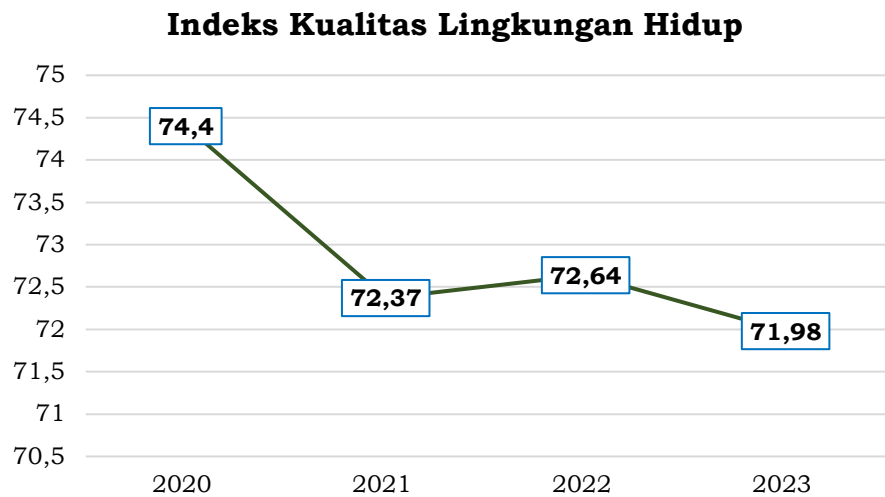


persen meningkat 2018 sebesar 72,75 persen. Kemudian 2019 meningkat 77,75 persen meningkat pada 2020 sebesar 78,75 persen dan terus mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 80,75 persen dan pada 2022 tidak mengalami peningkatan tetap di angka 80,75 persen. Adapun penyelesaian izin lokasi capaian sangat baik dari tahun ke tahun.

2.8.2.4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup segala komponen energi kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan tindakan mereka yang saling mempengaruhi alam itu sendiri sebagai kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Suatu kegiatan pembangunan membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang cukup tinggi, terlepas dari hal tersebut maka akan sangat mempengaruhi kondisi dari lingkungan bahkan mengarah ada kerusakan lingkungan. Dengan adanya kerusakan lingkungan tersebut maka berpotensi menjadikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar dengan baik demi keberlanjutan lingkungan itu sendiri secara keseluruhan.

Dalam suatu wilayah untuk mengukur kualitas lingkungan hidup digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Pengukuran IKLH hidup terus mengalami penyempurnaan perhitungan dan penyempurnaan dimana berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2001 terjadi perubahan beberapa parameter pengukuran dan kategori indeks sesuai dengan peringkat nilai. Dalam peraturan tersebut, terdapat kebijakan baru yang menyebabkan jumlah parameter penilaian pada Tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh IKLH, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 – 2023 mengalami fluktuatif tidak signifikan yang mana tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Selatan sebesar 71,98.



Gambar 2. 43 Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sumber: Bappeda Kab. Barito Selatan 2023

2.8.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan bentuk kegiatan pencatatan yang terdiri dari biodata penduduk, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatann sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Sementara itu, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Tingkat kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga karena bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan.

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik, dan kutipan akta kematian telah mencapai 100%, mencerminkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan. Meski sempat fluktuatif, cakupan akta kelahiran dan akta nikah terus menunjukkan peningkatan yang menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen sipil. Kepemilikan Kartu Identitas Anak juga tumbuh pesat, memperlihatkan keberhasilan sosialisasi dan inovasi layanan yang inklusif bagi kelompok usia dini. Kualitas database kependudukan mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai 95% pada tahun 2024, didukung

oleh peningkatan pembinaan partisipasi masyarakat dan stakeholder yang sempat menyentuh angka 100%. Kedepannya, tantangan utama terletak pada menjaga konsistensi partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen sipil, yang sempat menurun, agar target pelayanan prima dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase cakupan penerbitan kartu keluarga	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase pasangan berakta nikah	34,36	40,52	82,8	82,88	52,95	56,63
3.	Persentase cakupan penerbitan ktp elektronik	98,41	99,17	99,63	99,69	97,14%	98,08
4.	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	92,68	93,26	94,22	97,63	94,61	95,42
5.	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kematian	86,53	77,47	81,34	100	100	100
6.	Kepemilikan kartu identitas anak	7.836	10.519	12.363	14.979	17.717	64,28
7.	Persentase kuantitas dan kualitas database kependudukan	77,02	78,32	80	80	85	95
8.	Persentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan	75,01	75,43	75,63	80	100	85
9.	Persentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	77,89	79,02	80%	80%	30	95

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Barito Selatan

2.8.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran untuk maju dan berkembang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Melalui pemberdayaan, masyarakat dan desa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan masalah di wilayah mereka, serta merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa digunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Pada

tahun 2022, Indeks Desa Membangun Kabupaten Barito Selatan terklasifikasi dalam desa berkembang. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,701 atau diklasifikasikan dalam desa maju. Selain IDM, pembangunan masyarakat dan desa dapat juga dilihat berdasarkan indikator kerja antara lain, seperti posyandu aktif, persentase PKK aktif, persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa, persentase lembaga desa yang dibina, persentase tingkat perkembangan desa, serta jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk. Jumlah posyandu aktif hingga tahun 2023 di Kabupaten Barito Selatan sebanyak 100 unit disertai dengan persentase PKK aktif sebesar 100 persen. Sementara itu, seluruh desa telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persentase tingkat perkembangan desa menunjukkan tren peningkatan yang mana pada tahun 2023 mencapai 84 persen. Adapun jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk hingga tahun 2023 sebanyak 9.264 unit. Secara lebih rinci, berikut merupakan tabel capaian indikator bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019–2023.

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Desa Membangun	-	-	-	0,678	0,701
2.	Posyandu aktif	26,2	93	30	100	100
3.	Persentase PKK aktif	100	100	80	100	100
4.	Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100
5.	Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	100	100	100	100	-
6.	Persentase tingkat perkembangan desa	78	79	80	82	84
7.	Jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	634	9264	9264	9264	9264

Sumber: Dinas PMD, 2023

Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah, pada tahun 2023 Kabupaten Barito Selatan memiliki desa mandiri sejumlah 3 (tiga) desa, yang terletak di Kecamatan Dusun Utara sebanyak satu desa dan dua desa lainnya berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Sementara itu, sejumlah 26 desa berada pada klasifikasi desa maju yang sebagian besar berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dusun Utara. Sebagian

besar desa berada dalam klasifikasi desa berkembang yakni sejumlah 137 desa dimana 19 desa diantaranya berada di Kecamatan Dusun Selatan. Pada klasifikasi desa tertinggal, tersisa satu desa di Kabupaten Barito Selatan yang terletak di Kecamatan Karau Kuala. Adapun klasifikasi desa berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.70 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah

No	Kecamatan	Desa tertinggal	Desa Berkembang	Desa Maju	Desa Mandiri
1.	Dusun Hilir	-	7	2	-
2.	Dusun Selatan	-	19	5	-
3.	Dusun Utara	-	9	8	1
4.	G. Bintang Awai	-	9	10	2
5.	Jenamas	-	4	-	-
6.	Karau Kuala	1	8	1	-

Sumber: Satu Data Statistik Sektoral Dinas DPMD, 2024

2.8.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dapat diwujudkan melalui pengendalian angka kelahiran. Pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mengiringi agenda pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sektor ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi penurunan tingkat kelahiran yang dilaksanakan melalui program keluarga berencana. Keberhasilan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diukur melalui beberapa indikator program. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang dapat berdampak langsung terhadap hasil pencapaian tersebut. Pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat secara langsung diiringi oleh pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah kependudukan mempunyai dampak yang berarti dalam menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Peran serta pemerintah daerah juga berkontribusi dalam kampung KB dan memberikan pembinaan kelompok remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR).

Indikator yang digunakan mencakup berbagai aspek program keluarga berencana (KB), seperti rasio akseptor KB, angka pemakaian kontrasepsi, cakupan pasangan usia subur (PUS) dengan istri di bawah 20 tahun, cakupan PUS yang keinginannya ber-KB tidak terpenuhi, serta persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, tabel juga menampilkan cakupan anggota bina keluarga (balita, remaja, dan lansia)

yang ber-KB, cakupan peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta jumlah desa yang memiliki Data Mikro Keluarga dan petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD). Selama periode ini, terlihat adanya variasi dalam setiap indikator dengan beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan capaian. Rasio akseptor KB dan angka pemakaian kontrasepsi mengalami perubahan naik turun yang sedikit, sedangkan cakupan anggota bina keluarga dan PUS menunjukkan perubahan yang beragam setiap tahunnya.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ratio Akseptor KB	78	72	-	75	80,14	-
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	78,00	72	-	75,27	-	8,71
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,18	2,18	-	1,83	-	-
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,85	11,67	-	16,18	-	3,83
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	NA	13,35%	-	10,86	-	77,26
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	86,93	79,53	-	84,6	-	100
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	90,00	88,06	-	82,9	-	93
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,80	75,27	-	74,91	-	70
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	76,21	66,67	-	100	-	-
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	50,00	76,72	-	77,25	-	-
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	93	93	-	100	-	100
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1	1	-	1	-	-

Sumber: RKPD Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.8.2.8. Perhubungan

Transportasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan progres pembangunan karena berperan sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sektor dalam suatu perekonomian. Hal ini memungkinkan mobilitas manusia dan barang yang efisien, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang. Selain aspek ekonomi, transportasi juga berperan dalam aspek sosial dan lingkungan, seperti mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keamanan jalan. Dengan demikian, transportasi yang baik berperan sebagai pilar utama dalam mempercepat dan menjaga keberlanjutan progres pembangunan suatu negara.

Tabel 2. 72 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor

Penggunaan	2019	2020	2021	2022
Mobil penumpang - Car Sedan	20	21	23	22
Mobil penumpang - Car Jeep	127	127	121	134
Mobil penumpang - Car - Minibus	1427	1543	1754	1821
Micro Bus	4	8	8	13
Bus	-	-	-	-
Mobil barang - Pickup	376	308	387	397
Mobil barang - Light Truck	110	100	87	83
Truck	26	54	19	15
Sepeda Motor roda 2	18477	17365	17692	17731
Sepeda Motor roda 3	30	26	25	19

Sumber: BPS Kab. Barito Selatan 2023

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan saat covid-19, tetapi terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 – 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan paling mencolok terjadi pada jumlah kendaraan roda dua. Detail tentang pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun 2018 hingga 2022 dapat ditemukan dalam tabel diatas.

Tabel 2.73 Data Penumpang Angkutan Umum

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio jumlah arus penumpang	Unit	27,420	39,504	18,3014	13,100	16,586
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/bh	0.058	0.053	0.049	0.052	0.05
Rasio ijin trayek	Unit	1325	1235	1120	310	25
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	255	281	-	220	690

Sumber: Dinas Perhubungan Barito Selatan 2023

Merujuk pada tabel diatas, rasio jumlah arus penumpang mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Di sisi lain, penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat covid-19. Adapun rasio ijin trayek kian mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada 2021 hanya 25 unit ijin trayek. Kemudian untuk jumlah uji kir angkutan umum mengalami fluktuasi dan meningkat signifikan pada 2021 sebesar 690 unit.

Tabel 2.74 Jumlah Kendaraan Umum yang Berangkat dan Datang Menurut Trayek dan Jenis Pelayanan Angkutan

Jurusan	Jenis Pelayanan	Berangkat	Datang
Buntok-Banjarmasin	AKAP	288	290
Buntok-Palangkaraya	AKDP	199	180
Buntok-Sunggu	Angkot	-	-
Buntok-Asam	Angkot	-	-
Buntok-Tabak Kanilan	Angdes	211	212

Sumber: BPS Barito Selatan 2023

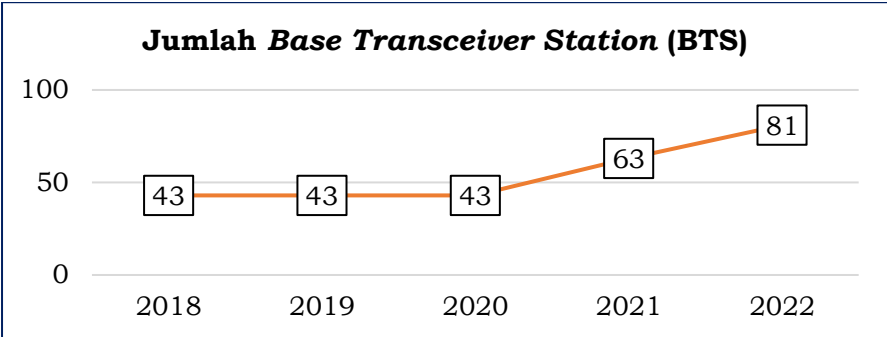
Berdasarkan data tersebut menurut trayek kendaraan yang berangkat dan datang pada 2022 jurusan terbanyak ada pada Buntok-Barjarmasin yang kemudian jurusan Buntok-Tabak Kanilan. Dengan memperhatikan karakteristik geografis, Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah dataran rendah dan perbukitan mempermudah arus kendaraan darat untuk terhubung satu sama lain dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, infrastruktur seperti jaringan jalan dan perlengkapannya diperlukan untuk menghubungkan berbagai daerah guna memastikan penggunaan jaringan jalan dapat dioptimalkan dan pergerakan lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

2.8.2.9. Komunikasi dan Informatika

Dalam era otonomi daerah dan percepatan globalisasi informasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kabupaten Barito Selatan memiliki beragam jenis jaringan telekomunikasi, termasuk jaringan kabel, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin terhubung dan terinformasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih efisien.

Jaringan kabel fiber optik underground terpasang di Kecamatan Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Gunung Bintang Awai, sementara jaringan

nirkabel yang dikelola oleh pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebar di seluruh kecamatan. Infrastruktur informatika ini memberikan manfaat signifikan bagi tata kelola pemerintahan. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan publik, mengelola sumber daya dengan lebih baik, dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola. Ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaporan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, langkah-langkah menuju implementasi pemerintahan elektronik (e-gov) dianggap sebagai langkah strategis yang melibatkan pengoptimalan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi yang terpadu antarunit kerja pemerintah.



Gambar 2. 44 Jumlah Base Transceiver Station (BTS)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Barito Selatan (2024)

2.8.2.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2022. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan 56 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan meskipun ada peningkatan kembali pada tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, koperasi aktif menunjukkan kecenderungan yang lebih stabil, dengan peningkatan jumlah yang konsisten setiap tahunnya, dari 37 koperasi pada tahun 2019 menjadi 61 koperasi pada tahun 2023.

Tabel 2. 75 Perkembangan Urusan Koperasi

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi sehat	56	29	31	33	45
2	Koperasi aktif	37	42	54	55	61

Sumber: BPS Barito Selatan

Jumlah koperasi di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bidang usaha, yaitu serba usaha, jasa dan sejenisnya, serta lain-lain. Pada periode 2019-2023, ketiga jenis koperasi ini menunjukkan

karakteristik yang sama, dengan kenaikan jumlah setiap tahunnya dan angka tertinggi tercatat pada tahun 2023.

Tabel 2. 26 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Serba usaha	Unit	7	9	9	9	10
2	Jasa dan sejenisnya	Unit	56	56	59	59	62
3	Lain-lain	Unit	55	58	60	62	64

Sumber: BPS Barito Selatan

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang positif, ditandai dengan pertumbuhan usaha mikro, peningkatan jumlah wirausahawan baru, dan usaha mikro yang berizin. Jumlah usaha mikro meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, dengan puncaknya mencapai 525 usaha pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada peningkatan jumlah wirausahawan baru selama periode 2019-2023. Namun, indikator usaha mikro yang berizin masih relatif rendah, berkisar antara 3-4 persen pada tahun 2019-2023.

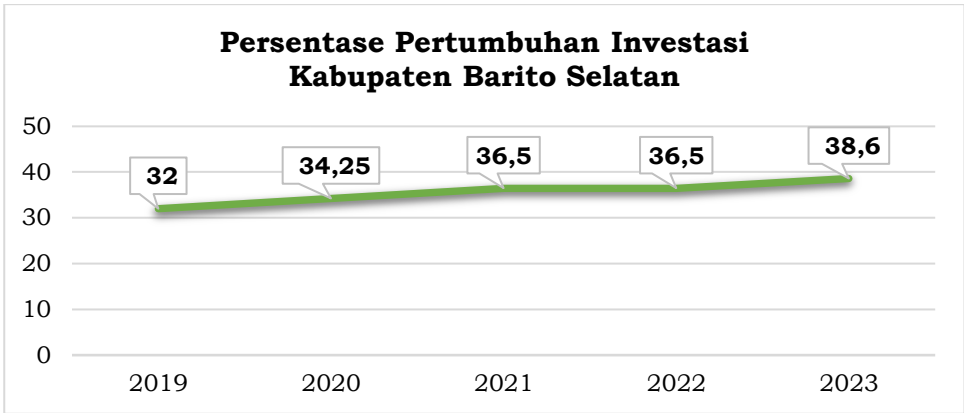
Tabel 2. 77 Perkembangan Usaha Mikro

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan usaha Mikro	105	210	315	420	525
2	Peningkatan Wirausaha Baru	34	35	37	40	42
3	Usaha Mikro yang Berizin	3%	4%	4%	4%	4%

Sumber: BPS Barito Selatan

2.8.2.11. Penanaman Modal

Penanaman modal dapat menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2019 hingga 2023, pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2. 45 Grafik Persentase Pertumbuhan Investasi

Sumber: BPS Barito Selatan

2.8.2.12. Statistik

Data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun nasional. Data ini menjadi bahan dasar dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan wilayah. Selain itu, data statistik juga digunakan untuk menganalisis tren jangka panjang, meramalkan perkembangan masa depan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Peramalan berdasarkan data statistik membantu dalam perencanaan sumber daya dan pengalokasian anggaran yang tepat. Data statistik juga berguna untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Saat ini, data statistik menjadi kebutuhan mendasar bagi publik secara luas. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi pemangku kepentingan, dunia bisnis, akademisi, pengamat, serta masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan BPS. Pelaksanaan tugas-tugas statistik dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis ekonomi makro, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengelolaan database daerah, pengelolaan Portal Satu Data, dan koordinasi dalam pengelolaan data bersama dengan BPS.

Tabel 2. 78 Publikasi Statistik

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Publikasi Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka)	Ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Barito Selatan 2023

2.8.2.13. Persandian

Pembangunan infrastruktur persandian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perkembangan suatu

wilayah. Infrastruktur persandian adalah fondasi utama yang memungkinkan komunikasi aman dan efisien di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ancaman siber, infrastruktur persandian yang kuat diperlukan untuk melindungi data sensitif, baik dalam konteks keamanan, bisnis, maupun privasi manajemen pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang persandian, mengatur sistem persandian, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi persandian.

2.8.2.14. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memegang peranan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Barito Selatan. Sebagai jantung ilmu pengetahuan dan pusat informasi, perpustakaan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi, kecerdasan, kreativitas, serta pelestarian khazanah budaya lokal. Pembangunan perpustakaan yang terencana dan berkelanjutan merupakan investasi strategis. Upaya pengembangan perpustakaan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, perluasan akses informasi, serta pemberdayaan budaya literasi.

Layanan perpustakaan di Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan dua kondisi yang kontras, yaitu stabilitas pada aspek kualitas layanan dengan capaian 60 persen sesuai standar minimal yang konsisten sejak 2019 hingga 2024, namun disertai penurunan signifikan jumlah pengunjung dari 7.818 orang pada 2020 menjadi hanya 1.983 orang pada 2024. Di sisi lain, terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terlihat dari bertambahnya pustakawan bersertifikat dari 12 orang menjadi 16 orang, serta pertumbuhan koleksi buku sebesar 7,3 persen dalam kurun waktu lima tahun, meskipun tidak mengalami penambahan sejak 2021. Capaian penting lainnya adalah kenaikan Tingkat Kegemaran Membaca dari kategori sedang dengan skor 54,85 menjadi kategori tinggi dengan skor 67,00 pada 2023. Peningkatan ini didukung oleh lonjakan jumlah buku yang dibaca di tempat, dari 208 buku pada 2022 menjadi 1.415 buku pada 2024. Tantangan utama ke depan adalah membalikkan tren penurunan pengunjung melalui transformasi digital dan inovasi layanan, sembari

menjaga tingkat kepuasan masyarakat yang terus menunjukkan peningkatan dari skor 77 pada 2020 menjadi 81,71 pada 2023.

Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Perpustakaan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan	5.500	7.818	2.495	3.386	2.725	1.983
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	60	60	60	60	60	60
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	12	14	16	16	16	16
Jumlah anggota perpustakaan	4.862	4.898	4.939	4.981	5.010	5.027
Jumlah koleksi buku perpustakaan	31.412	31.412	33.718	33.718	33.718	33.718
Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	1089	403	335	208	1441	1415
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	-	-	-	54,85 (Sedang)	67,00 (Tinggi)	-
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan	-	77	79	80	81,71	-
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	-	56,44 (Sedang)	52,00 (Sedang)	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.2.15. Kearsipan

Dalam era digital saat ini, kearsipan menjadi aspek yang krusial dalam pengelolaan informasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem kearsipan yang efektif dan efisien. Analisis indikator kearsipan merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana sistem kearsipan yang ada mampu memenuhi standar dan kebutuhan pemerintah. Indikator ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan arsip, keamanan data, hingga aksesibilitas informasi.

Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2024. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi capaian positif, dengan jumlah pengelola kearsipan yang bertambah dari dua orang pada 2019 menjadi tiga puluh tiga orang pada 2024. Namun, implementasi standar kearsipan justru mengalami penurunan tajam. Jumlah SOPD yang menerapkan sistem kearsipan secara baku menurun dari sembilan belas unit pada 2022 menjadi hanya lima unit pada 2024. Persentase perangkat

daerah yang mengelola arsip sesuai standar juga merosot dari enam puluh tiga persen menjadi tujuh belas persen dalam periode yang sama.

Tabel 2.80 Capaian Kinerja Kearsipan

Indikator Kearsipan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	12	17	18	19	10	5
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	40	57	60	63	33	17
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	3	3	35	33
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)	42,42	42,42	42,42	6,95	20,49	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.2.16. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan penggerak utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah Daerah berkomitmen memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan, mengembangkan bakat olahraga, serta menciptakan ekosistem yang mendorong prestasi, kesehatan, dan inovasi generasi muda. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari perkembangan organisasi, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sejumlah organisasi dan klub olahraga terus tumbuh setiap tahun, sementara cakupan pembinaan olahraga dan atlet muda mencapai 100 persen selama periode 2019 hingga 2022. Namun, cakupan pelatih bersertifikasi masih rendah dan stagnan, hanya mencapai 9 persen sejak 2020. Jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan drastis akibat pandemi, dari enam puluh atlet pada 2019 menjadi nihil pada 2020 dan 2021, lalu hanya satu atlet berprestasi dengan satu medali pada 2022. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi keberlanjutan pembinaan atlet dan peningkatan kualitas kepelatihan guna mendorong pencapaian prestasi yang lebih baik di masa mendatang.

Tabel 2.81 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	98	98	60	-
Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	0	9	9	9
Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	100	100	100
Jumlah atlet berprestasi	orang	60	0	0	1
Jumlah prestasi olahraga	medali	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2022

2.8.2.17. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan, yang tidak hanya melestarikan identitas lokal tetapi juga mendorong potensi ekonomi kreatif dan pariwisata. Upaya sistematis dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, mengoptimalkan aset budaya, dan meningkatkan kontribusi sektor kebudayaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni dan kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, yang mencapai 8 hingga tahun 2023. Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara dari tahun 2019-2023 mencapai 70 buah. Selain itu, ada 8 cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga tahun 2023.

Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan

Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	8	8	8	8	8
Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	Buah	70	70	70	70	70
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2022

2.8.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.8.3.1. Perikanan

Kabupaten Barito Selatan yang tidak memiliki batas laut membedakan perikanan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang menangkap ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk dijual sebagian atau seluruhnya. Sedangkan rumah tangga perikanan budidaya adalah rumah tangga yang membudidayakan ikan, hewan air lainnya, atau tanaman air untuk tujuan penjualan sebagian atau seluruh hasilnya. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Barito Selatan tidak banyak berubah pada tahun 2019-2024. Untuk jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami peningkatan drastis pada tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun dari 2019 hingga 2024. Sebaliknya, produksi perikanan budidaya

mengalami fluktuasi: meningkat dari 2020 hingga 2021, menurun pada 2022, dan kembali meningkat pada 2023-2024.

Tabel 2. 83 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Perikanan Tangkap	4.513	4.513	4.513	4.513	4.515	4.513
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	6.436	6.567	6.697	6.831	6.967,14	7.108,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.84 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Perikanan Budidaya	3.769	3.769	3.769	3.769	7.393
Produksi Perikanan Budidaya	8.766,63	8.943,36	7.545,15	9.300,98	9.488,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.8.3.2. Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayah, karena berperan sebagai pendorong ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu dalam masyarakat dan memperluas peluang kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan.

Tabel 2. 85 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Selatan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nusantara	38.713	15.561	23.170	51.936	68.128	93.305
Mancanegara	19	-	-	-	-	2

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019-2025

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari data pengunjung, yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang positif. Namun, pada tahun 2020, sektor pariwisata mengalami penurunan drastis, dengan jumlah wisatawan domestik turun menjadi 15.561 dari 38.713 pada tahun 2019, serta 19 wisatawan mancanegara. Setelah pemulihan dan adaptasi normalisasi dari pandemi Covid-19, tren positif terlihat dari tahun

2021 hingga 2024, dengan jumlah pengunjung wisatawan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 93.305 pada tahun 2024. Terdapat harapan besar bahwa pengembangan potensi pariwisata akan meningkatkan sektor-sektor penunjang lainnya dan memberikan efek pengganda.

2.8.3.3. Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Barito Selatan memiliki beberapa komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Untuk komoditas pangan utama, yaitu padi, produktivitas di Kabupaten Barito Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Produktivitas padi tertinggi tercatat pada tahun 2020, mencapai 3,555 ton/ha dengan total produksi sebesar 13.044,07 ton. Menurut data terbaru tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan luas lahan panen maupun produktivitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 86 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2019	2.795,12	8.004,07	2,864
2020	4.276,05	13.044,07	3,555
2021	1.748	4.708,42	2,694
2022	2.069,58	6.171,00	3,09

Sumber: Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2019-2025

Produktivitas sendiri merupakan hasil perhitungan hasil dibagi dengan total luas lahan yang dipanen, dimana dihitung untuk melihat apakah setiap tanaman sekunder mempunyai potensi untuk tumbuh dan mempunyai dampak jangka panjang pada sektor pertanian. Perkebunan juga menjadi salah satu indikator yang dapat digolongkan sebagai potensi suatu daerah. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan usaha tani di Kabupaten Barito Selatan, yaitu luas panen, hasil produksi dan produktivitas.

Tabel 2. 87 Luas Panen Perkebunan

Luas Panen Perkebunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024 (hektar)						
Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	510	518	526	529	529	528,66
Kelapa Sawit	1.077	1.091	1.151	1.177	1.177	1.177
Karet	32.959	32.959	33.146	33.115	33.102	33.102

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Luas panen perkebunan Kabupaten Barito Selatan dari tiga komoditas perkebunan yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, dan Karet. Dari ketiga komoditas tersebut mengalami tren yang cenderung stagnan.

Tabel 2.88 Produksi Perkebunan

Produksi Perkebunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024 (kuintal)						
Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	674,2	753,6	814,4	915,1	1.470,1	1.088,1
Sawit	19.615	20.293	21.231	19.696	21.444	21.444
Karet	82.000,0	82.900,0	84.170,1	102.183,9	102.183,9	102.183,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Produksi perkebunan pada tiga komoditas menunjukkan tren yang beragam, dengan adanya kenaikan dan penurunan angka tren yang tidak terlalu signifikan. Hasil produksi yang paling tinggi ditunjukkan oleh komoditas karet.

Tabel 2. 89 Produktivitas Perkebunan

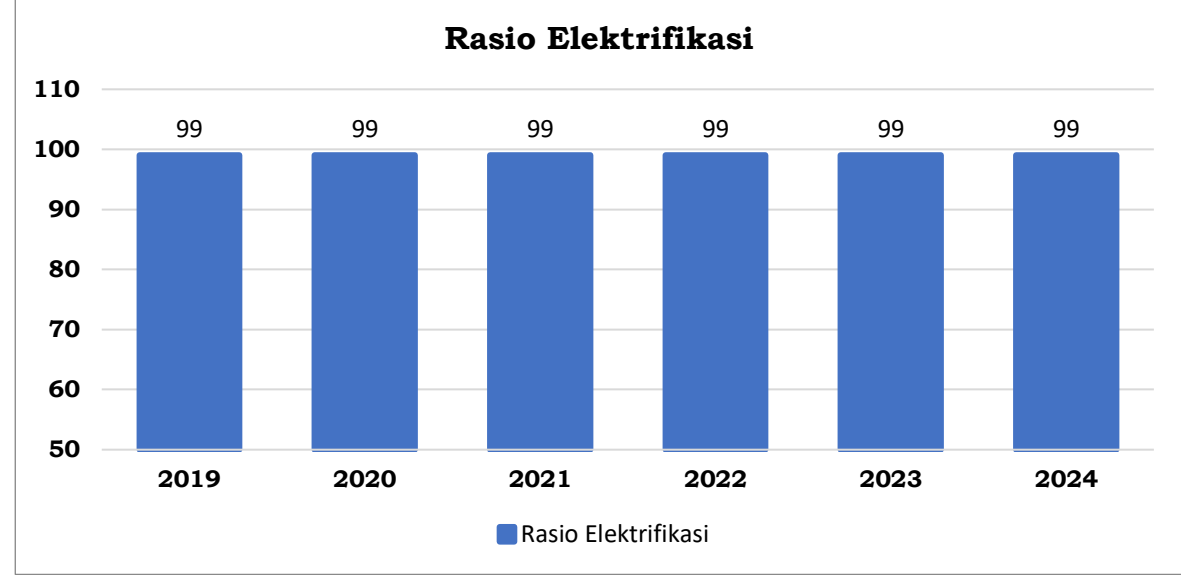
Produktivitas Perkebunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024(ku/ha)						
Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	1,32	1,46	1,55	1,73	2,78	2,06
Kelapa Sawit	1,82	1,86	1,84	1,67	1,82	1,82
Karet	2,49	2,52	2,54	3,09	3,08	3,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Diolah)

Produktivitas dari ketiga komoditas mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana masing-masing komoditas mengalami tren kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan penetapan isu strategis dalam peningkatan produktivitas perkebunan Kabupaten Barito Selatan.

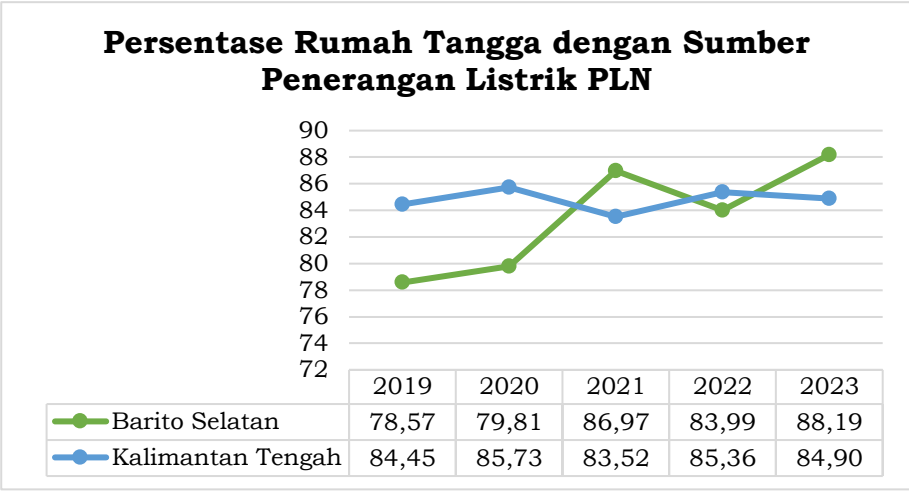
2.8.3.4. Energi

Rasio elektrifikasi mengacu pada persentase suatu wilayah atau populasi yang menggunakan listrik sebagai sumber utama energi. Hal ini mencerminkan perubahan mendasar dalam pola konsumsi energi. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik, baik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun sumber non-PLN, dengan total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir, rasio elektrifikasi di Kabupaten Barito Selatan meningkat sebesar 9%, mencapai 99% pada tahun 2024.



Gambar 2. 46 Rasio Elektrifikasi
Sumber Bappeda Kabupaten Barito Selatan, 2024

Peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barito Selatan, yang selama lima tahun terakhir telah melampaui rata-rata persentase di Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan tren positif dalam akses dan penggunaan energi listrik di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah upaya pemerintah setempat dalam memperbaiki infrastruktur listrik, penyediaan layanan listrik dengan harga lebih terjangkau, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan listrik.



Gambar 2. 47 Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Listrik PLN
Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Selatan 2023

2.8.3.5. Perdagangan

Perdagangan tidak dapat dilepas dari konsep pembangunan daerah, yang mana sektor perdagangan menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Berbagai indikator dapat diterapkan untuk menganalisis

bagaimana kondisi perdagangan disuatu wilayah. Berdasarkan data jumlah sarana perdagangan, Kabupaten Barito Selatan mengalami gejolak fluktuatif. Hal tersebut terlihat bahwa tahun 2020 jumlah sarana perdagangan yaitu sebanyak 1.935 dan akibat dari adanya pandemi Covid-19 jumlah sarana perdagangan pada tahun 2021 tren menjadi menurun yaitu hanya diangka 1.652. Terlepas dari hal tersebut adaptasi yang cukup kuat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan sehingga pada tahun 2022 jumlah sarana perdagangan ini naik sebanyak 20. Meskipun tahun 2023 mengalami penurunan jumlah, pada tahun 2024 sarana perdagangan mengalami peningkatan signifikan hingga 930 sarana.

Tabel 2. 90 Jumlah Sarana Perdagangan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar	59	57	59	63	63	63
Toko	5	8	621	628	549	549
Kios	1028	1024	436	425	425	1143
Warung	846	846	536	556	556	768
Jumlah Sarana Perdagangan	1938	1935	1652	1672	1593	2523

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

2.8.3.6. Perindustrian

Kondisi perindustrian yang ada di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh industri kecil atau industri dalam level rumah tangga dimana jumlah di tahun 2023 lebih besar daripada jumlah di tahun 2019 hingga tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan jumlah tenaga kerja industri kecil atau rumah tangga yang sempat menurun di tahun 2020 namun kembali meningkat di tahun 2020 hingga 2023. Industri besar tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada jumlah industri, tetapi untuk jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan di tahun 2023.

Tabel 2. 91 Capaian Kinerja Perindustrian

Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Kecil/Rumah Tangga	788	626	650	662	847
Industri Besar	1	1	1	1	1
Tenaga Kerja Industri Kecil/Rumah Tangga	1121	1092	1132	1.933	1.844
Tenaga Kerja Industri Besar	385	276	295	363	318

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, 2023

2.8.3.7. Transmigrasi

Transmigrasi memiliki esensi yang penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk meratakan pemukiman penduduk di berbagai wilayah dengan mengurangi tekanan populasi di daerah yang padat penduduk bersamaan dengan dukungan perkembangan di daerah sekitar pusat perkembangan. Redistribusi penduduk dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Dengan demikian, transmigrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Dari tahun 2017-2022, jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapatkan sertifikat tidak mengalami perubahan, yaitu sejumlah 2,99.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Transmigrasi

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	0	0	0	0	0	0
Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	9	9	9	9	9	9

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja , 2023

2.8.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.8.4.1. Sekretariat Daerah

Perumusan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan daerah adalah kunci dalam memastikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pendekatan sistematis dalam monitoring dan evaluasi memungkinkan identifikasi dini terhadap hambatan serta penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Monitoring membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sementara evaluasi memberikan pandangan yang mendalam tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk peningkatan kinerja dalam pembangunan kedepan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan progres positif dalam beberapa indikator kinerja, seperti peningkatan nilai reformasi birokrasi dari CC

menjadi B (62,00) pada 2024 dan capaian tertinggi laporan kinerja pemerintah (61,02/B). Namun, konsistensi masih menjadi tantangan, terutama dalam evaluasi produk hukum yang belum berdampak pada peningkatan kualitas substantif. Ke depan, diperlukan strategi terstruktur, seperti penguatan koordinasi, pelatihan teknis penyusunan hukum, dan integrasi sistem digital untuk mempercepat reformasi birokrasi serta memastikan target tercapai dengan kualitas yang terukur.

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laporan kinerja Pemerintah	kategori	57,46	59,04	57,19	56,74	66,15	61,02 (B)
2.	Nilai reformasi birokrasi	nilai	47,52	CC	CC	CC	B	62,00 (B)
3.	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah	rancangan perda	4	9	2	7	5	5
4.	Jumlah penyusunan Peraturan Bupati	rancangan pergub	34	35	55	69	27	38
5.	Jumlah penyusunan Keputusan Bupati	rancangan kepgub	415	415	289	486	403	480
6.	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi	rancangan produk hukum kab/kota	453	459	346	562	435	495
7.	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif	rancangan produk hukum kab/kota	453	459	346	562	435	495
8.	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang tertata format dan substansiya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	rancangan produk hukum kab/kota	453	459	346	562	435	495
9.	Jumlah dokumen perkara hukum litigasi yang tertangani	dokumen perkara litigasi	1	1	-	1	1	-
10.	Jumlah dokumen perkara non litigasi yang tertangani	dokumen perkara litigasi	1	1	1	1	1	-
11	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	81,30	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan krusial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD, seperti mengkoordinasikan proses perencanaan, memfasilitasi pertemuan, dan mendukung anggota DPRD dalam penyusunan dan pengusulan peraturan perundang-undangan. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan koordinasi kelembagaan menunjukkan tren positif selama periode 2019–2024. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas tepat waktu mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 9 perda, kemudian sempat menurun di tahun 2021, dan kembali meningkat hingga mencapai 8 perda pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan dinamika dalam proses legislasi daerah yang dipengaruhi oleh kompleksitas substansi peraturan dan agenda pembahasan legislatif. Di sisi lain, penerimaan delegasi—yang mencerminkan aktivitas konsultasi, koordinasi, dan tukar informasi antara DPRD dengan pemangku kepentingan eksternal—mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022, dengan total 146 penerimaan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif stabil. Peningkatan ini menandakan peran DPRD yang semakin terbuka dan aktif dalam menjalin komunikasi lintas daerah maupun sektor.

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perda yang dibahas tepat waktu	4	9	2	7	11	8
2	Penerimaan delegasi	44	72	52	146	-	-
3	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota	12	12	12	12	-	12
4	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	-	128	-	580	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.4.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Indikator konsistensi antara program RPJMD ke dalam RKPD menunjukkan dinamika yang cukup tajam, dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 106,67%, kemudian menurun signifikan hingga hanya 14,04% pada tahun 2022. Kendati demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan yang signifikan dengan tingkat konsistensi kembali mencapai 100%, menunjukkan adanya upaya korektif dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Hal ini menjadi catatan penting untuk memperkuat mekanisme integrasi dan konsistensi perencanaan di masa mendatang.

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	106,67	93,07	81,39	14,04	-	100%

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.4.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian kinerja capaian pengelolaan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan beberapa indikator seperti opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan daerah, persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, dll. Opini BPK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK. Hal tersebut terlihat dari pencapaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WPT). Kriteria yang ditetapkan oleh BPK sendiri berupa kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Persentase SILPA terhadap APBD dari Tahun 2017-2022 tergolong cukup

kecil karena berada di bawah 10 %. Secara lebih rinci capaian pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	8,53	8,53	8,53	-
3	Persentase SILPA terhadap APBD	8,94	5,06	8,4	0,0846
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	7,53	2,8	3,2	0,1492
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	26,25	24	25	0,2651
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,98	17,41	13,2	0,1286
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	55/45	56/44	56/45	54,29/ 39,79
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Selatan

2.8.4.5. Kepegawaian

Indikator kinerja fungsi unsur penunjang kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat, jumlah PNS yang lulus seleksi untuk belajar, jumlah PNS yang terdata secara elektronik, dan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Jumlah PNS yang naik pangkat dan lulus seleksi untuk belajar mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 – 2024 sehingga mencerminkan upaya peningkatan kompetensi ASN. Sementara itu, jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu mengalami tren penurunan hingga di tahun 2022 hanya mencapai sebanyak 1 kasus. Penegakan disiplin yang tegas dan adil akan menciptakan budaya kerja yang profesional dan berintegritas, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan. Secara rinci, kondisi kepegawaian di Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 97 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS	495	647	461	890	614	199
Jumlah PNS kabupaten yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin	111	66	69	106	-	-

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar						
Jumlah PNS yang terdata secara elektronik	3643	3503	3451	3584	3737	4185
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	-	6	1	1	-	-
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	82%	83,33%	-	0,19%	-	-
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	73%	0%	-	60,4%	-	-

Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Adapun capaian pembangunan urusan penunjang pendidikan dan pelatihan untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang memadai, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, yaitu mencapai 90%. Artinya, menunjukkan bahwa program diklat kepemimpinan telah efektif dalam menyiapkan calon-calon pemimpin dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam pemerintahan daerah. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test serta terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat dari tahun ke tahun menunjukkan tren optimal dengan pencapaian sebesar 100% di tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa program diklat telah berhasil meningkatkan kompetensi sehingga tercipta ASN yang terampil dan terlatih untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. Capaian tersebut didukung pula oleh rata-rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mendapatkan rata-rata sebesar 100%.

Tabel 2. 98 Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Pendidikan Dan Pelatihan

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	80	-	62	60	90
Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	75	75	75	75	85
Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	100	100	100
Pesertase peserta diklat fungsional yang lulus post test	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat	100	100	100	100	100
Persentase rata-rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat	100	100	100	100	100

Sumber: BPKSDM Kabupaten Barito Selatan, 2024

2.8.4.7. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan kualitas mutu kebijakan yang dirancang dalam perencanaan pembangunan. Kajian atau penelitian disusun sebagai landasan berbasis teoritis dan praktis untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan berbasis bukti. Inovasi dan solusi kreatif yang dikembangkan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Penelitian dan pengembangan sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga akademis, yang dapat memperkuat partisipasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, hanya pada 2019 dan 2024 kajian penelitian tercapai 100 persen. Artinya, perlu adanya prioritas untuk daerah dalam ketersediaan dan pelaksanaan kajian penelitian untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan pembangunan tersedia dengan baik.

Tabel 2. 99 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kajian/ penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	100	0%	0%	0%	0%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.8.4.8. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat, diperlukan pula unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Dalam proses perencanaan pembangunan pengawasan memiliki peran yang signifikan dimana untuk memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku maka dibutuhkan lembaga untuk mengawasi kinerja tersebut. Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 indikator pengawasan dapat dilihat menurut persentase tindak lanjut temuan oleh pengawas, persentase pelanggaran pegawai serta jumlah temuan BPK. Secara lebih rinci capaian indikator tersebut dan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 100 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC	CC	CC	C	B
2	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	CC	CC	CC	B	B
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	72,01	71,62	76,62	74,44	76,41	79,47
4	Persentase Pelanggaran Pegawai	10	25	5	0	-	0
5	Jumlah Temuan BPK	17	12	9	3	-	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, 2025

2.8.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerah dengan mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik sosial serta ancaman terhadap keamanan. Sementara itu, Kesbangpol mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kesadaran politik, partisipasi dalam pemilihan umum, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kesbangpol berperan sebagai mediator antara berbagai kelompok masyarakat sehingga membantu dalam mengurangi ketegangan dan memperkuat kerjasama antar kelompok untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari tahun ke tahun di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan yang drastis di tahun 2024 hingga hanya mencapai 22 kegiatan selama setahun. Adapun Kegiatan pembinaan politik daerah dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2019-2024 dengan rata-rata penyelenggaraan kegiatan sebanyak 90 kegiatan per tahun. Secara lebih rinci, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	40	43	47	47	20	22

Kegiatan pembinaan politik daerah	89	90	90	90	90	100

Sumber: LAKIP, 2024

Adapun dampak positif dari kegiatan Kesbangpol di Kabupaten Barito Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.102 Peningkatan Frekuensi Kegiatan Kesbangpol

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	100	100	99,12	100	100%
Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	100	100	78,78	98,99	67,95	99,89%
Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	100	100	4,59	98,99	0	99,98%
Pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah	100	87,49	0	99,63	36,55	95,50%
Pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan / LSM	100	100	51,49	99,99	41,67	100%

Sumber: LAKIP, 2024

2.9 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan yang handal. Permasalahan tersebut yaitu:

2.9.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

2.9.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud.
- c. Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi.
- d. Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik.



- e. Kenaikan jabatan kepala sekolah terhambat karena sertifikasi-perjalanan dinas tidak dapat dilakukan.
- f. Proses belajar mengajar terganggu terutama karena belum semua sekolah, guru, dan peserta didik terlayani jaringan internet/paket internet untuk menunjang pembelajaran daring.

2. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan memiliki sasaran meningkatnya usia harapan hidup.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- a. Angka harapan hidup masyarakat Barito Selatan yaitu 72,79 tahun masih dibawah rata-rata provinsi 74,49tahun.
- b. kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesehatan terutama di kecamatan yang sulit dilalui melalui darat.
- c. Tenaga kesehatan yang masih sangat kurang yaitu dokter gigi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan di 12 PKM.
- d. Masih rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kecamatan dan desa.
- b. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
- c. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:



- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih;
- b. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Tempat Pemakaman Umum belum terkelola dengan baik;
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan belum terkelola dengan baik;
- e. Masih tingginya angka backlog;
- f. Belum optimalnya pelayanan jaringan air bersih/minum permukiman;
- g. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman;
- h. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- i. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Bidang Perumahan;
- j. Belum selesainya Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- k. Belum selesainya Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- l. Belum diriviewnya dokumen RP2KPKP dan RP3KP;
- m. Belum adanya masterplan penataan bantaran/sempadan sungai.

5. Pertanahan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain:

- a. Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya
- b. Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan
- c. Banyaknya lokasi tanah yang berada di wilayah kawasan hutan sehingga sulit untuk dilakukan pembuatan kepemilikan sertifikat tanah
- d. Kurang sinkronnya peta RTRWK perda no 4 tahun 2014 dengan fungsi dan pemanfaatan lahan yang berkembang di masyarakat saat ini
- e. Kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang berkompeten menangani masalah pertanahan



6. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat antara lain:

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencapai 70%, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 75%, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 80%, Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 80 %, Persentase Penegakan PERDA sebesar 85%.

7. Sosial

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Sosial antara lain:

- a. Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial (Panti Sosial, rumah singgah, penampungan sementara)
- b. Kurangnya sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas SDM Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa

9. Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa
Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial menyebabkan perangkat desa kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan.
- b. Belum Optimalnya Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Lembaga seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK belum berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Ketergantungan pada Dana Desa Tanpa Inisiatif Lokal.
Desa cenderung pasif dan menunggu bantuan pemerintah tanpa inisiatif pembangunan berbasis potensi lokal.
- d. Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi di Desa.
Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan promosi usaha desa.



10. Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja antara lain:

- a. Tingginya Angka Pengangguran dan Setengah Pengangguran.
- b. Balai latihan kerja (BLK) terbatas, atau belum tersedia secara merata di kabupaten/kecamatan.
- c. Banyak perusahaan belum menjalankan kewajiban seperti membayar upah minimum, BPJS Ketenagakerjaan, dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- d. Basis data pencari kerja, pengangguran, dan kebutuhan tenaga kerja perusahaan sering tidak tersedia atau tidak diperbarui.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Rendahnya partisipasi kader koordinator KB untuk mensosialisasikan program KB kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Data tahun 2021-2022 menunjukkan persentase Pasangan Usia Subur dalam penggunaan peralatan pengendalian kelahiran (implant dan suntikan) sebesar 75%.
- c. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan program KB.
- d. Masih banyak usia remaja di yang belum mendapatkan pendidikan dan penyuluhan serta fasilitasi dalam program dan kegiatan Keluarga Berencana yang ditinjau dari cakupan PIK remaja dikarenakan minimnya anggaran.

12. Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan antara lain:

- 1) Rendahnya produktivitas tanaman pangan;



- 2) Diversifikasi yang belum berjalan secara progresif sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar;
- 3) Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan sawah;
- 4) Sistem agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan baik;
- 5) Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit;
- 6) Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan masih kurang dan relatif terbatas;
- 7) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pelaku utama untuk menghasilkan produk yang berdaya saing;
- 8) Terbatasnya sarana pendukung di sekitar kawasan sentra perikanan;
- 9) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayan teknis maupun non teknis;
- 10) Kurang optimalnya upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya pelaksanaan operasional pengawasan aparat pemerintah.

13. Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), akibat Penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran dari usaha/dan atau kegiatan masyarakat, dimana belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman
- b. Penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- c. Penurunan tutupan hutan, dimana tingginya tingkat erosi, akibat meningkatnya lahan terbuka.

- d. Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbitnya PP 22 Tahun 2021 adanya kewajiban penyusunan RPPMA, RPPMU dan RPPMAL dan diintegrasikan dalam RPPLH yang terkendala minimnya anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
- e. Data untuk penyusunan penyusunan RPPMA, RPPMU masih minim
- f. Tidak adanya anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan Hidup
- g. Peningkatan Sampah dan Limbah B3 yang diakibatkan oleh Pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah, mengakibatkan adanya sampah yang belum terangkut ke TPA, dimana kurangnya sarana dan tenaga kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA
- h. Rendahnya kesadaran masyarakat melakukan 3R, dan kurangnya sosialisasi kepadamasyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dengan 3R
- i. Masih kurangnya jumlah BANK Sampah di Kab. Barito Selatan, dan kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya BANK Sampah dan tidak tersedianya dana untuk pembangunan BANK Sampah baru
- j. Tidak tersedianya sarana pemusnahan limbah B3 diKabupaten Barito Selatan, dimana tingginya biaya pemusnahan limbah B3 karena harus dikirim kedaerah lain untuk pemusnahan.
- k. Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan, dan kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan.

14. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Dokumen Kependudukan.

- b. Kurangnya jaringan internet di daerah pedesaan atau terpencil sehingga menyulitkan pelayanan berbasis online.
- c. Masih ditemukan data penduduk ganda atau tidak sinkron antar dokumen (misal nama berbeda di KK dan KTP).
- d. Aksesibilitas ke desa-desa terpencil sulit, terutama saat musim hujan atau banjir, sehingga pelayanan tidak menjangkau seluruh wilayah dengan baik.

15. Perhubungan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain:

- a. Transportasi air masih menjadi tumpuan di beberapa daerah terpencil, namun sarana seperti kapal tradisional dan klotok belum memadai dari sisi keselamatan.
- b. Pelabuhan penyeberangan dan dermaga sungai di DAS Barito kurang memadai dan minim fasilitas keselamatan.
- c. Jumlah petugas Dishub yang terbatas untuk pengawasan di lapangan, seperti pengujian kendaraan, pengawasan terminal dan pelabuhan.

16. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Masih terdapat desa-desa blank spot (tidak terjangkau sinyal) terutama di daerah pelosok.
- b. Masyarakat, khususnya di pedesaan, masih belum terbiasa menggunakan layanan digital pemerintah (seperti pengaduan online, informasi desa digital, dsb).
- c. Minimnya tenaga ahli IT di lingkungan pemerintah daerah.

17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;



- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- c. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UKM;
- d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan UKM;
- f. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
- g. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- h. Kurangnya inovasi produk ;
- i. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
- j. Kesadaran SDM Koperasi dan UKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Koperasi dan UKM;
- l. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UKM dalam tertib hukum dan tertib niaga;
- n. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

18. Penanaman Modal

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Sarana/fasilitas yang menunjang pelayanan perizinan masih kurang memadai, diantaranya : jaringan internet kurang maksimal, tidak tersedianya ruang konsultasi, dan belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas;
- b. Masih kurangnya koordinasi dari instansi-instansi teknis dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- c. Belum tersedianya MPP (Mall Pelayanan Publik);



- d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
- e. Masih kurangnya jumlah tenaga PNS/ASN;
- f. Kesulitan dalam koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan dinas teknis;
- g. Masih terbatasnya upaya pengembangan peningkatan investasi mengingat sangat minimnya dana yang diberikan untuk promosi investasi daerah.

19. Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan antara lain:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang masih minim;
- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan;
- c. Belum maksimalnya pengembangan potensi wisata dan terbatasnya SDM Kepariwisata;
- d. Belum maksimalnya promosi pariwisata;
- e. Masih kurang pendanaan terkait pemeliharaan Stadion Batuah, Stadion Sanggu, Stadion Danau Sadar dan GOR Manunggal;
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana Olahraga yang ada di sekolah untuk kegiatan pembinaan anak usia dini;
- g. Belum terlaksananya pembinaan olahraga prestasi sebagai upaya penjaringan atlet usia dini secara sistematis dan berkelanjutan;
- h. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional;
- i. Pembinaan atlet-atlet berbakat yang masih sangat kurang terkoordinir dengan baik;
- j. Ekspose dan promosi potensi budaya dan obyek wisata yang dimiliki yang hingga kini masih terkendala teknis;
- k. Pengelolaan, Pemeliharaan, Penataan dan Identifikasi Benda-Benda Museum masih kurang.



20. Perpustakaan dan Kearsipan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

- a. Banyak OPD belum menjalankan tata kelola arsip dinamis dan statis sesuai standar.
- b. Kebanyakan petugas perpustakaan bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan, sehingga tidak kompeten dalam tata kelola perpustakaan modern.
- c. Gedung perpustakaan daerah masih belum representatif atau kurang layak, terutama dari segi kenyamanan, pencahayaan, dan kelengkapan ruang baca.
- d. Belum optimalnya kegiatan promosi perpustakaan seperti literasi keliling, pojok baca desa, atau taman baca masyarakat.

21. Perdagangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- c. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan;
- d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengelolaan Bidang Perdagangan;
- f. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- g. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- h. Belum adanya Dana terkait Data yang khusus menginformasikan secara luas Ketersediaan Bahan Pokok dari Perdagangan ;



- i. Masih rendahnya SDM Perdagangan dalam tertib hukum dan tertib niaga.

22. Perindustrian

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

- a. Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas;
- b. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- d. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM IKM;
- e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- f. Bantuan usaha ekonomi produktif dari dana perbantuan (APBN) berupa mesin peralatan pengolah rotan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh pengusaha/perajin secara optimal dikarenakan kesulitan modal biaya operasional seperti bahan baku (rotan batangan) dan biaya operator mesin peralatan.

23. Perencanaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perencanaan antara lain:

Indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja PD. Capaian penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tidak sesuai dengan harapan, perubahan program sering terjadi, hal ini menunjukkan tidak konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, tidak konsistennya penjabaran tersebut adalah karena sebagian besar perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan tidak berpedoman pada Renstra sehingga program yang dilaksanakan cenderung berubah-ubah yang mengakibatkan keberhasilan atau

capaian suatu program tidak dapat diukur selama periode RPJMD. Faktor lain yang mempengaruhi tidak konsistennya jumlah program RPJMD dengan Program RKPD adalah perubahan regulasi dari Permendagri No.13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Keuangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah atau masih dibawah 90% pasca wabah Pandemi Covid-19;
- c. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
- e. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
- f. Belum Maksimalnya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan rendahnya Rasio Pendapatan daerah terhadap APBD ditengah situasi pasca wabah Pandemi Covid-19 sehingga perekonomian belum stabil;
- g. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
- h. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;



- i. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- j. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
- k. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- l. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- m. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terbatas.

25. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepegawaian antara lain:

- a. Kegiatan diklat, Bimtek, dan pelatihan ASN terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan.
- b. Analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai belum akurat, menyebabkan kekurangan atau kelebihan ASN di beberapa unit kerja.
- c. Masih ditemukan pelanggaran disiplin ringan hingga sedang, seperti keterlambatan kerja, kurangnya inisiatif, dan kinerja rendah.
- d. Masih terdapat ASN dengan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban.

26. Pengawasan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pengawasan antara lain:

- a. Banyak rekomendasi hasil pemeriksaan (baik dari Inspektorat, BPK, maupun BPKP) yang tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
- b. Jumlah auditor atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah masih terbatas, belum ideal dibandingkan jumlah OPD dan kegiatan yang diawasi.

- c. Banyak auditor belum bersertifikat atau belum memenuhi standar kompetensi, seperti Auditor Madya atau Utama.

2.10 Dukungan Untuk Ibukota Negara (IKN) Baru

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru dilakukan pada 2020-2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN/PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal.

2.11 Food Estate

Salah satu program utama Pemerintah Pusat yang merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional dan dukungan untuk IKN adalah Program Food Estate yang berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO). Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Program Food Estate dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam negeri yang juga dilandasi upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang fokus kepada masyarakat sebagai bagian penanganan pandemi covid-19.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensukseskan program ini sangat besar, tetapi tidak mengurangi komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap ekosistem gambut di Kalimantan Tengah sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo



Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang disusul dengan penetapan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/684/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 s/d 2050.

Rencana kegiatan food estate di lokasi eks-PLG merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua mengingat kegagalan dimasa lalu, sehingga diperlukan integritas dan komitmen dalam pelaksanaannya. Peran masyarakat baik yang terdampak langsung, tokoh adat, serta pemerhati lingkungan yang ada di Prov. Kalteng sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan saran/masukan/pendapat/ tanggapan serta informasi terhadap gambaran permasalahan di lapangan baik ekonomi maupun lingkungan terkait rencana food estate, sehingga nantinya dapat diambil keputusan guna merumuskan suatu kebijakan yang tepat dan konkret karena berlandaskan dengan fakta dan objektivitas (Evidence Based) dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dan Prov. Kalteng pada umumnya untuk Kalteng Makin Berkah.

Terkait hal tersebut, walaupun Kabupaten Barito Selatan tidak termasuk dalam area Program Food Estate namun Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kab. Barito Selatan siap mendukung program tersebut. Hal ini telah dilakukan pengecekan rencana lokasi pengembangan food estate di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas sesuai intruksi Bupati Barsel serta menindaklanjuti surat Sekda Kalteng tertanggal 18 Mei 2021 terkait tindak lanjut pengembangan food estate berbasis korporasi petani.

Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan, masih tersedia lahan seluas 50 hektar yang berada di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas. Luas lahan 50 hektar ini, akan ditanam padi, jagung dan tanaman hortikultura serta dibuat kolam serta juga akan dikembangkan peternakan ayam petelur sebanyak 1.500 ekor yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian RI.

Lokasi ini nantinya dapat menjadi tempat pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani yang paling layak dari aspek teknis,

sosial, ekonomi maupun lingkungan yang disesuaikan dengan potensi. Diharapkan lokasi tersebut dapat menjadi percontohan bagi petani lainnya untuk mengembangkan agribisnis dan lokasi tersebut dapat di jadikan tempat agrowisata.

Diharapkan kedepannya (jangka panjang) kita siap sebagai daerah pendukung program food estate bahkan terlibat langsung didalamnya dengan potensi lahan dan sumber daya yang ada. Yang juga pada saatnya nanti kita bisa mengembangkan wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan guna terbukanya akses jalan yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi hasil pertanian dan lainnya.

2.12 Makan Bergizi Gratis

Salah satu program utama Pemerintah Pusat yang merupakan program Prioritas yakni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak, dengan menyediakan makanan bergizi gratis di sekolah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6 persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yakni dengan Menargetkan pembangunan puluhan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di setiap kecamatan guna mendukung program tersebut. Program makan bergizi gratis (MKG) ini telah resmi dimulai pada tahun 2025 di 16 sekolah di palangkaraya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sedang melakukan proses penyesuaian anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan telah mendata jumlah siswa yang terdaftar, yakni sebanyak 18.500 pelajar yang terdiri dari murid PAUD, SD, dan SMP. Untuk mendukung program prioritas pusat tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Selatan turut bekerja bersama Kodim 1012 Buntok.

2.13 Program Cetak Sawah

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berkomitmen mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional dengan mencetak sawah rakyat di sejumlah kecamatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Pemerintah Daerah menargetkan pencetakan sawah baru seluas lebih dari 6.000 HA lebih, namun berdasarkan survei dan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar hanya 2,700 HA lahan yang dinyatakan siap untuk program ini. terkait pelaksanaan proyek ini menunggu pengumuman lelang untuk cetak sawah rakyat di Kabupaten Barito Selatan akan dilakukan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi makro dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya sesuai kebijakan pemerintah, serta mempersiapkan kondisi untuk pengelolaan anggaran yang baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah keselarasan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gambaran kerangka ekonomi makro memberikan perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Barito Selatan secara luas, yang berdampak signifikan pada perekonomian regional, nasional, dan global. Kerangka ini dicapai melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk menghadapi tantangan serta menyelesaikan masalah pembangunan. Tujuannya adalah agar arah pembangunan daerah pada tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan analisis potensi sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2026. Rancangan kerangka ekonomi daerah ini juga mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Telaah Ekonomi Global

Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi perekonomian global dan domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju memberikan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa faktor utama seperti konflik geopolitik di Eropa Timur, pengetatan moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perlambatan ekonomi di Tiongkok menjadi pendorong utama ketidakstabilan ekonomi global.

Peningkatan suku bunga oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) sebagai upaya meredam inflasi berdampak langsung pada aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan impor, terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Hal ini mengakibatkan penurunan ekspor Indonesia dan memperbesar risiko defisit perdagangan.

Dinamika harga energi juga turut menjadi perhatian, terutama di kawasan Eropa yang menghadapi krisis energi berkepanjangan akibat konflik Rusia-Ukraina. Keterbatasan pasokan energi dan fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya saing industri di Indonesia.

Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor global yang memengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan bagaimana respons pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Melalui analisis terhadap tren ekonomi global, arus investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia.

Pada tahun 2025, ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi situasi global meliputi:



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

1. Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju
 - a. Amerika Serikat dan Uni Eropa masih melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi.
 - b. The Fed diproyeksikan mempertahankan suku bunga di atas 5%, yang menekan arus modal ke negara berkembang.
 - c. European Central Bank (ECB) juga mengisyaratkan kebijakan moneter ketat hingga kuartal ketiga 2025.
2. Pelemahan Ekonomi Tiongkok
 - a. Tiongkok menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, di bawah target pemerintah sebesar 5%.
 - b. Sektor properti yang sebelumnya menjadi penggerak utama ekonomi, mengalami stagnasi.
 - c. Permintaan impor komoditas dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menurun.
3. Krisis Energi di Eropa
 - a. Konflik geopolitik di Eropa Timur memperpanjang krisis energi, meningkatkan biaya produksi dan memperlambat pemulihan ekonomi.
 - b. Ketergantungan Eropa pada energi impor dari luar kawasan mendorong volatilitas harga minyak dan gas.
4. Ketegangan Perdagangan Global
 - a. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
 - b. Indonesia berpotensi terdampak tarif tinggi terhadap produk ekspor tertentu ke Amerika Serikat jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan pada pertengahan 2025.

3.1.2 Telaah Ekonomi Nasional

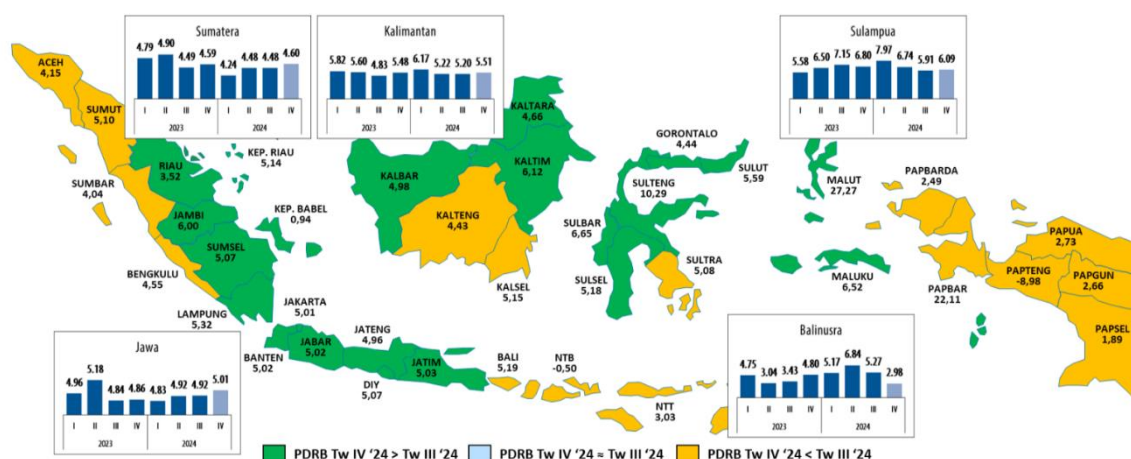
a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Memasuki triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan tetap terjaga dipengaruhi peningkatan mobilitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Di sisi domestik, Konsumsi RT dan LU Perdagangan diperkirakan membaik di mayoritas wilayah, terutama daerah-daerah tujuan mudik utama di Jawa dan Sumatera. Kinerja industri di berbagai wilayah juga diperkirakan membaik

untuk memenuhi permintaan domestik baik saat HBKN maupun ekspor. Kinerja industri ertinggi di Balinusra seiring beroperasinya smelter tembaga pada awal 2025. Sementara itu, investasi diprakirakan melambat kecuali di Sumatera, akibat proyek Pemerintah yang lebih terbatas pada awal tahun 2025 di tengah prospek investasi swasta masih kuat di berbagai wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor ditopang perbaikan di Jawa dan Sumatera, sedangkan ekspor berbagai komoditas LU Pertambangan di Kawasan Timur Indonesia melambat.

Pada keseluruhan 2025, prospek ekonomi daerah diperkirakan tetap baik, di tengah tekanan ekonomi global. Di sisi domestik, prospek konsumsi swasta diperkirakan terjaga, terutama di Sumatera dan Kalimantan seiring harga komoditas ekspor SDA yang tetap di tinggi, serta investasi industri di Jawa yang dapat menyerap tenaga kerja. Investasi swasta diharapkan dapat menjaga prospek ekonomi seluruh daerah tetap kuat pada 2025 di tengah proyek Pemerintah yang lebih terbatas dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, terutama pembangunan IKN di Kalimantan. Lebih lanjut, berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk realokasi anggaran ke program-program prioritas diharapkan dapat menjaga permintaan domestik tetap kuat di seluruh wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor dan LU tradeable berorientasi ekspor diperkirakan masih positif, terutama hilirisasi mineral di Balinusra, Sulampua, dan Jawa, meskipun risiko kebijakan tarif AS perlu mendapat perhatian.

Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2024



Sumber : Bank Indonesia (2025)

b. Konsumsi Swasta



Pada keseluruhan 2025, konsumsi swasta diperkirakan tetap terjaga di seluruh wilayah. Berbagai kebijakan Pemerintah seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), disertai terjaganya tingkat inflasi diperkirakan turut menopang Konsumsi RT tetap kuat. Konsumsi RT di Sumatera tumbuh meningkat dibandingkan 2024 sesuai prakiraan sebelumnya. Harga komoditas SDA utama Sumatera terutama TBS diperkirakan tetap tinggi sepanjang 2025, sehingga menopang prospek pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan Sumatera, harga TBS yang tinggi juga menopang pendapatan masyarakat di Kalimantan. Lebih lanjut, investasi industri baru di beberapa KI dan KEK di Jawa diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja pada LU Industri Pengolahan di berbagai sentra. Hal ini diperkirakan dapat menopang tetap terjaganya Konsumsi RT. Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRRT yang menurun pascaPemilu dan Pilkada 2024.

c. Investasi

Secara keseluruhan 2025, investasi di berbagai wilayah diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian 2024, kecuali di Kalimantan. Pertumbuhan investasi di daerah diperkirakan ditopang oleh investasi bangunan dan investasi nonbangunan di kawasan industri dan KEK, serta program hilirisasi dan program swasembada pangan. Di wilayah Jawa, pertumbuhan investasi ditopang berlanjutnya investasi swasta multiyear di kawasan industri dan KEK. Di Sumatera, investasi industri juga mendorong perbaikan ekonomi sejalan, selain masih berlanjutnya proyek Pemerintah, khususnya jalan tol. Sementara perbaikan investasi di Balinusra, ditopang proyek pariwisata diantaranya KEK Sanur dan hilirisasi mineral. Sejalan dengan Balinusra, investasi Sulampua akan didukung hilirisasi dan investasi pada sektor pertambangan mineral serta gas. Sementara itu, investasi di wilayah Kalimantan diperkirakan tertahan akibat turunnya aktivitas investasi bangunan di IKN. Perlambatan investasi yang lebih dalam wilayah ini tertahan oleh kinerja investasi swasta yang masih baik, khususnya terkait proyek hilirisasi bauksit dan beberapa subLU Industri Pengolahan lainnya.

d. **Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah**

Kinerja pendapatan dan belanja fiskal daerah pada triwulan I 2025 hingga Februari lebih baik dari pola historis. Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini didorong peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pendaptaan Transfer ke Daerah (TKD) di mayoritas wilayah. Di sisi belanja, realisasi belanja APBD juga lebih tinggi seiring kenaikan penyaluran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja barang dan jasa dengan peningkatan tertinggi di wilayah Balinusra dan Sumatera. Realisasi belanja yang lebih baik juga dipengaruhi proses penetapan RAPBD TA 2025 yang lebih tepat waktu.

Gambar 3.2
Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah (Triliun Rp)	Alokasi		Realisasi				
	2024	2025 Pasca Efisiensi	s.d. Feb 24	s.d. Feb 25	%thdp pagu s.d. Feb 24	%thdp pagu s.d. Feb 25	s.d. Feb 25 (yoy)
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	140.07	159.86	14.79	16.17	10.56%	10.11%	9.27%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.70	430.96	72.19	82.45	16.88%	19.13%	14.21%
3. Dana Transfer Khusus	187.43	166.93	0.00	28.55	0.00%	17.10%	0.00%
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.82	18.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	133.09	146.68	0.00	28.55	0.00%	19.46%	0.00%
c. Hibah ke Daerah	0.51	1.61	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
4. Dana Otsus	19.69	15.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
5. Dana Keistimewaan DIY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
6. Dana Desa	69.00	69.00	0.00	2.83	0.00%	4.11%	0.00%
7. Insentif Fiskal	4.00	6.00	0.00	0.03	0.00%	0.45%	0.00%
TKD	847.89	847.76	86.99	130.02	10.26%	15.34%	49.48%

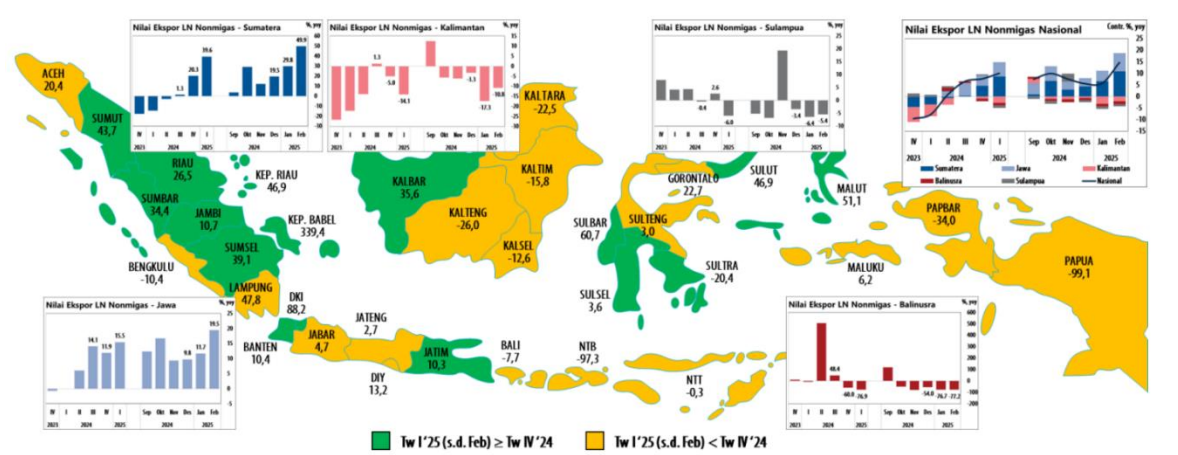
Sumber : Bank Indonesia (2025)

e. **Ekspor Luar Negeri**

Kinerja ekspor nonmigas wilayah pada triwulan I 2025 hingga Februari tumbuh kuat ditopang oleh Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan kinerja ekspor di Sumatera terutama didorong oleh kenaikan permintaan CPO dari Tiongkok di tengah keterbatasan pasokan CPO dari Malaysia, didukung harga CPO Indonesia yang relatif kompetitif. Di Jawa, kinerja ekspor ditopang oleh ekspor komoditas manufaktur capital intensive, terutama perhiasan dan baja. Sementara itu, kinerja ekspor di Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua tumbuh terbatas.

Gambar 3.3

Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2025 (% ,yoy)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

Tertahannya kinerja ekspor di Kalimantan diakibatkan oleh penurunan ekspor batu bara. Selanjutnya, terbatasnya kinerja ekspor di Balinusra dan Sulampua dipengaruhi oleh kendala regulasi perizinan ekspor tembaga pada triwulan I 2025, meskipun ke depan diprakirakan kembali meningkat seiring progress hilirisasi yang berjalan baik. Prospek ekspor berbagai komoditas utama daerah pada 2025 diprakirakan tetap terjaga, di tengah tekanan ekonomi global. Kinerja ekspor di Jawa diprakirakan masih tumbuh didorong pulihnya ekspor olahan logam.

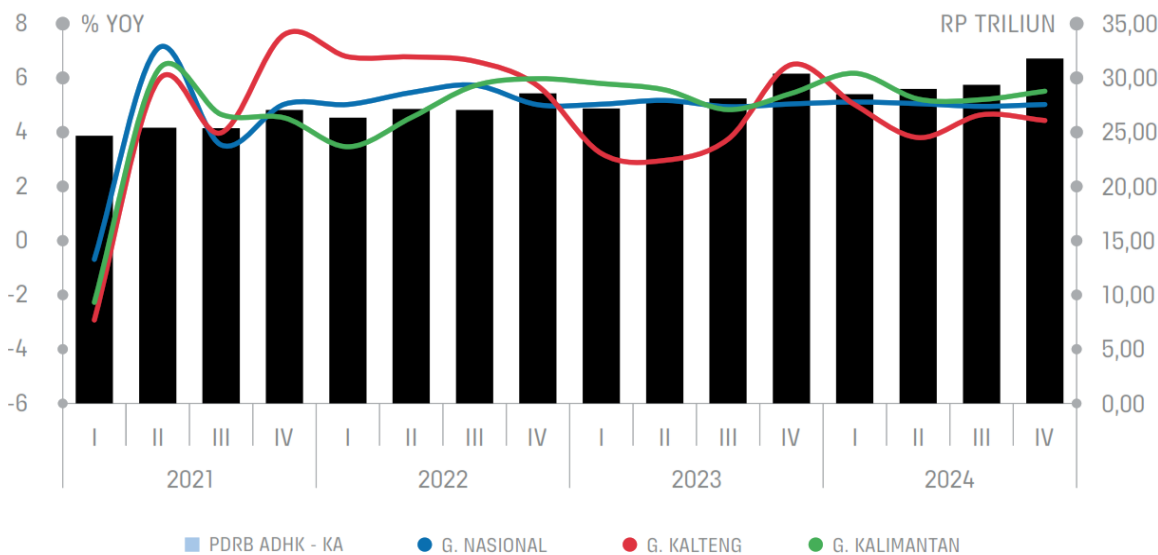
Hal ini sejalan dengan perbaikan kapasitas utilisasi smelter dan potensi berlanjutnya ekspor elektronik. Ekspor di Sulampua dan Balinusra diprakirakan ditopang ekspor pertambangan dan peningkatan nilai tambah setelah beroperasinya industri hilirisasi tembaga di NTB. Di Sumatera dan Kalimantan, ekspor CPO diprakirakan tetap baik dipengaruhi daya saing yang masih tinggi. Di sisi lain, ekspor batu bara di kedua wilayah diprakirakan relatif lebih terbatas akibat permintaan global yang belum cukup kuat. Ke depan, kebijakan tarif resiprok al Amerika Serikat perlu menjadi perhatian karena berpotensi menahan kinerja ekspor berbagai komoditas, terutama industri padat karya di Jawa dan industri padat modal di Sumatera.

3.1.3 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

a. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pada triwulan IV 2024, ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) serta periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kalteng sepanjang tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,46% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,08% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 0,82% (yoy). Penurunan nilai nominal ekspor batu bara menjadi penyebab penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan muat pengiriman batu bara yang melalui pelabuhan Sampit. Konsumsi pengeluaran pemerintah tercatat tumbuh sebesar 12,07% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,63% (yoy). Sejalan dengan itu, sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) tercatat melambat menjadi tumbuh sebesar 12,16% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,33% (yoy) disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilakukan di bulan November 2024.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kal-Teng dan Nasional



Sumber : Bank Indonesia (2025)

Dilihat dari sisi sektoral secara presentasi pertumbuhan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh tinggi sebesar 14,18% (yoy) di tengah pertumbuhan sektor LNPRT, sektor jasa pendidikan tercatat tumbuh sebesar 13,40% (yoy), dan sektor jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 11,82% (yoy). Sementara, sektor utama perekonomian Kalteng mayoritas tumbuh moderat seperti sektor pertanian dan perkebunan tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan produksi TBS di periode berjalan dan telah selesainya puncak masa panen komoditas padi. Penurunan tersebut juga searah dengan pencapaian pada sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi serta penurunan produksi CPO dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertambangan tercatat tumbuh melambat menjadi sebesar 4,83% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024 yang mampu tumbuh tinggi sebesar 12,64% (yoy) seiring dengan penurunan produksi batu bara yang menjadi sebesar 189,5 juta ton dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 223,5 juta ton. Namun demikian, kinerja sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan permintaan perjalanan masyarakat pada periode Nataru dan adanya insentif diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah. Sementara, pada sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) mencatatkan peningkatan pertumbuhan didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi masyarakat pada akhir tahun dan kenaikan pembelian kendaraan akibat adanya isu kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 meski tidak jadi diimplementasikan.

Gambar 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan (% , yoy)

KOMPONEN PERMINTAAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Konsumsi RT	3,24	2,76	2,82	3,23	3,01	4,85	5,98	4,86	4,95	5,16
Konsumsi LNPRT	3,94	3,84	7,90	14,93	7,69	21,06	19,84	14,33	12,16	16,54
Konsumsi Pemerintah	2,92	15,86	4,08	2,22	6,08	15,86	3,20	15,63	12,07	10,30
PMTB	4,30	5,36	5,58	5,97	5,33	3,21	3,16	4,19	8,41	5,22
Perubahan Inventori	88,44	105,21	106,22	(28,63)	156,46	12,06	3,79	-62,08	-19,00	-48,14
Ekspor	5,87	0,12	(9,71)	1,47	(0,54)	2,03	(0,34)	0,58	-6,08	-0,50
Impor	9,50	6,65	(9,78)	(4,18)	0,11	2,56	0,30	1,49	-1,42	0,67
PDRB	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber : Bank Indonesia (2025)



Memasuki triwulan I 2025, ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan masih tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor konsumsi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor utama LU utama Kalteng seperti perlambatan realisasi konstruksi yang dijalankan pemerintah dan perlambatan belanja modal di sektor riil.

Perlambatan triwulan I 2025 juga diperkirakan didorong oleh pelemahan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh proyeksi pelemahan sektor batu bara yang mengalami perlambatan produksi pada awal tahun berjalan, sementara produksi CPO masih akan mengalami kenaikan untuk menopang pelemahan kinerja ekspor Kalteng. Di sisi lain, pertumbuhan kinerja triwulan I 2025 diperkirakan bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga (RT) yang meningkat sejalan dengan masuknya periode HBKN ramadhan dan idul fitri 1447 H. Kinerja investasi (PMTB) diperkirakan masih mampu melanjutkan penguatan utamanya didorong oleh realisasi kegiatan investasi dari sektor swasta untuk menopang kenaikan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi penawaran, pelemahan pertumbuhan ekonomi didorong oleh pelemahan sektor konstruksi seiring dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah untuk efisiensi yang dapat menurunkan realisasi belanja infrastruktur pemerintah. Sektor pertambangan dan penggalian turut mendorong penurunan pertumbuhan PDRB Kalteng sejalan dengan proyeksi penurunan produksi batu bara sementara harga batu bara global tercatat stabil. Pelemahan pertumbuhan juga didorong oleh sektor administrasi pemerintahan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran pemerintah khususnya untuk belanja barang di daerah.

Penurunan sektor administrasi pemerintahan turut menurunkan proyeksi sektor penyediaan akomodasi akibat pemotongan anggaran sektor pemerintah untuk melaksanakan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi di hotel. Sejalan, sektor jasa pendidikan juga diproyeksikan melemah setelah berakhirnya musim masuk sekolah. Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan berjalan yang tumbuh moderat seiring dengan masih berlangsungnya musim *peak crop* komoditas padi yang akan memasuki puncak panen pada triwulan

berjalan yang juga didukung oleh cuaca yang lebih stabil dan optimal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi TBS diperkirakan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2024. Proyeksi kenaikan produksi TBS turut meningkatkan proyeksi produksi CPO dimana secara tahunan, produksi TBS dan CPO di bulan Januari 2025 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15,07% (yoy) dan 12,90% (yoy). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

Gambar 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)

KOMPONEN PENAWARAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,02	4,62	1,35	4,13	4,21	2,10	0,80	1,26	1,08	1,30
Pertambangan dan Penggalian	-15,21	-17,95	1,49	15,19	-5,09	11,88	8,13	12,64	4,83	9,12
Industri Pengolahan	5,72	7,44	0,80	8,68	5,64	2,72	1,22	0,92	-4,80	-0,02
Konstruksi	8,21	13,56	9,10	3,14	7,92	3,58	3,75	7,83	4,42	4,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	7,45	8,61	3,13	6,77	3,51	3,36	3,94	7,01	4,47
Transportasi dan Pergudangan	3,99	1,20	7,43	9,05	5,33	2,80	3,90	5,04	10,63	5,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,44	7,92	8,79	8,55	8,18	8,78	7,05	8,96	9,14	8,49
Informasi dan Komunikasi	2,73	0,30	3,14	9,05	3,76	7,96	5,56	3,31	5,06	5,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	11,88	4,94	5,54	6,15	6,68	4,86	5,74	4,39	5,41
Real Estate	9,41	6,10	7,37	-2,54	4,72	5,83	6,52	6,73	4,26	5,80
Jasa Perusahaan	2,17	6,07	16,85	18,19	10,63	7,08	5,73	8,66	11,82	8,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,12	10,08	-2,76	6,31	5,23	16,46	8,00	-0,02	13,75	9,18
Jasa Pendidikan	10,94	11,34	5,89	0,08	6,80	4,12	5,58	6,68	13,40	7,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,50	9,31	8,63	7,45	8,71	1,95	3,97	5,18	13,63	6,22
Jasa lainnya	11,17	10,80	11,49	2,97	8,95	-3,65	2,94	12,69	9,54	5,12
PDRB	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber : Bank Indonesia (2025)

b. Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah terhadap pagu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 90,61% atau secara nominal mencapai sebesar Rp29,92 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 dengan realisasi mencapai sebesar 97,96% dengan dukungan terutama dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak daerah menurun seiring dengan kinerja pertambangan yang melambat terutama pada ekspor batu bara serta penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Secara

spasial, realisasi pendapatan terhadap pagu tertinggi diraih oleh Kabupaten Sukamara dengan capaian realisasi sebesar 35,29%. Realisasi belanja Pemerintah Daerah terhadap pagu sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 81,42%, lebih moderat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 83,23%.

Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh komponen belanja operasional dan belanja modal yang sejalan dengan peningkatan pagu, kecenderungan *wait and see* pasca penyelenggaraan pemilu 2024, serta pemberlakuan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Barito Utara menjadi wilayah dengan realisasi belanja terhadap pagu paling tinggi yakni sebesar 66,24%.

Gambar 3.7
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah TW.IV 2023 & 2024 (Rp Miliar)

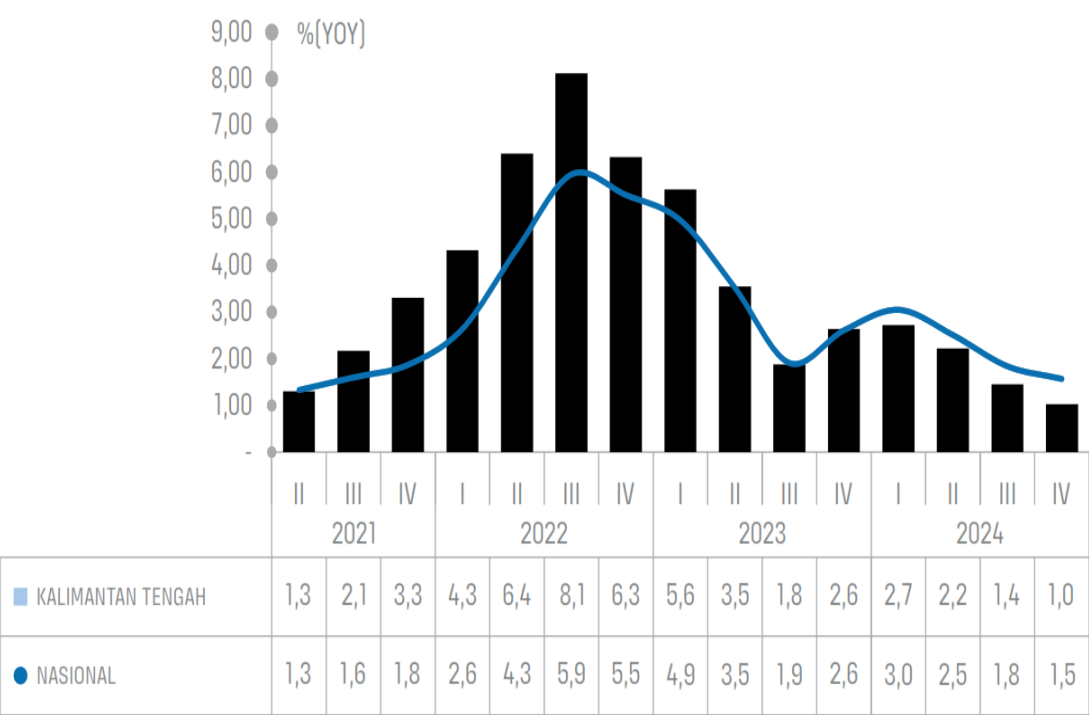
PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA	REALISASI TW IV 2023 (RP. MILIAR)	REALISASI TW IV 2024 (RP. MILIAR)	PERUBAHAN (%)	BELANJA KABUPATEN/ KOTA	REALISASI TW IV 2023 (RP. MILIAR)	REALISASI TW IV 2024 (RP. MILIAR)	PERUBAHAN (%)
BARITO UTARA	1679,91	1850,35	10,15	BARITO TIMUR	892,64	1000,94	12,13%
MURUNG RAYA	2024,63	1823,13	-9,95	KAPUAS	1755,36	2346,23	33,66%
BARITO TIMUR	972,74	1182,19	21,53	LAMANDAU	1290,98	879,26	-31,89%
PULANG PISAU	1235,75	1259,35	1,91	SERUYAN	1037,87	1113,66	7,30%
KOTAWARINGIN BARAT	1593,93	1781,34	11,76	BARITO UTARA	1046,02	1738,89	66,24%
GUNUNG MAS	1158,75	1423,31	22,83	PULANG PISAU	1171,81	1184,33	1,07%
SUKAMARA	714,71	966,90	35,29	SUKAMARA	637,02	894,74	40,46%
KAPUAS	2469,62	3194,10	29,34	MURUNG RAYA	1119,87	1611,61	43,91%
LAMANDAU	951,05	1059,32	11,38	GUNUNG MAS	1027,25	1200,01	16,82%
KATINGAN	1390,23	1463,83	5,29	KOTAWARINGIN BARAT	1416,96	1650,79	16,50%
KOTAWARINGIN TIMUR	1961,11	2312,22	17,90	PALANGKA RAYA	1692,09	1405,10	-16,96%
SERUYAN	1162,39	1250,18	7,55	BARITO SELATAN	1289,08	983,63	-23,70%
PALANGKA RAYA	1223,78	1319,08	7,79	KATINGAN	802,91	1190,26	48,24%
BARITO SELATAN	1202,15	969,48	-19,35	KOTAWARINGIN TIMUR	1624,86	1884,00	15,95%
Rata-Rata TW IV			10,96	Rata-Rata TW IV			16,41%
Rata-Rata TW III (sebelumnya)			10,87	Rata-Rata TW III (sebelumnya)			11,40%

Sumber : Bank Indonesia (2025)

c. Perkembangan Inflasi Daerah

Berdasarkan empat kota IHK nya, inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 1,03% (yoy), menurun dari triwulan III 2024 yang inflasi sebesar 1,45% (yoy). Penurunan laju inflasi tahunan gabungan keempat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah utamanya berasal dari Kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelan makanan dan minuman/restoran. Komoditas emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ikan gabus masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Tengah. Kenaikan harga emas didorong oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar meningkatkan daya tarik emas sebagai aset *safe heaven*. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut hingga tahun 2024. Ikan gabus menjadi komoditas penyumbang inflasi pada triwulan IV 2024 karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi sehingga menurunkan produksi perikanan tangkap. Pada triwulan IV 2024, empat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi gabungan sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir 2022-2024 sebesar 3,33% (yoy).

Gambar 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (% , yoy)



Sumber : Bank Indonesia (2025)

**d. Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Pada triwulan IV 2024, kondisi pembiayaan daerah di Kalimantan Tengah sedikit meningkat yang tecermin dengan rasio LDR yang meningkat, namun dengan risiko yang tetap terjaga. Pertumbuhan kredit sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat. Berdasarkan segmen, kredit korporasi dan UMKM juga tercatat mengalami pertumbuhan walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian, DPK tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan DPK pemerintah daerah sejalan dengan percepatan realisasi anggaran mendekati periode akhir tahun. DPK korporasi juga mengalami perlambatan seiring preferensi korporasi untuk menggunakan modal sendiri dalam membiayai investasi di tengah ketidakpastian yang meningkat. Walaupun intermediasi bank umum di Kalimantan Tengah meningkat, namun risiko kredit tetap terjaga. Hal ini tercermin oleh rasio NPL yang sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya serta tetap di bawah threshold 5%. Begitupun kredit yang direstrukturisasi mengalami penurunan disebabkan pencabutan kebijakan restrukturisasi kredit dan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung.

e. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Net outflow uang kartal dari Bank Indonesia kepada perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ini sejalan dengan adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Transaksi pembayaran non-tunai kliring mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) mengalami peningkatan dari sisi volume dan sisi nilai nominal periode sebelumnya yang didorong karena adanya momentum menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan transaksi QRIS mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah merchant, dan volume transaksi dan nominal transaksi.

f. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III 2024 yang tumbuh kuat dibandingkan triwulan sebelumnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2024 sebesar 68,71%, meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebesar 67,18%. Hal ini didorong oleh menurunnya angka bekerja tidak penuh baik pekerja setengah menganggur maupun paruh waktu. Bekerja tidak penuh tercatat sebesar 399,23 ribu jiwa pada Agustus 2023, menurun menjadi sebesar 397,35 ribu jiwa pada Agustus 2024.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP gabungan di Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 119,90, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 125.40. Menurunnya NTP Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 didorong oleh penurunan pada subsektor perikanan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi padi setelah habis masa panen serta curah hujan kategori menengah-tinggi di Kalimantan Tengah yang mengurangi produktivitas perikanan tangkap. Dari kelima sub sektor, nilai tukar yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada triwulan IV 2024 berasal dari NTP tanaman hortikultura, yaitu sebesar 119,84, meningkat sebesar 15,72% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,56.

Gambar 3.9
Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2021		2022		2023		2024	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Penduduk Usia Kerja (ribu Jiwa)	2.036,08	2.053,88	2.053,48	2.088,77	2.094,01	2.095,35	2.111,64	2.126,31
Angkatan Kerja (ribu Jiwa)	1.413,78	1.410,31	1.374,70	1.404,30	1.439,82	1.407,63	1.432,34	1.460,91
Bekerja (ribu Jiwa)	1.353,63	1.346,44	1.317,00	1.344,48	1.384,47	1.349,87	1.379,83	1.402,28
Pengangguran (ribu Jiwa)	60,15	63,87	57,70	59,83	55,35	57,76	52,51	58,63
Bukan Angkatan Kerja (ribu Jiwa)	622,30	643,57	678,79	684,47	654,19	687,72	679,29	665,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tpak) (%)	69,44	68,67	66,94	67,23	68,76	67,18	67,83	68,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	4,53	4,20	4,26	3,84	4,10	3,67	4,01
Bekerja Tidak Penuh (ribu Jiwa)	456,71	471,79	431,53	392,94	434,38	399,23	447,17	397,35
Setengah Menganggur (ribu Jiwa)	83,79	80,92	72,98	72,33	71,55	85,52	111,70	85,33
Paruh Waktu (ribu Jiwa)	372,93	390,87	358,55	320,61	362,83	316,71	335,47	312,02

Sumber : Bank Indonesia (2025)

**g. Prospek Perekonomian Daerah**

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Prospek ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan fiskal dan moneter, dampak internasional dari kebijakan tersebut, intensitas fragmentasi geoekonomi, serta kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang telah lama tertunda. Prakiraan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil namun terdapat dinamika ekonomi di dalamnya. Amerika Serikat diprediksi tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025, sementara Eropa hanya mencapai 1,0% akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik yang masih membayangi kawasan tersebut. Tiongkok diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh kebijakan stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, India tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 6,5%, sementara kawasan Amerika Latin diproyeksikan tumbuh 2,5%, meskipun mengalami perlambatan ekonomi di beberapa negara besar seperti Brasil dan Meksiko.

Ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2025 masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Dari sisi permintaan, sejumlah sektor ekonomi masih memiliki potensi untuk tumbuh kuat seperti kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, Dari sisi penawaran, sektor pertanian mengalami peningkatan didorong oleh program cetak sawah rakyat yang meningkatkan produksi padi, sawit serta kenaikan produksi karet seiring perbaikan harga global. Mencermati perkembangan ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam kisaran 4,00% -5,00% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan meningkat moderat di tahun 2025 sehingga dapat memenuhi sasaran inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang meningkat utamanya disokong oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan lainnya. Sinergi kebijakan terus dilakukan oleh TPID melalui GNPIP seperti pengembangan cetak sawah rakyat, IR42 dan optimalisasi lahan rawa, serta upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi pangan.

3.1.4 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui dinamika ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 8.898,70 miliar.

Tabel 3.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 207,21	1 212,79	1 305,08	1.372,95	1.470,2
2	Pertambangan dan Penggalian	837,04	1 056,50	2 123,60	2.010,38	1.865,0
3	Industri Pengolahan	372,63	390,48	433,49	418,93	437,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,84	4,13	4,33	4,68	5,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,71	11,80	12,78	14,03	14,5
6	Konstruksi	400,49	364,92	395,03	446,40	495,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	539,61	548,93	578,40	638,54	696,0
8	Transportasi dan Pergudangan	773,24	751,61	833,54	916,17	1.082,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,05	140,64	151,57	163,16	182,5
10	Informasi dan Komunikasi	99,92	107,77	112,88	112,75	116,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	340,01	364,84	374,11	401,03	430,9
12	Real Estat	166,34	174,57	179,52	194,72	201,1
13	Jasa Perusahaan	1,14	1,09	1,13	1,31	1,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	503,34	536,42	535,14	578,66	639,1
15	Jasa Pendidikan	527,35	584,84	623,00	698,55	721,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228,07	302,75	335,31	360,56	381,4
17	Jasa Lainnya	130,93	127,08	132,73	148,42	159,0
PDRB Kabupaten Barito Selatan		6277,92	6681,13	8131,63	8.481,24	8.898,7

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing-masing sektor.

Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020-2024 secara umum cenderung fluakuatif. Pada tahun 2024, kategori lapangan usaha yang mangalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan yakni Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,97 %. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2020-2024 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,65	-1,65	4,38	-0,72	-0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,57	6,02	13,37	6,81	8,31
3	Industri Pengolahan	-0,73	1,43	7,14	-4,33	0,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,58	6,04	0,59	5,23	5,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	7,26	3,81	5,17	-1,82
6	Konstruksi	-11,10	-11,43	6,51	11,64	6,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,64	1,20	2,59	1,21	3,27
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,69	-3,57	8,27	1,50	9,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,34	1,70	5,05	3,74	6,95
10	Informasi dan Komunikasi	17,69	7,99	3,13	2,68	4,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,45	4,99	0,26	3,12	4,78
12	Real Estat	2,23	0,03	0,85	4,92	1,14
13	Jasa Perusahaan	-7,66	-7,89	0,18	10,44	4,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,69	5,12	-1,86	3,99	7,31
15	Jasa Pendidikan	4,37	4,14	2,76	4,29	0,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,37	32,34	10,69	3,11	2,98
17	Jasa Lainnya	-7,36	-5,86	1,25	7,89	2,79
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK		-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70

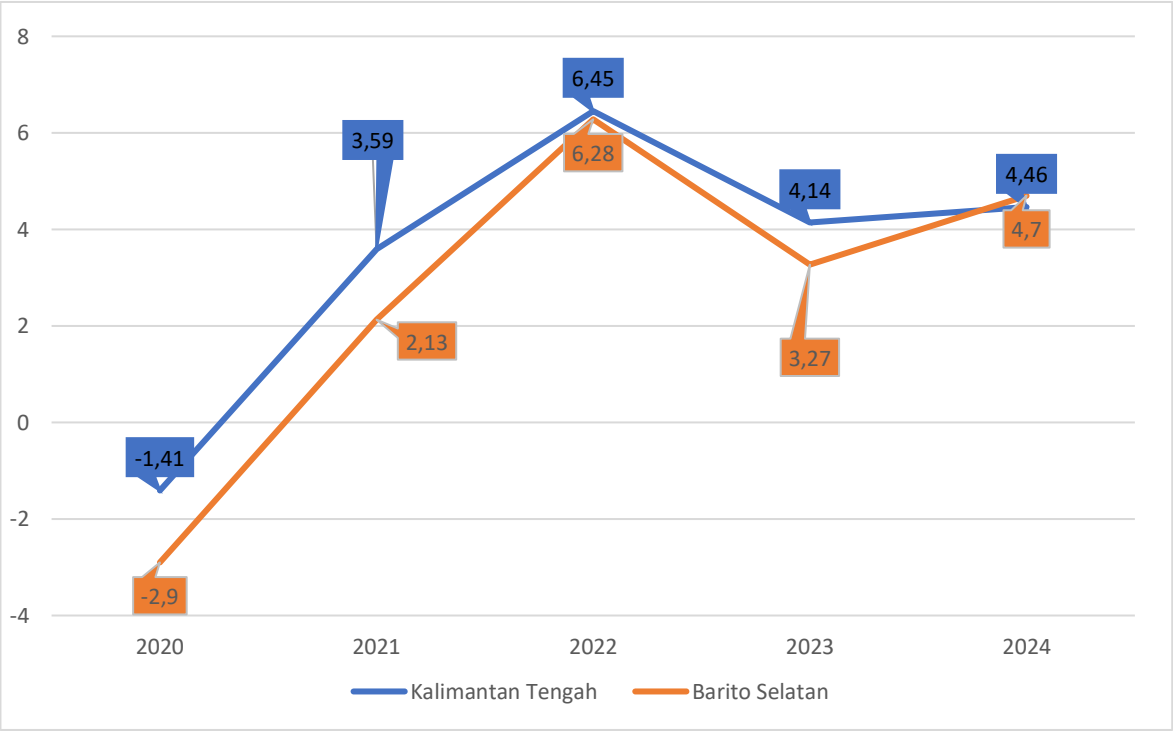
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025, diolah

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Adapun terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 cenderung Fluktuatif. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan paling besar terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi sebesar -2,90. Hal ini semua merupakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020-2024



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka dari Beberapa Edisi, diolah

c. Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi

suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,23	18,15	16,05	16,19	16,52
2	Pertambangan dan Penggalian	13,33	15,81	26,12	23,70	20,96
3	Industri Pengolahan	5,94	5,84	5,33	4,94	4,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,16	0,17	0,16
6	Konstruksi	6,38	5,46	4,86	5,26	5,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,60	8,22	7,11	7,53	7,82
8	Transportasi dan Pergudangan	12,32	11,25	10,25	10,80	12,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,11	1,86	1,92	2,05
10	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,61	1,39	1,33	1,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,42	5,46	4,60	4,73	4,84
12	Real Estat	2,65	2,61	2,21	2,30	2,26
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,02	8,03	6,58	6,82	7,18
15	Jasa Pendidikan	8,40	8,75	7,66	8,24	8,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	4,53	4,12	4,25	4,29
17	Jasa Lainnya	2,09	1,90	1,63	1,75	1,79
PDRB Kabupaten Barito Selatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2025

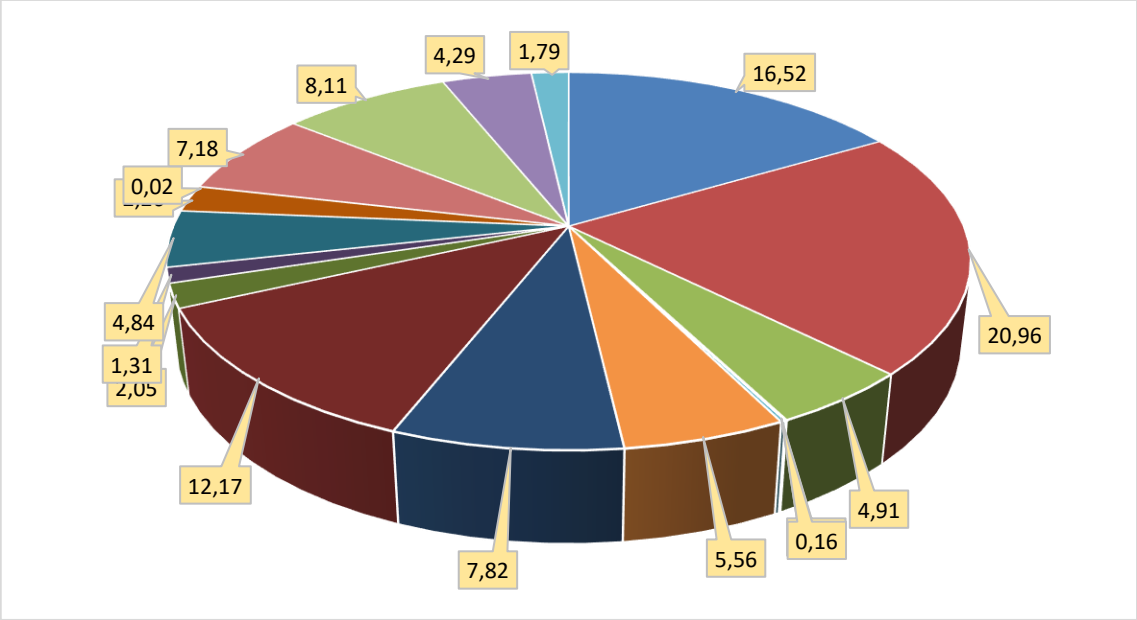
*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada awalnya merupakan tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2020-2022 cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 19,23 persen dan di tahun berikutnya 2021 turun ke angka 18,15 persen kembali turun Pada tahun 2022 menjadi 16,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya tren pertambangan sejak tahun 2022 sehingga

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya tumpuan pertama menjadi tumpuan kedua digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian selama periode 2022-2024 dan menjadi tumpuan ekonomi kabupaten barito selatan.

Gambar 3.11
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024



Keterangan	
1. Pertanian, kehutanan dan Perikanan	10. Informasi dan Komunikasi
2. Pertambangan dan Penggalian	11. Jasa Keuangan dan Asuransi
3. Industri Pengolahan	12. Real Estat
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13. Jasa Perusahaan
5. Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14. Adminitrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
6. Kontruksi	15. Jasa Pendidikan
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8. Transportasi dan Pergudangan	17. Jasa Lainnya
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang persentase kontribusinya secara berturut-turut adalah sebesar 20,96 persen dan 16,52 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke

dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah.

Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 12,17 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 4,91 persen dalam agregasi PDRB Kabupaten Barito Selatan sehingga apabila mengacu kepada UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) dalam Muta’ali (2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen.

Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional Kalimantan Tengah. Struktur perekonomian regional memiliki manfaat untuk melihat peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini merupakan kabupaten-kabupaten yang secara administratif tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.5
Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Barito Selatan	4,13	3,94	4,08	4,06	3,99

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025

*) angka sementara

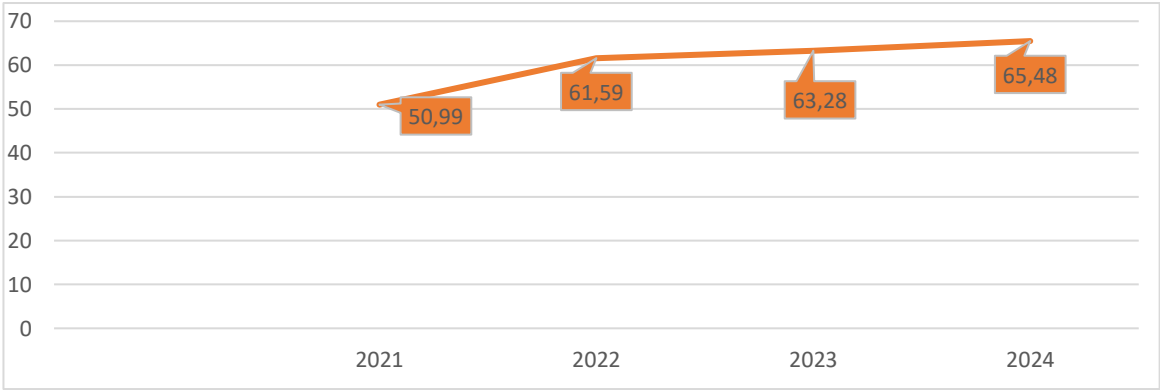
**) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi di kisaran angka 3,9 - 4,13

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Tren perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.13
Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku (juta rupiah)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dari Beberapa Edisi, diolah

Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2020-2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB ADH Berlaku (milyar rupiah)	6.277,92	6.681,13	8.131,63	8.481,24	8.898,70
Jumlah Penduduk	131,1	131,6	131,9	134,7	135.910
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB ADH Konstan (milyar rupiah)	4.240,61	4.331,03	4.602,95	4.753,49	4.976,7
Jumlah Penduduk	131,1	131,6	131,9	134,7	135.910
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Konstan	-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, diolah dari beberapa edisi

*) angka sementara

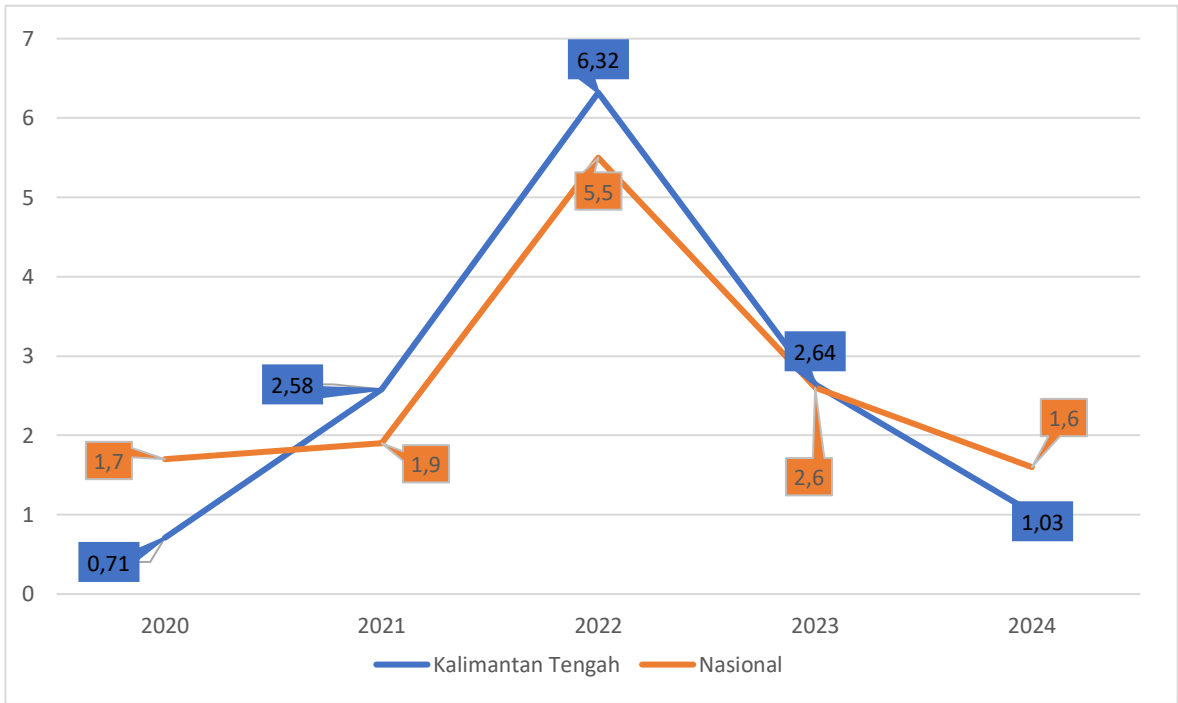
**) angka sangat sementara

e. Laju Inflasi

Laju merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukkan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dibawah laju inflasi nasional dengan angka 0,71 persen, pada tahun 2021 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas laju inflasi nasional yaitu pada angka 2,58 persen dan di tahun selanjutnya laju inflasi Provinsi Kalimantan tengah meningkat dengan angka 6,32 persen di tahun 2022, di tahun 2023 laju inflasi provinsi kalimantan tengah kembali turun diangka 2,64 persen, pada tahun 2024 kembali turun dibawah laju inflasi nasional sebesar 1,03.

Berikut perkembangan angka inflasi umum untuk Provinsi Kalimantan Tengah. dari tahun 2020-2024.

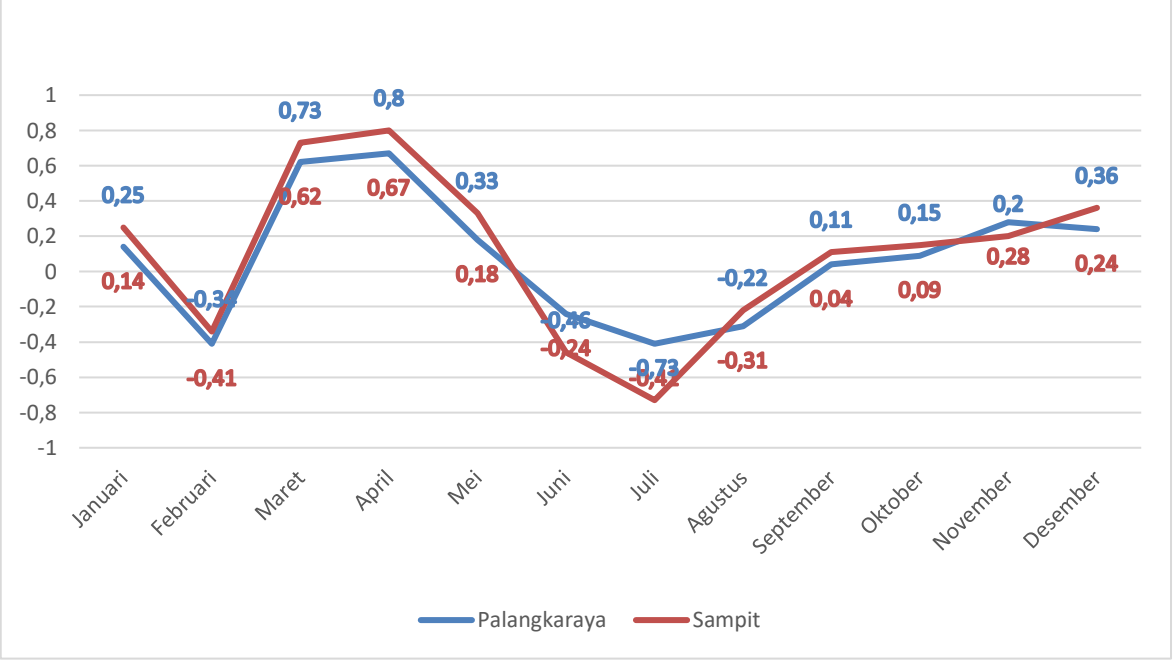
Gambar 3.14
Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%)



Sumber : Indonesia Statistik dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka, diolah dari beberapa edisi

Selain mengalami fluktuasi inflasi, selama tahun 2024 Kota Palangka Raya dan Kota Sampit juga diwarnai deflasi Terkait laju inflasi dan deflasi dua kota (Palangkaraya dan Sampit) bisa dilihat pada gambar berikut ini.

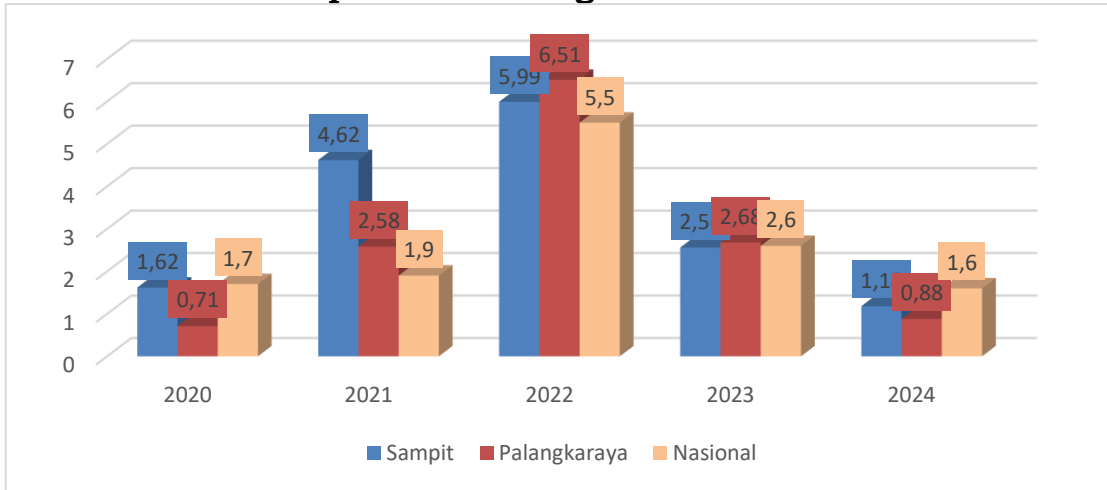
Gambar 3.15
Perkembangan Inflasi (Umum) Dua Kota HK Tahun 2024 (%)



Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025

Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2020-2024, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Dimana tingkat inflasi di dua kota tersebut tidak terpaut jauh terhadap angka inflasi tingkat nasional selama tahun 2020-2024 sedangkan periode yang mana juga merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2022. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama.

Gambar 3.16
Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit
Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2020-2024



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Kota Sampit, Beberapa edisi diolah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Pendapatan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.882.331.052.574,99 Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp1.499.619.676.999,00 maka terlihat terjadi kenaikan sebesar Rp 382.711.375.576.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan



daerah yang sah mengalami kenaikan. Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp150.569.999.999,99, atau berkurang sebesar Rp2.080.448.097,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Parkir; g) Pajak Air Tanah; h) Pajak Sarang Burung Walet; i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol.C); j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); l) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); m) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); n) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); o) Pajak Air Permukaan; p) Pajak Rokok. Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp52.799.999.999,99 atau turun sebesar Rp27.426.010.067,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp80.226.010.067,00 Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel diproyeksi sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 2) Pajak Restoran diproyeksi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 3) Pajak Hiburan diproyeksi sebesar Rp21.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 4) Pajak Reklame diproyeksi sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

- 5) Pajak Penerangan Jalan Umum diproyeksi sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 6) Pajak Parkir Tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp50.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 7) Pajak Air Tanah diproyeksi sebesar Rp25.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 8) Pajak Sarang Burung Walet diproyeksi sebesar Rp500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol.C) diproyeksi sebesar Rp2.620.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) diproyeksi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diproyeksi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksi sebesar Rp14.168.593.200,49 atau naik sebesar Rp8.505.498.036,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.663.095.164,00.
- 13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diproyeksi sebesar Rp14.315.156.799,50 atau naik sebesar Rp8.505.498.037,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.809.658.763,00.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c)



Retribusi Pelayanan pasar; d) Retribusi Kebersihan; e) Retribusi Parkir Di Tepi Jalan; f) Retribusi Labotarium; g) Retribusi Laboratorium Kesda; h) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan g) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung; b) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c) Retribusi Izin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp8.520.000.000,00 atau naik sebesar Rp885.353.015,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp7.634.646.985,00.

Retribusi Jasa Umum pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.624.989.670,00 atau naik sebesar Rp600.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp.2.024.989.670,00 Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp514.611.750,00 atau naik Rp200.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp314.611.750,00.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp177.100.000,00,00 atau naik sebesar Rp100.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp77.100.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.833.277.920,00 atau naik sebesar Rp300.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.533.277.920,00.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

- 4) Retribusi Pelayanan Kebersihan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp100.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diproyeksi sebesar Rp0,00.
- 6) Retribusi Pengujian Laboratorium diproyeksi sebesar Rp0,00.
- 7) Retribusi Pengujian Laboratorium Kesda diproyeksi sebesar Rp0,00.
- 8) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus diproyeksi sebesar Rp0,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp3.913.010.330,00 atau naik sebesar Rp285.353.015,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.627.657.315,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Usaha pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.429.157.315,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp124.000.000,00 atau naik sebesar Rp100.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp24.000.000,00.
- 3) Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp160.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp6.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp 1.935.353.015,00 atau naik sebesar Rp185.353.015 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00.
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp110.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

- 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp148.500.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

Retribusi Perizinan Tertentu pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.982.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.970.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 3) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp10.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp1.500.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp13.500.000.000,00.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00 atau naik sebesar Rp1.500.000.000,00 dibanding dengan APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp13.500.000.000,00.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga; 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian; 8) Pendapatan dari BLUD; dan 9) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp74.250.000.000,00 atau naik sebesar Rp22.960.208.955,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp51.289.791.045,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp5.050.000.000,00 atau naik sebesar Rp3.000.000.000 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp2.050.000.000,00.
- 2) Penerimaan Jasa Giro pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.650.000.000,00 atau naik sebesar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.650.000.000,00.
- 3) Pendapatan Bunga pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp225.182.999,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp16.838.163.000,00 atau naik sebesar Rp10.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp6.838.163.000,00.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp150.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp180.277.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- 7) Pendapatan dari Pengembalian pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp13.357.883.216,00 atau naik sebesar



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Rp11.415.883.216,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.942.000.000,00.

- 8) Pendapatan dari BLUD pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp35.798.493.785,00 atau turun sebesar Rp2.455.674.261,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp38.254.168.046,00,00.
- 9) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp562.937.000,00 atau naik sebesar Rp400.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp162.937.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.719.183.547.532,00 atau naik sebesar Rp394.299.223.532,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00 dengan rincian:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.674.746.541.392,00 atau naik sebesar Rp349.862.217.392 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00 yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada APBD Tahun Anggaran 2026, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.605.568.398.392,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp349.862.217.392,00 dibandingkan dengan Target Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.255.706.181.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp799.868.422.000,00 atau naik sebesar Rp303.874.338.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp 495.994.084.000,00.

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

- a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp46.491.639.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- b) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp7.367.809.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- c) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, (SDA) Gas Bumi pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp195.124.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- d) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp437.039.865.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- e) DBH Kurang Bayar pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp303.874.338.000,00.
- f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.491.969.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp851.176.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- h) DBH Sawit pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.556.502.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp659.419.073.392,00 atau naik sebesar Rp74.201.465.392,00 dibandingkan dengan



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp585.217.608.000,00 terdiri dari:

- a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp372.794.572.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- b) DAU yang ditentukan penggunaannya pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp254.740.290.488,00 atau naik sebesar Rp42.317.254.488,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp212.423.036.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggajian Formasi PPPK pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp171.060.411.488,00 atau naik sebesar Rp111.848.280.488,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp59.212.131.000,00.
 - 2) Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025 pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - 3) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025 pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp39.651.364,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - 4) Bidang Kesehatan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp42.628.515.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - 5) Bidang Pekerjaan Umum pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.

3. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp18.022.668.000,00 atau turun sebesar Rp28.605.998.000,00 dibandingkan



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp46.628.666.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp549.952.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp220.403.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp11.990.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.
 - g. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp5.262.063.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp128.258.235.000,00 atau naik sebesar Rp392.412.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp127.865.823.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp92.456.845.000 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
 - b. Bantuan Operasional Sekolah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp19.479.263.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

- c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.821.082.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- d. BOP Pendidikan Kesetaraan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp367.500.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- e. Tunjangan Guru ASN Daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp70.789.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- f. Bantuan Operasional Kesehatan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp35.408.978.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- g. BOK Dinas pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp19.375.622.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- h. BOK Puskesmas pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp13.212.326.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- i. BOK Keluarga Berencana pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.821.030.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.
- j. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp392.412,00.

b. Insentif Fiskal

Pendapatan Insentif Fiskal pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.

c. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp69.178.143.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

2)Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp44.437.006.140,00 Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp 34.479.425.042,00.
- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp625.488.569,00.
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar 9.332.092.529,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Dana Desa pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp12.577.505.043,00 atau turun sebesar Rp9.507.399.859,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp22.084.904.902. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp3.070.105.184,00 atau turun sebesar Rp9.507.399.859,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp12.577.505.043,00.

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan pada ABPD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp9.507.399.859,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

Tabel 3.7
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2026

Jenis Penerimaan	APBD 2025	PROYEKSI APBD 2026
Pendapatan Asli Daerah	152.650.448.097,00	150.569.999.999,99
Pajak Daerah	80.226.010.067,00	52.799.999.999,99
Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	8.520.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	15.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	51.289.791.045,00	74.250.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.324.884.324.000,00	1.719.183.547.532,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.674.746.541.392,00
Transfer Antar Daerah	-	44.437.006.140
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.084.904.903,00	12.577.505.043,00
Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	3.070.105.184,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	9.507.399.859,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.499.619.676.999,00	1.882.331.052.574,99

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

A. Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2026 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a)pendidikan; b)kesehatan; c)pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e)lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o)



persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2026 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi,



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;

- c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Alokasi belanja daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.032.331.052.574,99 atau naik sebesar Rp316.814.387.114,99 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.715.516.665.460,00.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp1.148.333.400.602,98 atau naik sebesar Rp137.317.285.233,48 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Belanja Pegawai pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp641.979.854.743,01 atau naik sebesar Rp147.325.803.656,79 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp465.216.656.859,97 atau naik sebesar Rp5.500.714.076,69 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga jasa pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi yang akan diberikan kepada PDAM pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp2.525.000.000,00 atau turun sebesar Rp2.475.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp26.472.389.000,00 atau turun sebesar Rp4.556.232.500,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp31.028.621.500,00.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp12.139.500.000,00 atau turun sebesar Rp8.478.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp20.617.500.000,00.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal pada APBD Tahun 2026 diproyeksi



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

sebesar Rp656.348.759.432,81 atau naik sebesar Rp152.822.418.111,31 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp503.526.341.321,50.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan APBD Murni tahun 2025.

4. Belanja transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja tranfer pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp212.648.892.539,20 atau naik sebesar Rp26.674.683.770,20 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp185.974.208.769,00. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp6.132.000.000,00 atau turun sebesar Rp2.654.065.769,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp8.786.065.769,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bantuan Keuangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

pada APBD Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp206.516.892.539,20 atau naik sebesar Rp29.328.749.539,20 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp177.188.143.000,00.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.8
Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	APBD 2025	PROYEKSI APBD 2026
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.148.333.400.602,98
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	641.979.854.743,01
Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	465.216.656.859,97
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	26.472.389.000,00
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.139.500.000,00
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	656.348.759.432,81
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	212.648.892.539,20
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	6.132.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	206.516.892.539,20
JUMLAH BELANJA	1.715.516.665.460,00	2.032.331.052.574,99

B. SURPLUS/DEFISIT

Proyeksi APBD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Defisit sebesar Rp150.000.000.000,00.

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); 2)Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 3)Penerimaan Pinjaman Daerah; 4)Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 5)Penerimaan Piutang Daerah; dan 6)Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun 2026 diproyeksi mencapai Rp150.000.000.000,00 yang bersumber dari Silpa sebesar Rp150.000.000.000,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000.000,00 sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000.000,00.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan pada Tahun 2026 diproyeksi mengalami defisit mencapai Rp150.000.000.000,00 sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp pada APBD Tahun 2026 diproyeksi mencapai Rp150.000.000.000,00, maka dengan demikian pada Proyeksi APBD Tahun 2026 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2026

III	PEMBIAYAAN	APBD 2025	PROYEKSI APBD 2026
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00
	SiLPA	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(215.896.988.461,00)	(150.000.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun Anggaran 2026

URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI APBD 2026	SELISIH
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.650.448.097	150.569.999.999,99	(2.080.448.097)
Pajak Daerah	80.226.010.067,00	52.799.999.999,99	(27.426.010.067)
Retribusi Daerah	7.634.646.985,00	8.520.000.000,00	885.353.015
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.500.000.000,00	15.000.000.000,00	1.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	51.289.791.045,00	74.250.000.000,00	22.960.208.955
PENDAPATAN TRANSFER	1.324.884.324.000,00	1.719.183.547.532,00	394.299.223.532
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.884.324.000,00	1.674.746.541.392,00	349.862.217.392
Dana Perimbangan	1.255.706.181.000,00	1.605.568.398.392,00	349.862.217.392
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	495.994.084.000,00	799.868.422.000,00	303.874.338.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	585.217.608.000,00	659.419.073.392,00	74.201.465.392
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.628.666.000,00	18.022.668.000,00	(28.605.998.000)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	127.865.823.000,00	128.258.235.000,00	392.412.000
Insentif Fiskal	-	-	-
Dana Desa	69.178.143.000,00	69.178.143.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	44.437.006.140,00	44.437.006.140,00
Pendapatan Bagi Hasil	-	44.437.006.140,00	44.437.006.140,00
Bantuan Keuangan	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.084.904.902,00	12.577.505.043,00	(9.507.399.859)
Pendapatan Hibah	12.577.505.043,00	3.070.105.184,00	(9.507.399.859)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.507.399.859,00	9.507.399.859,00	-
Jumlah Pendapatan	1.499.619.676.999,00	1.882.331.052.574,99	382.711.375.576
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.011.016.115.369,50	1.148.333.400.602,98	137.317.285.233,48
Belanja Pegawai	494.654.051.086,22	641.979.854.743,01	147.325.803.656,79

Belanja Barang dan Jasa	459.715.942.783,28	465.216.656.859,97	5.500.714.076,69
Belanja Bunga	-	-	
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.525.000.000,00	(2.475.000.000,00)
Belanja Hibah	31.028.621.500,00	26.472.389.000,00	(4.556.232.500,00)
Belanja Bantuan Sosial	20.617.500.000,00	12.139.500.000,00	(8.478.000.000,00)
BELANJA MODAL	503.526.341.321,50	656.348.759.432,81	152.822.418.111,31
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.733.727.237,50	39.670.916.341,50	1.937.189.104,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.916.608.941,00	148.842.752.181,00	-16.073.856.760,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	298.266.005.143,00	257.851.005.143,00	-40.415.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	220.403.000,00	220.403.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
BELANJA TRANSFER	185.974.208.769,00	212.648.892.539,20	26.674.683.770,20
Belanja Bagi Hasil	8.786.065.769,00	6.132.000.000,00	(2.654.065.769,00)
Belanja Bantuan Keuangan	177.188.143.000,00	206.516.892.539,20	29.328.749.539,20
Jumlah Belanja	1.715.516.665.460,00	2.032.331.052.574,99	316.814.387.114,99
SURPLUS/DEFISIT	(215.896.988.461,00)	(150.000.000.000,00)	65.896.988.461,00
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00	(65.896.988.461,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00	(65.896.988.461,00)
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00	(65.896.988.461,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	
Penyertaan Modal Daerah	-	-	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
Pembiayaan Netto	215.896.988.461,00	150.000.000.000,00	(65.896.988.461,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

**D. Pagu Belanja Per Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang dimaksudkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah akumulasi dari: 1) Belanja Pegawai untuk honorarium tim, uang lembur, honor non PNS dan lainnya; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal.

pagu belanja daerah pada APBD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.032.331.052.574,99 atau naik sebesar Rp316.814.387.114,99 dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.715.516.665.460,00.

Untuk pagu Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.032.331.052.574,99 Diuraikan dan di rinci ke masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.11

Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROYEKSI APBD 2026	APBD 2025	SELISIH APBD 2025 DGN PROYEKSI APBD 2026
1	DINAS PENDIDIKAN	309.452.018.918,96	319.378.964.148,00	(9.926.945.229,04)
2	DINAS KESEHATAN	228.286.135.628,00	215.414.342.919,00	12.871.792.709,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	570.976.690.887,18	463.473.797.144,00	107.502.893.743,18
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	17.385.605.068,48	22.488.919.000,00	(5.103.313.931,52)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.494.858.654,00	6.364.104.796,00	3.130.753.858,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	21.079.786.292,00	14.001.242.791,00	7.078.543.501,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.519.865.471,00	8.305.956.653,00	213.908.818,00
8	DINAS SOSIAL	10.907.095.154,40	11.467.180.179,00	(560.085.024,60)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.034.364.141,88	8.139.474.000,00	(105.109.858,12)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	29.777.620.431,12	22.754.305.265,00	7.023.315.166,12
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.488.284.011,00	12.060.587.790,00	2.427.696.221,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.175.775.220,08	7.013.719.000,00	(837.943.779,92)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	155.663.943.577,76	123.633.958.839,00	32.029.984.738,76
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.891.953.530,64	7.997.039.000,00	894.914.530,64
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	20.864.071.583,00	14.218.958.839,00	6.645.112.744,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.450.299.177,00	10.752.118.000,00	(301.818.823,00)
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.791.235.378,00	10.137.421.000,00	(1.346.185.622,00)



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	14.969.059.318,64	19.919.655.135,00	(4.950.595.816,36)
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.816.258.276,00	3.882.756.300,00	(66.498.024,00)
20	DINAS PERIKANAN	6.090.640.707,93	7.375.000.000,00	(1.284.359.292,05)
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	7.214.852.928,00	7.596.411.000,00	(381.558.072,00)
22	SEKRETARIAT DAERAH	78.470.188.060,00	80.339.617.530,00	(1.869.429.470,00)
23	SEKRETARIAT DPRD	43.545.258.805,00	53.808.847.235,00	(10.263.588.430,00)
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	14.067.366.766,00	16.610.357.000,00	(2.542.990.234,00)
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	333.279.874.260,54	163.466.552.030,00	169.813.322.230,54
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16.105.154.083,00	15.085.737.919,00	1.019.416.164,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.336.028.234,38	19.191.786.739,00	2.144.241.495,38
28	INSPEKTORAT DAERAH	12.281.870.536,00	13.172.737.000,00	(890.866.464,00)
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	4.582.476.337,00	3.737.883.099,00	844.593.238,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	7.594.646.374,00	5.712.754.000,00	1.881.892.374,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	4.388.694.508,00	3.767.869.000,00	620.825.508,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.969.082.804,00	3.850.000.000,00	119.082.804,00
33	KECAMATAN JENAMAS	3.820.868.582,00	3.194.051.000,00	626.817.582,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	4.721.392.474,00	4.166.567.110,00	554.825.364,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.837.736.396,00	13.035.994.000,00	(198.257.604,00)
JUMLAH		2.032.331.052.574,99	1.715.516.665.460,00	316.814.387.114,99

3.2.4 Proyeksi Pagu Belanja Menurut Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun rincian proyeksi pagu belanja menurut urusan adalah sebagai berikut:



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

1. **Urusan Pemerintahan yang Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp1.175.596.873.574,02, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp 309.452.018.918,96. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp228.286.135.628,00. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Rsud Jaraga Sasameh dan 12 UPT Puskesmas Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp570.976.690.887,18. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp16.880.422.568,48. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp39.094.510.417,00. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Satuan Polisi Pamong Praja 3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp10.907.095.154,40. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

**2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp277.951.419.697,12, meliputi 18 (Tujuh belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp6.997.754.928,00. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp505.182.500,00. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.955.455.902,88. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.078.908.239,00. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp21.898.607.019,12. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp14.488.284.011,00. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

g. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp6.175.775.220,08. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp155.663.943.577,76. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp8.891.953.530,64. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp20.534.071.583,00. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp7.769.749.813,00. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

n. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp8.791.235.378,00. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp12.350.915.218,64 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp1.703.324.500,00. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.712.258.276,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp104.000.000,00 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pilihan

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pilihan adalah sebesar Rp 17.782.121.083,93, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp7.879.013.412,00. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp1.733.594.954,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp946.954.410,00. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.

d. **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp914.819.600,00. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.

e. **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp6.090.640.707,93. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

f. **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp217.098.000,00. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.

4. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp122.015.446.865,00, yang termasuk dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah :

a. **Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp78.470.188.060,00.

b. **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp43.545.258.805,00.

5. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp381.205.301.049,92, yang termasuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah :

a. **Perencanaan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp10.484.244.472,00. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp349.385.028.343,54. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Kepegawaian dan Diklat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp21.336.028.234,38. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.583.122.294,00. Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp12.281.870.536,00, yang termasuk dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah :

a. Inspektorat

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp12.281.870.536,00. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp32.408.288.000,00, yang termasuk dalam Unsur Kewilayahan adalah :

a. Kecamatan Dusun Hilir

Kecamatan Dusun Hilir pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.582.476.337,00.

b. Kecamatan Dusun Selatan

Kecamatan Dusun Selatan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp7.594.646.374,00.

c. Kecamatan Dusun Utara

Kecamatan Dusun Utara pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.388.694.508,00.

- d. Kecamatan Gunung Bintang Awai**
Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.969.082.804,00.
- e. Kecamatan Jenamas**
Kecamatan Jenamas pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.820.868.582,00.
- f. Kecamatan Karau Kuala**
Kecamatan Karau Kuala pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.721.392.474,00.

8. Unsur Pemerintahan Umum
Unsur Pemerintahan Umum pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp12.837.736.396,00. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	309.452.018.918,96	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	156.918.553.494,00	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	46.269.908.886,00	RSUD JARAGA SASAMEH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.330.253.334,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.627.464.444,00	UPT PUSKESMAS BARU
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.575.527.657,00	UPT PUSKESMAS SABABILAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.837.554.175,00	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.154.264.240,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEH
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.429.807.400,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.563.592.861,00	UPT PUSKESMAS PATAS I
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.046.020.702,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.514.031.575,00	UPT PUSKESMAS BABAI
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.907.018.741,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.213.494.215,00	UPT PUSKESMAS MENGKATIP
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.898.643.904,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	570.976.690.887,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.880.422.568,48	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.484.187.471,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.494.858.654,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.079.786.292,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.907.095.154,40	DINAS SOSIAL
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.997.754.928,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	505.182.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.955.455.902,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.078.908.239,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	21.898.607.019,12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.488.284.011,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.175.775.220,08	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	155.663.943.577,76	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.891.953.530,64	DINAS PERHUBUNGAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.534.071.583,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.769.749.813,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.791.235.378,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.350.915.218,64	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.703.324.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.712.258.276,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	104.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.879.013.412,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.733.594.954,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	946.954.410,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	914.819.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.090.640.707,93	DINAS PERIKANAN
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	217.098.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
46	SEKRETARIAT DAERAH	78.470.188.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
47	SEKRETARIAT DPRD	43.545.258.805,00	SEKRETARIAT DPRD
48	PERENCANAAN	10.484.244.472,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
49	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.583.122.294,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Urusan	RKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung jawab
50	KEUANGAN	333.279.874.260,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
51	KEUANGAN	16.105.154.083,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
52	KEPEGAWAIAN	21.336.028.234,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
53	INSPEKTORAT DAERAH	12.281.870.536,00	INSPEKTORAT
54	KECAMATAN	4.582.476.337,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
55	KECAMATAN	7.594.646.374,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
56	KECAMATAN	4.388.694.508,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
57	KECAMATAN	3.969.082.804,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
58	KECAMATAN	3.820.868.582,00	KECAMATAN JENAMAS
59	KECAMATAN	4.721.392.474,00	KECAMATAN KARAU KUALA
60	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.837.736.396,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH		2.032.331.052.574,99	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 11 (Sebelas) Tujuan Pembangunan Daerah, dan sebanyak 18 (Delapan Belas) sasaran Pembangunan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu :
 - 1.1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
 - 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.



- 2) **Tujuan Kedua adalah** “Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.
 - 2.2. Upaya Ketahanan Bencana.
- 3) **Tujuan Ketiga adalah** “Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu:
 - 3.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.
 - 3.2. Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah.
- 4) **Tujuan Keempat adalah** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu:
 - 4.1. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
 - 4.2. Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah.
- 5) **Tujuan Kelima adalah** “Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
 - 5.1. Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing.
 - 5.2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- 6) **Tujuan Keenam adalah** “Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
 - 6.1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni.



- 6.2. Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa.
- 7) **Tujuan Ketujuh adalah** “Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
- 7.1. Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.
- 8) **Tujuan Kedelapan adalah** “Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
- 8.1. Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.
- 9) **Tujuan Kesembilan adalah** “Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
- 9.1. Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.
- 9.2. Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 10) **Tujuan Kesepuluh adalah** “Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
- 10.1. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.
- 11) **Tujuan Kesebelas adalah** “Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu :
- 11.1. Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan maka disusun Program Prioritas Kabupaten Barito Selatan sebagai hasil sintesis dari cascading kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur,

baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu-isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong akselerasi pencapaian visi daerah, dengan dukungan indikator kinerja yang tersusun sistematis guna memastikan arah pembangunan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan.



Gambar 4.1 Fokus Strategis Pembangunan

Selaras dengan tagline visi Kepala Daerah “**Bekerja Bersama, Merangkul Semua**” terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a. Barsel Ceria – Pendidikan Kesehatan

- C (Cerdas)
- E (Edukasi inklusif)
- R (Ruang belajar sepanjang hayat)
- I (Inklusivitas sosial)
- A (Asupan bergizi)

Dimensi ini mencakup tentang “Generasi cerdas, sehat, dan bahagia” sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan dan kesehatan.

**b. Barsel Sejahtera – Perekonomian**

- S (SDA lestari)
- E (Ekonomi kreatif)
- J (Jaminan sosial ketenagakerjaan)
- A (Akselerasi tenaga kerja lokal)
- H (Hilirisasi potensi daerah)
- T (Tumbuhnya wisata unggulan)
- E (Ekspansi fiskal yang sehat)
- R (Resiliensi bencana)
- A (Akses ekonomi hijau)

Dimensi ini menekankan pada perwujudan “Perekonomian yang adil dan inklusif” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Barsel Kuat – Infrastruktur

- K (Ketangguhan menghadapi bencana)
- U (Utilitas publik yang merata)
- A (Akses antarwilayah yang terkoneksi)
- T (Tata ruang adaptif)

Dimensi ini menjadi fokus untuk Infrastruktur yang tangguh, merata, dan adaptif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan wilayah di masa kini dan masa depan. Ini menitikberatkan pada pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga adaptif, termasuk terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah.

d. Barsel Rukun – Sosial Budaya

- R (Ruang harmoni antarumat)
- U (Unjuk seni & budaya lokal)
- K (Keterlibatan perempuan dalam pembangunan)
- U (Upaya penguatan keluarga rentan)
- N (Nilai-nilai kearifan lokal)

Dimensi ini diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai aktor sekaligus objek perencanaan sebagai upaya membangun



lingkungan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, kebudayaan, dan kebersamaan.

e. **Barsel Sigap – Tata Kelola**

- S (Sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien)
- I (Integritas birokrasi dan transparansi tata kelola)
- G (Good Governance)
- A (Akselerasi digitalisasi pemerintahan)
- P (Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan)

Dimensi ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel. Pemerintahan diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap teknologi digital.

f. **Barsel Tumbuh – Ketahanan Pangan**

- T (Tumbuhnya sentra pangan)
- U (Usaha tani dan energi lokal)
- M (Mandiri dari sisi pangan dan energi)
- B (Berbasis potensi desa)
- U (Unggul dalam teknologi dan pasokan)
- H (Harmoni antara manusia dan alam)

Dimensi ini ditujukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dengan menjadikan Barito Selatan sebagai penyangga pangan yang produktif, dan mandiri.

Berikut ini adalah Program masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;



6) Urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pangan;
- 4) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- 11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 14) Urusan pemerintahan bidang statistik;
- 15) Urusan pemerintahan bidang persandian;
- 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- 18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.

3. Urusan Pilihan, meliputi 8 (delapan) urusan yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 4) Urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 5) Urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- 6) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.



4. Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi 2 (dua) urusan yakni:

- 1) Unsur Sekretariat Daerah
- 2) Unsur Sekretariat DPRD

5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi 5 (lima) urusan yakni:

- 1) Unsur perencanaan;
- 2) Unsur keuangan;
- 3) Unsur kepegawaian;
- 4) Unsur pendidikan dan pelatihan;
- 5) Unsur penelitian dan pengembangan.

6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu Inspektorat Daerah

7. Unsur kewilayahan, yaitu urusan Kecamatan.

8. Unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:

1. Dinas Daerah Kabupaten, meliputi 21 Perangkat Daerah yakni:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Dinas Sosial
- 9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 15) Dinas Perhubungan
- 16) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
- 17) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Perikanan

2. Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten, terdiri

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Badan Pendapatan Daerah
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Sekretariat Daerah

4. Sekretariat DPRD

5. Inspektorat Daerah

6. Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Dusun Selatan
- 2) Kecamatan Karau Kuala
- 3) Kecamatan Dusun Hilir
- 4) Kecamatan Jenamas
- 5) Kecamatan Gunung Bintang Awai
- 6) Kecamatan Dusun Utara

Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selain ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara langsung, juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Program-program tersebut pada dasarnya

merupakan bentuk fungsi pelayanan PD kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, program tersebut mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia		
SASARAN	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal 2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi 3. Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi
Urusan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN	2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Bidang Perpustakaan	dan Arsip	PERPUSTAKAAN	Numerasi
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.		
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4. Pemberian Minum Susu Gratis 5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh 6. Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh
		PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	

Misi 2: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.		
SASARAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
SASARAN	Upaya ketahanan bencana.		
Urusan Pemerintahan	Dinas Pemadam Kebakaran dan	PROGRAM PENCEGAHAN,	8. Peningkatan ketangguhan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelamatan	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	daerah dalam menghadapi risiko bencana
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
TUJUAN	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah.		
SASARAN	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9. Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9. Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata
Sasaran	Meningkatnya Kontribusi Dan Kinerja Usaha Lokal Dalam Perekonomian Daerah.		
Urusan Pemerintahan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan	PROGRAM PELAYANAN IZIN	10. Penciptaan iklim ekonomi

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	USAHA SIMPAN PINJAM	kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
	Serta Pariwisata	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan		
Sasaran	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Dan Inklusivitas Ketenagakerjaan Daerah.		
Urusan Pemerintahan	Dinas Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Bidang Tenaga Kerja	Dan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	13. Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Tujuan	Menguatkan Pondasi Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Adaptif-Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan		
Sasaran	Terwujudnya Struktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Kuat Dan Berdaya Saing.		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Modal	Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dan Perluasan Inklusi Ekonomi Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal.		
Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah
Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah

Misi 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat.		
SASARAN	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	17. Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Umum Dan Penataan Ruang	Ruang	PENYEDIAAN AIR MINUM	Perpipaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	20. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		(PSU)	Berkelanjutan 17. Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik 18. Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan
Sasaran	Terwujudnya Konektivitas Wilayah Untuk Mendukung Pergerakan Barang Dan Jasa.		
Urusan Pemerintahan Bidang	Dinas Pekerjaan Umum Dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN	21. Pemerataan dan Pemantapan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penataan Ruang	JALAN	Konektivitas Jalan dan Jembatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22. Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	22. Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal

Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju.		
SASARAN	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25. Penguatan Iklim Stabilitas Politik

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Masyarakat			
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
		PROGRAM PERFILMAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		NASIONAL	
urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	25. Penguatan Iklim Stabilitas Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	25. Penguatan Iklim Stabilitas Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	24. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
TUJUAN	Menjadikan Masyarakat Tangguh Dengan Kualitas Hidup Yang Sejahtera.		
SASARAN	Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	26. Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		PROGRAM PENINGKATAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		KUALITAS KELUARGA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik.		
SASARAN	Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LAYANAN	
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
		PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	
		PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	
		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		DAN PERKARA PERTANAHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	28. Penguatan Kualitas Fasilitas

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
			Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		NASIONAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
SASARAN	Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.		
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	29. Penguatan Good Governance
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	29. Penguatan Good Governance
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	29. Penguatan Good Governance

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Sekretariat Dprd	Sekretariat Dprd	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	29. Penguatan Good Governance
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	29. Penguatan Good Governance
Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29. Penguatan Good Governance
Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	29. Penguatan Good Governance
Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

Misi 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

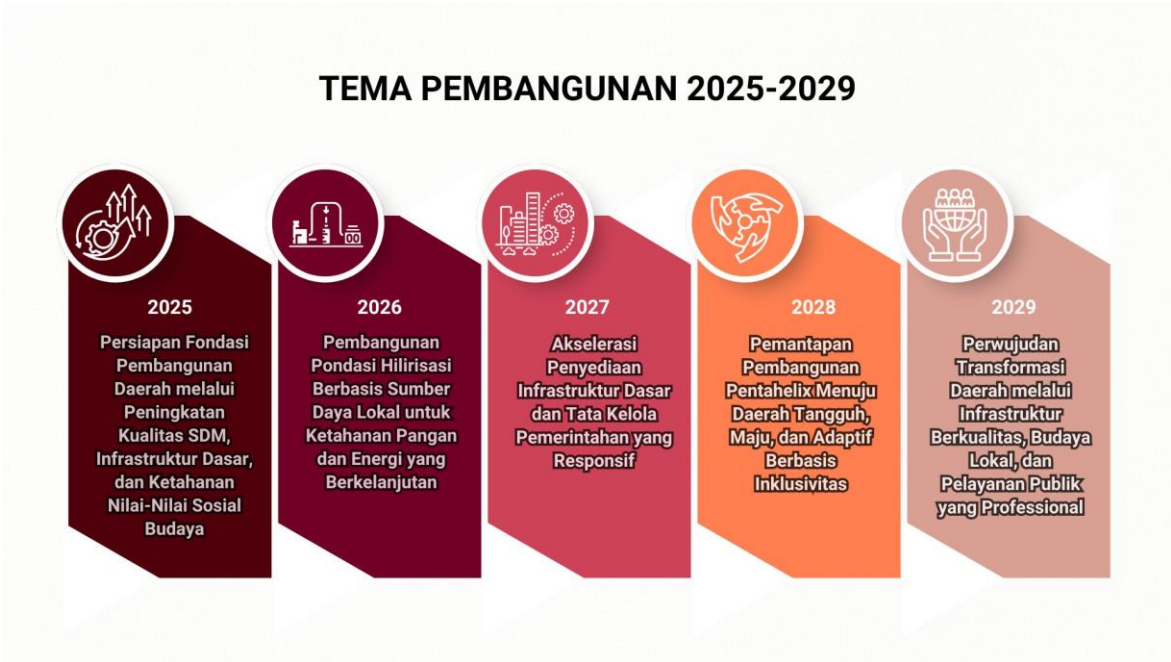
URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal.		
SASARAN	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	30. Penguatan ketahanan pangan daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	30. Penguatan ketahanan pangan daerah

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30. Penguatan ketahanan pangan daerah
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
TUJUAN	Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		
SASARAN	Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT).		
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	32. Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	32. Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah

Selanjutnya untuk memberikan arah pembangunan tahunan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 di buat fokus tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing – masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai Berikut :

Gambar 4.2 TEMA PEMBANGUNAN 2025-2029



4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong



kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Secara khusus Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema pembangunan pada RKP 2026 yaitu : **“Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, sehingga fokus Pembangunan Nasional pada tahun 2026 diarahkan pada 2 (dua) arah kebijakan Prioritas yang meliputi:

1. Kedaulatan Pangan dan Energi

a) Pangan

- Optimalisasi BULOG
- Pelaksanaan Lumbung (*Food estate*)

b) Energi

- Peningkatan Bauran ethanol dan biodisel
- Energi terbarukan

c) Air

- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

d) Pengelolaan Persampahan;

2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

a) Pendidikan dan Kesehatan



- Ekosistem Makan Bergizi Gratis
 - Percepatan renovasi sekolah
 - Sekolah unggulan
 - Cek kesehatan
 - Percepatan rumah sakit daerah
 - Digitalisasi Pendidikan
 - Sekolah Rakyat
- b) Deregulasi dan Kepastian Hukum
- Reformasi Birokrasi
 - Kemudahan berbisnis
 - Ketertarikan investasi
- c) Pertahanan Semesta
- Komponen cadangan
 - Pemenuhan alutsista
 - Penguatan kemampuan teritorial
- d) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
- Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik indonesia
 - Optimalisasi potensi Danaantara
- e) Adopsi Teknologi dan Inovasi
- Tranformasi digital
 - Riset dan Inovasi
- f) Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Data tunggal kemiskinan
 - Digitalisasi bantuan
 - 3 juta rumah
 - Koperasi desa/kelurahan merah putih
- g) Fiskal adaptif, stabilitas Makroekonomi

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP di Tahun 2026, yang meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 - 6,3%;
2. PDRB Perkapita *GNI Per Capita* sebesar 5.870
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5-7,5%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44 - 4,96%;
5. Rasio Gini Sebesar 0,377 – 0,380

6. Indeks Modal Manusia sebesar 0,57
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,67

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

17 Program Prioritas	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk,	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), 16. termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 17. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 18. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah:

PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH	
KALTENG BERMARTABAT	
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir
2	Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belum Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing
BETANG MAJU	
1	Pembangunan 1000 Km jalan Desa
2	Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kab/ Kota
3	Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif
4	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa
5	Peningkatan akses listrik desa (100% Bersinar)
6	Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman
BETANG MAKMUR	

PROGRAM HUMA BETANG KALIMANTAN TENGAH	
1	Bantuan Pangan Rp 2 Juta/KK
2	Operasi Pasar Murah
3	Menciptakan 250 orang Milyader Muda
4	Milenial Job Center
5	Inkubasi UMKM
6	Asuransi Petani dan Nelayan
7	Bantuan Perahu dan Alat Tangkap
BETANG CERDAS	
1	Sekolah/Kuliah Gratis
2	1 Sarjana 1 Keluarga
3	1000 unit Rumah Guru
4	Insentif Guru Agama
5	Kalteng Mengaji
BETANG SEHAT	
1	Berobat Gratis berbasis KTP
2	Insentif Tenaga Kesehatan Desa
3	Revitalisasi Puskesmas Desa
4	Pendampingan Ibu Hamil dan Pasca Hamil
5	1 Ambulans / Desa
BETANG HARMONI	
1	Berdayakan 100 Desa Wisata (Dewi)
2	Bantuan Provinsi untuk Kab/Kota Rp 150 Milyar
3	Rp 250 Juta Stimulus Desa
4	Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, RT/RW seKalteng
5	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga

Dengan Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 adalah:

“Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan”

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tema Pembangunan Daerah tersebut ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah beserta kualitas fasilitas pendukungnya.



2. Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan sektor potensial wilayah
3. Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan
4. Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi
5. Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan kesehatan
6. Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat
7. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat prevalensi kategori tinggi
8. Peningkatan upaya edukasi kesehatan terhadap ibu hamil
9. Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis
10. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat
11. Pengembangan solusi berbasis alam untuk Pengendalian risiko bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan
12. Pengembangan akomodasi dan layanan penunjang pariwisata
13. Pengembangan pariwisata berbasis jasa lingkungan
14. Pengembangan 1 desa 1 produk berdasarkan potensi daerah
15. Pengembangan layanan logistik untuk mendukung peningkatan perdagangan
16. Pengembangan dan penguatan pusat industri pengolahan produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
17. Pengembangan dan optimalisasi peran koperasi, BUMD dan BULOG dalam perekonomian daerah
18. Peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja yang berkompeten dan berketerampilan yang relevan



19. Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha
20. Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan
21. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional dan internasional
22. Pembangunan dan pengembangan Barito Selatan sebagai gerbang Kalimantan Tengah untuk mendukung IKN sebagai hub ekonomi yang mendorong aktivitas ekonomi maju dan kompetitif
23. Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif
24. Pemerataan akses terhadap air bersih di kawasan permukiman
25. Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman
26. Pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu
27. Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dari sumber timbunan hingga tempat pemrosesan akhir.
28. Pemerataan akses jaringan listrik
29. Pengembangan fasilitas publik
30. Pengembangan konektivitas antar wilayah
31. Perbaikan dan penguatan konektivitas antarwilayah
32. Pengembangan moda transportasi terintegrasi dan terjangkau
33. Penguatan infrastruktur dasar jalan, jembatan, drainase, dan irigasi
34. Perbaikan jalan arteri primer
35. Perbaikan jalan kolektor primer.
36. Pembangunan jaringan irigasi primer
37. Pembangunan pelabuhan pengumpul
38. Pembangunan pelabuhan perikanan
39. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
40. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
41. Penguatan Pilar Kebangsaan Melalui Pendidikan Ideologi, Pemberdayaan Politik Etis, dan Sinergi Organisasi Kemasyarakatan



42. Pelestarian cagar budaya dan penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi.
43. Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya.
44. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
45. Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas pembangunan (bidang ekonomi, sosial, dan budaya)
46. Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga
47. Peningkatan pelayanan, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) keluarga berencana
48. Penguatan Sistem Respons dan Pemulihan Perlindungan Anak yang Komprehensif
49. Penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan
50. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
51. Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif
52. Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data makro sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran
53. Percepatan integrasi sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
54. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
55. Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur, bertujuan mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berprofesional dan bebas dari tindakan korupsi.
56. Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan
57. Penguatan reformasi hukum



58. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
59. Pengembangan zonasi wilayah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan berbasis potensi unggulan kewilayahan
60. Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
61. Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko
62. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
63. Pengembangan Kawasan untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
64. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat
65. Pengembangan pusat industri pengolahan produk sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
66. Penguatan industri pengolahan hasil perkebunan
67. Optimalisasi hasil produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan
68. Pengembangan model pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek pangan dan energi
69. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sektor strategis daerah
70. Pengembangan sistem penyimpanan atau cadangan energi
71. Pengembangan dan percepatan transisi energi listrik melalui penguatan sarana pendukung, riset, SDM serta kebijakan energi komprehensif
72. Penguatan Ekosistem dan lansekap ekonomi hijau
73. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah serta arah kebijakan prioritas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disusun Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selain ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara langsung, juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk fungsi pelayanan PD kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, program tersebut mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.

Tabel 5.1 Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia		
SASARAN	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal 2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi 3. Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
		PROGRAM PENDIDIK DAN	1. Percepatan dan Pemerataan Akses

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan Formal
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2. Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.		
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4. Pemberian Minum Susu Gratis 5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh 6. Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		BIDANG KESEHATAN	menyeluruh
		PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	

Misi 2: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.		
SASARAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan



RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
SASARAN	Upaya ketahanan bencana.		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
TUJUAN	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah.		
SASARAN	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata.		
Urusan Pemerintahan Bidang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	9. Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi



RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Pariwisata	Serta Pariwisata	PARIWISATA	pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9. Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata
Sasaran	Meningkatnya Kontribusi Dan Kinerja Usaha Lokal Dalam Perekonomian Daerah.		
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		(UMKM)	lokal
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	10. Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan		
Sasaran	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat
Urusan Pemerintahan Bidang	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN	



RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Transmigrasi	Kerja	TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Dan Inklusivitas Ketenagakerjaan Daerah.		
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	13. Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Tujuan	Menguatkan Pondasi Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Adaptif-Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan		
Sasaran	Terwujudnya Struktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Kuat Dan Berdaya Saing.		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		POKOK DAN BARANG PENTING	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	14. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dan Perluasan Inklusi Ekonomi Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal.		
Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah
Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	15. Penguatan Kapasitas fiskal daerah

Misi 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat.		
SASARAN	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17. Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	20. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
Urusan Pemerintahan Bidang	Dinas Perumahan Rakyat Dan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Serta Pertanahan		Berkelanjutan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan 17. Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik 18. Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		BERACUN (LIMBAH B3)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan
Sasaran	Terwujudnya Konektivitas Wilayah Untuk Mendukung Pergerakan Barang Dan Jasa.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22. Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	22. Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal

Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju.		
SASARAN	Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25. Penguatan Iklim Stabilitas Politik
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	



RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	23. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
		PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	25. Penguatan Iklim Stabilitas Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	25. Penguatan Iklim Stabilitas

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	24. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
TUJUAN	Menjadikan Masyarakat Tangguh Dengan Kualitas Hidup Yang Sejahtera.		
SASARAN	Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Urusan Pemerintahan	Dinas Pengendalian	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	26. Peningkatan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik.		
SASARAN	Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LAYANAN	
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
		PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan		

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	
		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	



RKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN	

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
	Perdagangan	PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
SASARAN	Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.		
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	29. Penguatan Good Governance

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	29. Penguatan Good Governance
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	29. Penguatan Good Governance
Sekretariat Dprd	Sekretariat Dprd	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	29. Penguatan Good Governance
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	29. Penguatan Good Governance
Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29. Penguatan Good Governance
Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM RISET DAN	28. Penguatan

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
		INOVASI DAERAH	Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	29. Penguatan Good Governance
Kewilayahan	Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

Misi 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
TUJUAN	Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal.		
SASARAN	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.		
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	30. Penguatan ketahanan pangan daerah

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
	Pertanian	KEMANDIRIAN PANGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	30. Penguatan ketahanan pangan daerah
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30. Penguatan ketahanan pangan daerah
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
Perikanan			unggulan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	31. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
TUJUAN	Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		
SASARAN	Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT).		
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	32. Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	32. Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah

Selain berdasarkan Program Prioritas Daerah diatas, dalam proses Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, Pemerintah Barito Selatan menjalankan prosedur-prosedur perencanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan

jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, antara lain Musrenbang Kecamatan, Musrenbang RKPD, penelaahan Pokok-pokok Pikiran dan Usulan SKPD yang semuanya diinput dan di entry ke dalam aplikasi SIPD. Kemudian disusun Rencana Kerja yang disertai dengan pendanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang secara lengkap disajikan sebagaimana Tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2026
Kabupaten Barito Selatan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BARITO SELATAN
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN						309.452.018.918,96							315.275.430.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.452.018.918,96							315.275.430.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						309.452.018.918,96							315.275.430.000,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	242.377.588.918,96						-	251.500.000.000,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-	600.000.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	238.925.588.918,96			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-	248.045.000.000,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2300 Orang/bulan	238.880.588.918,96	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		248.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	150.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-		150.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	850.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-		850.000.000,00	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	550.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-		110.000.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	75.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	32.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	65.899.430.000,00							-		62.600.430.000,00	

[illegible]

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					1 Paket	750.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					500 Peserta Didik	520.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					500 Orang	4.800.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				4.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					100 Orang	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					162 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					162 Satuan Pendidikan	12.383.343.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				12.383.343.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	

							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					162 Orang	400.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					2 Ruang	800.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					1 Konten Digital	90.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					100 Orang	145.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					1 Komunitas	95.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					3 Kegiatan	360.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0046	Penzadaan Perlengkapan Peserta Didik																

							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					4 Paket	2.847.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			2.847.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					81 Orang	85.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar					162 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					10 Ruang	2.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					3500 Peserta Didik	195.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	0055	Penzadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																

							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	21.164.920.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		-	17.605.920.000,00	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	350.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					2 Ruang	800.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					5 Unit	750.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	750.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																

							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	900.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					5 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					1 Paket	550.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					700 Peserta Didik	740.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			745.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					500 Peserta Didik	625.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					330 Orang	3.564.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0040	Pensembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					120 Orang	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					62 Satuan Pendidikan	7.095.920.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			7.095.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					62 Orang	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					1 Komunitas	140.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					1 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																

							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					162 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					100 Orang	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					4463 Paket	900.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-		11.956.067.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-	-	11.956.067.000,00		
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					700 Orang	6.720.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		6.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					120 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							-				-		1.836.067.000,00	-	-	-	-	-		1.836.067.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																

							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					120 Orang	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					3 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					3 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					100 Peserta didik	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					120 Orang	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Unit	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia					1 Paket	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																

							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					120 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat					2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-				-	542.500.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-		542.500.000,00	
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					4 Satuan Pendidikan	367.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					4 Peserta Didik	75.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal				75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-				-	275.000.000,00						-		275.000.000,00	

	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-				-	150.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	150.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar															
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun					1 Dokumen		150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-		125.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	125.000.000,00	
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					1 Dokumen		125.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-		550.000.000,00						-	550.000.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-		550.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	550.000.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Dokumen		100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Laporan		450.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal		-	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-			-		350.000.000,00						-	350.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	30.419.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	298.000.000,00			-		-	-			0,00	
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	198.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	160.000.000,00			-		-	-			0,00	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	770.750.000,00			-		-	-			0,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	72.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	35.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	578.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	571.000.000,00			-		-	-			0,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	260.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	311.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	4.153.500.000,00			-		-	-			0,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							-					-	360.000.000,00	-	-	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	3.793.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	381.000.000,00			-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	21.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-		-	58.394.745.624,00				-			-		32.264.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	20.138.837.140,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas															
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	7.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Mengkatip	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	6.090.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Sungai Jaya Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Janggi Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Reong Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Ugang Sayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	964.094.140,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				150 Unit	224.874.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	4.249.619.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga															
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				168 Keluarga	110.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	37.612.534.484,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			32.264.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1599 Orang	363.569.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1428 Orang	127.625.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															

							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1418 Orang	284.835.250,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7828 Orang	469.144.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18057 Orang	89.266.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75736 Orang	49.890.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							0				36883 0	167.728.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44162 Orang	88.040.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2736 Orang	112.625.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				206 Orang	151.610.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3530 Orang	40.260.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3227 Orang	80.604.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	89.288.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	176.880.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	54.344.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	83.084.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	239.526.998,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	206.169.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					16000 Orang	54.689.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					15 Orang	25.570.155,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	669.436.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					12 Dokumen	32.264.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua	-			32.264.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah					200 Orang	58.826.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					1 Dokumen	91.278.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					12 Unit	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Dokumen	836.154.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					1 Dokumen	23.388.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Unit	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					120 Orang	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					5 Orang	70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang	35.280.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN

1		02	02		2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	148.956.581,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	355.468.500,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-	33.374.000,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-		0,00	
	1	02	02		2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	33.374.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	610.000.000,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-		0,00	
	1	02	02		2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					14 Unit	60.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					13 Unit	490.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02		2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					1 Dokumen	60.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-				-	1.178.116.500,00				-		-			0,00	
	1	02	03		2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-				-	97.811.500,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-		0,00	
	1	02	03		2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					12 Orang	97.811.500,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03		2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	1.080.305.000,00				-	-	-	-		0,00	
	1	02	03		2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					150 Orang	1.080.305.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-				-	166.560.500,00				-		-	-		0,00	
	1	02	04		2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-				-	30.000.000,00				-	-	-	-		0,00	
	1	02	04		2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					1 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.224.625.739,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					0,00	UPT RSUD JARAGA SASAMEH
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	35.797.150.647,00			-					0,00	
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	35.797.150.647,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-					0,00	UPT RSUD JARAGA SASAMEH
13	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	7.425.000.000,00								0,00	
	1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	6.450.000.000,00			-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	
	1	02	02	2.01	0022		Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	6.450.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT RSUD JARAGA SASAMEH
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	975.000.000,00			-					0,00	
	1	02	02	2.02	0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	975.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					0,00	UPT RSUD JARAGA SASAMEH
14	1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-			-	1.823.132.500,00								0,00	
	1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			-	1.823.132.500,00			-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	
	1	02	03	2.02	0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	1.823.132.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT RSUD JARAGA SASAMEH
							UPT PUSKESMAS BUNTOK					4.330.253.334,00								36.820.000,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.330.253.334,00								36.820.000,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.330.253.334,00								36.820.000,00	
15	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	2.457.017.399,00								0,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	2.457.017.399,00			-					0,00	
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.457.017.399,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-					0,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK
16	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	1.866.761.935,00								36.820.000,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	1.866.761.935,00			-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		36.820.000,00	
	1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				453 Orang	36.820.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Danau Sadar Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Pamait Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Jelapat Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		36.820.000,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK

[illegible]

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan					1 Dokumen	840.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	67.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK	
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	6.474.000,00						-		0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	6.474.000,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	6.474.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BUNTOK	
						UPT PUSKESMAS BARU							1.627.464.444,00									0,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.627.464.444,00									0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.627.464.444,00									0,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	725.586.519,00						-		0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				-	725.586.519,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	725.586.519,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				-	895.923.925,00						-		0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	895.923.925,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					88 Orang	50.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					932 Orang	19.783.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					10 Orang	33.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					190 Orang	49.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	226.406.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	21.100.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS BARU	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	22.488.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7.550.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				808 Orang	7.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU					
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	84.760.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	234.311.925,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU					
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	38.950.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	5.115.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	44.060.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	50.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU					
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	5.954.000,00									0,00					
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.954.000,00									0,00					
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.954.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BARU					
						UPT PUSKESMAS SABABILAH					1.575.527.657,00								0,00					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.575.527.657,00								0,00					
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.575.527.657,00								0,00					
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	699.194.732,00									0,00					
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	699.194.732,00									0,00					
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	699.194.732,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS SABABILAH					
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	863.613.925,00									0,00					

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	30.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS SABABILAH
23	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-		-	12.719.000,00							-			0,00		
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	12.719.000,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-		0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																				
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	12.719.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS SABABILAH
							UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN						1.837.554.175,00						0,00						
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.148.054.175,00						0,00						
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.148.054.175,00						0,00						
24	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-		-	1.137.959.175,00							-			0,00		
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-	1.137.959.175,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-		0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					60 Orang	52.629.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1345 Orang	34.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					8 Orang	52.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					150 Orang	18.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	335.520.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	43.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	38.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	22.250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1 Orang	9.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	84.014.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	272.310.175,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN

	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																					
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																					
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	38.200.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																					
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	7.786.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																					
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	81.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	48.750.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	10.095.000,00								-		0,00					
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.095.000,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																					
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	10.095.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
	X					NON URUSAN											689.500.000,00								0,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											689.500.000,00								0,00		
26	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	689.500.000,00								-		0,00					
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	689.500.000,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																					
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	689.500.000,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN			
						UPT PUSKESMAS KALAHIEH											2.154.264.240,00								0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											2.154.264.240,00								0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2.154.264.240,00								0,00		
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.082.475.315,00								-		0,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.082.475.315,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																					
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.082.475.315,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS KALAHIEH				
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.064.981.925,00								-		0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.064.981.925,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																					
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					155 Orang	59.670.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS KALAHIEH				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																					

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1523 Orang	47.430.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					17 Orang	68.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					310 Orang	20.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	344.670.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1308 Orang	11.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	84.475.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	238.601.925,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	2.385.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	57.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-		6.807.000,00			-			-			0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		6.807.000,00			-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00	

	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	6.807.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS KALAHIEN
						UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE					1.429.807.400,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.429.807.400,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.429.807.400,00							0,00	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	422.535.675,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	422.535.675,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	422.535.675,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	983.119.725,00						-	0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	983.119.725,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	82.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				876 Orang	42.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	61.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	260.091.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	63.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				705 Orang	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	74.243.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	199.592.725,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	21.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	43.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	50.390.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1 Orang	4.250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	103.145.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	226.644.225,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	11.550.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	2.662.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	99.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	90.375.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-		6.641.000,00									-	0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		6.641.000,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	6.641.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PATAS I
						UPT PUSKESMAS PENDANG							2.046.020.702,00												
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.046.020.702,00												
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.046.020.702,00												
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-		974.753.777,00									-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-		974.753.777,00						Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	974.753.777,00	-		PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS PENDANG

37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-	1.061.417.925,00				-		0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	1.061.417.925,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					128 Orang	38.250.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1567 Orang	62.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					19 Orang	127.550.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					300 Orang	10.500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	223.635.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	22.695.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	30.930.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	12.210.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1 Orang	29.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	90.168.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	243.341.925,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	39.420.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	4.968.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	54.000.000,00	-		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG

	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	71.750.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	9.849.000,00					-		0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.849.000,00			-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	9.849.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS PENDANG
						UPT PUSKESMAS BABAI						1.514.031.575,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.514.031.575,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.514.031.575,00							0,00	
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	718.217.650,00					-		0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	718.217.650,00			-	-	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	718.217.650,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	791.239.925,00					-		0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	791.239.925,00			-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					52 Orang	19.900.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					749 Orang	37.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					12 Orang	72.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					200 Orang	5.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	220.820.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	33.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	5.285.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					12 Orang	5.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI

	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	48.353.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	216.491.925,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	15.670.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	8.740.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	62.630.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	4.574.000,00						-	0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.574.000,00			-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	4.574.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BABAI	
						UPT PUSKESMAS BANGKUANG						1.907.018.741,00								0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.907.018.741,00								0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.907.018.741,00								0,00	
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.017.839.316,00						-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.017.839.316,00			-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.017.839.316,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	883.280.925,00						-	0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	883.280.925,00			-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					88 Orang	56.021.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					868 Orang	11.875.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					13 Orang	35.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					210 Orang	10.393.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	339.180.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	14.485.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					13 Orang	7.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	60.603.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	188.238.425,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	1.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	28.020.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	12.690.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	40.125.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	5.898.500,00							-			0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.898.500,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-		0,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	5.898.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				0,00	UPT PUSKESMAS BANGKUANG	
						UPT PUSKESMAS MENKATIP							2.213.494.215,00											
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.213.494.215,00											

45	1	02	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.213.494.215,00								0,00		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				1.096.561.250,00							-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				1.096.561.250,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.096.561.250,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				1.113.609.965,00							-	0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				1.113.609.965,00				-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					158 Orang	74.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1547 Orang	49.240.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					20 Orang	22.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					390 Orang	30.630.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	392.064.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	8.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	35.390.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	8.010.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1938 Orang	9.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	98.620.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	218.290.965,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		0,00		UPT PUSKESMAS MENINGKATIP
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																

								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen	11.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS MENGGATIP			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																							
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen	615.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS MENGGATIP			
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																							
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan					1 Dokumen	78.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS MENGGATIP			
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																							
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					1 Dokumen	77.500.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS MENGGATIP			
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	3.323.000,00								-		-	0,00					
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	3.323.000,00							Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																							
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	3.323.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS MENGGATIP			
						UPT PUSKESMAS JENAMAS													1.898.643.904,00								0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													1.898.643.904,00								0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1.898.643.904,00								0,00		
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	772.021.979,00								-		-	0,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				-	772.021.979,00							Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																							
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	772.021.979,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				-	1.115.513.925,00								-		-	0,00					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	1.115.513.925,00							Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-		-	0,00					
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																							
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					104 Orang	55.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																							
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1241 Orang	76.013.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																							
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					14 Orang	30.760.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																							
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					230 Orang	17.460.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																							
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	298.075.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00		UPT PUSKESMAS JENAMAS			
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15.375.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	48.020.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	33.675.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				91 Orang	21.050.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	132.105.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	246.325.925,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	39.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	5.030.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	51.375.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-		11.108.000,00						-		0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		11.108.000,00				Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	11.108.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-			0,00	UPT PUSKESMAS JENAMAS		
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						570.976.690.887,18										463.673.814.769,87	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						570.976.690.887,18										463.673.814.769,87	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						570.976.690.887,18										463.673.814.769,87	
51	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-		23.369.906.882,87						-		23.369.906.882,87			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-		285.926.500,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			285.926.500,00			
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	115.036.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			115.036.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	20.890.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			20.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	12.046.789.316,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	12.046.789.316,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					173 Orang/bulan	11.504.945.816,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		11.504.945.816,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 Dokumen	404.778.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				404.778.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dokumen	87.065.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				87.065.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	142.025.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		142.025.000,00	
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				12.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					7 Laporan	62.400.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				62.400.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	12.125.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				12.125.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	242.111.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-			242.111.000,00		
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					2 Paket	141.750.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				141.750.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	21.321.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				21.321.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	20.040.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				20.040.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	59.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				59.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	903.764.662,87				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-			903.764.662,87		
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				25.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	222.260.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				222.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	61.455.912,87	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				61.455.912,87	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				12.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	407.548.750,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				407.548.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	20.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				20.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			5.477.114.104,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		5.477.114.104,00		
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	1.760.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				1.760.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																				
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					2 Unit	2.112.640.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				2.112.640.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	598.630.104,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				598.630.104,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																				
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					5 Unit	1.005.844.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				1.005.844.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.307.176.300,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		3.307.176.300,00		
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	2.208.340.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				2.208.340.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	135.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	958.836.300,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			958.836.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	965.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	965.000.000,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	180.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya															
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	285.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			285.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-				-	40.697.829.850,00						-	115.100.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi					20 Lembaga	114.108.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam																
							Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara					10 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau																
							Jumlah Danau yang Direvitalisasi					1 Danau	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					2 KM	4.600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				12.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam																
							Jumlah Check Dam yang Dibangun					3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai																

							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun					2 KM	17.125.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	1.018.355.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																
							Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun					2 Titik	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun					1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																

								Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun					1 Unit	0,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																				
								Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun					1 Dokumen	66.360.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																				
								Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun					1 Dokumen	63.450.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																				
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	21.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-		13.157.914.450,00				-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-			50.650.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																				

							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya					20 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi					20 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air																		
							Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi					1 Dokumen	2.442.016.250,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan					1 Rekomendasi	65.506.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa																		
							Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun					1 Dokumen	2.050.392.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
53	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-		19.602.854.120,00						-				21.777.854.120,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi					1 Unit	275.879.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan				280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
								Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan				100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																	
								Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.					200 Rumah Tangga	7.137.063.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan				7.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
								Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					1 Dokumen	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-				-	4.300.000.000,00				-			-		5.550.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	4.300.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-	-		5.550.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	

							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					200 M	1.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara					100 Meter	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan					24 Sistem Drainase Lingkungan	2.400.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun					3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
57	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	18.045.000.000,00				-		-			34.335.000.000,00		
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.045.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			34.335.000.000,00		
	1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar					1 Rumah Tangga	18.045.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			34.335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
58	1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	111.059.876.500,00				-		-			128.120.000.000,00	
	1	03	08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	111.059.876.500,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-	-		128.120.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																	
							Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)					0 Bangunan Gedung Negara	7.090.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan					0 Bangunan Gedung	61.875.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			61.875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					0 Bantuan Teknis	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	48.542.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			65.475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Perseetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	

							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					1 Dokumen	605.286.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
59	1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-		-			-	839.045.000,00					-			1.240.000.000,00	
	1	03	09	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	839.045.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		-	1.240.000.000,00	
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	799.045.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	09	2.01	0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan																	
							Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan					1 Orang	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
60	1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-		-			-	342.558.751.534,31					-			123.010.568.767,00	
	1	03	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-		-			-	342.558.751.534,31			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-		-	123.010.568.767,00	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	

[illegible]

							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan					8 KM	36.782.027.247,00			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			36.782.027.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan																			
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala					1,5 KM	3.000.000.000,00			Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan																			
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi					25 Meter	2.675.000.000,00			Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			2.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan																			
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi					10 KM	279.933.724.287,31			Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			60.385.541.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																			

							Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi					0 KM	5.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan																
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin					25 Jembatan	1.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan																
							Panjang jembatan yang dibangun					20 Meter	3.800.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan	-			3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	1.222.550.000,00				-		-			1.222.550.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	385.000.000,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-	-		385.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																
							Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi					80 Orang	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat"	-			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																

							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
							Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				2 Orang	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	185.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”			185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	379.250.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	379.250.000,00	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				3 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														

							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3 Orang	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.				20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan					5 Layanan Informasi	39.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			39.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	458.300.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		458.300.000,00	
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan					1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk					1 Bangunan Konstruksi	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk					25 Lembaga	78.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			78.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha					1 Badan Usaha	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota					1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	1.767.935.000,00				-			-		1.767.935.000,00	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.317.935.000,00				-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-		1.297.109.000,00	
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota					2 Dokumen	1.217.935.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			1.265.028.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																

							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat					1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			32.081.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			86.629.000,00		
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang					6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			86.629.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	350.000.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			384.197.000,00		
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					4 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			384.197.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
							DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						17.385.605.068,48								22.342.350.832,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.880.422.568,48									21.560.868.332,00	
	1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.880.422.568,48									21.560.868.332,00	
63	1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.362.078.832,00			-			-		9.420.868.332,00		
	1	04	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.087.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.087.000,00		
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	6.087.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.087.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.673.418.778,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.673.418.778,00		
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					38 Orang/bulan	5.438.578.778,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.438.578.778,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	234.840.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			234.840.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-		-	53.697.999,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		53.697.999,00	
	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	22.737.999,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			22.737.999,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	30.960.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			30.960.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-	98.650.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		113.650.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	28.750.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			28.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2 Dokumen	34.900.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			34.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					3 Orang	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		-	450.517.195,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		494.306.695,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.130.075,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		13.130.075,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.720.900,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		10.720.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.671.120,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		5.671.120,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.861.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		13.861.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16.213.100,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		16.213.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17.710.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		17.710.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	224.712.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	131.498.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	48.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			48.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	107.608.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			107.608.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
64	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-		1.055.064.750,00			-			-		1.290.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-		30.576.050,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			80.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					1 Dokumen	13.826.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus					1 Dokumen	16.750.050,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-		975.088.700,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			1.050.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					17 Unit Rumah	964.491.875,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																

							Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah					10 Rumah Tangga	10.596.825,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	49.400.000,00			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		160.000.000,00	
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					2 Laporan	17.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
							Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara					1 Sistem Informasi	32.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
65	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	768.767.500,00				-			-	1.250.000.000,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	58.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		200.000.000,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					1 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	710.767.500,00				-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-		1.050.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni															
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					30 Unit Rumah	687.767.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh															

								Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi					1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
66	1	04	04					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	1.000.000.000,00						-			1.000.000.000,00		
	1	04	04	2.01				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	1.000.000.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				1.000.000.000,00		
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
								Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					45 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
67	1	04	05					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	4.694.511.486,48							-			8.600.000.000,00	
	1	04	05	2.01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	4.694.511.486,48			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-				8.600.000.000,00		
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
								Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					1 Dokumen	769.292.186,48	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-				800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					1 Laporan	69.271.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																			

							Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					10 Lokasi	648.147.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					10 Lokasi	3.207.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							438.390.300,00									714.690.300,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							438.390.300,00										714.690.300,00	
68	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	41.020.000,00							-		76.320.000,00			
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.020.000,00				-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Good Governance	-			76.320.000,00			
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	5.320.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Good Governance	-			6.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	35.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Good Governance	-			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
69	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-			-	260.997.300,00							-		371.997.300,00			

[illegible]

							Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					6 Berita Acara	10.295.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			20.295.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
71	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-			-		11.755.000,00					-		-		21.755.000,00	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			-		11.755.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-		-		21.755.000,00	
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																	
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah					1 Dokumen	11.755.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			21.755.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
72	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-			-		114.323.000,00					-		-		224.323.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		114.323.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-		-		224.323.000,00	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1 Laporan	14.323.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-			24.323.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																	

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	60.735.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		62.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	546.182.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	320.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	329.000.000,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	120.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	125.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	130.000.000,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	75.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		78.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
75	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-				-	1.816.053.400,00						-	1.785.000.000,00	

	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	566.211.000,00				-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		580.000.000,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					0 Dokumen	25.407.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					0 Dokumen	148.494.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					0 Orang	94.760.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					0 laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		255.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					0 Orang	47.550.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	1.170.762.400,00			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-	-	1.122.000.000,00		
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0 Laporan	40.350.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					0 Laporan	60.370.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0 Laporan		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	XX	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD	-				-	180.224.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	200.000.000,00	
	X	XX	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					0 Laporan	180.224.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
77	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	14.450.967.792,00							-	14.450.967.792,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	11.235.550.242,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-		-	11.235.550.242,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						237 Orang/bulan	11.235.550.242,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			11.235.550.242,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	278.950.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-		-	278.950.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						12 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance				30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	213.950.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			213.950.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		2.866.467.550,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-	-		2.866.467.550,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	29.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			29.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	125.971.550,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			125.971.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	157.260.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			157.260.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	2.554.236.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-			2.554.236.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		70.000.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Good Governance	-	-		70.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
78	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-		6.628.818.500,00							-		6.628.818.500,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-		6.486.184.300,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-	-		6.486.184.300,00		
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					12 Dokumen	135.634.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				135.634.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan	142.634.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				142.634.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran					12 Dokumen	142.634.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				142.634.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal					12 Dokumen	5.647.122.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				5.647.122.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																	
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					105 Orang	418.159.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance				418.159.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-				142.634.200,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			142.634.200,00			
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					12 Orang	142.634.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			142.634.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						8.519.865.471,00										10.203.412.664,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.484.187.471,00										10.168.412.664,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.484.187.471,00										10.168.412.664,00		
79	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.163.080.671,00				-		-			7.662.880.884,00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	117.581.550,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			125.000.000,00			
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					12 Bulan Dokumen	19.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Bulan Laporan	97.981.550,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.712.435.552,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			4.259.550.884,00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan Orang/bulan	3.647.435.552,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			4.194.550.884,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Bulan Laporan	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	7.124.800,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			8.500.000,00	
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Bulan Dokumen	7.124.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	250.202.050,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			289.000.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Bulan Paket	6.995.550,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Bulan Paket	39.539.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			42.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Bulan Paket	28.219.300,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			30.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

[illegible]

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan Laporan	142.809.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Bulan Laporan	692.830.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			692.830.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-				-	425.733.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	550.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					10 Unit Unit	325.733.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit Gedung Kantor Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi "Belom Bahadat" Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
80	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-				-	2.321.106.800,00							-		2.505.531.780,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-				-	65.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-		-	71.500.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
								Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun					137914 Orang	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-			71.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					15 Dokumen Dokumen	54.388.100,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal				60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					6 Dokumen Dokumen	126.280.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal				135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	X					NON URUSAN												35.678.000,00						35.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												35.678.000,00						35.000.000,00	
81	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	35.678.000,00								-		35.000.000,00		
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					-	35.678.000,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			-		35.000.000,00		
	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					60 Orang Orang	35.678.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
						DINAS SOSIAL												10.907.095.154,40						11.376.095.154,40	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												10.907.095.154,40						11.376.095.154,40	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												10.907.095.154,40						11.376.095.154,40	
82	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	6.527.095.154,40								-		6.661.095.154,40		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-	150.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			-		155.000.000,00		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik					155.000.000,00	DINAS SOSIAL	

[illegible]

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					6 Unit	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		530.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	542.000.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	370.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		370.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		280.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	315.000.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 Unit	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
106012.090009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
106012.090010Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-				-	100.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		125.000.000,00	
106012.130001Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																							
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
83	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-				-	700.000.000,00							-		735.000.000,00	
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-				-	100.000.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-	-		110.000.000,00	
106022.010002Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																							
								Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	600.000.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-	-		625.000.000,00	
106022.030003Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																							
								Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
106022.030004Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																							

							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Lembaga	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pengurangan tingkat kemiskinan masvarakat	-			500.000.000,00	DINAS SOSIAL	
84	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	1.200.000.000,00					-				1.335.000.000,00	
	1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	700.000.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			785.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal	-			325.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	500.000.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			550.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan				550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
85	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	1.830.000.000,00						-			1.895.000.000,00	
	1	06	05	2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	80.000.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	-			85.000.000,00	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																	
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	-				85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.750.000.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua	-	-			1.810.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					0 Orang	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua	-				160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				1.550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan					0 Usulan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				100.000.000,00	DINAS SOSIAL
86	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	450.000.000,00						-			500.000.000,00	
	1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	-	-			445.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penvediaan Makanan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	-			170.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-				-	50.000.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	-	-		55.000.000,00			
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	-			55.000.000,00	DINAS SOSIAL		
87	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-				-	200.000.000,00						-		250.000.000,00			
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-				-	200.000.000,00			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkuat ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-	-		250.000.000,00			
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					0 Makam	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkuat ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-			250.000.000,00	DINAS SOSIAL		
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.034.364.141,88									0,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.034.364.141,88										0,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.955.455.902,88										0,00	
88	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	4.748.255.902,88						-		0,00			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	75.776.000,00			-	-	-	-		0,00			
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	5.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	65.426.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	5.050.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.693.532.558,88			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3.550.888.558,88	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	9.298.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	133.346.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.150.500,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	50.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	5.000.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	50.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang	50.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	263.689.444,00			-	-	-	-	0,00	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	38.370.880,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	9.195.400,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	1.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	90.123.666,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	123.596.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0 Dokumen	903.498,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	8.300.000,00			-	-	-	-	0,00	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	3.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	50.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.466.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	4.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	79.966.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	395.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.841.400,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0 Unit	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	102.230.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	41.500.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	24.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	10.111.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	500.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					0 Laporan	500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	35.000.000,00						-	0,00	

[illegible]

							Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTP Kewenangan Provinsi													
							Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KTP Kewenangan Provinsi				5 orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KTP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah kebijakan pencegahan KTP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				1 Kebijakan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	32.000.000,00			-	-	-	0,00	
	2	08	03	2.02	0003	8)layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&													
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				12 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12 Orang	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				12 orang	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12 Orang	7.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				12 orang	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.200.000,00			-	-	-	0,00	
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota													

								Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan					20 Orang	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek					5 orang	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan					1 Dokumen	200.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
91	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	49.000.000,00				-				-		0,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.000.000,00				-				-		0,00	
	2	08	04	2.01	0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																	
							Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					5 Lembaga	4.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Kebijakan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																	
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Orang	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00				-				-		0,00	
	2	08	04	2.02	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan					5 Lembaga	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Lembaga	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas					5 Lembaga	5.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota					5 Lembaga	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
92	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-				-	6.000.000,00				-					-		0,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	6.000.000,00				-					-		0,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia					1 Dokumen	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak																			
							Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak					30 Lembaga	2.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA																			
							Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA					30 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
93	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-				-	21.000.000,00				-					-		0,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	6.000.000,00				-					-		0,00	
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Lembaga	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Laporan	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek					5 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)					5 Lembaga	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan					5 Lembaga	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
94	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	30.000.000,00						-	0,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTA Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTA Kewenangan Kab/Kota					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota					12 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota					12 Orang	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					12 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.078.908.239,00							0,00	

95	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	213.803.000,00	-	-	-	-	-	0,00		
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	-	53.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00		
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
						Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					3 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana													
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					2 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal													
						Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					2 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan													
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan					12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	160.803.000,00	-	-	-	-	-	0,00		
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					12 Laporan	96.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOXB-KB	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
						Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan					2 Dokumen	4.753.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota													
						Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk					2 Laporan	50.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana													
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana					2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain													

							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				1 Unit	10.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	1.774.780.000,00				-				-	0,00		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.319.850.000,00				-				-	0,00		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				0 Laporan	744.800.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																	
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit	50.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	330.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				0 Laporan	120.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0 Dokumen	125.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	70.850.000,00				-				-	0,00		
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																	
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				6 Unit	50.000,00		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				313 Orang	55.800.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-					0,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	

							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					93 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	234.080.000,00			-			-			0,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					78 Laporan	11.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					695 Orang	192.230.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																	
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP					2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB					0 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					39 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					2 Orang	50.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					111 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																	

								Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					15 Orang	50.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																			
								Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan					3 Kegiatan	50.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-				-	150.000.000,00					-						0,00	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																			
								Jumlah DASHAT di Kampung KB					0 Unit	82.800.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
								Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					0 Kampung	67.200.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-				-	1.090.325.239,00					-						0,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-				-	208.725.239,00					-						0,00	
	2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																			
								Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia					0 Kegiatan	10.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			
								Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					0 Laporan / Dokumen	3.725.239,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					0 Laporan	15.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					0 Unit	130.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0 Orang	10.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																			

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					0 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)					0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan					0 Orang	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					0 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk					0 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	-	881.600.000,00			-	-	-	-		0,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					0 laporan	303.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					0 laporan	363.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga																
							Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga					0 Laporan	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga																
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga					0 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	1.341.982.179,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-	-		1.341.982.179,00		
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					13 Paket	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					15 Paket	831.982.179,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		831.982.179,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					720 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-		330.000.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-	-		330.000.000,00	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	125.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	105.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	22.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	55.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
99	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	200.000.000,00			-		-			200.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-		200.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya															
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				15 Unit	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
100	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	1.220.000.000,00			-		-			1.220.000.000,00	

2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-		-			-	425.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	425.000.000,00	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					6 Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan					5 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan																
						Informasi Stok Pangan					12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota					12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	650.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	650.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					40 Ton	650.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	145.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	145.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal															
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					16 Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun															
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun					9 Laporan	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		-	45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
101	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	70.000.000,00						-		70.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota					12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.879.013.412,00									7.879.013.412,00		
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.879.013.412,00										7.879.013.412,00	
103	3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	3.247.073.400,00							-			3.247.073.400,00	
	3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	174.999.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-		174.999.000,00		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					21 Laporan	24.999.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			24.999.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					44 Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	02	2.01	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang					1430 Batang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

[illegible]

							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar					5 Laporan	36.052.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			36.052.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-		60.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan					2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar					4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	1.328.522.400,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-		1.328.522.400,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																

							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					1630 Ekor	1.328.522.400,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah				1.328.522.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
104	3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	3.472.500.000,00					-			3.472.500.000,00	
	3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.370.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-		1.370.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan					3400 Ha	1.200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																
							Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikelola dan dimanfaatkan					20 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																

[illegible]

							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					1 Unit	102.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			102.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
105	3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	170.000.000,00					-	-			170.000.000,00	
	3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-			100.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	04	2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	70.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-			70.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					8 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan																	

							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi					5 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
106	3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	20.000.000,00						-	-			20.000.000,00	
	3	27	05	2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-			20.000.000,00	
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					5 Ha	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
107	3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	10.000.000,00						-	-			10.000.000,00	
	3	27	06	2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-			10.000.000,00	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-				10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]

							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya					12 Orang	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
							Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian					5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP											14.488.284.011,00						16.243.267.600,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											14.488.284.011,00						16.243.267.600,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											14.488.284.011,00						16.243.267.600,00	
109	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.011.967.600,00						-		8.053.267.600,00				
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	160.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	184.000.000,00				
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

											Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
											Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																					
											Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																					
											Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
											Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.257.767.600,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	5.782.767.600,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5.057.767.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		5.557.767.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									-					

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			8.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			8.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			7.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	48.500.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-		61.000.000,00		
	2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			7.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			8.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			40.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	218.500.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-		246.000.000,00		
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					90 Paket	103.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			110.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					8 Orang	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	545.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	663.500.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-		120.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	140.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan				60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-				-	582.200.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-		616.000.000,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	327.200.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	360.000.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	-	-	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
110	2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	500.000.000,00					-		600.000.000,00	
	2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	500.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
111	2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	1.280.000.000,00					-		1.420.000.000,00	
	2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.000.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	1.110.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordniasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-		120.000.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					1 Titik	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-		190.000.000,00	
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan						1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																			
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan						1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-				-	80.000.000,00							-				100.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-				-	80.000.000,00				-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-			100.000.000,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																			
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun						1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Ha	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

113	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-		-			-	60.000.000,00					-		90.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-		-			-	30.000.000,00				3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				2 Usaha	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	30.000.000,00				-		-	40.000.000,00	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-		-			-	260.000.000,00					-		290.000.000,00	

	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-					260.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		290.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				32 Badan Usaha	180.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
115	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-		-	40.000.000,00				-		-	60.000.000,00		
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-		-	20.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	-	-	20.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00		
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
116	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	70.000.000,00					-	-	100.000.000,00		
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	70.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	100.000.000,00		
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	-	-	0 Orang	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

								Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH						1 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
117	2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-		-				-	30.000.000,00						-			40.000.000,00		
	2	11	09	2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-				-	30.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		-		40.000.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																				
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						0 Entitas	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
118	2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-		-				-	160.000.000,00						-			180.000.000,00		
	2	11	10	2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-		-				-	160.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		-		180.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																				
								Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola						5 Pengaduan	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0 Ton	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-			-	30.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan	-	-	40.000.000,00			
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											6.175.775.220,08		5.851.438.656,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6.175.775.220,08		5.851.438.656,00			
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											6.175.775.220,08		5.851.438.656,00			
120	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.853.256.960,08						-	4.528.920.396,00			

[illegible]

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					404 Orang/bulan	2.945.907.006,08	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			2.945.907.006,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	123.240.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			131.760.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	3.999.900,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			3.999.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordniasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					12 Dokumen	2.024.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			2.024.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordniasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	15.000.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			15.000.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	18.505.100,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	20.500.000,00	
	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0003	Koordniasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					3 Laporan	3.005.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barane Milik Daerah pada SKPD															

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.999.400,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.500.200,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	114.300.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		115.800.000,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	32.250.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			32.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.500.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	76.050.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			77.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	882.428.190,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		696.360.240,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8.404.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			8.404.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	251.991.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			251.991.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			56.632.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	61.556.950,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	13.155.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			13.155.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	10.301.440,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			10.301.440,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					6 Laporan	23.915.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	351.876.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			355.876.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	157.728.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	0,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	265.645.464,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			282.940.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			3.840.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	183.884.664,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.160.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				150 Laporan	75.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		75.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	271.480.650,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	100.000.000,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	31.553.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	105.410.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	25.150.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.367.050,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
121	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-		-	346.662.700,00						-	348.662.700,00	
	2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	248.187.400,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	249.187.400,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				2000 Dokumen	248.187.400,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		249.187.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-				-		83.999.800,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				84.999.800,00	
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						8 Laporan	83.999.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				84.999.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-				-	14.475.500,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-			14.475.500,00	
	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk						8 Laporan	14.475.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				14.475.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
122	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-				-	389.999.910,00							-	-			235.999.910,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-				-	161.999.810,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-			161.999.810,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						4 Dokumen	161.999.810,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				161.999.810,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-				-	228.000.100,00			-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-			74.000.100,00	
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						0 Laporan	155.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														-					

							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					10 Laporan	73.000.100,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			74.000.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
123	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	500.229.150,00						-	-		652.229.150,00	
	2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	376.521.400,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-		377.521.400,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					12 Dokumen	193.608.700,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			193.608.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					10 Dokumen	182.912.700,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			183.912.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	72.392.750,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-		73.392.750,00	
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					12 Dokumen	72.392.750,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			73.392.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.04			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	51.315.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-	-		201.315.000,00	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					12 Laporan	51.315.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-			51.315.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																	

							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					1 Laporan	0,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
124	2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	85.626.500,00							-			85.626.500,00				
	2	12	05	2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	85.626.500,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-		-		85.626.500,00				
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																					
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun					12 Dokumen	85.626.500,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan	-				85.626.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							155.663.943.577,76												166.211.943.577,76		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							155.663.943.577,76												166.211.943.577,76		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							155.663.943.577,76												166.211.943.577,76		
125	2	13	01				PROGRAM PENUNTIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.682.488.594,56							-				7.879.488.594,56			
	2	13	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	98.542.849,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		99.542.849,00				
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	98.542.849,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				99.542.849,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.737.261.129,56				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		5.848.261.129,56				
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/bulan	5.566.232.129,56		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.666.232.129,56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																					
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	70.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				71.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					

[illegible]

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			31.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	61.880.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			62.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	300.339.616,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			310.339.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	98.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	100.000.000,00		
	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	48.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			49.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	730.740.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	752.740.000,00		
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	10.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			11.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	140.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			150.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 Laporan	15.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			16.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	565.740.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			575.740.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	215.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	228.000.000,00		
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						10 Unit	100.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			110.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						3 Unit	15.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			16.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				

							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	89.747.500,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	100.747.500,00	
	2	13	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	89.747.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		100.747.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
126	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	1.231.483.444,00			-		-	-	1.332.483.444,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	1.231.483.444,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-	-	1.332.483.444,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				2 Desa	26.012.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-		27.012.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				86 Unit	1.205.470.944,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan Good Governance	-		1.305.470.944,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
127	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	131.445.000,00					-	-	133.445.000,00	

	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	-	-	131.445.000,00	-	-	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal	-	-	133.445.000,00	-
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	-	5 Dokumen	32.572.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal	-	-	33.572.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	1 Dokumen	98.873.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-	-	99.873.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
128	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	138.548.855.039,20						-	-	148.583.855.039,20	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	138.548.855.039,20				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	148.583.855.039,20	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2 Dokumen	110.704.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	120.704.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	1 Dokumen	37.689.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	38.689.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	2 Dokumen	137.525.584.039,20	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	147.525.584.039,20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	-	172 Orang	226.350.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	236.350.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	-	6 Laporan	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		-	-					-		-	-		

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					86 Dokumen	52.316.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal	-			53.316.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					3 Laporan	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					4 Laporan	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					6 Dokumen	28.644.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			29.644.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					86 Orang	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa					25 Desa	444.025.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			454.025.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					6 Dokumen	73.541.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal	-			74.541.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
129	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	-	-	-	8.069.671.500,00					-	-	-	8.282.671.500,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					1 Laporan	0,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa					1 Dokumen	0,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			0,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					4 Dokumen	1.368.989.500,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah	-			1.468.989.500,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
						DINAS PERHUBUNGAN												8.891.953.530,64						8.891.953.530,64		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												8.891.953.530,64						8.891.953.530,64		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												8.891.953.530,64						8.891.953.530,64		
130	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	8.230.942.630,64				-		-		-		8.230.942.630,64			
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	64.952.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-	-		64.952.000,00				
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	39.952.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-			39.952.000,00		DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	6.392.329.194,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	6.392.329.194,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					124 Orang/bulan	6.392.329.194,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		6.392.329.194,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	15.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	15.000.000,00	
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-				-	15.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	15.000.000,00	
	2	15	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah															
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah					2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah															

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	244.578.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			244.578.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.034.730.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		1.034.730.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	128.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			128.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	896.430.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			896.430.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	278.960.094,64			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		278.960.094,64	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 Unit	271.460.094,64	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			271.460.094,64	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	7.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
131	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	255.592.800,00						-		255.592.800,00	

[illegible]

								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	12.519.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			12.519.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			-	54.800.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			54.800.000,00	
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
								Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	19.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			19.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	25.180.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		25.180.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
132	2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-		-	405.418.100,00					-		405.418.100,00	
	2	15	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	45.217.500,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	45.217.500,00	
	2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	45.217.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		45.217.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.02			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	30.400.600,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-	-	30.400.600,00	
	2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	30.400.600,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-		30.400.600,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					5 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					5 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Dokumen Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	4.196.692.883,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		5.201.532.833,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					49 Orang Orang/bulan	3.939.692.883,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			4.939.692.833,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					3 Dokumen	207.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			206.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket Paket	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			99.709.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan Laporan	210.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			208.354.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	8.964.600.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		362.695.600,00	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	34.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			34.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit Unit	180.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit Unit	8.420.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			19.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit Unit	180.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			100.963.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit Unit	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			58.032.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	451.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		451.000.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

[illegible]

							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas Komunitas	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
							Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan Laporan	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		7.710.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan Permohonan	304.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		304.082.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi Rekomendasi	84.420.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		84.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi														
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100% Persentase	27.858.700,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				44 Media Media	4.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten														
							Jumlah Konten Informasi Publik				100 Konten Konten	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				3 Orang Orang	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
135	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-		-	1.130.500.000,00						-		689.534.000,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	50.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	25.204.000,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		25.204.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2 Dokumen Dokumen	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.				100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					2000 Data Data	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
137	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-				-	110.000.000,00						-		130.000.000,00		
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	110.000.000,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	130.000.000,00		
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																	
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.					100% %	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																	
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik					4 Orang	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							120.000.000,00									87.534.000,00	
138	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-				-	120.000.000,00						-		87.534.000,00		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	90.000.000,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	56.886.000,00		
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			20.484.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan																	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					1 Laporan Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.222.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian					30 Perangkat Perangkat Daerah	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			20.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	30.000.000,00				5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	30.648.000,00		
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																	

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	57.192.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			57.192.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	464.846.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	201.074.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		500.000,00	
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	201.074.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	385.437.500,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		1.129.437.500,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					5 Laporan	96.837.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			96.837.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	273.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			1.017.600.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	122.450.320,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		122.450.320,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					10 Unit	92.450.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				92.450.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	30.000.320,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				30.000.320,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
140	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-				-		25.000.000,00							-			25.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-		25.000.000,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-		-		25.000.000,00	
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
								Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					2 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-				25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
141	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-				-		37.978.200,00							-			37.978.200,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-				-		37.978.200,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-		-		37.978.200,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
								Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					5 Unit Usaha	27.278.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-				27.278.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
								Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan					5 Unit Usaha	10.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-				10.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
142	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-				-		68.016.800,00							-			10.016.800,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-		68.016.800,00				-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-		-		10.016.800,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
								Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					93 Unit Usaha	68.016.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”	-				10.016.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																			

[illegible]

							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					3545 Unit Usaha	11.590.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			11.590.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	0005	Koordniasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					1720 Orang	12.499.660,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			12.499.660,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					3545 Unit Usaha	92.134.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			92.134.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					11464 Unit Usaha	242.878.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			242.878.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata					11464 Unit Usaha	29.891.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-			29.891.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	

							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				25 Orang	36.920.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		36.920.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
146	2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-		-	169.434.600,00					-	-	169.434.600,00	
	2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-		-	169.434.600,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-	-	169.434.600,00	
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
							Jumlah yang Difasilitasi				1720 Orang	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				4 Unit Usaha	159.434.600,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.	-		159.434.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.680.549.364,00							2.431.005.364,00	
	3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.733.594.954,00							1.484.050.954,00	
147	3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-		-	32.996.100,00					-	-	32.996.100,00	
	3	30	02	2.06			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	32.996.100,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	32.996.100,00	
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				5 Laporan	32.996.100,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		32.996.100,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
148	3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-		-	498.941.778,00					-	-	498.941.778,00	

	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-				-	457.570.180,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		457.570.180,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					2 Unit	358.192.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		358.192.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	99.378.180,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		99.378.180,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-				-	41.371.598,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		41.371.598,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					25 Dokumen	41.371.598,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		41.371.598,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
149	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-				-	586.894.876,00						-		586.894.876,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-				-	487.204.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		487.204.200,00	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					7 Laporan	487.204.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		487.204.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-				-	99.690.676,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		99.690.676,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					6 Laporan	67.716.700,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		67.716.700,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					6 Laporan	31.973.976,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		31.973.976,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
150	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-				-	208.668.200,00						-		208.668.200,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					3 Dokumen	21.617.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			21.617.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																				
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					3 Dokumen	49.222.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			49.222.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
153	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-		862.289.610,00				-		-		862.289.610,00					
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-		862.289.610,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		862.289.610,00				
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINasi)																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINasi)					10 Dokumen	862.289.610,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			862.289.610,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							8.791.235.378,00												8.791.235.378,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.791.235.378,00												8.791.235.378,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.791.235.378,00												8.791.235.378,00	
154	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-		7.801.235.378,00				-		-		7.801.235.378,00					
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-		5.026.269.714,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		5.026.269.714,00				
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	5.026.269.714,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			5.026.269.714,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-		10.873.200,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		10.873.200,00				
	2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																				
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1 Laporan	10.873.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			10.873.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-		235.914.600,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		235.914.600,00				
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	104.630.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			104.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	31.284.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			31.284.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	702.963.844,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	702.963.844,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 Paket	144.781.344,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		144.781.344,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	51.314.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		51.314.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					6 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kuniungan Tamu															

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70 Laporan	302.868.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			302.868.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	964.660.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		964.660.000,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					9 Unit	129.980.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			129.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	334.680.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			334.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	590.554.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		590.554.000,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	3.302.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			3.302.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	320.012.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			320.012.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	267.240.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			267.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	270.000.020,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	270.000.020,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	110.000.020,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		110.000.020,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
155	2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-		-	135.000.000,00						-	135.000.000,00	
	2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	100.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-	-	100.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					155 Pelaku Usaha	130.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					155 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
158	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	200.000.000,00				-		-			200.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			200.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					15 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					25 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																					
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					350 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
159	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-				-	25.000.000,00							-		25.000.000,00					
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	25.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	25.000.000,00					
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																					
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					155 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA													14.969.059.318,64						91.158.600,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													14.054.239.718,64							91.158.600,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													12.350.915.218,64							91.158.600,00	
160	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	5.892.419.181,64							-		91.158.600,00					
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	91.158.600,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	91.158.600,00					
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	42.161.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			42.161.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA				
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	48.997.100,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			48.997.100,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA				

	2	19	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun					1 Dokumen	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	4.782.197.395,64			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00		
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						63 Orang/bulan	3.911.727.307,64	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 Dokumen	667.660.088,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	202.810.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	16.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00		
	2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	16.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	100.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00		
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						2 Paket	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	372.352.316,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	0,00		
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	77.633.375,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	52.597.400,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	242.121.541,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	196.159.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	196.159.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	160.573.670,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	8.009.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	126.901.920,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	15.290.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	10.372.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	173.478.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	0,00	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	53.443.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	120.035.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
161	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	2.291.099.500,00							-	0,00	
	2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	2.219.008.000,00			-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-		-	0,00	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota					1 Dokumen	166.546.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Good Governance	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					30 Orang	129.170.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda					2 Orang	256.103.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					1 Kegiatan	145.435.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda					1 Orang	111.753.400,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					1 Unit	1.410.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.091.500,00			-	-	-	0,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota													
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	2.512.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				30 Orang	69.579.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
162	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-		-	4.167.396.537,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	661.248.577,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	438.852.660,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	222.395.917,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	200.831.600,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	100.831.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				10 Orang	99.999.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	137.727.200,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah													
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													
						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	104.497.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota													
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	33.230.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-		-	2.837.713.760,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.837.713.760,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-		-	329.875.400,00			-	-	-	0,00		
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan													
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	25.247.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional													
						Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	304.627.900,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.703.324.500,00						0,00		
163	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-		-	1.481.968.000,00						0,00		

	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.099.668.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal		-		0,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				7 Objek		157.948.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	02	2.01	0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan																
						Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina				1 Lembaga		941.720.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		382.300.000,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan		382.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
164	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-		-		0,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		0,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				0 Sertifikat		0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
165	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-		-		0,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		0,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1 Orang		0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
166	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-		-		148.054.000,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		-		43.342.000,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek		43.342.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		-		104.712.000,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				7 Objek		104.712.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
167	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-		-		73.302.500,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-		-		73.302.500,00			-		-	-	-		0,00	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit		73.302.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	06	2.01	0014	Pengelolaan Operasional Museum																
						Jumlah Layanan Operasional Museum				1 Layanan		0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						914.819.600,00			-						0,00	
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						914.819.600,00			-						0,00	

168	3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-								301.074.200,00												0,00	
	3	26	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-								20.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-				-	0,00							-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1 Lokasi	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-				-	260.660.000,00							-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						3 Lokasi	60.660.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						1 Unit	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	20.414.200,00							-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																								
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha						1 Laporan	20.414.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
169	3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-				-	541.450.500,00														-	0,00	
	3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-				-	541.450.500,00							-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						1 Dokumen	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						1 Dokumen	19.107.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																								
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1 Dokumen	16.525.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						1 Kegiatan	409.418.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																								
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						1 Promosi	96.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
170	3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-				-	31.430.000,00														-	0,00	
	3	26	04	2.02			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-				-	31.430.000,00							-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif						1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																								

							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	19.430.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA			
171	3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-		-	40.864.900,00					-		0,00				
	3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-		-	40.864.900,00				-	-	-	0,00				
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				2 Orang	14.700.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA			
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				2 Orang	26.164.900,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA			
	3	26	05	2.02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-		-	0,00				-	-	-	0,00				
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				1 Orang	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA			
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																	
							Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	0,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA			
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN													3.816.258.276,00		3.817.470.026,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																3.817.470.026,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																3.712.258.276,00	
172	2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.539.121.876,00						-	3.539.121.876,00				
	2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	28.288.200,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	28.288.200,00				
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	8.288.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		8.288.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	2.550.852.136,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		2.550.852.136,00			
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/bulan	2.550.852.136,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		2.550.852.136,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	7.263.700,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			7.263.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2160 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					85 Laporan	160.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			160.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	250.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		250.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	318.280.340,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		318.280.340,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	9.591.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			9.591.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	158.689.340,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			158.689.340,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	36.760.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		36.760.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	23.510.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		23.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	8.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	5.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		5.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
173	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	173.136.400,00						-	174.348.150,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	87.405.600,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-	88.617.350,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				133 Perpustakaan	12.117.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		13.329.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				252 Perpustakaan	10.853.375,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		10.853.375,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				10 Layanan	18.962.375,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		18.962.375,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				89 Perpustakaan	8.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		8.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Orang	17.586.100,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		17.586.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	4.062.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		4.062.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					1 Eksemplar	10.828.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			10.828.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK					2 Perpustakaan	4.696.250,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			4.696.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	85.730.800,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			85.730.800,00		
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan					10 Perpustakaan	34.839.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			34.839.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					15 Orang	50.891.800,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			50.891.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			
													104.000.000,00										104.000.000,00		
174	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																			
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	104.000.000,00					-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			104.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	-	-				-	70.395.000,00					-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			70.395.000,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					3000 Berkas	15.395.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			15.395.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					3000 Berkas	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Laporan	50.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	5.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.000.000,00		
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			

							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					3120 Arsip	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	28.605.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		28.605.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN															
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					960 Pengguna	8.605.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		8.605.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN														6.341.600.058,94	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														6.341.600.058,94	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														6.341.600.058,94	
175	3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	3.483.860.707,93			-			-	3.579.600.058,94	
	3	25	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	120.691.450,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-		133.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	100.691.450,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan Good Governance	-		23.000.000,00	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.071.975.607,93			-	-	-	-	2.081.975.607,94	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	1.951.975.607,93	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.951.975.607,94	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	40.420.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	45.000.000,00	
3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	40.420.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	88.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	94.000.000,00	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	73.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	132.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			135.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	197.332.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			199.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	258.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		266.000.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					30 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	128.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	147.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		174.000.001,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			42.000.001,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			92.000.000,00	DINAS PERIKANAN
176	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	1.059.000.000,00						-	1.111.500.000,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	407.500.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	412.500.000,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				15 Unit	198.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				15 Unit	199.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-		200.500.000,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						1 Layanan	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan				50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-						-	10.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				20.000.000,00		
	3	25	03	2.04	0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap																			
							Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan						5 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-				20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
177	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-						-	1.234.500.000,00							-			1.301.500.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-						-	462.500.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				482.500.000,00		
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																			
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas						2 Kelompok	208.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-				220.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				

							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan					1 Kelompok	195.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha															
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya					1 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah			12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan															
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					2 Kelompok	49.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-		772.000.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-	819.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-		270.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		18.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	95.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat															
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Unit	197.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-		199.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat															
							Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	205.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
178	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	113.280.000,00					-		116.000.000,00		

	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	113.280.000,00			-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-	116.000.000,00	
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				1 Pelaku Usaha	64.280.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-	65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				1 Pelaku Usaha	49.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	-	-	51.000.000,00	DINAS PERIKANAN
179	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-		-	200.000.000,00						-	-	233.000.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-		-	20.000.000,00				-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal	-	-	23.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal	-	-	23.000.000,00	DINAS PERIKANAN

3		25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	-	30.000.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-	-	35.000.000,00			
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																	
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					3 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	150.000.000,00			-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal	-	-	175.000.000,00		
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Ton	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Mendorong Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Penguatan ketahanan pangan daerah	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
					DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA											7.214.852.928,00						0,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6.997.754.928,00						0,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											6.997.754.928,00						0,00

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	134.469.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	109.779.850,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	1.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					19 Unit	108.779.850,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	646.182.400,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	128.382.400,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	517.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	279.980.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	39.990.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	220.680.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	19.310.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
181	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	53.532.000,00						-	0,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	53.532.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-	-	0,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	31.285.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				25 Orang	22.247.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
182	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	221.700.500,00						-	0,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	205.983.500,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-	-	0,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	169.471.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				8 Lembaga	36.512.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

[illegible]

							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				2 Orang	11.060.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			11.749.000,00			-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
							Jumlah CPI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				1 Orang	11.749.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
184	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	1.528.715.650,00					-		0,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	83.310.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10.555.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	11.856.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				7 Laporan	60.898.700,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.445.405.450,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	36.322.250,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara	31.741.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

									Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	30.260.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																						
									Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1 Lembaga	8.303.300,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																						
									Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					7089 Orang	1.338.778.400,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									217.098.000,00											0,00		
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									217.098.000,00												0,00	
185	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-			-	192.878.000,00									-			0,00			
	3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		-	-			-	192.878.000,00					-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		-		0,00			
	3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																						
									Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain					1 Dokumen	192.878.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
186	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-			-	1.000.000,00									-			0,00			
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-			-	1.000.000,00					-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-		-		0,00			
	3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																						
									Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)					1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
187	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-			-	23.220.000,00									-			0,00			
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		-	-			-	23.220.000,00					-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-		0,00			
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																						
									Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					25 Kepala Keluarga	1.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																						

							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan					2 Satuan Permukiman	22.220.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.				0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
							SEKRETARIAT DAERAH						78.470.188.060,00									74.300.188.060,00	
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						78.470.188.060,00									74.300.188.060,00	
	4	01					SEKRETARIAT DAERAH						78.470.188.060,00									74.300.188.060,00	
188	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-			55.905.664.775,00								-	51.735.664.775,00	
	4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-			127.835.900,00				-		-		-	127.835.900,00	
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	127.835.900,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					127.835.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-			21.311.131.593,00				-		-		-	21.311.131.593,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	21.311.131.593,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					21.311.131.593,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-			2.970.000.000,00				-		-		-	0,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	970.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			8.807.385.250,00				-		-		-	8.807.385.250,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	4.050.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					4.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	457.385.250,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					457.385.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			500.000.000,00				-		-		-	0,00	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			7.402.000.000,00				-		-		-	7.402.000.000,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36 Laporan	102.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1.400.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-					1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	133.539.750,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.539.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	694.138.735,00			-	-	-	-	694.138.735,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	133.931.900,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.931.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				36 Dokumen	275.660.885,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.660.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				8 Orang	284.545.950,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		284.545.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	130.044.000,00			-	-	-	-	130.044.000,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	38.264.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.264.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				5 Dokumen	27.727.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.727.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				5 Dokumen	64.053.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		64.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD						43.545.258.805,00							0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						43.545.258.805,00							0,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						43.545.258.805,00							0,00	
191	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	23.574.058.805,00						-	0,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	0,00	
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-			-	3.132.064.711,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	0,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan		2.778.564.711,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen		350.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan		3.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-		-		25.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	0,00	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan		25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		-		255.375.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	0,00	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket		171.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen		84.375.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		2.917.835.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		0,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	2.242.835.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		870.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		0,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Unit	275.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	155.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					50 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					50 Unit	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-				-	4.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	
	4	02	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-				-	10.946.301.594,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					12 Orang/Bulan	10.262.821.594,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																

							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					1 Paket	476.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					25 Orang	207.480.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-				-	4.195.920.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		0,00	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					12 Laporan	1.333.120.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					12 Paket	2.862.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
192	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-				-	19.971.200.000,00							-		0,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-				-	800.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		0,00	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					12 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-				-	4.666.400.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		0,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					2 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli															
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					16 Orang	815.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi															
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					5 Orang	95.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD															
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					15 Dokumen	2.956.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-		4.454.800.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen	2.954.800.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-		10.050.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					12 Dokumen	10.000.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD															

[illegible]

							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Berita Acara Berita Acara	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					1 dokumen Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	5.528.985.272,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	6.081.805.400,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					59 Orang/bulan	5.220.663.272,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.742.729.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 Dokumen	254.732.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			280.205.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	14.927.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.419.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	12.955.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			14.250.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	8.363.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			9.199.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	12.344.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 dokumen Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	31.737.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			34.911.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	16.448.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			18.092.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket Paket	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket Paket	16.773.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					24 Laporan	18.150.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			22.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75 Laporan	410.216.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			412.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	8.972.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			9.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	87.630.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	106.160.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	72.630.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			89.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32.690.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				34.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
194	5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-		-		1.297.679.000,00						-			1.372.446.900,00		
	5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-		-			995.384.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-		1.039.922.400,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	95.190.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				49.709.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3 Berita Acara	33.939.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				37.332.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	38.305.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				42.135.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				30 Usulan	110.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	717.950.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				789.745.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-			91.692.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-		100.861.200,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				31 Dokumen	4.096.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				4.505.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				31 Orang	73.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-				80.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					1 Buku	14.096.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			15.505.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	210.603.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.		-	231.663.300,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					4 Laporan	72.127.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			79.339.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					4 Laporan	138.476.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			152.323.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
195	5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	1.876.320.500,00						-	1.942.337.100,00	
	5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	831.115.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.		-	891.783.900,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	80.280.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			60.808.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					7 Laporan	38.350.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			42.185.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					7 Laporan	34.649.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			38.113.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					7 Laporan	43.913.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			48.304.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen	201.520.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.			221.672.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															

							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					9 Laporan	116.378.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			132.756.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					9 Laporan	93.450.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			102.795.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					9 Laporan	222.575.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			245.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-		420.451.500,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		419.153.200,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen	153.932.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			141.825.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					6 Laporan	28.984.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			31.878.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					2 Laporan	66.838.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			68.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	132.522.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			134.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					2 Laporan	4.989.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			6.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					6 Laporan	11.966.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			13.250.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 Laporan	16.220.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			18.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-	-				-	624.754.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	631.400.000,00		
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 dokumen Dokumen	112.830.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			68.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan Laporan	4.400.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			4.800.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan Laporan	111.413.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			122.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					1 Laporan Laporan	290.651.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			320.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 dokumen Dokumen	36.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			39.600.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah																			
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah					1 Laporan Laporan	4.530.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			5.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah																			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah					1 Laporan Laporan	35.859.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			39.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah																			

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					1 dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					1 dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			223.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					1 dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1 dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					1 dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	698.122.294,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		1.346.000.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 dokumen Dokumen	198.122.294,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			374.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					1 Laporan Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					1 Laporan Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan Laporan	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
197	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-			-	935.000.000,00				-		-			1.028.500.000,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	240.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		264.000.000,00	
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1 Laporan Laporan	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset					1 Naskah Naskah	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1 Laporan Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1 Laporan Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1 Pelatihan Pelatihan	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			38.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					1 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	-	-			-	695.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		764.500.000,00	
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah																

							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah					1 Laporan Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.				16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi					1 Laporan Laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah					1 Laporan Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah					1 Laporan Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional					1 Laporan Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)					1 Laporan Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi					1 Laporan Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)					1 Laporan Laporan	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			38.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah																
							Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah					1 Kegiatan Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat																

							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			38.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																
							Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					1 Sistem Informasi	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi																
							Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi																
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi																
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi					1 Pelatihan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi																
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi					1 Naskah	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah																

							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi																		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi					1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			38.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah																		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi																		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah																		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah																		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset																		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset					1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							333.279.874.260,54									127.386.934.126,54		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							327.937.666.300,54									127.386.934.126,54		
	5	02				KEUANGAN							327.937.666.300,54									127.386.934.126,54		
198	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	223.938.521.940,54							-		127.386.934.126,54		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	354.145.550,00					-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-		-	354.145.550,00	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100 Dokumen	70.733.050,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			70.733.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 Dokumen	72.680.950,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			72.680.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					0 Dokumen	69.188.650,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			69.188.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					0 Dokumen	70.959.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			70.959.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	70.583.900,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			70.583.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	127.691.061.226,54			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-	-		127.032.788.576,54	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	127.032.788.576,54	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat.	-			127.032.788.576,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	219.304.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0 Laporan	201.892.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0 Laporan	237.075.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	222.238.550,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	

	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0 Laporan	222.238.550,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	709.792.450,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					0 Paket	286.330.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0 Dokumen	357.838.450,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang	65.624.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	1.289.571.234,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	44.064.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	91.157.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	174.834.310,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	40.729.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	660.056.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	70.830.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	207.899.924,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	90.676.456.520,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	7.718.995.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	81.415.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	1.542.461.520,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	1.795.852.110,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	110.826.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	1.024.926.110,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

[illegible]

							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	46.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	125.473.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	108.538.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	293.428.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	161.908.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0 Dokumen	322.495.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen	338.157.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				0 Dokumen	147.686.940,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				0 Dokumen	278.721.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	749.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	539.112.850,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			-	1.499.526.300,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				0 Laporan	263.625.450,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban															
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				0 Dokumen	449.688.900,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				0 Laporan	198.383.050,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				0 Laporan	333.754.150,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				0 Dokumen	133.416.650,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD															
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0 Dokumen	46.783.700,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Dokumen	73.874.400,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			-	96.678.143.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-	-		0,00	
	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi															

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					0 Dokumen	166.923.400,00	Kab. Barito Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					0 Laporan	89.244.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					0 Laporan	130.355.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	X					NON URUSAN							5.342.207.960,00									0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.342.207.960,00									0,00	
201	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.342.207.960,00								-	0,00		
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.342.207.960,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-		-	0,00		
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	5.342.207.960,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						BADAN PENDAPATAN DAERAH							16.105.154.083,00									16.105.154.083,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							16.062.326.083,00									16.062.326.083,00	
	5	02				KEUANGAN							16.062.326.083,00									16.062.326.083,00	
202	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.651.936.583,00								-	5.651.936.583,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	299.675.000,00				-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		-	299.675.000,00		
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	46.592.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			46.592.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	62.190.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			62.190.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	39.828.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance				39.828.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	151.065.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			151.065.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	3.260.239.583,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		-	3.260.239.583,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	2.874.712.083,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			2.874.712.083,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					36 Dokumen	90.379.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			90.379.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6 Laporan	100.128.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			100.128.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	195.020.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			195.020.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-				-	220.000.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		-	220.000.000,00	
	5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																

							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah					12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah					12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	109.657.500,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-	-		109.657.500,00	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					9 Dokumen	59.657.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			59.657.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					12 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	591.003.500,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-	-		591.003.500,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	64.304.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			64.304.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 Paket	153.503.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			153.503.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					8 Paket	87.990.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			87.990.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	65.906.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			65.906.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	49.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			49.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					38 Laporan	120.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	219.000.000,00				-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-	-		219.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					50 Unit	219.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			219.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	701.861.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-	-	701.861.000,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	502.085.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		502.085.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	174.776.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		174.776.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	250.500.000,00			-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-	-	250.500.000,00	
	5	02	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					12 Dokumen	75.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		75.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
203	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	6.274.092.500,00					-		6.274.092.500,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					12 Dokumen	29.617.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			29.617.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					12 Dokumen	404.172.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			404.172.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					12 Laporan	303.998.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			303.998.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					100 Unit	1.350.350.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			1.350.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					12 Laporan	409.394.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			409.394.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	343.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			343.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					12 Obyek Pajak	123.899.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			123.899.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					12 Dokumen	93.416.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penguatan Good Governance	-			93.416.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

[illegible]

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	105.862.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2 Dokumen	157.820.800,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					3 Orang	27.480.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	586.089.050,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	625.000.000,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	21.995.450,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	70.813.600,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	142.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	24.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40 Laporan	301.780.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	522.780.880,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	550.000.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	196.780.880,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					22 Unit	326.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	150.598.800,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	155.000.000,00	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	150.598.800,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	298.934.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	345.000.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Paket Unit	28.450.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Paket Unit	68.291.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Tahun Unit	98.712.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Paket Unit	103.481.200,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
208	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-				-		14.922.825.060,00							-		16.098.872.700,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-				-		875.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	890.971.200,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
							Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						125 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			122.971.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi						1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian						1 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			276.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional					1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																			
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN					100 Orang	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	7.204.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		7.350.000.000,00				
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					100 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					6679 Orang	6.854.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					10 Laporan	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
						INSPEKTORAT DAERAH												12.281.870.536,00						13.522.192.590,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												12.281.870.536,00						13.522.192.590,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH												12.281.870.536,00						13.522.192.590,00	
209	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.639.040.536,00							-		10.615.079.590,00				
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	111.316.450,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		122.448.095,00				
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	21.316.450,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			23.448.095,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			77.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	7.274.464.086,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	8.001.910.495,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	7.038.784.086,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		7.742.662.495,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	160.680.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		176.748.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		82.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	15.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	16.500.000,00	
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		16.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			220.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	317.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	348.700.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	252.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			277.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			38.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.260.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	145.521.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					26 Unit	121.260.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			145.521.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
210	6	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	2.314.090.000,00							-	2.545.499.000,00	

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					5 Laporan	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					24 Laporan	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
211	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-				-	328.740.000,00						-		361.614.000,00			
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-				-	50.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	55.000.000,00			
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					5 Rekomendasi	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-				-	278.740.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	306.614.000,00			
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					1 perangkat daerah	128.740.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			141.614.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					1 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					8 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					5 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
						KECAMATAN DUSUN HILIR							4.582.476.337,00								4.567.106.337,00			
7						UNSUR KEWILAYAHAN							4.582.476.337,00									4.567.106.337,00		

7	01					KECAMATAN					4.582.476.337,00						4.567.106.337,00			
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-		3.676.259.137,00					-	3.676.259.137,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		12.641.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	12.641.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	3.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	3.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	3.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.641.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	3.641.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-		2.932.111.887,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.932.111.887,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.826.111.887,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.826.111.887,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	100.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	3.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR	

	7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	68 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	105.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	105.000.000,00	
	7		01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	29 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	291.906.250,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	291.906.250,00	
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	10 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	25.162.250,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	25.162.250,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	6.744.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	6.744.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7		01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kuniungan Tamu														

							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				20.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	220.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			220.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	124.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		124.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	22.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			22.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					50 Unit	52.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			52.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					5 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	108.600.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		108.600.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			3.600.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			45.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	102.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	12.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					15 Unit	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			70.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
213	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	10.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			10.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
214	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	560.000.000,00							-	560.000.000,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	10.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			10.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	500.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	500.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					12 Unit	150.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		350.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
215	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	183.500.000,00						-	168.130.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	183.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	168.130.000,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					50 Orang	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		84.630.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					50 Orang	36.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		36.000.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					10 Dokumen	47.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		47.500.000,00	KECAMATAN DUSUN HILIR

[illegible]

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																						
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																						
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-		4.096.409.374,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-			4.096.409.374,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					52 Orang/bulan	4.090.409.374,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				4.090.409.374,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																						
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3 Dokumen	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				3.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	3.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				3.000.000,00		KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-		15.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-			15.000.000,00			
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																						

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			15.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	2.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-	2.000.000,00	
	7	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah															
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			2.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	115.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-	115.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			5.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					6 Orang	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			60.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	431.237.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-	432.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	9.237.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			10.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				40.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				35.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				4.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					6 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				25.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	318.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				318.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	50.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	50.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					4 Unit	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			50.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	219.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	219.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			1.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					48 Laporan	85.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				85.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	133.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				133.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	40.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				40.000.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	25.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				25.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	15.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
218	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-				-	24.000.000,00									-			24.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				-	19.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				19.000.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	4.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				4.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Dokumen	15.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-				-	5.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				5.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
219	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.472.000.000,00						-			3.372.000.000,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.065.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-		-		2.965.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-				40.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	750.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-				900.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	1.275.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-				2.025.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	407.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		407.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					3 Lembaga Kemasyarakatan	337.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				337.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah	-				70.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
220	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	15.000.000,00						-			15.000.000,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	15.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		15.000.000,00	

	7		01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7		01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			10.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
221	7		01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	60.000.000,00			-		-			60.000.000,00	
	7		01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		60.000.000,00	
	7		01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			60.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
222	7		01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	30.000.000,00			-		-			30.000.000,00	
	7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	30.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		30.000.000,00	
	7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7		01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7		01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN
	7		01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.				6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN				
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.				6.000.000,00	KECAMATAN DUSUN SELATAN				
						KECAMATAN DUSUN UTARA												4.388.694.508,00						4.762.213.958,80		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												4.383.694.508,00							4.756.713.958,80	
	7	01				KECAMATAN												4.383.694.508,00							4.756.713.958,80	
223	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	3.022.238.410,00							-		3.259.112.251,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	28.500.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-	31.350.000,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			19.250.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			3.300.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			3.300.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	2.351.988.410,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-	2.587.187.251,00				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31 Orang/bulan	2.265.108.410,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			2.491.619.251,00	KECAMATAN DUSUN UTARA				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10 Dokumen	86.880.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			95.568.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	10.000.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	
	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			0,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	347.350.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			382.085.000,00	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			275.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					31 Orang	97.350.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			107.085.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	59.500.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			41.250.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	22.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			0,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	27.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			30.250.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-		60.000.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-	-		60.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			60.600.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		84.900.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-	-		63.140.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			0,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			12.100.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-			45.540.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-		80.000.000,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-	-		88.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					16 Unit	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				22.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				66.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
224	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-				-	80.000.000,00						-		-		88.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				-	80.000.000,00					8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-		88.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				88.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				-	931.200.000,00						-		-		1.024.320.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-				-	50.000.000,00					8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-		55.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					19 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				55.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				-	727.000.000,00					8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-		799.700.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	187.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				206.250.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					30 Pokmas / Ormas	539.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Pendang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-				593.450.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-				-	154.200.000,00					8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-		-		169.620.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					19 Lembaga Kemasyarakatan	99.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				108.900.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya					18 Lembaga Kemasyarakatan	55.200.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				60.720.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
226	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	53.104.000,00				-			-		58.414.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	53.104.000,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”			-	58.414.400,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					10 Dokumen	53.104.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				58.414.400,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
227	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	297.152.098,00				-			-		326.867.307,80	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	297.152.098,00				-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”			-	326.867.307,80	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					18 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				26.400.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				44.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					4 Laporan	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				11.000.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12 Dokumen	35.256.098,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				38.781.707,80	KECAMATAN DUSUN UTARA
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					54 Dokumen	187.896.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”				206.685.600,00	KECAMATAN DUSUN UTARA

	X						NON URUSAN											5.000.000,00							
	X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											5.000.000,00							
228	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-			-					5.000.000,00							
	X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-			-				8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	-	5.500.000,00						
	X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”	5.500.000,00	KECAMATAN DUSUN UTARA					
						KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI														3.969.082.804,00				4.245.775.650,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN														3.969.082.804,00				4.245.775.650,00	
7		01				KECAMATAN														3.969.082.804,00				4.245.775.650,00	
229	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-			-		3.568.885.154,00				3.748.428.000,00						
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-			-		12.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	12.000.000,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen		2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen		2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen		2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen		2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen		2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-			-	1.986.432.816,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	2.080.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					31 Orang/bulan	1.910.112.816,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			2.000.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	76.320.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-			-	37.500.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	37.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			-	518.459.838,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	601.935.500,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			6.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	117.524.338,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	40.035.500,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			40.035.500,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	55.900.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			55.900.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			250.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	819.492.500,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	-	819.492.500,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					5 Unit	87.002.500,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			87.002.500,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	232.490.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			232.490.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	500.000.000,00	-	-	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			500.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	135.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	-	135.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				5.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik				60.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		60.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					10 Unit	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
230	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	65.000.000,00							-	65.000.000,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	65.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		65.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			65.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
231	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	177.947.650,00							-	182.347.650,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	167.947.650,00			-	8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-		167.947.650,00	

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	167.947.650,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			167.947.650,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	10.000.000,00			-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	14.400.000,00			
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		8. Pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang” Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			14.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI		
232	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	50.000.000,00							-		50.000.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	50.000.000,00			-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	50.000.000,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	-	-		7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI		
233	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	107.250.000,00							-		200.000.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	107.250.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	200.000.000,00			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	107.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI		
						KECAMATAN JENAMAS											3.820.868.582,00						3.820.868.582,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											3.820.868.582,00						3.820.868.582,00	
	7	01				KECAMATAN											3.820.868.582,00						3.820.868.582,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.795.868.582,00							-		2.795.868.582,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-	25.000.000,00			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	10.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			10.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-	1.408.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		1.408.000.000,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					11 Orang/bulan	1.400.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			1.400.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	8.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			8.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-					-	5.000.000,00				-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		5.000.000,00		
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			5.000.000,00		KECAMATAN JENAMAS

[illegible]

							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			60.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			300.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	180.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	180.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		80.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		100.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	237.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	237.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		17.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		45.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		175.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS

[illegible]

								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				60.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS		
236	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-				-	700.000.000,00							-		700.000.000,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-				-	590.000.000,00				-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan Good Governance	-		-		590.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan Good Governance	-				15.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun							5 Unit	555.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-				555.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							5 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh	-				20.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS	
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-				-	110.000.000,00				-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		-		110.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya							20 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-				110.000.000,00	KECAMATAN JENAMAS	
237	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		-				-	50.000.000,00							-		50.000.000,00		
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-				-	50.000.000,00				-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Penguatan Good Governance	-		-		50.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				

[illegible]

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	2.734.138.344,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	2.984.138.344,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	2.671.018.344,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		2.911.018.344,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					12 Laporan	63.120.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		73.120.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	21.139.600,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	22.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					12 Dokumen	4.999.600,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		5.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	16.140.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		17.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	30.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	35.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	376.938.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		368.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	29.706.950,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	18.449.900,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	30.682.800,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	14.070.750,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	195.215.800,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		180.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	2.510.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	31.302.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	251.802.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	275.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4 Unit	113.903.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			120.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8 Unit	106.939.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			120.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2 Unit	30.960.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			35.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.977.180,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		-	352.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	1.992.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			2.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Laporan	47.985.180,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.590.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	114.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit		38.990.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit		8.120.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		9.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		23.480.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		35.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
241	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-		101.156.150,00			-		-		106.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-		96.156.150,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	100.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen		96.156.150,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-		5.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-	-	6.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan		5.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	KECAMATAN KARAU KUALA

[illegible]

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					25 Keluarga	28.880.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			3.500.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					25 Keluarga	25.757.200,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			15.000.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-		87.608.000,00			-			-		90.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-		87.608.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.	-	-		90.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	87.608.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.	-			90.000.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
244	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-		81.037.000,00			-			-		97.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-		81.037.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.	-	-		97.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12 Dokumen	56.663.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.	-			70.000.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					12 Dokumen	4.004.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance.	-			5.000.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					10 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik	-			2.500.000,00		KECAMATAN KARAU KUALA
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	

[illegible]

								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.159.464.646,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		3.159.464.646,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/bulan	2.929.258.646,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			2.929.258.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	50.206.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			50.206.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		15.000.000,00	
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.250.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-		91.250.000,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	41.250.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			41.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					6 Orang	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	789.114.200,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	789.114.200,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	60.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	65.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	70.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	504.114.200,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				504.114.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	501.962.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-		501.962.000,00	
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					8 Unit	78.462.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				78.462.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	423.500.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				423.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	281.532.000,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-		281.532.000,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	64.932.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				64.932.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	204.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance				204.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	162.674.300,00			-		5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance		-		162.674.300,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.540.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			38.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	37.300.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			37.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	86.834.300,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance			86.834.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	70.000.000,00			-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-	-	70.000.000,00	
	8	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Membangun tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penguatan Good Governance	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
246	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	undefined	-			undefined undefined	1.283.531.000,00						-	1.283.531.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.283.531.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-	-	1.283.531.000,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun					1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					30 Orang	30.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					70 Orang	130.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																
							Jumlah Paskibraka					54 Orang	1.048.531.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			1.048.531.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
247	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	2.180.875.000,00						-		-	2.180.875.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	2.180.875.000,00				-	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-		-	2.180.875.000,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentrman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					26 Orang	1.930.875.000,00	Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				1.930.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					20 Orang	90.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
248	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-				-	3.182.785.250,00						-			3.182.785.250,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-				-	3.182.785.250,00			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-	-			3.182.785.250,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	35.532.500,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				35.532.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					2 Dokumen	45.865.750,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-				45.865.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Orang	2.993.670.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			2.993.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Orang	63.636.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			63.636.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	44.081.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			44.081.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
249	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	267.548.000,00			-			-		267.548.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	267.548.000,00			-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-	-		267.548.000,00	
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			12.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	145.944.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			145.944.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Orang	82.106.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			82.106.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									-			-			

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					4 Laporan	26.898.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			26.898.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250	8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	642.000.000,00					-			642.000.000,00	
	8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	642.000.000,00				7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			642.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					30 Orang	300.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					15 Orang	205.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			205.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	87.000.000,00	Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama	-			87.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H												2.032.331.052.574,99								1.472.389.155.665,07	

Sesuai dengan Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga menerima dan menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Selatan kemudian semua usulan dilanjutkan oleh verifikator untuk ditelaah oleh Perangkat Daerah tujuan dari Pokok-Pokok Pikiran tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.3

Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
1	ENSILAWATIKA WIJAYA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jembatan di Desa Majundre Buat baru jembatan yang dulunya jembatan kayu ke jembatan beton ,Volume 4 M x 22 M, ketinggian dari permukaan air 4 meter	Desa Majundre Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	ENSILAWATIKA WIJAYA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Perbaiki jembatan dengan panjang 4 M X 10 M dengan ketinggian dari permukaan air 4 Meter	Desa Majundre RT 2 RW 1 Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Gang Surya desa teluk timbau kecamatan dusun hilir kabupaten barito selatan prov. Kalteng	Desa teluk timbau kecamatan dusun hilir kabupaten barito selatan prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan jalan desa batilap	Desa Batilap Kec. Dusun Hilir kabupaten Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Jalan Desa Damparan Teluk Timbau	Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN PERUMAHAN AZKHA DESA SABABILAH	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	ENSILAWATIKA WIJAYA	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Rabat beton Jalan usaha tani Desa Wayun,RT 06 / RW 02 Ukuran 300 M x 2 M x 0,15 M	Desa Wayun Kecamatan GBA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8	TRI WAHYUNI	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	Dermaga Terapung jalan Dusun Muara Puning Desa Teluk Timbau Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan	Dusun Muara Puning Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
9	RUSINAH	Belum optimalnya sistem drainase	Pembersihan Drainase Jalan ibunda I Buntok	Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	ENSILAWATIKA WIJAYA	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Rehab berat Titian Usaha Tani Punte Tinyak dengan Panjang 180 M x 1,5 M	Desa Bundar RT. 2 RW. 1 Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	RUSINAH	Belum optimalnya sistem drainase	pembersihan penyumbatan drainase di gang pematang pungsi I/II	buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	RUSINAH	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	rehab SD III buntok	buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
13	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	peningkatan gang sahran sukur cor sababilah	buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

14	ENSILAWATIKA WIJAYA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Peningkatan jalan desa di desa Palu Rejo di RT 1,RT 2,dan RT 3 sepanjang 1 kilometer	RT 1,RT 2,RT 3 Desa Palu Rejo,kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	ENSILAWATIKA WIJAYA	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	Buat Baru Pagar TK Mira Pakat Bundar dengan panjang 25 M x Lebar 15 M	Desa Bundar RT. 3 RW. 3 Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	NURUL HIKMAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan peningkatan jalan kompleks pelajar	Jalan kompleks pelajar , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	TRI WAHYUNI	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	Dermaga Terapung Desa Teluk Timbau RT 02	Desa Teluk Timbau RT 02 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
18	NURUL HIKMAH	Belum optimalnya sistem drainase	Peningkatan drainase lingkungan gang Halaban RT.19/RW. V jalan H. Indar buntok	Gang Halaban RT.19/RW. V Jalan H. Indar Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	NURUL HIKMAH	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan jalan umpu kakah menuju jalan rikot jawo	Jalan umpu kakah menuju rikot jawo desa sababilah , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	NURUL HIKMAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan peningkatan jalan kaladan gang purnama A2 RT.17 hilir sper	Jalan kaladan gang purnama A2 RT.17 Hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	NURUL HIKMAH	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan peningkatan jalan lingkungan gang arai samping langgar Miftahul khair Jl.kartini buntok	Gang Arai samping Langgar Miftahul Khair Jl. Kartini Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	NURUL HIKMAH	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	Pengadaan bibit Ayam/Bebek di Desa Muara Ripung	Desa Muara ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
23	NURUL HIKMAH	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	Pengadaan mesin cas/klotok di kelurahan jelapat	Kelurahan jelapat, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
24	NURUL HIKMAH	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pengadaan melbeller di SDN Desa Teluk Mampun	SDN Desa Teluk Mampun , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
25	NURUL HIKMAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan pembangunan jalan usaha tani desa murung paken	Jalan Usaha Tani Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

26	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan/Perbaikan jalan antar Desa Danau Masura – Desa Muara Ripung	Desa Danau Masura , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	Perehaban bangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa 1	Desa Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	H. RADEN SUDARTO, SH	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan Jalan Baru Desa Danau Masura – Dusun Parigi – Desa Kalahien	Desa Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	TRI WAHYUNI	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Siring Kuburan Muslimin RT. 02 Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau RT. 02 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
30	H. RADEN SUDARTO, SH	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Cor Beton Jalan Usaha Tani Sarian Permai Panjang 1000M	Desa Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
31	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	Pengadaan Listrik Desa di RT.01 dan RT.02	Desa Murung Paken , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
32	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Jalan RT. 03 Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau RT. 03 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Gang almursyidul amin 300meter lebar 2meter. Kelurahan Rantau Kujang	Kelurahan Rantau Kujang Gang almursyidul amin Kec. Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Peningkatan Jalan Antar Desa Murung Paken – Danau Masura	Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	Rehab Gedung SDN Murung Paken di RT.01	Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Gg Berkah perbatasan rt 09 dan 10 menuju jalan p2 d kelurahan mengkatip	Gg Berkah perbatasan rt 09 dan 10 menuju jalan p2 d kelurahan mengkatip kec. Dusun hilir kab. Barito selatan prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan jln teluk timbau rt 01	Desa Teluk Timbau RT 01 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

38	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Gg mufakat rt 07 rw 3 kelurahn mangkatip	Kelurahan Mengkatip RT. 07 RW. 03 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pengaspalan Jalan	Jalan Jendral Sudirman RT.044 RW.005 Blok II, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jalan Asam Gang.Fasty Rt. 41 Rw. 005 Buntok Kota	Jalan Asam Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan Jembatan Sungai Talapepai di Desa Murung Paken	Desa Muurng Paken, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pembuatan Irigasi Perkebunan	Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Lanjutan Pembangunan kantor Desa	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan Jalan Menuju jalan Provinsi (Dari Muara Ripung ke Desa Kalahien Seberang)	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	H. RADEN SUDARTO, SH	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	Pengadaan Bidan Desa	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
46	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Perehaban Total Gedung Sekolah Dasar dan SMP	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
47	H. RADEN SUDARTO, SH	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Bangun Baru dan Rehab Rumah Masyrakat Miskin	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
48	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan Pelabuhan/Dermaga	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan COr beton antara Desa Tanjung Jawa dan Desa Teluk Mampun	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan jalan gang rinjani jalan kaladan	Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan Siring Pencegah Longsor RT. 01 - 02 – 06	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

52	H. RADEN SUDARTO, SH	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	Pengadaan Ambulan Air	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
53	H. RADEN SUDARTO, SH	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Pembuatan Titian Jembatan Usaha Tani 200m	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
54	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	Perbaikan Pintu Cek DAM	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	H. RADEN SUDARTO, SH	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	Pembangunan Kantor BPD	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
56	H. RADEN SUDARTO, SH	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pembuatan Rumah Layak Huni	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
57	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Desa	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
58	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan Kantor Desa	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	H. RADEN SUDARTO, SH	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Pembuatan Jalan Timbun Tani Sepanjang 1km	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
60	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Pengadaan Tandon Air	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehab Jembatan Perahu atau Dermaga	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pembangunan Bangunan Serba Guna	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

63	H. RADEN SUDARTO, SH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehab Jembatan dan Bangunan Poskesdes	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	H. RADEN SUDARTO, SH	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan TK Paud Desa Pararapak dan Danau Jutuh	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	NURUL HIKMAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan Jalan Permukiman jalan kaladan Gang Purnama A3.1 RT. 17 kelurahan hilir sper kec. dusun selatan	Jalan kaladan Gang Purnama A3.1 RT. 17 kelurahan hilir sper kec. dusun selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	IDEHAM	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	Pembersihan Alur Sungai Puning dan Sungai Jalung Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala	Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
67	IDEHAM	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	Pembersihan Alur Sungai Balaharang Danau Masura Menuju Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan	Desa Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
68	IDEHAM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Rekontruksi Cor Jalan Desa Baru - Desa Danau Sadar	Desa Baru RT 8 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69	IDEHAM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Baru	Desa Baru RT 8 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
70	MASTINI.RL	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Rehab Berat SDN-1 Sanggu	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
71	TRI WAHYUNI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Gang Damai Kelurahan Mengkatip	Kelurahan Mengkatip Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
72	MASTINI.RL	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Lanjutan Tambatan Perahu Danau Sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73	MASTINI.RL	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehab Embung Desa Sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74	IDEHAM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Rekontruksi Cor Jalan Putri Mayang Sari Desa Baru	Desa Baru RT 8 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75	MASTINI.RL	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembangunan Ruang Kelas SDN-2 Sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

76	MASTINI.RL	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Penambahan Gedung Sekolah, 2 (dua) ruang belajar SDN Pamangka	Desa Pamangka , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
77	MASTINI.RL	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Timbunan Halaman SDN Mangaris	Desa Mangaris, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
78	MASTINI.RL	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Pembentukan Jalan Usaha Tani Desa Dangka RT 01 / RT 02	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
79	MASTINI.RL	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pemeliharaan dan Sambungan Jalan dari Simpang 3 Majundre, Desa Telang Andrau Menuju Desa Wungkur Baru RT 01	Desa Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80	MASTINI.RL	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Cor Beton Halaman SDN Pararapak	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
81	IDEHAM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Rekontruksi cor jalan Lingkungan Gang Rimbawan Jalan Pelita Raya	Jalan Pelita Raya RT 34 RW 4 Buntok , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82	MASTINI.RL	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Beton Jalan Haruan Padat Karya	Kelurahan Buntok Kota , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	IDEHAM	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembangunan Siring Timbun Kuburan Alkah A RAUDHAH	Kelurahan Jelapat RT 9 RW 2, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
84	MASTINI.RL	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Beton Gang Bersatu Jl. Pahlawan RT 29 RW 04 2 M x 100 M	Jalan Pahlawan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	MASTINI.RL	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Beton Gang Saluang Jl. Padat Karya RT 43 RW 05 4 M x 101 M	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	IDEHAM	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembangunan Siring Timbun Kuburan Alkah Ahlussunnah Desa Baru	Desa Baru RT 5 RW 2, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

87	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Peningkatan Cor Jalan Gang Nibung Indah Desa Baru	Desa Baru RT 7 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
88	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Peningkatan Cor Jalan Gang Keluarga Desa Baru	Desa Baru RT 11 RW 4, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
89	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Mawar Desa Baru	Desa Baru RT 11 RW 4, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
90	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan /rehab total sekolah SD negeri Desa Batampangdan perumahan dinas guru	Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
91	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembuatan WC 2 pintu pada SD Negeri Desa Batampang	Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
92	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Peningkatan Cor Jalan Kaladan Gang Pandawa	jalan Kaladan Gang Pandawa RT 24 RW 4 Kelurahan Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
93	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan jalan dari desa batampang menuju desa batilap	desa batampang kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Peningkatan Cor Jalan Gang Jambu Desa Baru	Desa Baru RT 5 RW 2, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
95	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pembangunan siring beton alkah kuburan muslimin	desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
96	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Lanjutan Peningkatan Cor Jalan Gang Bersama Desa Baru	Desa Baru RT 3 RW 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

97	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	lanjutan rehabilitasi berat puskesmas pembantu (pustu) desa batampang	desa Batampang kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
98	IDEHAM	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Peningkatan Cor Jalan Gang Bahron Desa Baru	Desa Baru RT 2 RW 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
99	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan jalan desa batilap ke desa batampang	desa batilap kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di pedesaan	pembangunan PLN desa Batilap	desa batilap kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
101	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	lanjutan rehabilitasi berat puskesmas pembantu(pustu) desa batilap	desa batilap kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
102	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pembuatan pagar beton pemakama muslimin RT.02 desa batilap	desa batilap kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
103	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	perpanjangan jalan cor beton RT.03 desa batilap	desa batilap kecamatan dusun ilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	IDEHAM	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	peningkatan Cor jalan Gang Melati Desa Baru	Desa Baru RT 11 RW 4, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	IDEHAM	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Lanjutan Peningkatan Cor Jalan Gang Mujair Desa Baru	Desa Baru RT 8 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembangunan jalan induk desa tampijak panjang 2 km lebar 23 tinggi 1 m	desa tampijak kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	bedah rumah untuk 8 (delapan) unit rumah desa tampijak	desa tampijak kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

108	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan/rehab total sekolah SD dan perumahan dinas guru desa tampijak	desa tampijak kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
109	IDEHAM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Peningkatan Cor Jalan Gang Mekar Indang Jl. A Gani Gandrung	Jalan A. Gani Gandrung Gang Mekar Indah RT 47 RW 5 Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan jalan desa dari RT.06 denagn panjang 400 m	desa batampang kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaaan dan Olahraga di Daerah	pembuatan lapangan fudsal desa sungai jaya	desa sunagi jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
112	IDEHAM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Cor jalan Gang Hartono Desa Baru	Desa Baru RT 11 RW 4, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	cor beton jalan pelajar TK PAUD desa sungai jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
114	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembuatan jalan ujung RT.08 karang bawui Desa sungai Jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
115	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	penyediaan air bersih sumur bor desa sungai jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
116	IDEHAM	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	Pengadaan Lampu Jalan (PJU) Desa Muara Talang	Desa Muara Talang , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
117	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan perumahan dinas guru desa sungai jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
118	IDEHAM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Cor Jalan Gang Sutomo I	Gang Sutomo I RT 23 RW 2 Kelurahan Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

119	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	rehabilitasi berat puskesmas pembantu (pustu) desa sungai jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
120	IDEHAM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Cor Jalan Gang Sekawan jalan Kartini	Jalan Kartini Gang Sekawan RT 20 RW 5 Kelurahan Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
121	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	bantuan pembelian bibit sawit kelompok tani muda desa sungai jaya	desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
122	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	bantuan pembelian bibit sawit kelompok tani eka harap dusun bakota	dusun bakota desa sungai jaya kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
123	IDEHAM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Peningkatan cot Jalan Gang Parajaman	Jalan Kaladan Gang Para Parajaman RT 24 RW 5 Kelurahan Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan jembatan sungai lunuk RT.01 Desa mahajandau	desa Mahajandau kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	pembangunan jalan mahajandau sungai jaya terus ke rangka ilung	desa Mahajandau kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
126	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan/rehab total SDN 1 dan Rumah dinas guru desa mahajandau	desa Mahajandau kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
127	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	pembangunan plafon dan dinding lapis gereja jemaat GKE desa mahajandau	desa Mahajandau kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
128	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di pedesaan	pembangunan plafon dan dinding lapis gereja jemaat GKE desa mahajandau	desa mahajandau kecamatan dusun hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH

129	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembuatan bundaran (tugu) simpang 3 kapolsek bangkuang	kelurahan bangkuang kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
130	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	penyirangan dan penimbunan halaman kantor kelurahan bangkuang kecamatan karau kuala	kelurahan bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
131	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pengadaan pembuangan tempat akhir (TPA) kelurahan bangkuang	kelurahan bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
132	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	LANJUTAN PENYELESAIAN AULA STIE DAHANI DAHANAI BUNTOK	JALAN CUT NYAK DIEN KELURAHAN HILIR SPER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
133	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembuatan dermaga warga kelurahan bangkuang kecamatan karau kuala RT.1 dan RT.11 panjang 60 m, lebar 2m , dengan kontruksi kayu	keluran bangkuang kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
134	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	lanjutan pembangunan jalan pelabuhan bangkuang menuju pasar bangkuang	kelurahan bangkuang kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
135	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	lanjutan peningkatan dan pelebaran jalan pada kharya RT. 01 s/d RT.07 panjang 800 m	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
136	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan dan pelebaran rabat beton Gg damai RT. 13 kelurahan rantau kujang panjang 300 m	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan jalan dari Desa Muara Talang ke Desa Teluk Telaga sekitar 500 meter	JALAN LINTAS DARI DESA TELUK TELAGA KE DESA MUARA TALANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
138	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	peningkatan jalan karya bhakti RT.10 kelurahan rantau kujang	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
139	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	peningkatan dan pelebaran jalan damai RT.10 s/d RT.16 kelurahan rantau kujang dengan panjang 800 m	kelurahan rantau kujang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

140	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan tower menara Mesjid Al Wustha Desa Muara Talang	Mesjid Al Wustha Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
141	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	rekonstruksi jalan al-mursidul amin kelurahan rantau kujang RT.17 panjang 800 m	kelurahan rantau kujang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
142	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan dan pelebaran Gang. H.imran RT.06 panjang 150 m kelurahan rantau kujang	kelurahan rantau kujang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
143	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	peningkatan dan pelebaran rabat beton Gang koramil RT.12 Panjang 100 m kelurahan Rantau kujang.	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
144	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan dan pelebaran jalan umum kelurahan rantau kujang	kelurahan rantau kujang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
145	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	siring beton jalan umum RT.07 panjang 100 m kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
146	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	pembersihan saluran irigasi pertanian kelurahan rantau kujang	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan turap/taper penahan longsor	DESA MUARA TALANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
148	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan jalan baru dari jembatan kuning Muara Talang ke kantor Desa Muara Talang	Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
149	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Rehab gedung sekolah SDN Desa Muara Talang	SDN Desa Muara Talang , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
150	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Rehab gedung sekolah SMP 4 Satu Atap Dusun Selatan Desa Muara Talang	SMP 4 Satu Atap Dusun Selatan Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
151	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Terbatasnya fasilitas untuk mengakomodir antusiasme masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan cagar budaya	PENGADAAN BAJU SERAGAM GRUP YASINAN DESA MUARA TALANG 28 BUAH	DESA MUARA TALANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

152	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	TEMPAT TAMBAT DAN NAIK PERAHU SUNGAI SARUPANJI-T.SAMPUDAU	SUNGAI SARUPANJI-T.SAMPUDAU DESA MUARA TALANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
153	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN DARI DESA TELUK TELAGA KE DESA TALIO	DESA TELUK TELAGA KE DESA TALIO, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
154	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PENGADAAN PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM	DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
155	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	LANJUTAN IRIGASI DAN CEKDAM DESA TELUK TELAGA	DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
156	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	COR HALAMAN MESJID MIFTAHUL JANNAH DESA TELUK TELAGA	MESJID MIFTAHUL JANNAH DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
157	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SDN DESA TELUK TELAGA SEKITAR 60 METER X 20 METER	SDN DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
158	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah	PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY DI DUSUN BAMBALER	DUSUN BAMBALER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
159	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah	pembebasan lahan sepak bola sekaligus penyirangan dan penimbunan	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
160	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	peningkatan halaman SDN 2 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas (paping halaman sekolah) ukuran 30 x 30	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
161	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan peningkatan jalan jembatan gg. ketapi RT. 16 Rw.05 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
162	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan pembangunan kantor desa 1 unit	desa Muara Ripung RT.01 , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

163	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan peningkatan jalan jembatan Gg. PNPM RT.20 RW.06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
164	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	rehab kantor BPD dan pembuatan teras	Desa Muara Ripung RT.01, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
165	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	lanjutan rehabilitasi/pembangunan kantor/perumahan dinas PDAM kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
166	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	lanjutan peningkatan jalan jembatan Gg. Ali RT. 2 RW 1 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
167	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan jalan menuju jalan provinsi dari Muara Ripung ke Desa Kalahien sebrang 7 Km	Desa Muara Ripung Rt. 01, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
168	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan peningkatan jalan jembatan Gg. sabilah muhtadin RT.7 RW.3 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
169	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya	peningkatan jalan jembatan Gg. molding RT. 15 RW.05 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
170	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan jalan anatar Desa Muara Ripung - Danau Masura	Desa Mara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
171	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pembangunan jalan dan jembatan Gg. kuburan muslimin RT.7 RW.2 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
172	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	rekonstruksi jalan padat karya kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	rkelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
173	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan jalan menuju Buntok sebrang	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
174	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan cor beton gang koramil RT. 12 RW.04 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

175	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembangunan cor beton Gang Keluarga RT. 20 Rw. 06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
176	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pembangunan baru dan rehab rumah masyarakat miskin	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
177	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan cor beton gang. setuju RT.19 RW.06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	gang. setuju RT.19 RW.06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
178	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Penunjang penguat jaringan untuk SMP dan SD	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
179	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan cor beton gang. ikhlas RT. 14 RW.05 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	gang. ikhlas RT. 14 RW.05 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
180	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	pembangunan cor beton gang. bersama RT 19 RW. 06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	gang. bersama RT 19 RW. 06 kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
181	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan/ rehab kantor / sekolah TK kenanga kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas	sekolah TK kenanga kelurahan rantau kujang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
182	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah	pembangunan gedung futsal ukuran 20 x 30 (bisa digunakan untuk gedung pertemuan/gedung serba guna) desa tabatan kecamatan jenamas	desa tabatan kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
183	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	siring timbun jalan usaha tani desa tabatan panjang 1 km, tinggi 1 m, lebar 5 m	desa tabatan kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
184	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di pedesaan	pemasangan jaringan listrik PLN desa tabatan	desa tabatan kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH

185	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Rehabilitasi Kantor BPD	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
186	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	perbaikan jalan desa depan masjid longsor desa Tampulang , panjang 56 m lebar 3 meter, tinggi 120 m	desa tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
187	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	rehab rumah dinas gugru SDN Tampulang	desa tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
188	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	pembangunan gedung serba guna desa tampulang	desa tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
189	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pembuatan alkah baru desa tampulang	desa tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
190	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi	pembangunan ruang komputer dan perpustakaan SDN tampulang kecamatan jenamas	pembangunan ruang komputer dan perpustakaan SDN tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
191	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pelebaran dan penimbunan alkah desa tampulang	pembangunan ruang komputer dan perpustakaan SDN tampulang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
192	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehabilitasi jembatan mandami tongko	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
193	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan pembangunan jalan rantau bahuang tembus jenamas	desa rantau bahuang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
194	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	pembangunan/perbaikan jalan dalam desa Rantau Bahuang RT. 11 karang paci	desa Rantau Bahuang RT. 11 karang paci, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
195	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Rabat beton jalan usaha tani	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

196	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	pembangunan /perbaikan jalan menuju ke sungai murung RT 1 desa rantau bahuang kecamatan jenamas.	sungai murung RT 1 desa rantau bahuang kecamatan jenamas., Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
197	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Lanjutan cor jalan usaha tani bangkeng Ripung	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
198	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	pembuatan gedung serba guna desa rantau bahuang	desa rantau bahuang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
199	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	pembuatan jalan tembus ke perbatasan paminggir kabupaten hulu sungai utara	desa rantau bahuang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
200	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembuatan pelabuhan terapung di kubah ukuran 4x8 m di desa rantau bahuang	desa rantau bahuang kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
201	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan siring beton jalan desa bintang kurung 500 m	desa bintang kurung kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
202	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	penimbunan dan cor beton jalan desa bintang kurung 800 m	desa bintang kurung kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
203	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan multies desa muara talang ke desa bintang kurung 2000 m	desa bintang kurung kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
204	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Rehab total Gedung Sekolah SD dan SMP	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
205	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	siring timbun halaman sekolah SMP SATAp 325 m	SMP SATAP desa bintang kurung kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
206	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembangunan pelabuhan desa bintang kurung 96 m	desa bintang kurung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
207	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	siring timbun halaman sekolah madrasah desa bintang kurung 100 m	sekolah madrasah desa bintang kurung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

208	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	pembangunan jalan usaha tani desa bintang kurung	desa bintang kurung kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
209	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	Perbaikan Puskesmas dan Postu	Desa Penda Asam Rt. 009, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
210	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembangunan jalan/rekonstruksi jalan ampura RT.07 menuju begau, desa babai	desa babai kecamatan karau kuala, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
211	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan titian gg basir RT 14 desa babai	gang. basir RT 14 desa babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
212	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	penegerian TK handayani desa babai	TK handayani desa babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
213	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan jalan cor beton babai-betung lingkungan RT. 1 desa babai	lanjutan jalan cor beton babai-betung lingkungan RT.1 desa babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
214	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan 4 unit rumah dinas guru SDN 4 Desa babai	SDN 4 Desa babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
215	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan pembangunan semenisasi gang pelajar desa wungkur baru	desa wungkur baru kecamatan gunung bintang awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
216	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan pagar beton SDN dan SMP SATAP desa wungkur baru	SDN dan SMP SATAP desa wungkur baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
217	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	pembangunan siring jalan poros desa , desa wungkur baru	desa wungkur baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

218	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembuatan siring jalan gotprit tomang desa wungkur baru	jalan gotprit tomang desa wungkur baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
219	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	pembangunan peningkatan jalan poros dalam desa wungkur baru	desa wungkur baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
220	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	renovasi ruang pelayanan (resepsionis)kantor kelurahan hilir sper	jl. teratai kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
221	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	penataan halaman dan gudang arsip kantor kelurahan hilir sper	jl. teratai kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
222	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	lanjutan peningkatan jalan lingkungan buntok seberang RT. 22 RW.001 kelurahan hilir sper	buntok seberang RT. 22 RW.001 kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
223	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	pembangunan baru puskesmas pembantu(pustu) buntok seberang RT.22 RW.001 kelurahan hilir sper	puskesmas pembantu(pustu) buntok seberang RT.22 RW.001 kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
224	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	rekonstruksi jalan danau palui buntok seberang batas kelurahan hilir sper	buntok seberang kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
225	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan pembangunan gang bengkel RT. 05 Rw 01 kelurahan jelapat	rt.05 rw 01 kelurahan jelapat, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
226	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembangunan siring timbun dan cor beton Gg. kadelope 2 jalan kaladan ujung kelurahan hilir sper	Gg. kadelope 2 jalan kaladan ujung kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
227	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan pengecoran titian jalan /Gg. RT.027 kelurahan hilir sper	Gg. RT.027 kelurahan hilir sper , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
228	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	peningkatan peninggian jalan gg. prajaman jalan kaladan RT. 24	gg. prajaman jalan kaladan RT. 24, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

229	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan ruang guru SDN 17 Buntok	SDN 17 Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
230	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	perbaikan pembangunan gg. keluarga 3 .05 RT. 04 RW.01 kelurahan hilir sper	Gg. keluarga 3 .05 RT. 04 RW.01 kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
231	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	perbaikan pembangunan Gg sepakat 05 RT.004 RW.001 Kelurahan hilir sper	Gg sepakat 05 RT.004 RW.001 Kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
232	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	perbaikan pembangunan gg oval RT. 004 RW. 001 kelurahan hilir sper	gg oval RT. 004 RW. 001 kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
233	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	normalisasi pembersihan sungai parigi atas di dusun parigi desa kalahien	sungai parigi atas di dusun parigi desa kalahien, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
234	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	lanjutan cor beton jalan usaha tani karya pemula desa kalahien	jalan usaha tani karya pemula desa kalahien, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
235	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan siring timbun gang kalilinsar desa kalahien	gang kalilinsar desa kalahien, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
236	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	pembangunan baru jembatan titian usaha tani danau rakit desa kalahien	jembatan titian usaha tani danau rakit desa kalahien, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
237	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	lanjutan siring timbun jalan karya pemula desa kalahien	jalan karya pemula desa kalahien, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
238	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	lanjutan rehabilitasi/ pembangunan kantor/ perumahan dinas PDAM kelurahan rantau kujung	kelurahan rantau kujung kecamatan jenamas, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
239	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	usulan Gg. sepakat 1 RT. 05 Hilir Sper	Gg. sepakat 1 RT. 05 Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

240	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	usulan Gg. Raini kelurahan hilir sper	Gg. Raini kelurahan hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
241	RUSINAH	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	pengadaan 6 bed di UGD jaraga sasameh	UGD jaraga Sasameh, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
242	RUSINAH	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	cor beton jl. kaladan Gg. itah RT.27 , Gg. azijah tembusan palapa	jl. kaladan Gg. itah RT.27 , Gg. azijah tembusan palapa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
243	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	usulan gang sepakat 42 RT.4 kelurahan hilir sper	gg. sepakat 4 RT.4 Kelurahan Hilir sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
244	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Cor gang kupang raya RT. 12 Desa Baru	gang kupang raya RT. 12 Desa Baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
245	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	cor gang. norman jelapat RT. 1	gang. norman jelapat RT. 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
246	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	siring timbun gang. sekawan jalan kartini	Gg sekawan jl kartini, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
247	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	usulan cakar ayam Gang. alfin faris jalan merdeka raya	Gang. alfin faris jalan merdeka raya, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
248	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	cor beton gang purnama A1 jalan kaladan	gang purnama A1 jalan kaladan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
249	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	cor beton Gg palapa 6 jalan kaladan	Gg palapa 6 jalan kaladan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
250	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	usulan gang isa pakat 1 desa sababilah	gang isa pakat 1 desa sababilah, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

251	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	cor beton gang ibunda 5	gang ibunda 5 , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
252	RUSINAH	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	rekonstruksi jalan usaha tani holtikultura desa mangaris 2 m	jalan usaha tani holtikultura desa mangaris 2 m, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
253	RUSINAH	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan jalan menuju madrasah ibtdaiyah desa palurejo	desa palurejo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
254	RUSINAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	lanjutan pembangunan jalan tugu (KTH) sampapulut (1,5 m)	jalan tugu, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
255	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBANGUNAN WC / JAMBA SEHAT DI DUSUN BAMBALER	DUSUN BAMBALER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
256	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	COR JALAN TANI RIGEI RT. 01/02 SEPANJANG 516M LEBAR 1,5M	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
257	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JL. KASUMBA SEPANJANG 300 M X 3 M	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
258	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	COR GANG RT. 005 SEPANJANG 75M X 2M	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
259	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBUATAN BOX COULVET RT. 11	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
260	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	PENGADAAN MESIN MOTOR UNTUK KELOMPOK NELAYAN TELUK BAYU 22 ORANG	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
261	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	LANJUTAN JL. USAHA TANI RT 01 SEPANJANG 100M X 2M	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
262	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	PEMBANGUNAN JL USAHA TANI RT 06	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
263	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	PEMBANGUNAN 3 JEMBATAN TANI PENDA ASAM	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
264	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	PENGADAAN PERAWAT KESEHATAN YANG MENETAP DI DESA PENDA ASAM	DESA PENDA ASAM, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
265	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN COR BETON JALAN LEMBENG BAWAH	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

266	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	LANJUTAN JARINGAN PDAM DARI RT.003 KE SELURUH LINGKUNGAN DESA LEMBENG	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
267	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PERBAIKAN JEMBATAN PENYEBERANGAN SUNGAI MAIYAP HALUS, SUNGAI MAIYAP BESAR, JEMBATAN SUNGAI MEISAI DAN JEMBATAN SUNGAI RAMPAN	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
268	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PEMBUATAN IRIGASI DARI SUNGAI MAIYAP BESAR SAMPAI KE MUARA DANAU LEMBENG	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
269	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI BANTAI KARING	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
270	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PENGADAAN LAMPU PJU DI SELURUH LINGKUNGAN DESA LEMBENG	DESA LEMBENG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
271	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	PENGADAAN TENAGA KESEHATAN YANG MENETAP DI DESA	DESA DANAU GANTING, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
272	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	TAMBAHAN KOUTA GAS ELPIJI 3KG	DESA DANAU GANTING, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
273	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	LANJUTAN JARINGAN PDAM DARI RT.003 KE SELURUH LINGKUNGAN DESA DANAU GANTING	DESA DANAU GANTING, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
274	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial	PENGADAAN BANSOS BAGI 15 ORANG DISIBALITAS	DESA DANAU GANTING, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL
275	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PENGADAAN LAMPU JALAN PJU DI SELURUH LINGKUNGAN DESA DANAU GANTING	DESA DANAU GANTING, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
276	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN DARI DESA DANAU GANTING KE BUNTOK	DESA DANAU GANTING KE BUNTOK, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
277	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	GANG TITIAN TANI RT 1 DESA TELUK TELAGA	DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
278	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN GANG ILUNG RT 7	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
279	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN GANG RAMBUTAN RT 2	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

280	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN GANG WARDUAN RT 7	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
281	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN GANG MUTIARA RT 2 DESA MUARA TALANG	DESA MUARA TALANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
282	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PEMBANGUNAN GANG HILAL RT 4	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
283	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PEMBANGUNAN GANG LAMBIDING RT 2	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
284	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GG ARPAH JALAN BUNTOK-ASAM RT 42 RW.5 BUNTOK KOTA	BUNTOK KOTA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
285	H. LISAWANTO, S.E, M.AP	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	.GANG HAPAKAT DESA BARU RT.3 RW.1	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
286	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN GANG RIMBAWAN RT 2 RW 1 SAMPING KELURAHAN PANJANG 100 METER LEBAR 4 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
287	MUHAMMAD RIDWAN	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	COR JALAN GANG PAHARI 2, RT 7, RW 2, PANJANG 200 METER, LEBAR 2 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
288	MUHAMMAD RIDWAN	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PENINGKATAN JALAN KELURAHAN MENGKATIP PANJANG 2 KILOMETER LEBAR 4 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
289	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	COR JALAN KELURAHAN MENGKATIP RT 3, RW 1, PANJANG 550 METER, LEBAR 3 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
290	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN COR JEMBATAN KUNING RT 4, RW 2	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
291	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN RT 4, RT. 5, RT 6, RT 7, RT 8, PANJANG 700 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
292	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENGERUKAN ALUR SUNGAI PANJANG 20 KILOMETER, LEBAR 4 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

293	MUHAMMAD RIDWAN	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PENINGKATAN JALAN P2 SIMPANG 3 MENGKATIP - MAHAJANDAU PANJANG 3 KILOMETER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
294	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	COR JALAN RT 8, PANJANG 400 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
295	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN RT 9 DAN RT 10 PANJANG 550 METER, LEBAR 3 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
296	MUHAMMAD RIDWAN	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	COR JALAN RT 10 DAN RT 11 KELURAHAN MENGKATIP PANJANG 1000 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
297	MUHAMMAD RIDWAN	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PENINGKATAN JALAN KARTAK HAMPARANG PANJANG 300 METER, LEBAR 4 METER	KELURAHAN MENGKATIP , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
298	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN JALAN DANAU BENTENG PANJANG 300 METER, LEBAR 4 METER	JALAN DANAU BENTENG KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
299	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN JALAN KEDUA KELURAHAN MENGKATIP RT 2 DAN RT 3 PANJANG 3 KILOMETER, LEBAR 15 METER, TINGGI 3 METER	KELURAHAN MENGKATIP RT 2 DAN RT 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
300	MUHAMMAD RIDWAN	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah	PERBAIKAN TEMPAT SARANA LAPANGAN SEPAKBOLA DAN VOLLY	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
301	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	GALI TIMBUN JALAN MENGKATIP - LEHAI PANJANG 8 KILOMETER, LEBAR 15 METER, TINGGI 3 METER	KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
302	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan siring tebing tanah longsor	Rt. 002 dan Rt. 003 Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
303	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Penimbunan siring tebing	Rt. 003 Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

304	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Perbaikan / Pelebaran dan pengaspalan jalan induk Desa	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
305	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan Rumah Mini Pehajatan Desa Mahajandau	Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
306	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Rehab Mesjid Sabilal Mutaqin Desa Damparan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
307	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di pedesaan	Pengadaan lampu Penerangan Tenaga Surya Dusun Muara Puning	Desa Teluk Timbau Dusun Muara Puning Kecamatan Dusun Hilir , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
308	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pagar Kuburan Muslimin RT.011 RW.06 Desa Damparan	Desa Damparan RT.011 RW.06 Kecamatan Dusun Hilir , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
309	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Desa Damparan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
310	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Mahajandau	Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
311	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Rekontruksi Jalan Bina Karya Desa Damparan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
312	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Rekontruksi Tahap II Peningkatan Jalan Dalam Desa Damparan RT.001 - RT.003	Desa Damparan RT.001 - RT.003 Kecamatan Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
313	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan pelabuhan Desa	Desa Penda Asam Rt. 003, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
314	RINTO RAHMAN, S.Pd, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Rekontruksi Penghubung Jalan Antar Desa Damparan - Teluk Timbau	Desa Damparan - Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

315	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pelebaran jalan , pembuatan siring dan Pengadaan tanah timbunan jalan kuburan sei durung	Desa Penda Asam Rt. 002, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
316	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pembangunan gedung serba guna	Desa Penda Asam Rt. 002, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
317	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan pelebaran jalan balai benih menuju jalan pasar Desa	Desa Penda Asam Rt. 005 dan Rt. 002, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
318	Hj. ANI MAHRITA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Jalan Dawit Karani Buntok Kecamatan Dusun Selatan	Buntok Kecamatan Dusun Selatan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
319	Hj. ANI MAHRITA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jalan Jendral Soeharto Rt 18 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
320	Hj. ANI MAHRITA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Peningkatan Jalan Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
321	Hj. ANI MAHRITA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan Tingang Rt 19 Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
322	Hj. ANI MAHRITA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Rekontruksi Jalan Dapur Hancur 1 Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara	Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
323	Hj. ANI MAHRITA	Penanganan Sampah baru dapat terlaksana sekitar 75%, sedangkan sisanya sekitar 25% dikelola masyarakat (dibakar, dikubur, dan dibuang kesungai)	Pembersihan Sungai Lelek Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara	Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
324	Hj. ANI MAHRITA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jembatan Mantarem - Marawan Baru Kecamatan Dusun Utara	Kecamatan Dusun Utara , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
325	Hj. ANI MAHRITA	belum optimalnya kondisi pasar sehingga dapat menjadi lebih menarik bagi pengunjung dan membuka peluang baru bagi pedagang, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal.	Peningkatan / Perbaikan Los Pasar Desa Tarusan RT 1 Kecamatan Dusun Utara	Desa Tarusan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

326	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Cor jalan usaha tani Rigei	Desa Penda Asam Rt. 01 , Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
327	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Peningkatan jalan Kasumba	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
328	Hj. ANI MAHRITA	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan Pagar Cor Beton Kuburan Muslimin RT 6 Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara	Desa Tarusan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
329	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Cor Gang Rt. 005	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
330	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembuatan BOX COULVET Rt. 011 (jalan Desa)	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
331	RIDA SRI AHLINA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rekontruksi jalan pasty I Dusun Selatan	Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
332	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	Permohonan mesin Motor Untuk para nelayan teluk bayur	Desa Penda ASam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
333	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Gang menuju Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kec. GBA	Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
334	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Lanjutan jalan usaha tani Rt. 001	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
335	RIDA SRI AHLINA	Masih minimnya sarana dan pra sarana serta infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan tingkat Desa	Lanjutan gedung Serba Guna Desa Palu Rejo	Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
336	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Jalan Gunung Rantau - Marawan Lama	Desa Gunung Rantau dan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
337	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Titian usaha jembatan tani	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
338	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan Gang Pasar RT. 17 Kelurahan Pendang	Kelurahan Pendang RT. 17 Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

339	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan / Rekontruksi Gang Bituguling I Kelurahan Pendang	Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
340	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Perbaikan jalan Teluk Mampun menuju Desa Tnajung Jawa	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
341	RIDA SRI AHLINA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rekonstruksi Jembatan Sunsang Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
342	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pembangunan Kantor BPD	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
343	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Peningkatan Jalan Marawan Lama - Desa Talekoi	Desa Marawan lama, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
344	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Penimbunan halaman sekolah SDN Teluk Mampun	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
345	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Jalan Desa Margajaya menuju MTU Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Margajaya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
346	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa RT. 1, 2, 3, 10 dan 11 Desa Palu Rejo	Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
347	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Perbaikan Plapon Masjid	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
348	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan menuju Masjid / Madrasah Desa Marawan Baru	Desa Marawan Baru, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
349	RIDA SRI AHLINA	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

350	RIDA SRI AHLINA	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Siring Timbun halaman Kantor Desa BPD dan PUSTU Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
351	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan cor beton antar Desa Tanjung Jawa dan Teluk Mampun	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
352	RIDA SRI AHLINA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rekonstruksi Jalan menuju TPU Muslim di RT. 08 Kelurahan Pendang	RT. 08 Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
353	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan cor beton jalan antar Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
354	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Pembuatan Plapon Masjid Jami Nurul Hikmah	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
355	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Rehab Kantor Desa	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
356	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembuatan siring pencegah longsor di Rt. 01 , Rt. 02 dan Rt 06	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
357	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perbaikan pintu CEK DAM	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
358	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembuatan Pelabuhan / Dermaga	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
359	RIDA SRI AHLINA	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan Gang Masjid Al-Ittihad Kelurahan Pendang	Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
360	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Pembuatan Tempat whudu Masjid Nurul Hikmah	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

361	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan pagar kuburan Muslim Rt 03 dan Rt. 06	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
362	RIDA SRI AHLINA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Gang Karya Bersama Kelurahan Pendang	Kelurahan Pendang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
363	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Lanjutan pembangunan Balai Basarah Hindu Kaharingan	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
364	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan jalan Palurejo - Kananai	Desa Palurejo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
365	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	Pengadaan Ambulance Air	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
366	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembangunan Jembatan Sungai Munyo	Sungai Munyo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
367	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Rehab berat bangunan TK Kenanga dan Rehab halaman sekolah TK Kenanga Jalan Jelapat RT. 09, RW. 01	Jalan Jelapat RT 09, RW 01 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
368	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	Rehab Polindes	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
369	ENSILAWATIKA WIJAYA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan jembatan(Boxkalvert)Rt.18 Rw.006 desa palu rejo 4x4 X 1,9 M X 25 M	Desa Palo Rejo kecamatan gunung bintang awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
370	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Siring timbun di desa Pararapak	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
371	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pengadaan tanah kuburan bersama (Tpu) di desa Prarapak	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

372	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Perbaikan Infrastruktur jalan AMD menuju Jalan Kelurahan Jelapat, RT 10, RW 02, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan Panjang = 600 Meter dan Lebar = 4,5 Meter	Jalan AMD RT 10 , RW 02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
373	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehab tambatan perahu atau dermaga	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
374	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pengaspalan jalan dalam Desa	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
375	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	Jaringan Air bersih untuk masyarakat	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
376	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pembuatan BEJE (Embung Air) di Desa Danau Masura, dari kelompok Nelayan Peduli Gambut Surian Berkah 2 x 100 m, kedalaman 2 Meter	Desa Danau Masura, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
377	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak	Pengadaan Tandon Air	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
378	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Gorong gorong jalan Desa pararapak	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
379	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Bantuan rumah ibadah	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
380	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Bantuan rehab untuk masyarakat yang kurang mamapu	Desa pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
381	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Pembangunan TK PAUD harapan jatuh	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
382	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	Rehab Postu	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

383	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan Sanggu menuju Desa Telekoi	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
384	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan Mangkatip menuju Desa Mahajandau	Kecamatan Mangkatip, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
385	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Pengadaan Ternak ayam petelur Di Desa Mangaris sebanyak 1.000 ekor	Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
386	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan Salat Baru menuju Teluk Betung	Desa Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
387	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Jalan Sei Jaya menuju Mahajandau	Desa Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
388	H. SUDIARTO, SE	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Belum tersedianya gedung serbaguna di Desa Talio RT. 03	Desa Talio RT. 03 , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
389	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Pengadaan Bibit Babi Di Jalan B.A Tidja Kaladan - Talio Desa Danau Sadar	Jalan B.A Tidja Kaladan - Talio Desa Danau Sadar, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
390	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Pembuatan badan jalan sekolah Smp satu atap	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
391	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Pagar Sd Dangka	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
392	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pengadaan Kursi dan Meja Murid di SMP Santa Maria Buntok	Jalan Panglima Batur, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
393	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Parkiran Sekolah SDN Dangka dan SMPN Satu Atap	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

394	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan pengaspalan jalan Dangka Menuju Marga Jaya	Desa Dangka Rt. 01, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
395	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan pengaspalan jalan Dangka menuju Telang Andrau	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
396	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan	Pengadaan Sangkar Khusus Sampah botol (3 Buah) dan Tong Sampah sebanyak (9 Buah) di Taman Iring Witu Buntok	Jalan Tugu , Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
397	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Pembuatan Ruang Kantor SDN Dangka	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
398	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Pengaspalan jalan Dangka menuju Gagutur	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
399	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Kursi Meja Siswa SD Dangka	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
400	ARBANU	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	REHAB BERAT PUSTU RT 3, RW 1 DESA UGANG SAYU 5 X 8 METER	DESA UGANG SAYU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
401	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik	Tambahan Ruang Guru dan Kepala ruang sekolah smp 1 Atap	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
402	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan jalan ke pemakaman Muslim	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
403	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Pembentukan pembuatan jalan usaha tani	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
404	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GAGUTUR - SARIMBUAH PANJANG 4 KILOMETER, LEBAR 4 METER	JALAN GAGUTUR - SARIMBUAH , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

405	Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Bantuan alat Traktor roda 4 (empat) petani	Desa Dangka Rt. 01 dan Rt. 02, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
406	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENYIRINGAN DAN PENINGKATAN JALAN DALAM DESA RT 01, 02, 03, 04 DESA WUNGKUR BARU PANJANG 1000 METER	DESA WUNGKUR BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
407	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN RT 03 DUSUN EKENG DESA BARUANG PANJANG 1500 METER	DUSUN EKENG DESA BARUANG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
408	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN COR BETON PELITA RAYA RT 01, 02 KELURAHAN PENDANG PANJANG 150 METER, LEBAR 3 METER	KELURAHAN PENDANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
409	ARBANU	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PENINGKATAN JALAN COR BETON GANG AR RAHMAN RT 06, 07 KELURAHAN PENDANG 120 METER, LEBAR 1,5 METER	KELURAHAN PENDANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
410	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Pengadaan Bibit Nanas di Desa Pararapak	Desa Pararapak Kacamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
411	ARBANU	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PEMBUATAN PAGAR BETON SMP-N 1 GUNUNG BINTANG AWAI 300 METER	SMP-N 1 GUNUNG BINTANG AWAI , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
412	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	REHAB TOTAL COR BETON JEMBATAN AMANG MAHAI RT 2 RW 1 DESA TALEKOI 18 M X 4 M	JEMBATAN AMANG MAHAI RT 2 RW 1 DESA TALEKOI, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
413	ARBANU	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	PENGADAAN BIBIT KOPI RUBUSTA KELOMPOK TANI MIRA PAKAT DESA UGANG SAYU 900.000 BIBIT	DESA UGANG SAYU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
414	ARBANU	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	PENGADAAN KERAMBA DAN BIBIT IKAN PATIN TANI NELAYAN BARU RT 01, 02 KELURAHAN PENDANG 800.000 EKOR	RT 01, 02 KELURAHAN PENDANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
415	ARBANU	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	PENGADAAN BIBIT AYAM BERTELOR DAN PAKAN KELOMPOK TANI MAJU RT 6 RW 2 DESA UGANG SAYU 800 EKOR	RT 6 RW 2 DESA UGANG SAYU , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
416	ENSILAWATIKA WIJAYA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan cor rabat jalan pada RT 018 RW 006 desa Palu Rejo dengan volume 500 M x 1,5 M x 0,25 M	Desa Palu Rejo, RT 018 RW 006 kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

417	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	Bantuan alat tangkap ikan Seperti Lunta, Rengge, Tampirai, bubu, Pangilar, dan Jukung untuk kelompok Nelayan Danau Masura masing-masing alat sebanyak 20 Sheet untuk 20 Orang	Desa Danau Masura , Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
418	ARBANU	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN TURAP RT 06, 07 DESA TABAK KANILAN 200 METER	RT 06, 07 DESA TABAK KANILAN , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
419	ARBANU	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	REHAB PUSTU DESA MUKA HAJI 1 UNIT	PUSTU DESA MUKA HAJI, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
420	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBUATAN BRONJONG/TURAP RT 03,04 DESA KAYUMBAN 350 METER	RT 03,04 DESA KAYUMBAN, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
421	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	LANJUTAN REHAB BERAT BALAI IMANAPA RT 3 DESA UGANG SAYU	BALAI IMANAPA RT 3 DESA UGANG SAYU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
422	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	COR BIASA JALAN PASAR LAMA PANJANG 200 METER ,LEBAR 3 METER	PASAR LAMA KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
423	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	COR BIASA JALAN PAKAT PAHARI 1 RT 5, PANJANG 150 METER	JALAN PAKAT PAHARI 1 RT 5, KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
424	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN 2 P2D PANJANG 1 KILOMETER, LEBAR 4 METER, TINGGI 3 METER	PEMBANGUNAN JALAN 2 P2D KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
425	MUHAMMAD RIDWAN	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN KELURAHAN MENGKATIP KEDUA PANJANG 350 METER, LEBAR 4 METER, TINGGI 3 METER	JALAN KELURAHAN MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
426	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN GANG BARITO RAYA II .A JL BARITO RAYA RT 44 KEL BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN.	GANG BARITO RAYA II .A JL BARITO RAYA RT 44 KEL BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
427	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN GANG BARITO RAYA II JLN BARITO RAYA RT 36 KEL.BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN	GANG BARITO RAYA II JLN BARITO RAYA RT 36 KEL.BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
428	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GANG DELIMA RT4RW 02 DESA SABABILAH.	GANG DELIMA RT4RW 02 DESA SABABILAH. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

429	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GANG 3 A JLN VETRAN, RT 13 RW 02 KEL.BUNTOK KOTA	GANG 3 A JLN VETRAN, RT 13 RW 02 KEL.BUNTOK KOTA. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
430	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GANG FIRDAUS JLN VETRAN RT 12 RW 02 KEL.BUNTOK KOTA.	GANG FIRDAUS JLN VETRAN RT 12 RW 02 KEL.BUNTOK KOTA. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
431	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GANG BERSAUDARA RT 004 RW 001 KEL HILIR SPER	GANG BERSAUDARA RT 004 RW 001 KEL HILIR SPER , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
432	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	GANG SUKA DAMAI 2 JLN PEMBANGUNAN RT 13, RW 04 HILIR SPER.	GANG SUKA DAMAI 2 JLN PEMBANGUNAN RT 13, RW 04 HILIR SPER., Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
433	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN GANG IBUNDA 5 RT 21 JALAN IBUNDA KEL.HILIR SPER.	GANG IBUNDA 5 RT 21 JALAN IBUNDA KEL.HILIR SPER. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
434	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN GANG SINDEN JALAN KELURAHAN KEL.BUNTOK KOTA.	LANJUTAN GANG SINDEN JALAN KELURAHAN KEL.BUNTOK KOTA. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
435	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBUATAN GANG KELUARGA JALAN ANGGREK RT 004 RW 002 DESA SANGGU	PEMBUATAN GANG KELUARGA JALAN ANGGREK RT 004 RW 002 DESA SANGGU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
436	Hj. ENUNG IRAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	PENGADAAN MESIN POMPA AIR LENGKAP DENGAN SELANG DAN PENYIMPANAN RT 13, RW 02 JALAN VETRAN KELURAHAN BUNTOK KOTA	RT 13, RW 02 JALAN VETRAN KELURAHAN BUNTOK KOTA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
437	Hj. ENUNG IRAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	PEMASANGAN PIPA PDAM JLN KARTINI KELURAHAN HILIR SPER	JLN KARTINI KELURAHAN HILIR SPER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
438	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBUATAN BUNDARAN PERTIGAAN JLN BARITO RAYA ,JLN PELITA 4, KEL BUNTOK KOTA.	JLN BARITO RAYA ,JLN PELITA 4, KEL BUNTOK KOTA., Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

439	Hj. ENUNG IRAWATI	Belum optimalnya sistem drainase	PEMILIHARAAN DRAINASE (TROTOAR) RT 13 JLN PEMBANGUNAN KEL HILIR SPER.	RT 13 JLN PEMBANGUNAN KEL HILIR SPER. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
440	Hj. ENUNG IRAWATI	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	PEMBUATAN PAGAR ,SIRING KUBURAN GANG KUSUMA JLN.KARTINI HILIR SPER.	GANG KUSUMA JLN.KARTINI HILIR SPER. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
441	Hj. ENUNG IRAWATI	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	PENGADAAN BIBIT IKAN DESA TELUK TELAGA (KELOMPOK USAHA TANI PERIKANAN HARAPAN TELAGA	DESA TELUK TELAGA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
442	Hj. ENUNG IRAWATI	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	LANJUTAN BANGUNAN GEDUNG LANTAI 2 RUMAH SAKIT JARAGA SASAMEH ,KEL BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN	RUMAH SAKIT JARAGA SASAMEH ,KEL BUNTOK KOTA KEC DUSUN SELATAN, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
443	Hj. ENUNG IRAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PERBAIKAN JALAN IBUNDA GANG IBUNDA 3.KEL HILIR SPER	JALAN IBUNDA GANG IBUNDA 3.KEL HILIR SPER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
444	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN TELUK TULAGA - TALIO	JALAN TELUK TULAGA - TALIO, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
445	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I.R DESA TELUK TULAGA.	DESA TELUK TULAGA., Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
446	IDARIANI, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PEMBANGUNAN PAGAR SDN TELUK TELAGA	SDN TELUK TELAGA , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
447	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENGECORAN HALAMAN MASJID DESA TELUK TELAGA	MASJID DESA TELUK TELAGA , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
448	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	BANTUAN ALAT PERTUKANGAN UNTUK RUKUN KEMATIAN DESA BARU	DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
449	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN DATU BAJINGKIT DESA BARU	JALAN DATU BAJINGKIT DESA BARU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
450	IDARIANI, SE	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	PENGADAAN KARAMBA UNTUK KELOMPOK PERIKANAN DESA DANAU SADAR	DESA DANAU SADAR, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
451	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PEMBANGUNAN GANG RAMBAI DESA DANAU SADAR	GANG RAMBAI DESA DANAU SADAR, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

452	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBUATAN BRONJONG PENGAMAN JEMBATAN DESA DANAU SADAR	JEMBATAN DESA DANAU SADAR, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
453	IDARIANI, SE	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KELURAHAN HILIR SPER (LOKASI EX KODIM)	KELURAHAN HILIR SPER (LOKASI EX KODIM) , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
454	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PEMBANGUNAN GANG DARI JALAN KARTINI MENEMBUS JALAN JELAPAT SIMPANG KLK	JALAN KARTINI KE JALAN JELAPAT SIMPANG KLK 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
455	IDARIANI, SE	Belum optimalnya sistem drainase	PEMBANGUNAN DRAINASE DARI DERMAGA JELAPAT KE ARAH SUNGAI PAKU	DERMAGA JELAPAT KE ARAH SUNGAI PAKU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
456	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBUATAN BRONJONG PENGAMAN SEPUTARAN JEMBATAN SUNGAI PAKU KELURAHAN JELAPAT	JEMBATAN SUNGAI PAKU KELURAHAN JELAPAT, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
457	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBERSIHAN SUNGAI KARABUNG RT 29, KELURAHAN BUNTOK KOTA	SUNGAI KARABUNG RT 29, KELURAHAN BUNTOK KOTA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
458	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBERSIHAN SUNGAI BAKUKU DESA BARU MENUJU DUSUN BAMBALER	SUNGAI BAKUKU DESA BARU MENUJU DUSUN BAMBALER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
459	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBERSIHAN SUNGAI GANTING MENUJU MUARA ARAI	SUNGAI GANTING MENUJU MUARA ARAI, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
460	IDARIANI, SE	Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah	PENATAAN KAWASAN STADION BATUAH	STADION BATUAH KELURAHAN HILIR SPER, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
461	IDARIANI, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PEMBANGUNAN PAGAR SDN TETEI LANAN	SDN TETEI LANAN , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
462	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN JALAN DAN TITIAN PAKAT RAMA DESA DANGKA KECAMATAN DUSUN SELATAN	DESA DANGKA KECAMATAN DUSUN SELATAN, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
463	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN ULU RIKUT JAWU DESA SABABILAH	JALAN ULU RIKUT JAWU DESA SABABILAH , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

464	IDARIANI, SE	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PEMBERSIHAN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN RUBANG RT 42, KELURAHAN BUNTOK KOTA	PERSAWAHAN RUBANG RT 42, KELURAHAN BUNTOK KOTA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
465	IDARIANI, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYU TAMPA RUMIS MENUJU PERSAWAHAN RUBANG RT 42, KELURAHAN BUNTOK KOTA	JEMBATAN KAYU TAMPA RUMIS MENUJU PERSAWAHAN RUBANG RT 42, KELURAHAN BUNTOK KOTA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
466	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pengerasan badan jalan Bintang Ara - Patas II/Buyuy	Bintang ara - Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
467	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	peningkatan badan jalan bintang ara - muara malungai	bintang ara - muara malungai kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
468	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan penyebrangan sungai ayuh jalan menuju Desa Bintang Ara	desa bintang Ara kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
469	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan jembatan Sei Kacang	muara malungai RT. 04, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
470	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	lanjutan pembangunan balai basarah di muara malungai	muara malungai RT. 03, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
471	PUTRI SITI ROHMAWATI	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	bantuan bibit ternak kambing dan sapi untuk 5 kelompok	RT. 01,02,03. dan RT.04 desa Bintang Ara kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
472	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	pembersihan jalur wisata air terowongan batu (tolongan batu)	desa bintang ara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
473	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	jalan lintas dalam desa bipak kali	Desa Bipak kali RT. 02 s/d RT. 05, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
474	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	pembangunan pagar balai adat	RT 02 Desa Bipak kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
475	PUTRI SITI ROHMAWATI	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	bangun baru posyandu cempaka	RT. 02 desa bipak kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

476	PUTRI SITI ROHMAWATI	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	lampu penerangan jalan sepanjang 6 km untuk 60 titik	RT.01 s/d RT.04 Desa Bipak kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
477	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	bantuan untuk pembangunan rumah ibadah	desa bipak kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
478	IDEHAM	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Cor Jalan Gang 3 Bersaudara Desa Baru	Desa Baru RT 7 RW 3, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
479	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Penimbunan Halaman	Jln Barito Raya Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
480	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	Pembuatan Halaman dan Tempat Parkir STIA Al Maarif Buntok	Jln Barito Raya Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
481	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Peningkatan Halaman Sekolah MAN Barsel	Jln R.a Kartini kel. Buntok Kota , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
482	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Normalisasi Saluran Menuju Lahan Pertanian Penda Asam	Penda Asam Buntok Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
483	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Normalisasi saluran samping jln Penda Asam	Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
484	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan Gang Buder Desa Sanggu	Desa Sanggu , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
485	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Gang Rajawali jln Amd 1 kel. Hilir Sper	Jln Amd 1 Gang Rajawali Kel. Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
486	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	bantuan alat tangkap ikan seperti Lunta, Rengge, Tampirai, bubu, Pangilar, dan Jukung untuk kelompok Nelayan Dusun Bambaler masing-masing alat sebanyak 20 Sheet untuk 20 Orang	Dusun Bambaler Kelurahan Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
487	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	Bantuan alat tangkap ikan Seperti Lunta, Rengge, Tampirai, bubu, Pangilar, dan Jukung untuk kelompok Nelayan Penda Asam masing-masing alat sebanyak 20 Sheet untuk 20 Orang	Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN

488	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	Bantuan alat tangkap ikan Seperti Lunta, Rengge, Tampirai, bubu, Pangilar, dan Jukung untuk kelompok Nelayan Danau Sadar masing-masing alat sebanyak 20 Sheet untuk 20 Orang	Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
489	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	Bantuan alat tangkap ikan Seperti Lunta, Rengge, Tampirai, bubu, Pangilar, dan Jukung untuk kelompok Nelayan Di Jelapat masing-masing alat sebanyak 20 Sheet untuk 20 Orang	Jalan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN
490	H. SUDIARTO, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembuatan selasar SDN 2 Talio dengan Bolume 50x20x100 di RT 02 Desa Talio	RT 02 Desa Talio, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
491	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan atau Pengaspalan Jalan Kaladan Ujung, Gg. AL - Qadar RT 24, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Panjang = 350 m, Lebar = 1.260 meter	Jalan Kaladan Gg. AL - Qadar RT. 24, RW. 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
492	H. SUDIARTO, SE	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	PDAM yang belum aktif di Desa Talio	RT 07 Desa Talio , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
493	H. SUDIARTO, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Rehab SMP 4 Karau Kuala di Desa Talio	Desa Talio, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
494	H. SUDIARTO, SE	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Peningkatan Jalan dari Mesjid At-Taqwa RT 03 Menuju ujung kampung (Jalan.Kaladan Talio) RT 07 - RT 11	Desa Talio, RT 07 - RT 11 , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
495	H. SUDIARTO, SE	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembuatan Gang Menuju PDAM di RT 07 Desa Talio	RT.07 Desa Talio, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
496	H. SUDIARTO, SE	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Titian Jalan Usaha Tani Sawah Gelombang Sebrang Desa di RT 06 Desa Talio	RT 06 Desa Talio, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

497	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Bantuan Bibit Ternak Bebek Di Jalan Jelapat RT 2 RW 01 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Buntok	Jalan Jelapat RT 2 RW 01 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Buntok, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
498	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan titian PAM RT 19 menuju RT 16 di Desa Babai	RT 19 dan RT 16 Desa Babai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
499	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan siring jalan Desa Babai dari Kemawang- RT 21 Desa Babai dengan Panjang 769 Meter, Lebar 3,5 Meter dan Tinggi 1,20 Meter	KEMAWANG - RT 21 Desa Babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
500	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembuatan Jalan Menuju Desa Babai - Desa Talio	Desa Babai - Desa Talio, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
501	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan jalan dari Desa Babai - Desa Teluk Betung	Desa Babai - Desa Teluk Betung, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
502	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembuatan Titian Gang Bersama di RT 06 Desa Babai	RT 06 Desa Babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
503	H. SUDIARTO, SE	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Rehab/Pelebaran Jalan Induk Desa Teluk Sampudau	Desa Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
504	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Pengadaan Ternak Babi di Desa Kalahien	Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
505	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor jalan MTU menuju Desa Malitin	MTU - Desa Malitin, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
506	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehab Jembatan Kantor Koramil Desa di Kelurahan Rantau Kujang	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
507	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan/ Cor Jalan RT 03 Desa Batilap	RT 03 Desa Batilap, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
508	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pengembangan Jalan Penghubung antar desa di Desa Batilap dan Desa Batampang	Desa Batilap - Desa Batampang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
509	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehab total Jembatan Sungai Batilap di RT 003	RT 003 Desa Batilap, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
510	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan Titian Menuju Sungai Barito di RT 16 Desa Babai	RT 16 Desa Babai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
511	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rehab jalan titian di Lingkungan RT 21 RW 05 Desa Babai dengan Panjang 110M Lebar 1M dan Tinggi 3,50M	RT 21 RW 05 Desa Babai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

512	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pada UPT Puskesmas Buntok	Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
513	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga Jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal	Tersedianya Pembangunan Jaringan Air Bersih PDAM pada rumah - rumah masyarakat di Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
514	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Pagar Kuburan Kristen Protestan di Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
515	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Di Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
516	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Pagar Kuburan Kristen Khatolik Di Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
517	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Bangun Baru Pustu (Puskesmas Pembantu) Di Desa Teluk Betung	Desa Teluk Betung, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
518	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Beton Halaman Puskesmas Kangkung Buntok	Jalan Pahlawan Atas, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
519	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	REHAB GEDUNG GEREJA BARU PAKA DESA TAMPARAK KM 25	GEREJA BARU PAKA DESA TAMPARAK KM 25, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
520	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBERSIHAN SUNGAI AYUH SEPANJANG 25 KM DARI DESA MAJUNDRE KE MUARA BARITO PENDANG	SUNGAI AYUH SEPANJANG 25 KM DARI DESA MAJUNDRE KE MUARA BARITO PENDANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

521	EDY SAPUTRA, S.E	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PENERANGAN ATAU PEMASANGAN LAMPU DI DESA TABATAN	DESA TABATAN , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
522	EDY SAPUTRA, S.E	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	PENGADAAN BIBIT KEPALA SAWIT DESA TABATAN	DESA TABATAN , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
523	EDY SAPUTRA, S.E	Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja	PENYERAPAN ATAU PENGADAAN TENAGA KERJA KELURAHAN RANTAU KUJANG	KELURAHAN RANTAU KUJANG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
524	EDY SAPUTRA, S.E	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBANGUNAN ATAU PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DI RT 15 KELURAHAN RANTAU KUJANG	RT 15 KELURAHAN RANTAU KUJANG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
525	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN ATAU PENINGKATAN JEMBATAN SUNGAI LUNUK SEKITAR 90 METER	DESA MAHAJANDAU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
526	EDY SAPUTRA, S.E	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PEMASANGAN LISTRIK DESA MAHAJANDAU	DESA MAHAJANDAU , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
527	EDY SAPUTRA, S.E	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	PENGADAAN TENAGA MEDIS DI DUSUN BAKOTA	DUSUN BAKOTA , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
528	EDY SAPUTRA, S.E	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	PENGADAAN ATAU PENAMBAHAN TENAGA MEDIS	DESA SUNGAI JAYA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
529	EDY SAPUTRA, S.E	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PENAMBAHAN ATAU PEMBANGUNAN PJU TENAGA SURYA SEKITAR 25 TITIK	DESA SUNGAI JAYA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
530	EDY SAPUTRA, S.E	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENGADAAN KARPET ATAU AMBAL MASJID UKURAN SEKITAR 15 KALI 15 METER.	DESA SUNGAI JAYA, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
531	EDY SAPUTRA, S.E	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	PEMASANGAN ATAU PENERANGAN LAMPU JALAN PJU DESA RANGGA ILUNG	DESA RANGGA ILUNG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
532	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan Pengaspalan Jalan Kangkung III Seberang Alfamart atau seberang Puskesmas Buntok	Jalan Kangkung III, Pahlawan Atas Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
533	EDY SAPUTRA, S.E	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENDALAMAN ATAU PEMBERSIHAN ALUR SUNGAI DESA RANGGA ILUNG	DESA RANGGA ILUNG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
534	EDY SAPUTRA, S.E	Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja	PENGADAAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK MASYARAKAT DESA RANGGA ILUNG	DESA RANGGA ILUNG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
535	EDY SAPUTRA, S.E	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	LANJUTAN PEMBANGUNAN DERMAGA PUSKESMAS KELURAHAN MENGKATIP	DERMAGA PUSKESMAS KELURAHAN MENGKATIP , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

536	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	REHAB JALAN P2D MENUJU SIMPANG MAHAJANDAU - KALANIS MURUNG	JALAN P2D MENUJU SIMPANG MAHAJANDAU - KALANIS MURUNG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
537	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENGERASAN COR BETON JALAN DESA MAHAJANDAU MENUJU RANGGA ILUNG	JALAN DESA MAHAJANDAU MENUJU RANGGA ILUNG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
538	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN ANTAR DESA DAMPARAN KE DESA TELUK TIMBAU	JALAN ANTAR DESA DAMPARAN KE DESA TELUK TIMBAU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
539	EDY SAPUTRA, S.E	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	PEMBANGUNAN SIRING COR BETON ALKAH ATAU PEMAKAMAN MUSLIMIN DESA BATAMPANG	PEMAKAMAN MUSLIMIN DESA BATAMPANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
540	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	perbaikan dan Pengaspalan Jalan Damang Ladar RT. 044 RW 05	Jalan Damang Ladar , RT 044 RW 005, Seberang Kampus STAI Ma Arif atau SLB Buntok (Pahlawan Atas) Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
541	PURLIANI THEA, S.Kep, M.M	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Lanjutan Cor Beton Jalan Damang Ladar, Gg, Damang Ladar II RT 044, RW. 05	Jalan Damang Ladar, Gg, Damang Ladar II RT 044, RW. 05 Seberang Kampus STAI MAARIF , atau Dekat Sekolah SLB Barito Raya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
542	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jalan penghubung dari desa Talekoi menuju desa Bundar sepanjang 1 kilometer	Desa Talekoi kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
543	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jembatan Amang Mahai yang masuk ke desa Talekoi RT 02 RW 01 karena tidak memungkinkan dilewati kendaraan besar (truck) dengan ukuran panjang 18 Meter Lebar 4 Meter	Desa Talekoi RT 002 RW 01, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
544	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Beton jalan Desa Reong ke Desa Marawan Lama sepanjang 3 Kilometer/3 Meter	Desa Reong kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

545	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor beton jembatan panjang 50 Meter,Lebar 4 Meter di RT 002 RW 001 Dusun Mantarem Desa Marawan Lama	RT 002 RW 001 Dusun Mantarem Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
546	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Lanjutan pembangunan cor beton jalan Desa sampai dengan batas Desa Marawan Lama di jembatan sung dang,sepanjang 2 kilometer RT 001 RW 001	Desa Gunung Rantau RT 001 RW 001, kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
547	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan jalan muka haji - tabak kanilan	desa muka haji - tabak kanilan kecamatan gunung bintang awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
548	PUTRI SITI ROHMAWATI	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	rehab pustu desa muka haji	desa muka haji, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
549	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembangunan siring bronjong	desa muka haji, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
550	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	pembangunan masjid baru desa muka haji	desa muka haji, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
551	PUTRI SITI ROHMAWATI	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	pembuatatan galangan lahan sawah	desa muka haji, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
552	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan 3 ruangan SDDN 1 muka haji	desa muka haji, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
553	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	rekonstruksi jembatan sungsang penghubung desa gunung rantau - desa marawan lama panjang 5 m, lebar 4 m	desa gunung rantau kecamatan dusun utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
554	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	cor jalan lingkungan RT.3, RT. 10 RT.7 desa wayun	RT.3, RT. 10 RT.7 desa wayun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
555	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	lanjutan peningkatan jalan desa wayun	desa wayun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

556	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	pembangunan gedung serba guna desa wayun	desa wayun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
557	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	pembangunan TK Al-Taqwa desa Wayun	desa wayun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
558	PUTRI SITI ROHMAWATI	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	rehab pustu desa wayun	desa wayun, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
559	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	peningkatan jalan lingkung RT 04 desa palurejo	desa palurejo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
560	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan jalan lingkungan RT. 6 desa palurejo	desa palurejo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
561	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	peningkatan jalan RT. 18 desa palurejo	desa palurejo, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
562	RIRI FARDHANI, S.Pt	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan/pengerasan jalan dari Desa Tarusan menuju ke desa panarukan sepanjang 12 km	Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
563	HERMANES, SE	belum optimalnya kondisi pasar sehingga dapat menjadi lebih menarik bagi pengunjung dan membuka peluang baru bagi pedagang, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal.	Pembangunan Pasar Desa	Desa Gagatur, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
564	MUHAMMAD RIDWAN	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan	PAGAR PUSKESMAS MENGKATIP RT 2 , RW 1,	PUSKESMAS MENGKATIP RT 2 , RW 1, , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
565	HERMANES, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 2, SMP 2, dan SMAN 2	Desa Ugang Sayu, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
566	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PAGAR KELURAHAN MENGKATIP RT1, RW 1.	KELURAHAN MENGKATIP RT1, RW 1. , Kab. Barito	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
567	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PAGAR KECAMATAN MENGKATIP RT 1, RW 1,	KECAMATAN MENGKATIP RT 1, RW 1, , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

568	MUHAMMAD RIDWAN	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	GEDUNG SERBAGUNA MENGKATIP RT 1, RW 1.	GEDUNG SERBAGUNA MENGKATIP RT 1, RW 1. , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
569	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Jalan Lintas Dalam Desa	Desa Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
570	MUHAMMAD RIDWAN	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	LANJUTAN PELABUHAN PUSKESMAS MENGKATIP DI RT 2,RW 1	PELABUHAN PUSKESMAS MENGKATIP DI RT 2,RW 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
571	RIDA SRI AHLINA	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Rekonstruksi Jalan kalimutu RT. 10, 11, 12 Desa Palurejo	Desa Palurejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
572	RIDA SRI AHLINA	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Peningkatan Jalan menuju Makam RT. 2 sampai RT. 4 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
573	HERMANES, SE	Terbatasnya fasilitas untuk mengakomodir antusiasme masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan cagar budaya	Pembangunan Balai Adat Desa	Desa Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
574	RIDA SRI AHLINA	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	Pembuatan Jalan baru dari RT. 8 menuju RT. 6 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
575	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembanguna Jalan Baru dari Desa Muara Singan ke Dusun Luir	Desa Muara Singan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
576	RIRI FARDHANI, S.Pt	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan Siring Dermaga di Desa Bundar sepanjang 200 Meter	Desa Bundar kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
577	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembangunan Saringan Beton di tepi Masjid Sbilal Muhlisin	Desa Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
578	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Brton Jalan Gg. Kampung	Desa Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
579	EDY SAPUTRA, S.E	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	RENOVASI PUSKESMAS KELURAHAN MENGKATIP	RENOVASI PUSKESMAS MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

580	EDY SAPUTRA, S.E	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	RENOVASI GANG RAJAWALI KELURAHAN BANGKUANG	GANG RAJAWALI KELURAHAN BANGKUANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
581	EDY SAPUTRA, S.E	Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya	PENGADAAN TANAH DI DESA RANGGA ILUNG	DI DESA RANGGA ILUNG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
582	HERMANES, SE	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	Pagar kantor Desa	Desa Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
583	HERMANES, SE	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	Rehab / Bangun Baru Pustu Desa	Desa Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
584	HERMANES, SE	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kebun Kas Desa	Desa Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
585	HERMANES, SE	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Pembangunan Pagar Sekolah SDN	Desa Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
586	HERMANES, SE	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Bantuan Bibit Kambing dan Sapi	Desa Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
587	HERMANES, SE	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	Permohonan Bantuan Dana Bangunan Baru Posyandu	Desa Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
588	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Jalan dari Desa Sungai Telang - Simpang Desa Majundre	Desa Majundre, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
589	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pekerjaan Lanjutan Jalan Antara Desa Talekoi dan Majundre	Desa Talekoi, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
590	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Cor Jalan Rt. 04	Desa Bundar , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
591	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan Bronjong/ Turap	Desa Kayumban , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

592	HERMANES, SE	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Bantuan Bibit dan Pakan Ayam Petelor	Desa Wungkur Baru , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
593	AHMAD RIZKY, S.Pd	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PELEBARAN JALAN COR BETON RT 01 DESA KARANIS	RT 01 DESA KARANIS , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
594	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum optimalnya pemerataan pembangunaninfrastruktur pelayanan dasar	PEMBANGUNAN DERMAGA MASJID DESA MANGKATIR	DERMAGA MASJID DESA MANGKATIR , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
595	HERMANES, SE	Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam	Pembanguan tempat Parkir	Tabak Kanilan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
596	AHMAD RIZKY, S.Pd	Peran serta masyarakat dalam Pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai	PENGADAAN MOBIL AMBULAN DESA KALANIS	DESA KALANIS , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
597	AHMAD RIZKY, S.Pd	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN JALAN PADAT KARYA RT 6 DAN RT 7 KELURAHAN RANTAU KUJANG	JALAN PADAT KARYA RT 6 DAN RT 7 KELURAHAN RANTAU KUJANG , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
598	HERMANES, SE	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	Pembuatan Galangan Lahan Sawah	Tabak Kanilan , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
599	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PENINGGIAN DAN COR BETON HALAMAN MTs DAN MI DESA KALANIS	PENINGGIAN DAN COR BETON HALAMAN MTs DAN MI DESA KALANIS , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
600	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembanguan Jalan Baru	Desa Sire, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
601	HERMANES, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan Badan Jalan Baruang - Dusun Ekeng	Desa Baruang , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
602	AHMAD RIZKY, S.Pd	Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan)	PENGADAAN VAKSIN DAN OBAT HEWAN UNTUK KELOMPOK KERBAU DAN RAWA DESA KALANIS	DESA KALANIS, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	-
603	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	PEMBANGUNAN RUANGAN KELAS BARU MA HIDAYUSHIBIN DESA KALANIS	MA HIDAYTUS SHIBYAN DESA KALANIS, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
604	AHMAD RIZKY, S.Pd	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS PERKOTAAN JALAN HAULING PT ADARO INDONESIA KM 5	JALAN HAULING PT ADARO INDONESIA KM 5, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

605	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	REHABILITAS ATAP MASJID AL MUKARRAMAH DESA JANGGI RT 01	MASJID AL MUKARRAMAH DESA JANGGI RT 01 , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
606	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBANGUNAN TPA DI RT 06 DESA KELANIS	RT 06 DESA KELANIS , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
607	PUTRI SITI ROHMAWATI	belum optimalnya kondisi pasar sehingga dapat menjadi lebih menarik bagi pengunjung dan membuka peluang baru bagi pedagang, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal.	COR BETON LOKASI PASAR PENDANG	PASAR PENDANG kelurahan pendang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
608	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENGADAAN SARANA SPEED BOAT 40 PK UNTUK AKOMODASI KECAMATAN DUSUN HILIR	PENGADAAN SARANA SPEED BOAT 40 PK UNTUK AKOMODASI KECAMATAN DUSUN HILIR, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
609	AHMAD RIZKY, S.Pd	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PENGADAAN SPEED BOAT OPERASIONAL CAMAT DUSUN HILIR SPESIFIKASI MESIN YAMAHA 40 PK BODI SPEED FIBERGLASS	KECAMATAN DUSUN HILIR, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
610	PUTRI SITI ROHMAWATI	Penanganan Sampah baru dapat terlaksana sekitar 75%, sedangkan sisanya sekitar 25% dikelola masyarakat (dibakar, dikubur, dan dibuang kesungai)	pengadaan tempat pembuangan akhir sampah, sarana pengangkutan dan bak sampah 5 buah tiap RT	kelurahan pendang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
611	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	pembuatan gedung aula kanto kelurahan	kelurahan pendang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
612	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembangunan jalan pelita RT.14 kelurahan Pendang	jl. pelita RT. 14 kelurahan pendang, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
613	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	rehab masjid al-muttaqin desa reong	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
614	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	rehab tk tpa al-jannah desa reong	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
615	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya minat investasi	pembangunan jaringan listrik PLN	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
616	PUTRI SITI ROHMAWATI	Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi	rehab SD 1 desa reong	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

617	PUTRI SITI ROHMAWATI	Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil	rehab pustu desa reong	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
618	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kemampuan SDM perangkat desa yang masih rendah	rehab balai basarah	desa reong, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
619	PUTRI SITI ROHMAWATI	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembangunan pelabuhan pasar desa	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
620	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	bantuan untuk rumah- rumah ibadah	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
621	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya gedung/aula pertemuan serbaguna untuk masyarakat di Desa	rehab total kantor BPD	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
622	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	rehab total TKA - TPA mida'ul khairiah No unit 038	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
623	PUTRI SITI ROHMAWATI	Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi	rehab total perumahan guru SDN Gunung Rantau	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
624	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	saluran air bersih (PDAM)	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
625	PUTRI SITI ROHMAWATI	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	penggilingan padi desa gunung rantau	desa gunung rantau, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
626	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	usulan meja dan kursi untuk anak-anak TK kasih bunda desa marawan baru	desa marawan baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
627	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	pembangunan kantor BPD desa marawan baru	desa marawan baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
628	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	bantuan masjid nurul khoir	desa marawan baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
629	PUTRI SITI ROHMAWATI	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembangunan pelabuhan desa marawan baru	desa marawan baru, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
630	PUTRI SITI ROHMAWATI	Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil	pengadaan bibit ayam bertelur desa marawan baru	desa marawan lama, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN

631	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan jalan dalam desa marawan lama	desa marawan lama, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
632	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum tersedianya atau masih belum optimalnya infrastruktur jaringan listrik di	pengadaaan pamsimas (PDAM) desa marawan lama	desa marawan lama, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
633	PUTRI SITI ROHMAWATI	Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah	pembangunan jalan sawah desa marawan lama	desa marawan lama, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
634	PUTRI SITI ROHMAWATI	Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	peningkatan/pengerasan jalan dari desa tarusan menuju desa panarukan	desa tarusan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
635	PUTRI SITI ROHMAWATI	Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan	pembuatan dermaga bongkar muar barang desa tarusan	desa tarusan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
636	PUTRI SITI ROHMAWATI	Masih minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemakaman Umum (TPU)	pembuatan pagar beton kuburan muslimin dan kuburan hindu kaharingan	desa tarusan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
637	PUTRI SITI ROHMAWATI	belum optimalnya kondisi pasar sehingga dapat menjadi lebih menarik bagi pengunjung dan membuka peluang baru bagi pedagang, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal.	peningkatan / perbaikan los pasar tarusan	desa tarusan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
638	PUTRI SITI ROHMAWATI	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	pembuatan pagar pembatas antara kuburan muslimin dan kuburan hindu kaharingan desa tarusan	RT. 003 desa tarusan, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
639	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	GEREJA MIRA PAKAT ULU JAMAN RT. 2 DESA UGANG SAYU	GEREJA MIRA PAKAT ULU JAMAN RT. 2 DESA UGANG SAYU, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
640	ARBANU	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	PEMBUATAN PAGAR GEREJA GKE GAGUTUR DALAM RT.01	GEREJA GKE GAGUTUR DALAM RT.01, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
641	H. SUDIARTO, SE	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Pembuatan Jalan Titian Cor Beton RT.01 Panjang 125 Meter, Lebar 2 Meter, dan Tinggi 1,5 Meter di Gang Berkah	Gang berkah, RT 01 Desa Babai , Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
642	EDY SAPUTRA, S.E	Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor	PEMBANGUNAN/RENOVASI GANG KELUARGA DESA LEHAI RT, 1 , RW , 1. KECAMATAN DUSUN HILIR MENGKATIP	GANG KELUARGA DESA LEHAI RT, 1 , RW , 1. KECAMATAN DUSUN HILIR MENGKATIP, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

643	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENINGKATAN DAN PELABARAN JALAN PATIANOM, PANJANG 340 METER, LEBAR 4 METER, KETINGGIAN 0,50 METER PERKIRAAN DANA 700 JUTA JALAN TERSEBUT SUDAH ADA SIRING KIRI KANAN BADAN JALAN RT 02 RW 01 DESA TELUK BETUNG KECAMATAN KARAU KUALA KAB BARSEL	ALAN PATIANOM RT 02 RW 01 DESA TELUK BETUNG KECAMATAN KARAU KUALA KAB BARSEL, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
644	EDY SAPUTRA, S.E	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	PENERUSAN JALAN MUFAKAT DI KELURAHAN RANTAU KUJANG	JALAN MUFAKAT DI KELURAHAN RANTAU KUJANG, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
645	NURUL HIKMAH	Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik	Peningkatan gang Al Jihad H.indar	Gang Al Jihad H. Indar, Kab. Barito Selatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selain melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga menerima aspirasi dari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan. Usulan-usulan prioritas yang disampaikan melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan ini kemudian diinput oleh Kecamatan melalui aplikasi SIPD, usulan-usulan ini kemudian disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksinya untuk ditelaah, apakah akan diterima atau ditolak untuk dimasukkan menjadi program dan kegiatan Perangkat Daerah Terkait tersebut di tahun 2026. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026

No	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
1	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Tahap 5 Cor Beton Jalan Rantau Kujang ke Rantau bahuang ± 1,5 Km	Desa R. Kujang - Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehab Berat Kantor Kecamatan	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya pengelolaan sampah terpadu	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir dan Alat Penunjang (tosa roda 3)	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peninggian Jembatan Penghubung Jalan Tembus R. Kujang ke R. Rantau Bahuang (Jembatan Sungai Jenamas 2)	Desa R. Kujang - Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan/GG RT.17 RW.05	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan/GG RT.14 RW.05	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk organisasi kepemudaan	Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
8	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembuatan Pelabuhan Mini RT. 12 RW.04 (dekat kantor koramil jenamas)	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
9	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Pembangunan Jalan Padat Karya Cor Beton RT.09 sampai dengan RT. 01 P. 1250 M L.3 M	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Karya Bhakti RT.10 Panjang ± 1 Km	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Damai dari RT.10 s/d RT. 16 Panjang ± 800 Meter	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan dan Pelebaran GG H.Imran RT.06 Panjang ± 150 Meter	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rekonstruksi Jalan Al - Mursidul Amin RT.17 Panjang ± 800 Meter	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Umum Kelurahan Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembersihan Saluran Irigasi Pertanian Kelurahan Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya akses dan kualitas tenaga kesehatan secara umum (dokter dan dokter gigi) bagi masyarakat	Tenaga Kesehatan Dokter Umum	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
17	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya akses dan kualitas tenaga kesehatan secara umum (dokter dan dokter gigi) bagi masyarakat	Tenaga Kesehatan Dokter Gigi	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
18	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Mobil Ambulanc Darat (Roda 4)	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
19	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Siring dan Uruk Halaman Puskesmas	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
20	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Rehab berat titian pendaratan Dermaga Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
21	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Rehab berat ponton Dermaga Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN

22	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Kantor UPTD Dermaga Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
23	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya pengelolaan sampah terpadu	Pembuatan bak sampah	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan Tabatan	SDN Desa Tabatan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
25	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Siring Cor Halamanan Masjid Al-Mukkaram	Tabatan RT.02, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya rumah ibadah untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Rehab Langgar Noor Hidayah	Tabatan RT.04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya rumah ibadah untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Rehab Total Langgar darul Alimin	Tabatan RT.03, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Galian Timbun Jalan Usaha Tani 1 Km	Tabatan RT.04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
29	MAHMUDIN	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk organisasi keolahragaan	Pembangunan Gedung Futsal	Tabatan RT.04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tabatan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
30	SAPARIYONO, SP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Tembus ke Perbatasan Kec.Paminggir Kab.HSU (7KM)	Rantau Bahuang/Paminggir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Bahuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	SAPARIYONO, SP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Tembus ke Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas (500M)	Rantau Bahuang/R.Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Bahuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	SAPARIYONO, SP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Dalam Desa Rantau Bahuang RT.11	Rantau Bahuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Bahuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	SAPARIYONO, SP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Menuju Makam Sungai Murung (550M)	Rantau Bahuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Bahuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	SAPARIYONO, SP	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembuatan Gedung Serbaguna	Rantau Bahuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Bahuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	DARMADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Perbaikan jalan Desa yang Longsor di Depan Masjid Tampulang	Desa Tampulang RT 04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tampulang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	DARMADI	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Rumah Dinas Guru SDN Tampulang (2 Unit)	Desa Tampulang RT 02, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tampulang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
37	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Mess Pegawai Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Lanjutan Rumah Jabatan Camat Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan lanjutan Penyambungan Pipa Induk Istalasi Perumdam Unit Mengkatip dari RT. 007 s/d RT. 012	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	DARMADI	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Ruang Komputer dan Perpustakaan / UKS u. SDN Tampulang (2 unit)	Desa Tampulang RT 02, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tampulang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

42	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan Pagar Halaman Istalasi Perumdam Unit Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	DARMADI	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Serba Guna	Desa Tampung RT 02, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tampung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan Saluran Pembuangan (Cor Beton) stalasi Perumdam Unit Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pengadaan Mesin Alkon untuk pengurasan air Kotor di Instalasi Perumdam Unit Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	DARMADI	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Alkah yang baru, untuk persiapan musim banjir	Desa Tampung RT 04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Tampung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerukan Hantasan Halimudin	Mengkatip_Mangkatir Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	JAINAL	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Tembus Antar Desa Rangga Ilung ke Desa tetangga (Mahajandau dan Murung Kelanis)	Rangga Ilung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	JAINAL	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Perehapan Pasar Desa	Rangga Ilung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembangunan Lanjutan Titian Cor Beton Lingkungan Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
51	JAINAL	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Penimbunan Lapangan Yayasan SMA Bina Ilmu Desa Rangga Ilung	Rangga Ilung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Rehab Jalan Lingkungan Permukiman Lapangan Binjai	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
53	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Pembangunan Baru Pasar Modern di Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
54	JAINAL	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan kelistrikan	Penyediaan Jaringan Listrik 1 x 24 Jam (PLN)	Rangga Ilung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
55	JAINAL	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Pembangunan Tower Telekomunikasi	Rangga Ilung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
56	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penerangan Jalan Umum 60 Titik	Kelurahan Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
57	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Dana untuk Membayar Sisa Harga Tanah Tempat Pembangunan Rumah Adat/Batang Kecamatan/Kedamangan Dusun Hilir Kabupatn Barito Selatan	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
58	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Rehab Mushola Sabilal Rasyad Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH

59	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pengadaan Speed Boat 85 PK	Kantor Camat Jenamas, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
60	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Baru di Depan Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
61	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Renovasi Mushola serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Mushola Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
62	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya aula pertemuan yang refresentatif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat	Pembangunan Aula Bhayangkari Polsek Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 23 KK	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
65	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Rumah Guru 1 Unit 2 Pintu	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
66	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pengadaan Moubiler Kantor dan Sekolah SDN-1 Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
67	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 1 Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
68	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Pembangunan Tempat Parkir SMPN-1 Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
69	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Kantor Korwil Dinas Pendidikan	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
70	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Rumah Dinas Korwil Dinas Pendidikan	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
71	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Rumah Dinas Perawat Rt. 002	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
72	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Rumah Dinas Perawat Rt. 007	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
73	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Rumah Dinas Bidan Rt. 007	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
74	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Mess Perawat Rt.002	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
75	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Rehab Dermaga Pelabuhan Gereja Pandohop	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
76	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Lanjutan Pembangunan Dermaga Puskesmas Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN

77	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan SMPN-1 Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
78	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan dan Penimbunan Tempat Parkir MIN 2 Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Ruang Mushola Sekolah SMAN 1 Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan gedung aula Pertemuan guru	Pembangunan Aula Pertemuan Guru 2 x 8 M Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
81	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Posyandu di Kel. Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehab Jalan P2D (menuju simpang Mahajandau-Kalanis Murung	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan 1 Ruang Kelas, 1 Ruang Kantor dan 1 Perumahan Dinas Guru	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
84	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan di RT. 010 Rw. 004	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab Gedung dan Mubiler Kantor Korwil	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
86	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab Jembatan Kantor Korwil	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
87	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pengadaan Tandon Air untuk Asrama/Kantor Polsek Dusun Hilir	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Cor Beton Halaman Kantor Kelurahan Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Rehab Pagar Kantor Kelurahan Mengkatip	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembuatan Rumah Menara Lonceng Gereja GKE Pandohop	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
91	YONG CIFAT DESPRIANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan lanjutan Pagar Selasar Mesjid Nurul Iman	Mengkatip, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH

92	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	kondisi sarana prasarana penunjang kegiatan penyuluhan dalam kondisi yang tidak layak	Rehab Rumah Jaga dan Titian UPT BPP	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
93	JONI HARTONO, A.Md	Kelurahan / Desa	kondisi sarana prasarana penunjang kegiatan penyuluhan dalam kondisi yang tidak layak	Rehab Cat/Pengecatan Kantor UPT BPP	Rantau Kujang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
94	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengaspalan Jalan Pendang dari Jembatan Ihi s/d Simpang Mantarem	Jalan Lintas Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehab Kantor Kecamatan Dusun Utara	Kantor Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehap Kantor dan Aula Korwil Kecamatan Dusun Utara	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
97	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab PAUD Mekar Sari	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
98	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Peningkatan Jalan Usaha Tani (BPP Dusun Utara)	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
99	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Bibit Ikan Patin dan Pakan (BPP Dusun Utara)	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
100	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembangunan Pagar Lokasi Perumahan UPT Puskesmas Pendang	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
101	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rehab Berat Rumah Dinas Perawat UPT Puskesmas Pendang	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
102	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Peningkatan Pengolahan Kualitas Air Bersih (PDAM Pendang)	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembuatan Gedung Aula Kantor Kelurahan Pendang	Kelurahan Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Rendahnya pengelolaan sampah terpadu	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) & Saran Angkutan	Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Beringin	Kelurahan Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
107	ANDUNG, AMd, Kep	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Paping Blok Halaman Kecamatan Dusun Utara	Halaman Kantor Kecamatan Pendang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	JULKIPLI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan/Cor Jalan Menuju Desa Panarukan	RT.001 RW.001 Desa Tarusan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Tarusan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
109	SAKITO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Desa Reong ke Marawan Baru	Desa Reong, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Reong	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	HADIANI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Ianjutan Jalan Cor Beton Menuju Simpang Mantarem	Marawan Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Marawan Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	MULIANO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Marawan Lama - Desa Talekoi	Desa Marawan Lama, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Marawan Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

112	MULIANO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jembatan Mantarem-Marawan Baru	Jalan Mantarem-Marawan Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Marawan Lama	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	KRLUSIUS FRANSISKA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rekonstruksi Jembatan Sungsang Penghubung Desa Marawan Lama & Gunung Rantau	RT.001 Gunung Rantau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Gunung Rantau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
114	SUBANDRIO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan & Pembangunan Jembatan sepanjang jalan G.Tumang	Jalan G. Tumang Desa Majundre, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Majundre	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
115	BARLAMIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan dari Desa Sungai Telang-Simpang Desa Manjundre	Jalan Se Telang Simpang majundre, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Sungai Telang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
116	NARWASTA	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehap Berat Rumah Dinas Jabatan Camat	Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
117	WINARIADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pekerjaan Lanjutan Jalan Antar Desa Talekoi dan Majundre	Jalan Lintas Talekoi-Manjundre, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Talekoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
118	EDUARD	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Jalan RT.04	Desa Bundar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Bundar	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
119	EREKTO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan dari Desa Maruga s.d Desa gunung Rantau	Desa Maruga RT.003 RW.001, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Maruga	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
120	NARWASTA	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pemasangan Paping Halaman dan Penimbunan Halaman Kantor Camat Gunung Bintang awai	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
121	HENDHY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Jalan Panarukan-Montallat	Desa Panarukan RT.003 RW.001, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Panarukan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
122	NARWASTA	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehap Berat Atap Kantor dan Plapon yang bocor	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
123	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembuatan Tower Air Bersih	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
124	WALDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Poros Desa Hulu Tampang Menuju Jalan Negara Ampah Muara Teweh	Hulu Tampang Sampai KM.30, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Hulu Tampang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125	KARTONO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan/Rekontruksi Jalan Desa Hingan	RT.001, RW.002, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Hingan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
126	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pemasangan Keramik Aula Pertemuan Korwil	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
127	NARWASTA	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehap Berat Balai Pertemuan Ex Rujap Puskesmas Tabak Di Samping Kantor Kedamaian	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
128	HERTONI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan desa Danau Bambure & Pembangunan Jembatan	RT.001, RW.002, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Danau Bambure	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
129	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pengadaan Pipa Induk 6 Inchi	Tabak Kanilan, Ruhing Raya, Sarimbuah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
130	REPELITA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jembatan Cor Beton	Desa Tamparak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Tamparak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
131	Gunsalis	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengaspalan Jalan Lintas Desa Tamparak Layung-Tamparak Sepanjang 3,4 KM	RT.003 dan RT.003, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Tamparak Layung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

132	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pagar Kantor dan Got/Parit Pembuangan Tempat Lumpur	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
133	TRIANA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	bangun Baru Rehab Berat Jembatan BOX CLUIVERT	RT.06 RW.001, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Bantai Bambure	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
134	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya rumah dinas/mess bagi pegawai pemerintah	Rumah Dinas PDAM	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
135	RAHMADIANTO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan & Jembatan Rampa Mea-Indrang Nangu	RT.03 Rampa Mea, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Rampa Mea	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
136	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Mobil Ambulan / Jenazah	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
137	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Perehapan dan Pelebaran Jalan Ke Komplek TPU Muslim di RT 09	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
138	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jalan Masuk Kantor	Kantor UPT-BPP Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
139	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembangunan Tempat Parkir	Kantor UPT-BPP Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
140	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembangunan Gudang Pupuk dan Alsintan	Kantor UPT-BPP Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
141	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana kantor BPKB di kecamatan	Cor Halaman BPKB	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
142	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana kantor BPKB di kecamatan	Pembuatan Siring Area Kantor BPKB	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
143	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembuatan Gazebo dan Taman Samping Kantor Kecamatan Dusun Selatan	Kantor Camat Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
144	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Beton jalan antar desa Tanjung jawa-desa teluk mampun	Desa tanjung jawa, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
145	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rehap Puskesmas Lama Menjadi IGD	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
146	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan cor beton jalan antar desa tanjung jawa-desa majundre	desa tanjung jawa, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembuatan plapon mesjid jami nurul hikmah	desa tanjung jawa, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
148	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembuatan Pagar Puskesmas Tabak Kanilan	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
149	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan siring pencegah longsor RT.01,RT.02 dan RT.03	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
150	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pengadaan Ambulance Pusling	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
151	SUPRATMO	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pengadaan Ambulance Air	Desa Tanjung Jawa, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
152	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Parkir Ambulance	Tabak Kanilan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
153	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Tabak Kanilan - Kayumban	Tabak Kanilan RT 01, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

154	ELSON SARAGIH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan desa Menujur Jalan Provinsi (Buntok-Palangkaraya)	Desa Madara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Madara	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
155	ELSON SARAGIH	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Percetakan Sawah	Desa Madara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Madara	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
156	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Total SDN 1 Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
157	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembuatan Titian Jembatan Usaha Tani	Tabak Kanilan RT 09, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
158	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Perumahan Guru SDN 1 Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
159	ELSON SARAGIH	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial	Program Kartu Pintar	Desa Madara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Madara	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL
160	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Bangunan SMP 1 Atap Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
161	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Penyediaan Fasilitas Meubelair (Meja dan Kursi) SMP 1 Atap Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
162	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Ruas Jalan GG Pelajar dan Jembatan	Tabak Kanilan RT 03, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
163	ELSON SARAGIH	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab berat ruangan belajar SDN Madara	Desa Madara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Madara	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
164	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penyediaan Tenaga Kesehatan (Bidan dan Perawat)	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
165	ELSON SARAGIH	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan ruangan kantor guru SDN Madara	Desa Madara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Madara	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
166	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jembatan di Sungai Lunuk Rt. 001 Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
167	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan antar Desa Mahajandau dan Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
168	BARDI	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lanjutan Siring tebing tanah longsor RT.02 dan RT.03	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
169	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jembatan Titian Usaha Tani RT 07	Tabak Kanilan RT 07, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
170	BARDI	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Penimbunan siring tebing RT.03	penda asam, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
171	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Penimbunan Halaman Sekolah SDN - 3 Tabak Kanilan	Tabak Kanilan RT 06, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
172	BARDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	perbaikan/pelebaran dan pengaspalan jalan induk desa RT.13 s.d perbatasan desa lembeng	desa penda asam, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
173	BARDI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	penimbunan/pemasangan stone halaman SMA negeri 5 Dusun Selatan RT.13	Desa penda asam, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
174	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan Turap Desa Tabak Kanilan	Tabak Kanilan RT 07 dan RT 08, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
175	BARDI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Perbaikan puskesmas RT.09 (Perbaikan atap yang bocor dan perbaikan jendela yang sudah lapuk)	Desa Penda Asam, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

176	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Pemasangan Tiang dan Jaringan Listrik dari Kelurahan Mengkatip ke Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
177	NARWASTA	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Perehapan Poskesdes	Tabak Kanilan RT 06, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
178	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan Cor Beton Jalan dari Desa Mahajandau menuju Desa Rangga Ilung	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
179	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Bibit Padi dan Pestisida untuk Kelompok Pertanian di Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
180	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Pagar Keliling Cor Beton Halaman Gereja Kaharap Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
181	BARIANUS NEDI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Sanitasi (WC) Smp Satu atap RT.01	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Dangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
182	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Rehab Mesjid Nurul Huda Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
183	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Muka Haji - Tabak Kanilan	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
184	HAPSIR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Pastori Gereja GKE Kaharap Desa Mahajandau	Mahajandau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
185	BARIANUS NEDI	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan Sekolah SMK RT.01/RT.02	Desa Dangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Dangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
186	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rehap Pustu Desa Muka Haji	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
187	BARIANUS NEDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan pengaspalan jalan dangka-marga jaya RT.01	desa dangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Dangka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
188	DIWU	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Bangunan Perumahan Guru SD	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
189	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan Siring Bronjong	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
190	DIWU	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Cor Beton Lapangan Halaman SDN 1 Sungai Jaya	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
191	BARIANUS NEDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan pengaspalan jalan dangka-telang andrau	desa dangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Dangka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
192	DIWU	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan antar Desa Sungai Jaya dan Desa Mahajandau	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
193	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Masjid Baru	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
194	BARIANUS NEDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan pengaspalan jalan dangka-gagutur	Desa dangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Dangka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
195	DIWU	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Ujung Rt. 008 Menuju Jalan Duhung	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
196	DIWU	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Cor Beton Jalan Pertanian Dusun Bakota Menuju BM 1	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
197	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembuatan Galangan Lahan Sawah	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

198	DIWU	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Terapung untuk Mesjid Dusun Bakota Desa Sungai Jaya	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
199	AHMAD TAHIR	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan 3 Ruang SDN 1 Muka Haji	Muka Haji, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
200	DIWU	Kelurahan / Desa	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Pembangunan Sumur Bor	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
201	DIWU	Kelurahan / Desa	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Pembangunan Jaringan Listrik PLN	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
202	UNDE	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Bangun baru kantor desa	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
203	UNDE	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan jalan tembus teluk mampun-penda asam	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
204	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pembuatan Lahan Parkir	Patas I, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
205	DIWU	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Gedung Puskesmas Pembantu Desa Sungai Jaya	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
206	UNDE	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengadaan penerangan jalan umum desa RT.01/RT.02	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
207	DIWU	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penyediaan Peralatan Kesehatan penunjang kegiatan Tenaga Kesehatan di Pustu/Poskesdes Sungai Jaya dan Dusun Bakota	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
208	DIWU	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pengadaan Fasilitas Ambulance Air (Speed Boat)	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
209	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Renovasi Ruang Rawat Inap dan UGD	Patas I, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
210	UNDE	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pengadaan mesin perontok padi RT.01/RT.02	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
211	UNDE	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	pengadaan tracktor mini RT.01/RT.02	Desa Teluk Mampun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
212	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pembangunan Laboratorium Sesuai Standar	Patas I, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
213	DIWU	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pembangunan Gedung Untuk Sanggar Adat dan Budaya di Desa Sungai Jaya	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
214	SARDIN	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	rehab berat rumah/bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu RT.01/RT.02/RT.03	Desa Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
215	SARDIN	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	pengadaan tracktor lotari bagi kelompok tani RT.01/RT.02/RT.03	Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
216	SARDIN	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	rehab berat kelas SD kunjung Desa Telang Andrau Rt.02	Desa Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

217	RUSBANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Baru Desa, Karena Jalan Yang Ada Hanya Melewati Samping Siring	Sire, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sire	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
218	SARDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	pemeliharaan dan sambungan pembuatan akses jalan antar Desa Telang Andrau dengan Desa Pamangka 10 Km Rt.02	Desa telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
219	RUSBANDI	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Masjid Baru, Karena Masjid yang ada hampir kena longsor, dan Tanah Sudah Siap Untuk Masjid Baru	Sire, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sire	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
220	DIWU	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas bagi Kelompok UMKM	Bantuan Fasilitas UMK bagi Kelompok Ibu/PKK	Sungai Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
221	SARDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan sekaligus pengaspalan jalan dari simpang tiga majundre desa telang andrau menuju desa wungkur baru RT.01	Desa Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
222	SARDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan sekaligus pengaspalan jalan dari simpang tiga Dangka menuju desa Telang Andrau RT.02	Desa Telang Andrau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Telang Andrau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
223	RUSBANDI	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan Siring dan Timbunan Halaman Sekolah SDN Desa Sire	Sire RT 01, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sire	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
224	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Gedung SDN 1 Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
225	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Berat SMP Satu Atap di Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
226	RIUM	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan desa diwilayah RT.04 Sebrang	Desa Danau Sadar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Sadar	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
227	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru Bangunan WC SMP 1 Atap di Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
228	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Pagar SMP Satu Atap di Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
229	RUSBANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengaspalan Jalan Desa Sire	Sire RT 1,2 dan 3, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sire	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
230	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Raudhatussshalihin Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
231	RIUM	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Penimbunan halaman SDN Danau Sadar RT.02	Desa Danau Sadar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Sadar	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
232	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan/Peninggian Halaman MTs Raudhatussshalihin Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
233	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Ruang Kelas Baru MA Hidayatusshibyan Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
234	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan MA Hidayatusshibyan Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
235	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pengadaan Perlengkapan UKS MA Hidayatusshibyan Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
236	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Antar Desa (Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan dan Desa Telang Baru-Desa Juru Banu Kecamatan Paju Empat Kab. Barito Timur)	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

237	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Antar Desa (Desa Kalanis Kc. Dusun Hilir dan Kelurahan Rantau Kujang Kab. Barito Selatan)	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
238	KECEWACIANO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Jalan Kayumban - Tabak Kanilan	Kayumban RT 4, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
239	KECEWACIANO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan BOX-CULVERT Penyebrangan Sei Layung Desa Kayumban	Kayumban, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
240	KECEWACIANO	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penambahan Jaringan Listrik Ke RT 05	Kayumban, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
241	KECEWACIANO	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Bronjong / Turap	Kayumban RT 03 dan 04, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
242	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	masih rendahnya TPU yang dikelola dengan baik	Peninggian/Penimbunan Alkah Pemakaman Muslimin di Rt. 002 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
243	SUMARTONO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jalan Baru Ruhing Raya Tembus Ke Wungkur Baru	Ruhing Raya RT 5, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
244	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Serba Guna (Lanjutan) di RT. 002 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
245	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pelebaran Jalan Cor Beton di RT. 001 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
246	RIUM	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Pembuatan Pagar Kantor desa RT.01	Desa Danau Sadar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Sadar	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
247	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Pasar Desa di Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
248	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehab Jembatan Desa di RT. 001 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
249	RIUM	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	penyirangan sungai/tabuk 9 (Jl. Asmawi Agani) RT.01/RT.02.RT.03	Desa danau sadar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Sadar	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
250	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
251	SUMARTONO	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Siring Timbun Halaman Kantor Desa, BPD dan Pustu	Ruhing Raya RT 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
252	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Rehab Titian Kayu Jalan Lingkungan di Desa di RT. 006 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
253	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Sarana/Prasarana/Bibit untuk Kelompok Peternak/Pembudidaya di Desa	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
254	RIUM	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	pengadaan penggilingan padi RT.01	Desa Danau Sadar, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Sadar	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
255	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Sarana/Prasarana untuk Kelompok Nelayan Perikanan Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
256	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pengadaan Pelabuhan Terapung Pasar Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN

257	SUMARTONO	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Cetak Sawah Lahan Eks UPT Sarimbuah	Ruhing Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
258	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Rehab Kantor Pemerintah Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
259	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Pembangunan Gedung Kantor BPD Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
260	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas bagi Kelompok UMKM	Bantuan Sarana/Prasarana Bahan Baku untuk Kelompok Pengrajin Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
261	SUMARTONO	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Pastori dan Tembok Pagar Gereja EPRATA Desa	Ruhing Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
262	MARNI	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	tanggul pertanian RT.01/RT.02/RT.03	Desa Pamait, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamait	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
263	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pembangunan Gedung Sanggar Budaya Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
264	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Mesjid (Baru)	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
265	MAHLIAN. H	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Teras Musholla Al-Mubaraqah di RT. 006 Desa Kalanis	Kalanis, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Kalanis	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
266	MARNI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan jembatan sebrang RT.01	Desa Pamait, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamait	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
267	SUMARTONO	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Serba Guna	Ruhing Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
268	MARNI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehabilitasi jembatan baiturahman RT.03	Desa Pamait, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamait	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
269	MARNI	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan bibit perikanan dan pertanian	Desa Pamait, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamait	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
270	ETIANI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Sarimbuah - Gagutur	Sarimbuah - Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
271	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	masih rendahnya TPU yang dikelola dengan baik	Pembangunan Siring Alkah Pemakaman Muslimin Rt. 001 Rw. 001	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
272	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Berat Gedung TK Kalinapu Desa Lehai Rt. 004 Rw. 003	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
273	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Berat Perumahan Guru SDN Lehai Rt. 001 Rw. 001	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
274	ETIANI	Kelurahan / Desa	Rendahnya pengelolaan sampah terpadu	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sarimbuah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
275	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru Kantor Guru SDN Desa Lehai	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
276	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru Gedung Sekolah SMAN 2 Dusun Hilir	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
277	ETIANI	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Penyambungan Intalasi PDAM	Sarimbuah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
278	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penyediaan Tabung Oksigen untuk pasien tidak mampu	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

279	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembersihan Drainase RT.08	Kelurahan Hilir seper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
280	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Desa Lehai menuju Desa Tampulangit Kabupaten Barito Timur	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
281	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyeberangan dari Dusun Panungku ke Desa Kalinapu Kabupaten Barito Timur	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
282	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Saluran Air (Drainase) RT.01	Kelurahan Hilir Sper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
283	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jalan antar desa (Lehai-Damparan)	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
284	ETIANI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Perehapan Pustu Desa Sarimbuah	Sarimbuah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
285	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jalan Lehai - Mangkatir	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
286	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	melanjutkan Gg. Tembus jalan R.A Kartini di samping utara pagar BLK RT.01	Keluahan Hilir Seper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
287	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyeberangan dari Desa Lehai ke Jalan antar Desa (Lehai-	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
288	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan Lanjutan Faslitas Pamsimas Dusun Panungku	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
289	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	perbaikan Gg. Kecil menuju sungai barito/jembatan RT.05	Kelurahan Hilir Seper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
290	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan Lanjutan PDAM Desa Lehai	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
291	WILOYO AMIN. A	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Siring Jalan Dalam Desa Wungkur Baru	Wungkur Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
292	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan Sumur Bor Rt. 008 Rw. 003	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
293	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Cor Beton Jalan Pemukiman Rt. 001 Rw. 001	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
294	SAID ABDUL HADI	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas bagi Kelompok UMKM	Bantuan alat Pendukung untuk UMK (Pengrajin Kerupuk)	Lehai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Lehai	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
295	WILOYO AMIN. A	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Rehab Berat Kantor BPD	Wungkur Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
296	WILOYO AMIN. A	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembuatan Pagar SDN 1 Wungkur Baru & SMPN SATAP 2 Gunung Bintang Awai	Wungkur Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
297	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Sarana Prasarana dalam bidang penanggulangan bencana masih terbatas	Slang Pemadam RT.05	Kelurahan Hilir Seper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

298	ZULKARNAIN MASDIPURA	Kelurahan / Desa	Sarana Prasarana dalam bidang penanggulangan bencana masih terbatas	Mesin Pompa air robin dan slang RT.05	Kelurahan Hilir Seper, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Kabupaten / Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
299	WILOYO AMIN. A	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Bibit dan Pakan Ayam Petelor	Wungkur Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
300	WILOYO AMIN. A	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Dalam Desa Wungkur Baru	Wungkur Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
301	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Ruang Klas Lokal di SMA Dharma Bhakti Desa Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
302	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Cor Beton Halaman SMPN 2 Dusun Hilir	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
303	HERIKOSWOYO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Badan Jalan Baruang - Wungkur Baru	Baruang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Baruang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
304	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Gedung Madrasah RA Nurul Iman dan Pengadaan Tanah	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
305	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Bantuan Rehab Gedung MTs. Nurul Iman dan Pembangunan Ruang Baru + Meja dan Kursi	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
306	RIZAL	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Beton jalan lembeng bawah RT.01.RT.02	Desa Lembeng, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
307	HERIKOSWOYO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Badan Jalan Baruang - Dusun Ekeng	Baruang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Baruang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
308	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Kantor Sekolah SMA Dharma Bhakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
309	RIZAL	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Lanjutan Jaringan PDAM dari RT.03 ke seluruh desa lembeng	Desa Lembeng, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
310	HERIKOSWOYO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Program Bedah Rumah 20 KK	Baruang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Baruang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
311	HERIKOSWOYO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan Siring Bronjong	Baruang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Baruang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
312	RIZAL	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Perbaikan Jembatan penyebrangan sungai maiyap halus, sungai maiyap besar, jembatan sungai maesani, dan jembatan sungai rampon RT.04,RT,02,RT.01	Desa Lembeng, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
313	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Pagar Sekolah SMA Dharma Bhakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
314	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Lokal Gazebo SMA Dharma Bhakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
315	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan WC Sekolah SMA	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
316	RIZAL	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Irigasi dan Sungai maiyap besar sampai ke muara danau lembeng	Desa Lembeng, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
317	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Bantuan Alat Peraga Edukasi Siswa TK Dharma Bhakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
318	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Gedung tempat bermain TK Tuntung Tulus	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
319	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Bantuan Alat Peraga Edukasi PAUD Mentari	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
320	RIZAL	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Lampu PJU di seluruh lingkungan desa Lembeng (50 titik)	Desa Lembeng, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

321	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Gedung TK Paud Dharma Bakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
322	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penyediaan Speed Boat 200 PK dan Mobil Ambulance Desa	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
323	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembangunan Gedung POSYANDU (MAWAR, MELATI, BKL)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
324	ROY APRIANTO	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Rehab Kantor Desa RT.02	Desa tetei lanan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tetei Lanan	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
325	ROKHIMIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Poros Desa Marga Jaya	Marga Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
326	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung POSYANDU (MAWAR, MELATI, BKL)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
327	ROY APRIANTO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan katimpun lebo RT.02	Desa tetei lanan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tetei Lanan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
328	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Pembangunan Jalan Antar Desa Damparan ke Desa Teluk Timbau	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
329	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Pembangunan Jalan Antar Desa Damparan ke Desa Lehai	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
330	ROKHIMIN	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengadaan Tiang Listrik Induk (PLN)	Marga Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
331	ROY APRIANTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Perumahan sekolah SDN Tetei Lanan RT.01	Desa Tetei Lanan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tetei Lanan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
332	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Rehab Berat Gedung MI Nurul Iman Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
333	ROY APRIANTO	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab Postu pembantu RT.02	Desa Tetei Lanan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tetei Lanan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
334	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Pasar Desa Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
335	ROKHIMIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Pemasangan Tower Sinyal / Penguat Sinyal	Marga Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
336	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Rehab Mesjid Jami Sabilal Muttaqin	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
337	ROY APRIANTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembersihan alur sungai/normalisasi RT.01-RT.02	Desa tetei lanan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Tetei Lanan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
338	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyebrangan di Kelompok Tani Ranggung Tutup cor beton (Lanjutan)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
339	ROKHIMIN	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Marga Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
340	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Pertanian Ranggung Tutup Cor Beton (Lanjutan)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

341	ESKARIADI	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Drainase jalan komplek pelajar	Desa Kalahien, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Kalahien	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
342	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyebrangan di Kelompok Tani Rimbangun 1 cor beton	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
343	ROKHIMIN	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Marga Jaya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
344	ESKARIADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Rekontruksi jalan dari dusun parigi ke jalan trans nasional provinsi	Desa Kalahien, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Kalahien	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
345	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyebrangan di Kelompok Tani Bunga Padi Cor Beton (Lanjutan)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
346	ESKARIADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Kontruksi beton bertulang Grider jabatan hungei masimpun	Desa Kalahien, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Kalahien	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
347	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Pertanian di Kelompok Tani Bunga Padi cor beton (Lanjutan)	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
348	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Pertanian Suka Damai 1 Cor Beton	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
349	JUNIATO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Badan Jalan Gagutur - Sarimbuah	Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Gagutur	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
350	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Cor Beton di Kelompok Tani Seha Hanyar	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
351	ESKARIADI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan baru Jalan Dusun Parigi menuju ruas jalan nasional buntok-palangkaraya	Desa Kalahien, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Kalahien	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
352	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan utama sekolah SMA Dharma Bhakti Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
353	ESKARIADI	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Pembangunan los pasar desa kalahien	Desa Kalahien, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Kalahien	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
354	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan Pagar Pembatas SMA di SDN 1	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
355	JUNIATO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Badan Jalan Gagutur - Palu Rejo di RT 05	Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Gagutur	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
356	JUNIATO	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Mushola	Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Gagutur	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
357	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Lanjutan Pembangunan Titian Pertanian RT 12	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
358	JUNIATO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Jalan Usaha Tani Ulu Gagutur	Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Gagutur	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
359	JUNIATO	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Pembangunan Pasar Desa	Gagutur, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Gagutur	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
360	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Rehabilitasi / bangun Baru Los pasar Desa Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
361	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Keterbatasan dari segi aksesibilitas, atraksi, dan amenitas	Pembangunan tempat Wisata Pancing danau besar (Danau Hai')	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

362	KURINTUS	Kelurahan / Desa	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Pembersihan danau sanggu ke arah kumatang kayu dan danau wendu	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
363	KURINTUS	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengaspalan jalan kumbang bernaung RT.04	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
364	SUPRIADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya fasilitas olahraga untuk masyarakat	Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga	Ugang Sayu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ugang Sayu	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
365	KURINTUS	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penerangan jalan kumbang bernaung PJU (RT.04)	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
366	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya fasilitas olahraga untuk masyarakat	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
367	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pembangunan Gedung Sanggar Seni Budaya dan Alat Kesenian	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
368	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya fasilitas olahraga untuk masyarakat	Pengadaan alat penerangan di Lapangan olahraga	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
369	SUPRIADI	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 2 Ugang Sayu, SMPN 2 Ugang Sayu, SMAN 3 Ugang Sayu	Ugang Sayu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ugang Sayu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
370	SUPRIADI	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengadaan Lampu Jalan Dalam Desa (PJU) jalan. Ampah _ Muara Teweh , Ugang Sayu - Palu Rejo , Ugang Sayu - Gagutur Dalam	Ugang Sayu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ugang Sayu	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
371	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Sarana Prasarana dalam bidang penanggulangan bencana alam masih terbatas	Pembangunan POSKO Karhutla	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
372	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Rehab Langgar 6 Unit	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
373	SUPRIADI	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Lanjutan Pembangunan Balai Adat Imanapa	Ugang Sayu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ugang Sayu	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
374	MISLI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Pengaspalan Jalan Desa	Palu Rejo, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Palo Rejo	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
375	MISLI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Sungai Munyo	Palu Rejo, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Palo Rejo	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
376	SAMSUDIN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Pembangunan Poskamling di Desa Damparan	Damparan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
377	MISLI	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penerangan Jalan Umum	Palu Rejo, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Palo Rejo	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
378	MISLI	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Cor Rabat Jalan Usaha Tani	Palu Rejo, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Palo Rejo	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
379	KURINTUS	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lanjutan kanal/irigasi napu gelombang dan swah sarunai RT.02	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
380	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Bantuan Laptop dan Printer untuk Sekolah MTs/MA Desa Teluk Timbau	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN

381	KURINTUS	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab Berat SDn 1 Sanggu RT.01	Desa Sanggu, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
382	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembangunan Baru Poskesdes Teluk Timbau	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
383	MISLI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pembangunan Fasilitas PUSTU : Bangunan , Halaman dan Akses Jalan	Palu Rejo, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Palo Rejo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
384	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pembangunan Puskesmas Induk (Pemekaran Puskesmas Desa Teluk Timbau)	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
385	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Peningkatan Jalan Penghubung Ruas Teluk Timbau ke Damparan	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
386	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan di Dusun Muara Puning	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
387	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan Siring Halaman Mesjid Jami Nurul Abidin Desa Teluk Timbau	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
388	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan Tanggul Cek Dam (Lanjutan)	Wayun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
389	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Betang Adat (Sanggar Budaya)	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
390	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Teluk Timbau (Lanjutan)	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
391	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Desa Aspal (lanjutan)	Wayun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
392	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Siring Cor Beton Pinggir Mesjid di TPU Dusun Muara Puning	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
393	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Cor Beton Fasilitas MTs/MA Desa Teluk Timbau	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
394	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Rehab Kantor Desa (Lanjutan)	Wayun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
395	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Akses Ruas ke II Wilayah RT. 001	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
396	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Desa Teluk Timbau	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
397	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pengembangan Pariwisata Desa	Wayun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
398	ARDINTO	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Cetak Sawah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
399	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembangunan Jembatan (Titian Tani) Rt. 003	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

400	TOMO.S.PD LANDAY	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penambahan Jaringan PLN	Wayun, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
401	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
402	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Mesin Perontok Padi untuk 6 kelompok	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
403	ARDINTO	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Lanjutan tambatan perahu danau sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
404	GURDANSYAH	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Lanjutan Pembangunan Mushola Nurul Huda	Teluk Timbau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
405	ARDINTO	Kelurahan / Desa	Tingginya tingkat pencemaran sungai	Normalisasikan Danau Sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
406	ARDINTO	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Rehab Embung	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
407	RABIONO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Lintas Dalam Desa	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
408	ARDINTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan ruang kelas SDN 2 Sababilah	Desa Sababilah, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
409	RABIONO	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pembangunan Pagar Balai Adat	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
410	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru Gedung SMP 1 Atap Desa Batilap	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
411	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Batilap dan Batampang	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
412	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa Batilap dan Desa Teluk Timbau (Kecamatan Karau Kuala)	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
413	RABIONO	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Bagunan Baru Posyandu " Cempaka "	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
414	MUHAMAD YUSUF, SE	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Mesjid jami nurul YAQIN Kelurahan Jelapat (Jl. Asmawi Agani RT.01- RW.01)	Kelurahan Jelapat, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Jelapat	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
415	RABIONO	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Lampu Penerangan Jalan	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
416	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Cor Beton Jalan Pemukiman Rt. 003	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
417	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehab Total Jembatan Sungai Batilap Rt. 003	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
418	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan Dam Irigasi/Tanggul Pertanian Rt. 003	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

419	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pengerukan Handel/Irigasi Pertanian RT. 003	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
420	RABIONO	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan untuk Pembangunan Rumah Ibadah	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
421	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Dermaga/Tambat Perahu untuk Anak Sekolah Rt. 001	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
422	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	masih rendahnya TPU yang dikelola dengan baik	Pembangunan Pagar Pemakaman Muslimin Rt. 002	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
423	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembangunan Lampu PJU TS di RT. 004	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
424	RABIONO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembuatan Pagar SD dan Relif Nama Sekolah	Bipak Kali, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
425	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Baru Mesjid Nurul Iman Desa Batilap	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
426	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Baru Langgar di RT. 004	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
427	MUHAMAD YUSUF, SE	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Lanjutan pembangunan Gereja "Parapah" kelurahan Jelapat (Jl. Kartini Rt.10-RW.02	Kelurahan Jelapat, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Jelapat	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
428	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Rehab Langgar Nurul Iman RT. 001	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
429	BUDIAN NOR	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Langgar Fathul Jannah RT. 003	Batilap, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batilap	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
430	RANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Cor Jalan Lintas Desa Muara Singan Patas 1	Muara Singan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
431	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru Rumah Dinas Guru SDN Batampang	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
432	RANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	BOX COLPEX (Ruas Jalan Desa Luir)	Muara Singan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
433	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Desa Cor Beton Rt. 006 Rw. 003 (Lanjutan)	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
434	MUHAMAD YUSUF, SE	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab Bangunan Tk Kenanga (Jl.Jelapat RT.09-RW.01)	Kelurahan Jelapat, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Jelapat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
435	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Badan Jalan dari Desa Batampang menuju Desa Batilap	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

436	RANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Pembuatan Galangan Sawah Desa Muara Singan	Muara Singan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
437	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	masih rendahnya TPU yang dikelola dengan baik	Pembangunan Siring Cor Beton Alkah/Pemakaman Muslimin Desa Batampang	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
438	MUHAMAD YUSUF, SE	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehab total ruang kelas 1 s/d 6 dan WC, pengadaan meja kurs, madrasah ibtdaiyah kelurahan jelapat (Jl. Asmawi Agani Rt.01-Rw.01)	Kelurahan Jelapat, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Jelapat	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
439	RANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jalan Baru Dari Desa Muara Singan Ke Dusun Luir	Muara Singan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
440	RANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Ke Kebun Korong Mangkare	Muara Singan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
441	MUHAMAD YUSUF, SE	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan jalan tembus Gg. Batuntun-Danau Ganting sepanjang kurang lebih 3,5 KM (Jl.Kartini Gg.Batuntun Rt.10-Rw.02)	Kelurahan Jelapat, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Jelapat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
442	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Akses sanitasi aman yang masih rendah	Pembangunan Jamban Sehat	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
443	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Bantuan Mesin Perahu Bermotor (Ces) untuk Anggota Kelompok Perikanan	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
444	MISTAN	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Cor Halaman mesjid RT.01	Desa teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
445	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hikmah Desa Batampang	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
446	MISTAN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Cor jalan teluk telaga talio RT.01	Desa teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
447	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembuatan Siring Beton Ditepi Masjid Sabilal Muhlisin RT 1	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
448	MISTAN	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Penerangan lampu jalanan RT.01	Desa teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
449	AHMAD MARTAWI	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Pembangunan Tower Telkomsel	Batampang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Batampang	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
450	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembuatan Siring Setfile di Tepi Jalan Patas 1 Menuju Muara Singan RT 06	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
451	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Rehab Gedung SDN Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
452	MISTAN	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan cek dam pertanian RT.01	Desa teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
453	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Rumah Dinas Guru SDN Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
454	MISTAN	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pagar keliling sekolah SDN RT.01	Desa teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

455	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Mangkatir ke Desa Lehai	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
456	MISTAN	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Lanjutan pembuatan irigasi desa RT.01	Desa Teluk telaga, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Telaga	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
457	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jembatan Penghubung RT 5 dan 6	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
458	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
459	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan Gedung Serba Guna	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
460	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan Siring/Turap/Brojong Tepian Sungai Pemukiman Penduduk Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
461	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	belum optimalnya fasilitas pengembangan kawasan seni budaya	Pembangunan Objek Wisata Danau kaliring di RT 08	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
462	WUNTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Gedung sekolah, dua ruang belajar	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
463	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Peninggian Jalan Kawasan Permukiman Induk Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
464	ABDULLAH	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bantuan Hibah Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Mangkatir	Mangkatir, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatir	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
465	WUNTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	WC guru dan WC Murid	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
466	WUNTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Mobiler, Meja Kursi murid	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
467	WUNTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Alat-Alat olahraga	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
468	WUNTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Guru Agama kristen protestan	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
469	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Perbaikan dan / atau Peningkatan Jalan Simpang Sayang Maliau di RT09	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

470	WUNTO	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Guru Agama Katolik	Desa Pamangka, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pamangka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
471	TINO RIKARDO, A.MD	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Pembukaan Lahan Persawahan	Patas 1, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas I	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
472	GAPILON	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Lanjutan Pembangunan kantor desa RT.03/RW01	Danau Ganting, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Ganting	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
473	GAPILON	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	peluasan siring dan timbun jalan danau ganting-Buntok	Danau Ganting, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Ganting	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
474	SUKARDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pelebaran Badan Jalan dan Pengaspalan Menuju Perkampungan (Pemukiman Desa)	Patas II, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas II	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
475	SURIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan/cor beton badan jalan antar desa (jalan antar desa danau masura-muara ripung	Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Masura	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
476	SUKARDI	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Masjid Baiturrahman	Patas II, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Patas II	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
477	SURIANSYAH	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Bantuan bedah rumah untuk warga	Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Masura	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
478	SURIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan antar desa-desa danau masura menuju parigi desa kalahien	danau masura, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Masura	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
479	SURIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	bangun jembatan sei Riri	Desa Masura, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Masura	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
480	UNDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Sei Paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sei Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
481	SURIANSYAH	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Bangun gedung serba guna	Danau Masura, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Danau Masura	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
482	UNDI	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembuatan Cor Rambat Beton Dalam Desa	Sei Paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Sei Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
483	LUKMANUL HAKIM	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk organisasi kepemudaan	Perbaikan lapangan sepak bola	Desa Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
484	LUKMANUL HAKIM	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan jalan dari dusun bambaler desa baru menuju desa madara	desa baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
485	LUKMANUL HAKIM	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Perbaikan pasar desa baru	Desa Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
486	LUKMANUL HAKIM	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Pembangunan WC untuk masyarakat dusun bambaler	desa baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
487	WELISON	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Cor Beton Jalan Gg. Kampung	Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ngurit	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
488	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan siring beton jalan desa	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
489	WELISON	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Pagar Kantor Desa	Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ngurit	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
490	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	penimbunan dan cor beton jalan desa yang sudah disiring	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

491	LUKMANUL HAKIM	Kelurahan / Desa	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Pengadaan truk Sampah	Desa Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
492	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	siring timbun halaman SMP Satap	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
493	WELISON	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Rehab / Bangun Baru Pustu Desa Ngurit	Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ngurit	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
494	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	siring timbun halaman Sekolah Madrasah Ibtidayah	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
495	YUSERAN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jalan baru RT.02	Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Talang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
496	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Dermaga Desa	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
497	YUSERAN	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan muara talang menuju teluk telaga	Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Talang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
498	WELISON	Kelurahan / Desa	Penurunan Kontribusi Sektor primer (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) di dalam PDRB	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kebun Kas Desa	Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ngurit	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
499	Suriansyah	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak layak huni	Bintang Kurung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bintang Kurung	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
500	YUSERAN	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembuatan tower menara mesjid RT.02	Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Talang	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
501	WELISON	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pembangunan Pagar Sekolah SDN	Ngurit, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Ngurit	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
502	YUSERAN	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Turap/taper penahan longsor	Desa Muara Talang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Talang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
503	GUNAWATI, SE	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan multiyears Teluk Sampudau - Muara Talang	Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
504	GUNAWATI, SE	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehabilitas/pelebaran jalan induk desa	Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
505	TRI WAHYUDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Dari Desa Ngurit Ke Malungai Raya	Malungai Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
506	GUNAWATI, SE	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	rehabilitas jalan menuju desa muara talang	Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
507	HERIANTO	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	Pembangunan jaringan air bersih PDAM (rumah masyarakat)	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pararapak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
508	GUNAWATI, SE	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penugasan/Penempatan Bidan Desa	Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
509	TRI WAHYUDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jembatan 1 Abah Ari Desa Ngurit	Malungai Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
510	HERIANTO	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	pembuatan/pemasangan tower BTS (jaringan internet)	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pararapak	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
511	GUNAWATI, SE	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Bedah Rumah bagi Masyarakat miskin yang tidak layak huni	Teluk Sampudau, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

512	HERIANTO	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	siring timbun jalan desa RT.01 dan RT.04	desa pararapak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pararapak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
513	TRI WAHYUDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jembatan 1 Abah Ari Desa Malungai Raya	Malungai Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
514	HERIANTO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	aspal jalan dalam desa	Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Pararapak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
515	TRI WAHYUDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Kantor Sekretariat DAD Desa Malungai	Malungai Raya, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
516	ADRIANUS	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Timbun halaman SDN Mangaris	Desa Mangaris, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mangaris	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
517	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	lanjutan peningkatan, penyirangan dan pelebaran cor beton jalan poros kelurahan	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
518	JHON EDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pengerasan Badan Jalan Bintang Ara - Patas II / Buyui	Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
519	ADRIANUS	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Pembuatan jalan lingkar dan pandopo dilokasi TPU Desa Mangaris	Desa Mangaris, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mangaris	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
520	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	peningkatan pembangunan penyirangan dan cor beton jalan kantor pos - KUA s/d Pasar Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
521	JHON EDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Badan Jalan Bintang Ara - Muara Malungai	Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
522	JHON EDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Sungai Ayuh Jalan Menuju Desa Bintang Ara	Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
523	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Capaian desa mandiri masih rendah	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Ripung	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
524	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan menuju jalan provinsi (dari desa muara ripung ke desa kalahien seberang)	Desa Muara ripung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Ripung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
525	JHON EDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan Jembatan Sei Kacang	Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
526	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan antar desa muara ripung- desa danau masura	Desa Muara Ripung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Ripung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
527	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jalan menuju buntok seberang	Desa muara ripung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Ripung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
528	SUTRISNO	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Bangun baru atau rehab rumah masyarakat miskin	Desa muara ripung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Muara Ripung	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
529	BARDIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Kelanjutan jalan sasameh menuju Desa Murung paken	Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Murung Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
530	BARDIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjuta jembatan layang murung paken menuju desa danau masura	Desa murung paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Murung Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
531	BARDIANSYAH	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya akses jaringan kelistrikan	Listrik masuk desa 24 Jam	Desa murung paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Murung Paken	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
532	JHON EDY	Kelurahan / Desa	Meningkatnya kesejahteraan peternak dan sektor pertanian secara umum	Bantuan Bibit Ternak Kambing dan Sapi	Bintang Ara, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	Kabupaten / Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
533	BARDIANSYAH	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan jembatan sungai talapepai di desa murung paken	Desa murung paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Murung Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
534	BARDIANSYAH	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan irigasi	Desa Murung Paken, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Murung Paken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
535	FRANS DUDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jalan Teluk Betung - Babai	Teluk Betung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Betung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

536	FRANS DUDY	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Badan Jalan Lintas Provinsi (Teluk Betung - Madara)	Teluk Betung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Betung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
537	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembelian meja dan kursi kerja kantor dan lemari	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
538	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	belum tersedianya bangunan kantor yang memadai untuk menunjang aktivitas perkantoran dan pemerintahan	Pembangunan gedung/ruangan kelurahan buntok kota	kelurahan buntok kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
539	FRANS DUDY	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembersihan Tanggul Irigasi Persawahan (Binjai Dan Padang Hai)	Teluk Betung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Betung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
540	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Perbaikan dan pembangunan gang samping sanggar pramuka RT 36	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
541	FRANS DUDY	Kelurahan / Desa	Akses sanitasi aman yang masih rendah	Kelanjutan Pamsimas (Pemasangan Pipa dan SR)	Teluk Betung, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Betung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
542	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Meningkatkan kinerja dan ketertiban lalu lintas akses jalan	Pembuatan Bundaran Simpang 3 Kapolsek Karau Kuala dengan Ikon kota kelurahan	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
543	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Pengadaan dan pembangunan Rehap berat gedung Tk. Cempaka dan Mainan luar	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
544	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Penyirangan dan Pelebaran Cor Beton Jalan Pembangunan Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
545	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Rehap dinding SDN Negeri 11 Buntok RT 36	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
546	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembangunan jembatan kelurahan Bangkuang dan peningkatan jalan menuju Desa Teluk Betung MUTU	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
547	KARUNIA ARDHI TRISNANTO, S.IP., M.AP	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Perbaikan drainase dan pembuangan air libah SD 4 Buntok RT 36	Kelurahan Buntok Kota, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
548	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
549	FATLI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jalan Janggi Seberang Menuju Jalan PT. MUTU	Janggi, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Janggi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
550	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Rehab Total Jembatan Utama Poros Kelurahan RT. 21 Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
551	FATLI	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Pembangunan Baru Masjid Al-Mukarromah Desa Janggi	Janggi, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Janggi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
552	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Peningkatan dan Penimbunan Pembangunan Jalan P2D (Jalan Padang) Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
553	YOUSTRIYASENG	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor jalan dan tembok TPU Desa mabuan	Desa mabuan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mabuan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

554	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya dermaga atau pelabuhan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Rehab total Dermaga Pasar Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
555	YOUSTRIYASENG	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Bronjong rangka baja wilayah RT 01	Desa Mabuan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mabuan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
556	FATLI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Pembangunan MCK Rumah Warga	Janggi, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Janggi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
557	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya halaman, pagar dan sarana pendukung lainnya di sekitar bangunan pemerintahan atau masyarakat	Penyirangan dan Penimbunan halaman Kantor Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
558	YOUSTRIYASENG	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Siring timbun jalan padat karya jembatan kurdi arah buntok	Desa Mabuan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mabuan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
559	YOUSTRIYASENG	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Cekdam tersier dir mabaras dan mabuan	Desa Mabuan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mabuan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
560	YOUSTRIYASENG	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Bangun Baru saluran irigasi sekunder tanggul 1 dan 2	Desa Mabuan, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Mabuan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
561	FATLI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penugasan / Penempatan Bidan Desa dan Perawat Desa	Janggi, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Janggi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
562	DANI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Aspal Jalan Desa	Malitin, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Malitin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
563	DANI	Kelurahan / Desa	Rendahnya rata-rata lama sekolah (masih berada dibawah rata-rata nasional) serta Tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan akademik dan vokasional yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan kualitas lulusan	Cor Panggung Halaman SMP Satap 2 KK	Malitin, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Malitin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
564	MUHAMMAD IQBAL, S. Kep	Kelurahan / Desa	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Bangkuang	Bangkuang, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
565	DANI	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penugasan Perawat Desa / Tenaga Kesehatan Desa	Malitin, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Malitin	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
566	DANI	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rumah Dinas Guru SDN	Malitin, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Malitin	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
567	M. HANAFI, SM	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Jalan Salat Baru menuju Teluk Betung	Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Salat Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
568	M. HANAFI, SM	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Lanjutan Jalan Salat Baru menuju gusung	Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Salat Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
569	DANI	Kelurahan / Desa	Belum tersedianya Pasar Modern di Kecamatan	Pemindahan / Bangun Baru Pasar Desa	Malitin, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Malitin	Kabupaten / Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
570	M. HANAFI, SM	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Pembangunan Baru/Rehab berat TK Salat Baru	Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Salat Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
571	M. HANAFI, SM	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Titian RT 01 Salat Baru	Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Salat Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
572	M. HANAFI, SM	Kelurahan / Desa	Belum optimal mutu kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Rehab Total POSKESDES	Salat Baru, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Salat Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN
573	AYA	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Rehab Total Perumahan Guru SDN Muara Arai	Muara Arai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Muara Arai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
574	YURIAN RUSENSON, S.AP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan antar Desa Babai - Teluk Betung	Babai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Babai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
575	AYA	Kelurahan / Desa	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Penugasan Bidan Desa	Muara Arai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Muara Arai	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN

576	YURIAN RUSENSON, S.AP	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan jalan antar Desa Babai - Tampijak	Babai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Babai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
577	AYA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Cor Beton Jembatan Sungai Libu Jalan Muara Arai - Talio	Muara Arai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Muara Arai	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
578	YURIAN RUSENSON, S.AP	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pembangunan Jalan Penghubung Titian Beton RT. 16 - RT.19	Babai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Babai	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
579	AYA	Kelurahan / Desa	masih rendahnya TPU yang dikelola dengan baik	Pembuatan Cor Beton Pagar , Kuburan Muslimin	Muara Arai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Muara Arai	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
580	AYA	Kelurahan / Desa	Permohonan hibah/bantuan untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan lainnya	Bangun Baru Langgar Nurul Jannah (hibah)	Muara Arai, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Muara Arai	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH
581	SEPTHA	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Peningkatan Jalan Benyamin A. Tidja (Talio - Kaladan)	Talio, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
582	SEPTHA	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Siring, Timbun dan Cor Halaman SDN 2 Talio	Talio, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
583	SEPTHA	Kelurahan / Desa	Minimnya dukungan sarana prasarana yang memadai	Siring, Timbun dan Cor Selasar SMP 4 Karau Kuala	Talio, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
584	IRWANDI	Kelurahan / Desa	Menurunnya tren jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya jalan dalam kondisi buruk	Pembuatan Jalan Induk Yang baru (mengantisifasi jalan Desa saat ini yang terancam longsor di tepi sungai barito)	Tampijak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Tampijak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
585	IRWANDI	Kelurahan / Desa	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum optimal	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tampijak	Tampijak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Tampijak	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN
586	SEPTHA	Kelurahan / Desa	Kurangnya kualitas sarana air minum layak dan air bersih	ktivasi PAM (revitalisasi, SR)	Talio, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
587	IRWANDI	Kelurahan / Desa	Rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembuatan Siring Pada Tepi Jalan Yang Longsor	Tampijak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Tampijak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
588	SEPTHA	Kelurahan / Desa	Akses sanitasi aman yang masih rendah	Pengadaan MCK	Talio, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
589	IRWANDI	Kelurahan / Desa	Masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	Bedah Rumah Bagi Rakyat Miskin Yang Tidak layak Huni	Tampijak, Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Tampijak	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengusulkan usulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Adapun rincian usulan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5

Usulan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
1	13-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Masih tingginya masalah Kesehatan dasar, seperti malnutrisi, Kesehatan ibu, Penyakit Menular, dan Penyakit Tidak Menular	Adanya kejadian kasus penyakit menular yang ditularkan melalui vektor nyamuk di kabupaten Barito Selatan yang menyebabkan penyakit DBD, Malaria dll. Maka perlu dilakukan penyemprotan (fogging) yang dilakukan oleh Puskesmas. Akan tetapi ketersediaan alat fogging di Kabupaten Barito Selatan terbatas dan hampir semua puskesmas tidak memiliki sehingga perlu diusulkan melalui anggaran APBD I Provinsi Kalteng.	Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Provinsi	Dinas Kesehatan
2	13-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang	Masih adanya kelangkaan obat tertentu diakibatkan oleh banyaknya permintaan dan kurangnya bahan baku pembuatan atau produksi bahan baku obat sehingga perlu diusulkan pengadaan obat tertentu sebagai penyangga (ketersediaan stok) di Kabupaten Barito Selatan	IFK Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Provinsi	Dinas Kesehatan
3	12-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Belum optimalnya serapan lulusan pendidikan vokasi	Belum optimalnya Pendidikan vokasi, atau pendidikan kejuruan yang menjadi pilar penting dalam menyiapkan lulusan siap kerja di era persaingan global	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	12-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Belum optimalnya serapan lulusan perguruan tinggi	Rendahnya serapan Pendidikan tinggi dalam dunia kerja di kabupaten barito selatan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Hilir Seper	Provinsi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	30-01-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan penyediaan jaringan air siap minum perpipaan di perkotaan	Jaringan perpipaan dalam Kota Buntok banyak yang mengalami kebocoran karena faktor termakan usia sehingga menyebabkan tingginya tingkat kebocoran air dan berkurangnya tekanan air yang sampai kepada pelanggan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	30-01-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan penyediaan jaringan air siap minum perpipaan di perkotaan	Banyak masyarakat di dalam kota Buntok yang belum mendapatkan pendistribusian air bersih karena pada wilayah tersebut belum terjangkau perpipaan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Teluk Timbau	Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlunya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Tabak Kanilan	Tabak Kanilan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlunya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kayumban	Desa Kayumban, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlunya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Mangkatip	Mangkatip, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mangkatip	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlunya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Rangga Ilung	Desa Rangga Ilung, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rangga Ilung	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlunya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Jenamas	Kecamatan Jenamas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Belum optimalnya fungsi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Damparan dikarenakan terdapatnya jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak Berat	Desa Damparan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Damparan	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Belum optimalnya fungsi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Bangkuang dikarenakan terdapatnya jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak Berat	Kel. Bangkuang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Belum optimalnya fungsi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Keladan-Talio dikarenakan terdapatnya jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak Berat	Desa Talio, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Talio	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Belum optimalnya fungsi Jaringan Irigasi D.I.R. Palui dikarenakan terdapatnya jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak Berat	Dusun Palui, Kec. Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

17	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Masih Banyaknya Tenaga Ahli yang Belum Tersertifikasi sehingga diperlukannya Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Jenjang 7-9	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Ketidaksesuaian antara Rencana dan Implementasi	Pegawai Masih Belum Memahami Penanganan Perangkat Quantum GIS sehingga diperlukannya Pelatihan Quantum GIS	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Ketidaksesuaian antara Rencana dan Implementasi	Pegawai Masih Belum Memahami Penanganan Perangkat Pelatihan Drone + Geodetik sehingga diperlukannya pelatihan	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Kurangnya Pompa Distribusi Kapasitas 100 Liter/detik di Kota Buntok sehingga diperlukannya Pengadaan Pompa distribusi Kapasitas 100 Liter/detik	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Kurangnya Pompa Distribusi Kapasitas 10 Liter/detik RPM 1500 di Kota Buntok sehingga diperlukannya Usulan Pengadaan Pompa distribusi Kapasitas 10 Liter/detik RPM 1500	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Kurangnya Pompa Intake Kapasitas 20 Liter/detik di Kota Buntok sehingga perlunya Usulan Pengadaan Pompa intake Kapasitas 20 Liter/detik	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan layanan jaringan irigasi	Kurangnya Pompa Intake Kapasitas 60 Liter/detik di Kota Buntok sehingga perlunya Usulan Pengadaan Pompa intake Kapasitas 60 Liter/detik	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Akses Jalan Hulu Tampang-Km. 30 Kandui Tidak Dalam Kondisi Baik sehingga perlunya Rekonstruksi Jalan Hulu Tampang-Km. 30 Kandui (Kab. Barito Utara)	Desa Hulu Tampang, Kecamatan Dusun Utara (Barito Selatan) - Kandui Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Tidak Terdapatnya Akses Jembatan Sei Bangkuang Mati sehingga diperlukannya Pembangunan Jembatan Sei Bangkuang	Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Bangkuang	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Keterbatasan kesediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi	Tidak Terdapatnya Akses Jembatan Surapanji (Ruas Jalan Desa Baru-Teluk Telaga-Muara Talang-Sampudau) sehingga perlunya Pembangunan Jembatan Surapanji (Ruas Jalan Desa Baru-Teluk Telaga-Muara Talang-Sampudau)	Desa Muara Talang - Sampudau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Karau Kuala	Teluk Sampudau	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan kualitas jalan	Kondisi Jalan tidak Terpelihara sehingga perlunya Perservasi Jalan Urbanus Marcun (Rikut Jawa - Tabak Kanilan)	Buntok - Tabak Kanilan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya peningkatan kualitas layanan sungai, danau, dan penyeberangan	Kondisi pos pelabuhan rantau kujang saat ini sudah tidak memadai sehingga diperlukannya Rehabilitasi Pos pelabuhan Rantau Kujang	Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Jenamas	Rantau Kujang	Provinsi	Dinas Perhubungan
29	17-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Layanan dan kualitas transportasi umum yang masih rendah	sering terjadinya potensi Rawan kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukannya Pengadaan dan pemasangan APILL (warning Light) (7unit) Ruas Jalan Pahlawan-Merdeka Raya	Ruas Jalan Pahlawan-Merdeka Raya, Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Perhubungan
30	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Kondisi lingkungan dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang dibawah standar : 1. Jalan lingkungan yang tidak layak 2. Rumah tidak layak huni 3. drainase lingkungan yang tidak layak 4. penerangan jalan lingkungan yang belum memadai	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
31	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Masih rendahnya capaian rumah layak huni	Pengintegrasian program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) : 1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 2. Pembangunan rumah baru	Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlunya opsi bauran pendanaan untuk penyediaan perumahan bagi MBR	Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah	Gunung bintang awai, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Kayumban	Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

33	12-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan	Minimnya kapasitas regulasi dan pengawasan aktivitas perekonomian dalam rangka mendorong adopsi ekonomi berkelanjutan di kabupaten barito selatan	Sanggu, Pararapak, Kalahien, Mabuan, Sababilah, Penda Asam, Danau Sadar, Lembeng, Pamait, Buntok Kota, Wayun, Bintang Ara, Wungkur Baru, Ruhing Raya, Sarimbuah, Bantai Bambure, T.Layung, Rampa Mea, Talekoi, Pendang, Babai, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sanggu	Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
34	14-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota sehingga membutuhkan alat penjunjang Bulldozer	UPT. TPA Sababilah , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
35	14-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Capaian timbulan sampah terkelola masih rendah di beberapa kabupaten/kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan seperti pembangunan PDU	UPT. TPA Sababilah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Sababilah	Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
36	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan Usaha Tani kelompok tani suka maju	lembeng, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Lembeng	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
37	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan usaha tani perkebunan	marga jaya, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
38	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Roda Maju	Penda Asam, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Penda Asam	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
39	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	pembangunan jalan usaha tani kelompok tani makmur	tarusan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Tarusan	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
40	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan jalan usaha tani kupang jaya	Baru, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
41	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan jalan usaha tani kelompok tani sunsang raya	marawan lama, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Marawan Lama	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
42	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Rehabilitasi Jalan usaha tani kelompok tani madanum	pendang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Utara	Pendang	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

43	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan Usaha Tani Teluk timbau	Teluk Timbau , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
44	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan jalan usaha tani kelompok tani mufakat	Kelompok tani mufakat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Teluk Timbau	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
45	11-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang serta relatif terbatas	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok tani tanjung Bakuku	baru, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Baru	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
46	13-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Rendahnya persentase pemuda wirausaha	Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dalam pengolahan makanan dan kerajinan dari kelapa serta kurangnya modal dalam usaha	desa wayun, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Gn. Bintang Awai	Wayun	Provinsi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47	13-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Rendahnya persentase pemuda wirausaha	Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dalam pengolahan ikan	mengkatip, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Provinsi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
48	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlambatan pertumbuhan ekonomi	Proses penjahitan lambat karena masih memakai mesin jahit yang bukan untuk kulit untuk Kelompok Pengrajin Anyaman Rotan “Karya Bersama”	Kelurahan Mengkatip, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Hilir	Mengkatip	Provinsi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
49	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlambatan pertumbuhan ekonomi	Kerupuk/keripik setelah di goreng masih menyisakan minyak berlebih, sehingga memerlukan mesin spinner untuk Kelompok Pengolah Makanan Ringan Kerupuk/Keripik “Sumber Rejeki”	Buntok Kota, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
50	18-02-2025	JAYA WARDANA. AP, S.E., M.EC. Dev	Perlambatan pertumbuhan ekonomi	Bantuan Pengadaan Mesin Pengolah Es Batu Kristal untuk Kelompok karena masih memakai kulkas untuk pembuatan es batu.	Buntok Kota, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Dusun Selatan	Buntok Kota	Provinsi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penentuan kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah dilakukan dengan kerangka pendekatan perencanaan strategis dengan mempertimbangkan hasil analisis faktor eksternal dan internal.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target indikator pada tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur pencapaian tujuan, mencakup berbagai program dan kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,01	71,86	72,71	73,56	74,41	75,26
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,74	76,95	77,17	77,38	77,59	77,81
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,93	3,08	3,24	3,39	3,54	3,69
4	PDRB per Kapita	Rp Juta	67,94	70,89	73,83	76,78	79,73	82,67
5	Indeks Gini	angka	0,290	0,285	0,279	0,274	0,268	0,263
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,18	3,39	3,60	3,81	4,02	4,23
7	Tingkat Kemiskinan	%	4,61	4,45	4,28	4,12	3,95	3,79
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24	3,16	3,09	3,01	2,93	2,85
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	53.88	54.23	55.29	56.54	57.38	58.40
10	Indeks Harmoni	Indeks	6,59	6,60	6,65	6,67	6,70	6,72
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,25	93,50	93.85	94,15	95,00	95,55
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,50	2,63	2,75	2,88	3,00	3,13
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,00	69,08	70,01	71,81	73,11	75,14
15	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,00	20,25	23,50	26,75	30,00	33,25



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran, sekaligus merangkum berbagai program dan kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Penentuan indikator kinerja daerah didasarkan pada kondisi awal tahun 2024, tren perkembangan di tahun-tahun sebelumnya, serta kapasitas keuangan daerah.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Barito Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,20	95,59	95,99	96,38	96,77	97,16
3	Nilai Tukar Petani	Nilai	123,36	124,97	126,58	128,19	129,8	131,41
4	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	330,00	262,5	268,75	275	281,25	287,5
5	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai	340,00	346,67	353,33	360	366,67	373,33
6	Intensitas Energi Primer	(SBM/Miliar)	183,00	179,75	176,50	173,25	170,00	166,75
7	Proporsi desa/kelurahan yang memiliki sinyal internet Telepon Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat"	%	16,20	18,87	21,54	24,21	26,88	29,55
8	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	%	3,26	6,18	9,10	12,02	14,95	17,87
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,69	18,15	22,60	27,06	31,51	35,97
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	37,76	41,65	45,54	49,43	53,32	57,21
11	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	14,65	13,90	13,15	12,40	11,65	10,90



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Kapasitas Air Baku	Liter/detik	1,52	1,64	1,76	1,88	2,00	2,12
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,34	39,38	43,42	47,46	51,50	55,54
14	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,54	108,86	106,19	103,51	100,83	98,15
15	Persentase Penurunan Emisi GRK							
	a. Kumulatif	%	27,61	29,90	32,20	34,49	36,79	39,08
	b. Tahunan	%	47,87	51,13	54,39	57,64	60,90	64,16
16	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,557	0,564	0,571	0,577	0,584	0,591
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,77	0,68	0,62	0,56	0,52	0,52
18	Rasio Penduduk	Nilai	104,08	103,98	103,89	103,80	103,73	103,73
19	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	15,58	15,69	15,78	15,87	15,95	15,95
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,10	13,18	13,27	13,35	13,44
2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	56,00
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,25	9,44	9,62	9,81	9,99	10,18



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,82	66,14	67,46	68,81	70,19	71,59
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,05	68,73	69,42	70,11	70,80	71,49
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Maju	Maju	Maju	Inklusif	Inklusif	Inklusif
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,75	57,45	58,00	58,70	59,25	59,94
9	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	2,75	3,00	3,35	3,85	4,00	4,25
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	86,40	86,43	86,47	86,50	86,53	86,56
11	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43
12	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,45	65,00	65,55	66,12	66,85	67,55
13	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,00	62,05	62,10	63,00	63,85	64,12
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	58,95	61,52	64,08	66,65	69,21	71,78
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	94,85	95,17	95,49	95,81	96,13	96,45
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,67	12,69	12,72	12,75	12,78	12,81
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	28,50	32,03	35,56	39,09	42,62	46,15
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan	%	43,97	46,98	49,99	52,99	56,00	59,01



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten							
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	31,63	34,65	37,68	40,70	43,72	46,74
21	Indeks Kejahatan (Crime Index)	%	1,00	0,96	0,91	0,87	0,82	0,78
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80,40	80,80	81,20	81,60	82,00	82,40
23	Indeks Pembanguna Keluarga (iBangga)	Indeks	70,00	71,31	72,63	73,94	75,25	76,56
24	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,00	54,38	56,75	59,13	61,50	63,88
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93	1,96	1,99	2,02	2,05	2,08
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,33	3,70	4,07	4,43	4,80	5,17
3	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	8,82	9,62	10,34	10,98	11,53	12,00
4	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,720	0,729	0,762	0,778	0,781	0,798
5	Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rupiah	-	-	-	-	-	-
6	Pertumbuhan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48
7	Deflator PDRB	%	1,916	1,905	1,893	1,882	1,870	1,859
8	Persentase Peningkatan Investasi	%	87,00	90,00	93,00	94,00	95,00	97,00
9	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	3,60	3,70	3,80	3,91	4,01	4,11



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	5,66	5,69	5,75	5,82	5,91	6,02
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,90	3,92	3,95	3,98	4,00	4,02
12	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	54,99	57,80	60,62	63,43	66,24	69,05
13	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	718,00	788,50	859,00	929,50	1000,00	1070,50
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,66	5,73	5,79	5,86	5,92	5,99
15	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	%	11,37	11,86	12,35	12,83	13,32	13,81
16	Jumlah Tamu Wisatawan							
	a. Mancanegara	Orang	100	949	1.798	2.646	3.495	4.344
	b. Nusantara	Orang	95.000	103.750	112.500	121.250	130.000	138.750
17	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	15,19	14,77	14,35	13,92	13,50	13,08
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	1,90	2,04	2,18	2,31	2,45	2,59
19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,76	2,12	2,48	2,84	3,20	3,55
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,89	2,10	2,31	2,51	2,72	2,93
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,41	56,07	56,74	57,40	58,06	58,72
22	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	0,82	0,95	1,08	1,21	1,35	1,48
23	Indeks Ekonomi Hijau							



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Produktivitas Sektor Pertanian	Juta Rp	35,00	36,77	38,53	40,30	42,06	43,83
	b. Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	Juta Rp	61,00	61,77	62,54	63,30	64,07	64,84
	c. Produktivitas Sektor Tersier	%	62,00	67,59	73,19	78,78	84,37	89,96
	d. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Tersier	%	31,00	31,62	32,24	32,86	33,48	34,10
	e. Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	4,00	4,00	3,99	3,99	3,98	3,98
24	PDRB Deflator Barito Selatan di antara Simpangan Baku Deflator Kota/Kabupaten Antar Wilayah	Nilai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
25	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,50	38,55	38,60	38,65	38,70	38,75
26	Ekspor Barang dan Jasa	%	45,60	45,70	45,80	45,90	46,00	46,10
27	Persentase Desa Mandiri	%	15,00	17,19	19,38	21,56	23,75	25,94
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,80	0,82	0,84	0,86	0,875	0,89
29	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	23,19	25,67	28,15	30,62	33,10	35,58
30	Total Kredit/PDRB	%	21,80	24,23	26,65	29,08	31,50	33,93
31	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	21,4	27,5	33,6	40	46,9	54,3
32	Angka Ketergantungan	%	42,83	43,09	43,31	43,51	43,68	43,89
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,60	70,30	71,00	71,80	72,50	73,30
34	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38,50	38,55	38,60	38,65	38,70	38,75
IV ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Rasio Konektivitas	%	0,55:0,58	0,56:0,59	0,57:0,60	0,58:0,61	0,59:0,62	0,60:0,63



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Indeks Harmoni	Indeks	6,59	6,6	6,65	6,67	6,7	6,72
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	95	95	95	95	95	95
4	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	30	35	40	45	50	55
5	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	78,50	80,13	81,75	83,38	85,00	86,63
7	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,90	2,93	2,95	2,98	3,00	3,03
8	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	A	A	A	A	A	A
10	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00
11	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	29,75	30,47	31,23	32,01	32,82	33,64
12	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	75,00	76,50	78,00	79,50	81,00	82,50
13	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,50	77,00	77,50	77,80	80,00	80,30
15	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	11,40	11,40	11,60	12,00	12,40	12,80
16	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00
17	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
18	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
19	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,00	73,13	74,25	75,38	76,50	77,63
20	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai	75,00	75,94	76,88	77,81	78,75	79,69
21	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
22	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25
23	Persentase Penegakan Perda	%	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
I	Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)							
A	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	95	97,08	99,63	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	100	99	99,04	99,29	99,54	99,79	100
3	Tingkat partisipasi warga negara	80,3	12	13,61	14,87	16,14	17,4	18,67



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)							
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Nilai	58.67-59.67	61.17-62.17	63.67-64.67	66.17-67.17	68.67-69.67	71.17-72.17
5	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	Nilai	70	70,83	71,93	73,03	74,13	75,23
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Nilai	54	56,69	59,59	62,49	65,39	68,29
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	Nilai	63	64,07	65,57	67,07	68,57	70,07
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	%	57	70,65	89,14	100	100	100
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	%	45	46,44	47,44	48,44	49,44	50,44
10	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	Nilai	63	65,7	68,2	70,7	73,2	75,7
11	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	Nilai	63	65,49	67,89	70,29	72,69	75,09
12	Iklim Keamanan SD (Nilai)	Nilai	80	80,87	81,77	82,67	83,57	84,47
13	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	Nilai	76	77,59	79,09	80,59	82,09	83,59



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	Nilai	74	74,68	75,68	76,68	77,68	78,68
15	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	Nilai	75	75,53	76,53	77,53	78,53	79,53
16	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	%	60	65	70	75	80	90
17	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Rasio	0,52	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
18	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	%	39,50	40	40,5	41	41,5	42
19	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	16	17	18	19	20	20
20	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	95,42	55	60	65	70	75	80
B Kesehatan								
1	Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka)	Angka	122	109	97	86	77	70
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	%	18,80	17,50	16,30	15,20	14,20	14,00
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	6,51	18,00	22,00	30,00	38,00	46,00	54,00
4	Angka	1	45,00	45,50	46,80	48,30	51,50	54,00
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	13,95	100	100	100	100,00	100,00	100,00
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Peningkatan	34,14	62,40	62,5	62,65	62,77	62,85	62,97



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)							
2	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	100	52,12	52,23	52,35	52,46	52,59	52,75
3	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	0	66,15	66,55	67,87	68,25	68,55	68,9
4	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (%)	0	75,12	76,87	78,55	80,2	81,9	83,64
5	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	61,98	26,07	26,50	27,07	28,07	29,07	30,07
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	2,17	79,89	80,82	81,92	82,97	83,97	83,97
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	32	23,11	24,11	25,11	26,11	27,11	28,11
8	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	80,71	45	100	100	100	100	100
9	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam	3,83	55	100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kondisi Baik (%)							
10	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	61	30	100	100	100	100	100
11	Tingkat Kemantapan Jalan (Angka)	Angka	38,93	39,53	40,33	41,14	41,96	42,86
12	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	0	8,51	15	20	25	30	35
13	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	0	100	100	100	100	100	100
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	78,38	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	3,14	70	65	60	55	50	45
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	78,38	78	76	74	72	70	68
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)		70	68	66	64	60	58
5	Persentase Permukiman yang	0	72	74	76	78	80	85



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)							
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	50	54	56	58	60	70
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	Nilai	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)	%	1	1	1	1	1	1
3	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	0	1	1	1	1	1	1
4	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai)	Nilai	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	Angka	82	85	87	90	92	95
6	Persentase Cakupan Penyebaran	0	100	98	98	98	98	98



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)							
7	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	0	97	97	97	97	97	97
8	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	97	97	97	97	97	97
9	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	%		82	84	86	88	90
10	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	99,18		82	85	88	91	94
F	Sosial							
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	95,48	100	100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	3	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%)	3	100	100	100	100	100	100
II Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)								
A Tenaga Kerja								
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100,00	100	100	100	100	100
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	29	54,35	54,35	57,02	59,4	61,53	61,53
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	100	70,31	70,31	71,75	73,67	75,35	75,35
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	Orang	12.166	12	13	14.129	14.998	14.998
B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	320	3	3	3,8	4,3	5	5



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	7109,05	50	50	65	70	75	80
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	7884,12	100	100	100	100	100	100
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	9,91	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	42,73	40,22	42,85	57,14	71,42	85,71	100
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	56	60	68	73	82	85
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	8	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75	78,50	78,55	79,01	79,57	80,12	81,01
C	Pangan							
1	Persentase cadangan pangan (%)	40	16	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00
2	Skor Pola Pangan Harapan (%)	123,36	92	93,30	94,50	95,01	96,21	97,30
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	9770,78	27	27,00	22,73	18,18	18,18	13,64



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	455,81	87	87	88	90	92	94
D	Pertanahan							
1	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	894308	40	45	50	55	60	65
2	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	4764,47	0,20	1	1	2	2	4
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2633	0,20	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	100	12,00	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00
5	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	25	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	4	6	8	10	12	14



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E	Lingkungan Hidup							
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kualitas Air	0		71,32	71,52	71,72	71,92	72,12
3	Indeks Kualitas Udara	0		80,04	80,34	80,64	80,94	81,24
4	Persentase RTH (%)	0	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0	100	100	100	100	100	100
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	0		49,23	51,52	53,73	57,58	57,97
7	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota (Dokumen)	98		1	1	1	1	1
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	98		100	100	100	100	100
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	90		100	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana			83,33	85,71	87,5	88,88	90



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lingkungan Hidup (%)							
11	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0		55,5	56	56,5	57	57,5
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	0	65	65	68	70	72	75
2	Perekaman KTP elektronik (%)	95	98,3	98,5	98,8	99	99,3	99,8
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Tinggi	100	100	100	100	100	100
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	495	96	96,5	97	97,5	98	98,5
5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	95	57	57,3	57,8	58,3	59	60
6	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan (%)	60	63	63,2	63,4	63,7	63,9	64,2
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	%	5	7	9	11	13	15
8	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	7,00	8,5	10	11,5	13	15



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	%	1	1	1	1	1	1
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	91	14	14,5	17,5	19,5	20,5	21,5
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)		6	6	8	10	12	15
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	34,14	17,73	15,19	12,66	10,13	10,13
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	0,00	30,23	23,56	17,44	17,44	11,62
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	-	0,00	30,23	23,56	17,44	17,44	11,62
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	Rata-Rata Anak per Wanita	2,16	2,15	2,15	2,11	2,11	2,1
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility)	%	31	30	28	26	25	25



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rate/ASFR 15-19) (%)							
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%)	8,89	81,50	82,51	83	83	85	85
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	40	95,00	96,47	96,47	96,5	96,8	97
5	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	Indeks	60,00	60,2	60,8	61,2	61,8	62
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	Indeks	83,20	83,6	84,2	84,8	85	85,5
I	Perhubungan							
1	Konektivitas Darat (rasio)	100	3,00	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	21,9	75	10	15	20	25	30
3	Konektivitas Laut (%)	0	10	10	15	20	25	30
4	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%)	%	10	10	15	20	20	30
J	Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	79,00	79	80	80	80	85
2	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks		2,63	2,75	2,88	3	3,13
K	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2,4	15,00	15	30	25	20	20



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2	25,00	25	25	20	20	10
3	Persentase koperasi aktif (%) (%)	82	20,00	20	20	20	20	20
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	11,4	20,00	20	20	20	20	20
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0,2	20,00	20	20	20	20	20
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	1,9	30,92	30,92	17,27	17,27	17,27	17,27
7	Pertumbuhan Wirausaha (%)	0,2	15,00	15	20	25	20	20
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2,4	20,00	20	20	20	20	20
L	Penanaman Modal							
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	-		90	95	96	97	98
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	-		90	95	96	97	98
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	-		100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	-		100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	-		95,5	96	96,5	97	98
M	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Nilai	70	70	75	80	90	100
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali)	Medali	1	1	1	1	1	1
N	Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	37		2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
O	Persandian							
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Kategori)	0		Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat IV
P	Kebudayaan							
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)			80	90	90	100	100
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	0		80	90	90	100	100
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	15		80	90	90	100	100
4	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	15		3	3	3	3	3
Q	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca	6	67,71	68,39	69,07	69,76	70,46	71,16



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat (Nilai)							
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	10	100	100	100	100	100	100
R	Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	9	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	81	50	50	50	50	50	50
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	50	100	100	100	100	100
III	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
A	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	7247,18	7.392,12	7.539,96	7.690,76	7.844,57	8.001,47
2	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	9676,74	9.870,27	10.067,68	10.269,03	10.474,41	10.683,90
3	Luasan Kawasan Konservasi (Meter Persegi)	Meter Persegi	139000,00	286000,00	643000,00	643000,00	1190000,00	2760000,00



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/th	43,59	44,46	54,35	46,26	47,18	48,12
B	Pariwisata							
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	80		8	15	20	30	40
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	80		75	80	85	90	95
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	80		43	43	45	50	50
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0		40	50	60	70	70
C	Pertanian							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	0		10.752,84	11.734,90	12.716,96	13.699,02	14.681,08
2	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	0		465,64	475,48	484,32	495,16	505,00
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	0		918.931,00	928.122,00	937.560,00	947.580,00	957.600,00
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0		170,00	190,00	230,00	240,00	267,53
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Ekor)	0		3.000	3.000	3.100	3.200	3.400



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	13		100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	2		25	30	35	40	45
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	1		25	30	35	40	45
9	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	57		80	85	85	90	95
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	1		38,29	48,58	56,00	64,44	72,54
11	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)			20	40	60	80	95
D	Perdagangan							
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	%	79	79,4	96,8	96,8	100	100
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	%	20	19,79	19,79	19,79	19,79	20,83
4	Nilai Ekspor Barang (%)	%	0	0	0	0	0	0
5	Persentase Penanganan	%	100	100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pengaduan Konsumen (%)							
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	%	20	20	20	20	20	20
E	Perindustrian							
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	%	18	18	21	21	21	21
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	%	9	9	23	23	23	23
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	%	9	9	23	23	23	23
F	Transmigrasi							
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	98	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	98	100	100	100	100	100
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	100	100	100	100	100	100
IV	Urusan Pendukung Pemerintahan							
A	Sekretariat Daerah							
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	0		100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	Nilai		100	100	100	100	100
3	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	Indeks		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		530	550	550	560	580
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Nilai)	Nilai		100	100	100	100	100
6	Tingkat Kematangan UKBPJ (%)	%		68	76	84	92	100
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	0		100	100	100	100	100
B	Sekretariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	0		85	85	85	85	85
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	0		95	95	95	95	95
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	0		90	90	90	90	90
V	Urusan Penunjang Pemerintahan							
A	Perencanaan							
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	0	100	100	100	100	100	10
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	0	100	100	100	100	100	10



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	100	100	100	100	100	10
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100	100	100	100	100	10
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0	100	100	100	100	100	10
B	Keuangan							
C	Kepegawaian							
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	0	40	55	70	85	90	100
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0		2,6	3	3,2	3,5	3,8
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	0		2,3	2,5	2,9	3	3,2
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	0		82,5	83	83,5	84	84,5
D	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang	0		0,5	0,8	1	1,2	1,4



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)							
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	0		2	2,2	2,5	2,7	3
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	0		0,8	1	1,4	1,5	1,8
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	0		2,5	2,7	2,9	3	3,1
E	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	0		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penerapan di Daerah (%)							
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (%)	0		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (%)	0		86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	0		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
VI	Urusan Pengawasan Pemerintahan							
A	Inspektorat							
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	0		80	82	85	88	90
2	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (Indeks)	0		B	B	BB	BB	BB
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	0		100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	TindakLanjut Rekomendasi APIP (%)	0		45	55	60	65	70
5	Maturitas Penyelenggara n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level Maturitas)	0		3,2	3,5	3,7	3,9	4
6	Manajemen Risiko (MR) (Level)	0		3,2	3,5	3,7	3,9	4
7	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	0		3,2	3,5	3,7	3,9	4
VII	Unsur Kewilayahan							
A	Kecamatan Dusun Selatan							
B	Kecamatan Dusun Hilir							
C	Kecamatan Dusun Utara							
D	Kecamatan Jenamas							
E	Kecamatan Karau Kuala							
F	Kecamatan Gunung Bintang Awai							
VIII	Urusan Pemerintahan Umum							
A	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Cakupan Penguatan Ideologi	0	100	100	100	100	100	100



RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)							
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	0	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	0	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	0	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	0	100	100	100	100	100	100



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah periode tahun 2026 yang disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 ini juga merupakan kompilasi dari Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah (Renja-PD) di Kabupaten Barito Selatan yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barito Selatan.

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURİ